



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PKAT)
(Studi Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam - Kota Batam)**

TESIS

**ATIK RAHMAWATI
NPM. 0806470573**

**PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PKAT)
(Studi Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam - Kota Batam)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial**

**ATIK RAHMAWATI
NPM. 0806470573**

**PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ATIK RAHMAWATI

NPM : 0806470573

Tanda Tangan : 

Tanggal : 4 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Atik Rahmawati
NPM : 0806470573
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Tesis : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PKAT)
(Studi Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-
Kota Batam)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial pada Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fentiny Nugroho, MA. Ph.D (.....)

Penguji : Makmur Sunusi, Ph.D (.....)

Penguji : Dra. Ety Rahayu, M.Si (.....)

Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan segala petunjuk-Nya, sehingga akhirnya dapat terselesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam”.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing, Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fentiny Nugroho, MA. Ph.D yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan secara sabar dan teliti dan senantiasa memotivasi penulis sehingga telah membantu perluasan pemikiran dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Yang tercinta kedua orang tuaku, Bapak Mohammad Sya’roni dan Ibu Kusmiatin (Alm.), Amangboru Amron Tohya Siregar serta Bou Mawarni Harahap, Suamiku Kangmas Abdi Martua Raja A. Siregar, dua pelita hatiku Aulyarahma Siregar dan Nabila Rahma Siregar yang telah memberikan motivasi dan semangat hidup serta senantiasa mendoakan setiap langkah keberhasilanku.
2. Bapak Makmur Sunusi, Ph.D selaku penguji ahli, Ibu Dra. Fitriyah, M.Si selaku penguji sekaligus Sekretaris Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, dan Ibu Dra. Ety Rahayu, M.Si selaku penguji sidang tesis ini.
3. Seluruh staf pengajar yang telah memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan seluruh Staf Sekretariat Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial atas dukungan dan kelancaran pelayanan administrasi.
4. Ibu Sri Soedarsono, Ibu Hasanah, Bapak Ranto, Bapak Saniman, Bapak Bahrudin, Bapak Oloan, serta narasumber lain yang tidak tersebut satu persatu yang telah meluangkan banyak waktu diskusi dan membagi pengetahuan kepada penulis.

5. Mbak Norma, Bapak/ Ibu Rahman, Bapak Mahdan, Bapak Husain serta seluruh warga Bertam yang telah menerima tulus kehadiran penulis dengan penuh keakraban dan berbagi diskusi serta mengajarkan “kehidupan yang bersahaja” selama penulis tinggal sehingga memperlancar penyelesaian tesis ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial UI Tahun 2008, atas kebersamaannya selama ini serta dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Keluarga Besarku Terkasih Mbak Ulfa, Mas Dur, Mas Yudi, Mbak Erna, Mas Lilik, Mbak Anita, Kak Dewi, Dek Rahma, Dek Rahmi, Angkasa, Dek Mayus yang selalu memotivasi dan memberikan semangat penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan jalan bagi selesainya tesis ini secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Semua ini karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Maka, kritik dan saran yang membangun bagi tesis ini selalu diharapkan. Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca khususnya mengenai kajian pemberdayaan masyarakat.

Depok, Juli 2011

Penulis,

ATIK RAHMAWATI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atik Rahmawati
NPM : 0806470573
Program studi : Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (PKAT) (STUDI PADA KOMUNITAS SUKU LAUT DI PULAU
BERTAM - KOTA BATAM)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 4 Juli 2011

Yang menyatakan



(Atik Rahmawati)

ABSTRAK

Nama : Atik Rahmawati
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial, Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PKAT) (Studi Deskriptif Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam)

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak yang muncul dari pelaksanaan program. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Landasan yang digunakan mengacu pada konsep Pengembangan Komunitas dan menaruh perhatian pada pentingnya peran pelaku perubahan. Temuan lapangan menunjukkan Depsos melakukan diskresi dengan menunjuk orsos KKKS (sebelumnya bernama FKKS) Batam sebagai pelaksana. Program ini merupakan wujud dari kewajiban negara dengan berlatar belakang pada letak strategis Kota Batam yang merupakan wilayah perbatasan negara Indonesia yang berdampak pada stabilitas keamanan negara serta semakin termarginalisasinya komunitas suku laut dalam pembangunan sosial yang ada di Batam, dengan *out put* penempatan pemukiman suku laut di pulau Bertam-Kota Batam. Kesimpulan menunjukkan pentingnya pemerintah memperhatikan keberlanjutan program dengan tetap mempertimbangkan dampak yang diakibatkan dari pelaksanaan program khususnya PKAT.

Kata Kunci: Kebijakan sosial, Pelaksanaan Program, Pemberdayaan, Pengembangan komunitas, Komunitas Suku Laut.

ABSTRACT

Name : Atik Rahmawati
Program of Study : Study of Social Welfare, Specificity of Social Welfare Study
Title : IMPLEMENTATION OF EMPOWERING PROGRAM OF
REMOTE INDIGENOUS COMMUNITY (a descriptive
study of Seanomads Communities in Bertam Island-Batam
City).

This research focuses on implementation, strength, weakness and impact program activities to the seanomade community at Bertam Island. This study used qualitative methodology to describe in detail the implementation of programs and behavioral changes in society which became the target of the program. Explanation of the program refers to the development community that has been implemented. Based on the findings of this research: DEPSOS pointed ORSOS which known by KKKS (previously called FKKS) to implemented. The strategic location of Batam city which is the Indonesian border into the background of the implementation of this program. This program is a form of state obligations with a background in strategic location of Batam, which is the border state of Indonesia to give effect to the stability and state security and the marginalization of seanomade of social development in Batam. The results of this study addressed the importance of government attention to the sustainability of the program while considering the impact resulting from the implementation of programs, especially programs PKAT.

Keywords: Social Policy, Program Implementation, Empowerment community, Seanomads Community

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	20
1.4. Manfaat Penelitian	20
1.5. Metode Penelitian	21
1.5.1. Pendekatan Penelitian	21
1.5.2. Jenis Penelitian	22
1.5.3. Lokasi Dan Jangka Waktu Penelitian	22
1.5.4. Teknik Pemilihan Informan	23
1.5.5. Teknik Pengumpulan Data	30
1.5.6. Analisa Data	31
1.5.7. Sistematika Penulisan	33
2. KAJIAN LITERATUR DAN MODEL OPERASIONAL	35
PENELITIAN	35
2.1. Komunitas Adat Terpencil (KAT)	35
2.2. Pelaksanaan (<i>Implementasi</i>) Program Pemberdayaan	41
2.2.1. Pelaksanaan (<i>Implementasi</i>) Program	43
2.2.1.1. Konsep Pelaksanaan (<i>Implementasi</i>) Program	43
2.2.1.2. Pendekatan Pelaksanaan (<i>Implementasi</i>) Program	45
2.2.2. Pemberdayaan	49
2.2.2.1. Konsep Pemberdayaan	49
2.2.2.2. Pemberdayaan Sebagai Proses	50
2.2.2.3. Bentuk Kekuasaan Dalam Pemberdayaan	52
2.2.2.4. Partisipasi	53
2.2.3. Pengembangan Masyarakat (<i>Community Development</i>)	61
2.2.3.1. Konsep Pengembangan Masyarakat	62
2.2.3.2. Pendekatan Dan Gagasan Dalam Pengembangan Masyarakat	63
2.2.3.3. Dimensi Pengembangan Masyarakat	66
2.2.3.4. Tahapan Dalam Pengembangan Masyarakat	71
2.2.3.5. Potensi Komunitas Pengembangan Masyarakat	75

2.2.3.6. Kendala Dalam Pengembangan Masyarakat	79
2.2.4. Pelaku Perubahan (<i>Community Worker</i>)	82
2.2.4.1. Definisi Pelaku Perubahan (<i>Community Worker</i>)	82
2.2.4.2. Peran Dan Keterampilan <i>Community Worker</i> Dalam Pengembangan Masyarakat	84
2.2.4.3. Dukungan (<i>Support</i>) Kepada Pelaku Perubahan	87
2.3. Kesejahteraan Sosial	89
2.4. Model Operasional Penelitian	90
3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, PELAKSANAAN PROGRAM PKAT DAN PROFIL LEMBAGA FKKS/ KKKS BATAM	93
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	93
3.1.1. Kondisi Historis	93
3.1.2. Kondisi Geografis	93
3.1.3. Jumlah Penduduk	95
3.1.4. Mata Pencaharian	96
3.1.5. Tingkat Pendidikan	97
3.1.6. Pola Pemukiman	100
3.1.7. Kesehatan	101
3.1.8. Keagamaan, Sosial Dan Budaya	102
3.1.9. Politik Pemerintahan	104
3.1.10. Perhubungan, Penerangan Dan Telekomunikasi	105
3.1.11. Peranan Perempuan Dalam Keluarga	105
3.2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)	106
3.2.1. Pelaksana Kegiatan	106
3.2.1.1. Pelaksana Kegiatan dari Pemerintah	106
3.2.1.2. Pelaksana Kegiatan dari FKKS Batam	108
3.2.2. Pendanaan Program	109
3.2.3. Pelaksanaan Program PKAT	111
3.3. Profil Lembaga FKKS/ KKKS Batam	114
3.3.1. Kedudukan Lembaga Dan Klasifikasi, Peranan Fungsi Lembaga Dalam Menangani Masalah Sosial	114
3.3.2. Falsafah Lembaga FKKS/ KKKS Batam	115
3.3.3. Struktur Lembaga FKKS/ KKKS Batam	116
3.3.4. Kedudukan Lembaga KKKS Batam Dalam Jaringan Kerjasama Antar Lembaga Sosial	117
3.3.5. Pola Pendanaan Lembaga KKKS Batam	118
4. TEMUAN LAPANGAN	120
4.1. Pelaksanaan Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam	120
4.1.1. Persiapan	124
4.1.1.1. Persiapan Petugas	124
4.1.1.2. Persiapan Lapangan	129

a.	Motivasi Dan Pendaftaran Calon Pemukim	129
b.	Study Kelayakan Dan Pembuatan Buku Pedoman Kegiatan	133
c.	Penyiapan Areal Permukiman	142
d.	Penyiapan Tenaga Kerja	144
4.1.2.	Pelaksanaan Kegiatan	146
4.1.2.1.	Pemukiman	146
a.	Pengadaan Rumah Sederhana	147
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana	151
c.	Penempatan Petugas Pendamping	155
d.	Santunan Biaya Hidup	159
4.1.2.2.	Pembinaan	160
a.	Bimbingan Hidup Bermasyarakat	160
b.	Bimbingan Kesadaran Beragama	163
c.	Bimbingan Pemeliharaan Kesehatan Diri Maupun Lingkungan	164
d.	Bimbingan Dalam Pertanian, Peternakan Dan Perikanan	168
e.	Bimbingan Penyuluhan Tentang Makanan Gizi Dan KB	172
f.	Bimbingan Untuk Mengikuti Pendidikan Formal Maupun Non Formal Bagi Orang Dewasa	174
g.	Bimbingan Budi Daya Rumput Laut	178
h.	Mengenal Penggunaan Uang Melalui Simpanan Pada Bank Rakyat Indonesia	183
i.	Bimbingan Keterampilan Wanita	186
4.1.3.	Terminasi	188
4.2.	Faktor Pendukung/Penghambat Pelaksanaan Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam	198
4.2.1.	Faktor Pendukung	198
4.2.1.1.	Dukungan Pemerintah	198
a.	Landasan Hukum.....	198
b.	Dukungan Lembaga/ Organisasi Pemerintah Lain Yang Terkait.....	200
4.2.1.2.	Dukungan Lembaga FKKS/ KKKS Batam	202
a.	Komitmen Kuat Ketua FKKS/ KKKS Batam	202
b.	Dukungan Mitra Kerja FKKS/ KKKS Batam.....	204
4.2.1.3.	Keterbukaan Warga Menerima Perubahan	206
4.2.2.	Faktor Penghambat	207
4.2.2.1.	Anggaran/Dana Yang Terbatas Dari Pemerintah.....	207
4.2.2.2.	Kerjasama Dan Perencanaan Kegiatan Yang Kurang Antar Pendamping	208
4.2.2.3.	Terbatasnya Sumber Daya Dalam Proses Pendampingan	209
4.2.2.4.	Hambatan Dari Warga Bertam	213
a.	Sikap Dan Perilaku Mengharap Menerima	

Imbalan	213
b. Sikap Curiga Antar Warga	214
4.2.2.5. Mahal Dan Jarangnya Transportasi Laut Menuju Pulau Bertam	216
4.3. Dampak PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam	217
4.3.1. Dampak Langsung Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam	217
4.3.1.1. Dampak Personal/ Spiritual	217
4.3.1.2. Dampak Budaya	218
4.3.1.3. Dampak Lingkungan	229
4.3.1.4. Dampak Ekonomi	229
4.3.1.5. Dampak Sosial Politik	233
4.3.2. Dampak Tidak Langsung Di Luar Komunitas	236
4.3.2.1. Dampak Ekonomi	236
5. PEMBAHASAN	240
5.1. Pelaksanaan Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam-Kota Batam	240
5.1.1. Persiapan	249
5.1.1.1. Persiapan Petugas	249
5.1.1.2. Persiapan Lapangan	250
a. Motivasi Dan Pendaftaran Calon Pemukim	250
b. Study Kelayakan Dan Pembuatan Buku Pedoman Kegiatan	252
c. Penyiapan Areal Permukiman	255
d. Penyiapan Tenaga Kerja	255
5.1.2. Pelaksanaan Kegiatan	257
5.1.2.1. Pemukiman	257
a. Pengadaan rumah sederhana	257
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana	258
c. Pengadaan Petugas Pendamping	259
d. Santunan Biaya Hidup	261
5.1.2.2. Pembinaan	261
5.1.3. Terminasi	263
5.2. Faktor Pendukung/Penghambat Pelaksanaan Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam	265
5.2.1. Faktor Pendukung	265
5.2.1.1. Dukungan Pemerintah	265
a. Landasan Hukum.....	265
b. Dukungan Lembaga/ Organisasi Pemerintah Lain Yang Terkait.....	265
5.2.1.2. Dukungan Lembaga FKKS/ KKKS Batam	266
a. Komitmen Kuat Ketua Fkks Batam	266
b. Dukungan Mitra Kerja Fkks Batam.....	266
5.2.1.3. Keterbukaan Warga Menerima Perubahan	267
5.2.2. Faktor Penghambat	267
5.2.2.1. Anggaran/Dana Yang Terbatas Dari Pemerintah.....	267

5.2.2.2. Kerjasama Dan Perencanaan Kegiatan Yang Kurang Antar Pendamping	268
5.2.2.3. Terbatasnya Sumber Daya Dalam Proses Pendampingan	268
5.2.2.4. Hambatan Dari Warga Bertam	269
a. Sikap Dan Perilaku Mengharap Menerima Imbalan	269
b. Sikap Curiga Antar Warga	269
5.2.2.5. Mahal Dan Jarangnya Transportasi Laut Menuju Pulau Bertam	270
5.3. Dampak PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam	272
5.3.1. Dampak Langsung Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam	272
5.3.1.1. Dampak Personal/ Spiritual	272
5.3.1.2. Dampak Budaya	273
5.3.1.3. Dampak Lingkungan	277
5.3.1.4. Dampak Ekonomi	277
5.3.1.5. Dampak Sosial Politik	278
5.3.2. Dampak Tidak Langsung Di Luar Komunitas	279
5.3.2.1. Dampak Ekonomi	279
6. KESIMPULAN DAN SARAN	282
6.1. Kesimpulan	282
6.2. Saran	285
DAFTAR REFERENSI	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Prosentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan 2010, Negara ASEAN.....	2
Tabel 1.2. Angka Persebaran KAT	9
Tabel 1.3. Persebaran Komunitas Adat Terpencil (KAT) Di Kota Batam	16
Tabel 1.4. Jenis Informasi Dan Informan Penelitian	27
Tabel 2.1. Identifikasi Kondisi KAT	39
Tabel 2.2. Tipologi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Dan Proyek Pembangunan.....	56
Tabel 3.1. Penduduk Bertam-Kota Batam Menurut Umur	95
Tabel 3.2. Tingkat Pendidikan Warga Pulau Bertam-Kota Batam ...	98
Tabel 3.3. Variasi Tempat Tinggal Siswa Sdn Lokal Jauh 006 Pulau Bertam-Kota Batam	99
Tabel 3.4. Sisa Dana Lembaga KKKS Batam Tahun 2006	119
Tabel 4.1. Jumlah Warga Suku Laut Menurut Jumlah Dan Persebarannya Di Daerah Perbatasan Riau	130
Tabel 4.2. Sarana Fisik Out Put Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam-Kota Batam	151
Tabel 4.3. Jumlah Anak Warga Bertam Dari Pernikahan Setelah Dimukimkan	174
Tabel 4.4. Ringkasan Pelaksanaan Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam	191
Tabel 4.5. Daftar Tamu Kunjungan Di Komunitas Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam Dari Tahun 1986 S/D 1993	200
Tabel 5.1. Identifikasi Kondisi Komunitas Suku Laut Di Wilayah Batam	254

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1.	Kehidupan Suku Laut Sebelum Dimukimkan	10
Gambar 1.2.	Peta Mobilitas Suku Laut.....	11
Gambar 1.3.	Rangkaian Implementasi Kebijakan	14
Gambar 1.4.	Kondisi Pemukiman Suku Laut, Dan Jembatan Yang Tidak Layak Pakai	19
Gambar 2.1.	Alur Proses Kebijakan	44
Gambar 2.2.	Dimensi Waktu <i>Output</i> Dan <i>Outcomes</i> Kebijakan	45
Gambar 2.3.	Jenjang Partisipasi Warga Negara	58
Gambar 2.4.	Kontinum Partisipasi	60
Gambar 2.5.	Komunitas Dan Kebijakan Publik	61
Gambar 2.6.	Dimensi Dalam Pengembangan Masyarakat	70
Gambar 2.7.	Tahapan Dalam Model Intervensi Pengembangan Masyarakat.....	75
Gambar 2.8.	Metode Operasional Penelitian.....	91
Gambar 3.1.	Pulau Lingka Dilihat Dari Pulau Bertam, Serta Aktivitas Anak Sekolah Dari Pulau Gara Menuju Pulau Bertam.....	95
Gambar 3.2.	Permukiman Warga Suku Laut Di Pulau Bertam, Kondisi Salah Satu Rumah Warga, Keahlian Warga Membuat Perahu,Serta Pengolahan Sederhana Gamat Dengan Cara Dikeringkan.....	97
Gambar 3.3.	Siswa SDN Lokal Jauh 006, Guru Serta Penulis Didepan Gedung Sekolah, Dan Kegiatan Gemar Menabung Siswa SDN Lokal Jauh 006.....	99
Gambar 3.4.	Bentuk Permukiman Warga Suku Laut Di Pulau Bertam, Warga Pulau Bertam, Gara Dan Lingka Sedang Menikmati Pertandingan Sepak Bola, Pemanfaatan Tanah Lapang Untuk Olah Raga, Serta Tradisi “Joget” Di Pulau Bertam-Kota Batam	101
Gambar 3.5.	Sampah Yang Menumpuk Di Bawah Rumah Warga, Bangunan Rumah Bidan Yang Sudah Tidak Bisa Digunakan, Dan Salah Satu Warga Bertam Yang Juga Merupakan Dukun Beranak Bersama Cucu.....	102
Gambar 3.6.	Salah Satu Keberhasilan Warga Dalam Bidang Pendidikan, Kegiatan Ibu Mengantar Anak Pergi Ke Sekolah, Dan Salah Satu Usaha Yang Digeluti Perempuan Guna Menambah Penghasilan Keluarga	106
Gambar 3.7.	Struktur Kepengurusan KKKS Kota Batam	117
Gambar 4.1.	Suku Laut Sesekali Mendarat Untuk Melakukan Barter, Dan Suku Laut Hidup Mengembara Secara Berkelompok Di Laut.....	123
Gambar 4.2.	Susunan Kepemimpinan Komunitas Suku Laut	137
Gambar 4.3.	Maket Permukiman Suku Laut Di Pulau Bertam-Kota Batam, Dan Gotong Royong Membangun Fasilitas	

	Permukiman	144
Gambar 4.4.	Reruntuhan sisa bangunan model rumah darat di Permukiman Suku Laut Bertam.....	148
Gambar 4.5.	Denah Wilayah Permukiman Bertam	150
Gambar 4.6.	Informan (Ol), Informan (Bu), Informan (Sn) & Salah Satu Satgasos Depsos RI Dalam Catatan Harian Salah Satu Pendamping Program	158
Gambar 4.7.	Pernikahan Salah Satu Warga Dengan CW Secara Islam, Peringatan Hari Isyra'dan Mi'raj, Dan Satu Aktivitas Keagamaan Khitanan Masal	164
Gambar 4.8.	Puskesmas Keliling Budi Kemuliaan, Pos Pelayanan Kesehatan Awal Pertama Kali Di Pulau Bertam, Dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan Di Batam.....	167
Gambar 4.9.	Beberapa Jenis Tombak Yang Digunakan Suku Laut, Nelayan Suku Laut, Dan Salah Satu <i>Kelong</i> Milik Warga Bertam.....	169
Gambar 4.10.	Warga Belajar Membuat Jaring Untuk Menangkap Ikan Dan Belajar Bertani.....	172
Gambar 4.11.	Kondisi Awal Suasana Belajar Mengajar Warga Suku Laut	176
Gambar 4.12.	Kegiatan Warga Membuat <i>Bidak</i> Tempat Pertumbuhan Rumput Laut	181
Gambar 4.13.	Metode Budidaya Rumput Laut Dengan Sistem Rawai (<i>Monoline</i>).....	183
Gambar 4.14.	Warga Sedang Mengikuti Pengarahan Dari Petugas BRI	184
Gambar 4.15.	Serah Terima Permukiman Suku Laut Di Pulau Bertam Kota Batam Dari Ketua FKKS Batam Kepada Menteri Sosial RI.....	190
Gambar 4.16.	Bentuk MCK Warga Bertam-Kota Batam	229
Gambar 5.1.	Skema Pelaksanaan Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam-Kota Batam	264
Gambar 5.2.	Skema Ringkasan Faktor Pendukung/Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam-Kota Batam	271
Gambar 5.3.	Skema Dampak Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam-Kota Batam	2

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Telaah Penelitian Mengenai Komunitas Adat Terpencil
- Lampiran 2. Perubahan Nomenklatur KAT
- Lampiran 3. Peta Letak Lokasi Pulau Bertam
- Lampiran 4. Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus FKKS/ KKKS Batam
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komuntas Adat Terpencil (PKAT) Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam - Kota Batam
- Lampiran 6. Foto Sarana Dan Prasarana Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam-Kota Batam
- Lampiran 7. Foto Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam-Kota Batam
- Lampiran 8. Taksonomi Penelitian Pelaksanaan Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam-Kota Batam
- Lampiran 9. Transkrip Wawancara Pelaksanaan Program PKAT Pada Komunitas Suku Laut Di Pulau Bertam-Kota Batam

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan dalam penelitian ini membahas enam subbab yang terdiri dari: latar belakang mengapa penelitian kali ini dilakukan, perumusan masalah penelitian dengan menggunakan bentuk kalimat pertanyaan bagaimana dan apa, tujuan dari penelitian ini dilaksanakan, manfaat penelitian yang ditinjau dari sudut pandang praktis maupun akademis, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian serta lokasi dan jangka waktu penelitian, teknik penelitian informan, teknik pengumpulan data, dan analisa data, dengan bahasan terakhir yaitu sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Millinium (*Millenium Development Goals/ MDGs*) 2010 mencatat beberapa kondisi yang masih menjadi prioritas sasaran pembangunan Indonesia, diantaranya: kemiskinan dan kelaparan; peningkatan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; dan kelestarian lingkungan hidup. MDGs sendiri merupakan “komitmen negara untuk mencapai kemajuan yang nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia pada tahun 2015, dari 189 negara yang dideklarasikan pada bulan September 2000 sebagai bagian dari keanggotaan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)” (Todaro Dan Smith, 2006, hal. 29).

Berbagai kondisi tersebut sering kali dihubungkan dengan banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sebagai gambaran yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia misalnya dapat dilihat dari posisi Indonesia jika dikomparasikan dengan negara-negara tetangga khususnya yang tergabung dalam ASEAN. *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* atau Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan Asosiasi kerja sama antar negara-negara Asia Tenggara yang menghendaki bagi setiap anggota terikat untuk melaksanakan, mematuhi dan menghormati kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang memuat kerjasama; Politik

Keamanan ASEAN, ekonomi ASEAN, Fungsional ASEAN serta mengatur tentang Hubungan Eksternal ASEAN.

Bagi Indonesia, keanggotaan dalam ASEAN merupakan pilar utama bangsa dalam menjalankan politik luar negeri dalam mewujudkan tercapainya tujuan nasional, sebagaimana yang diungkap oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam berikut :

Untuk memastikan tercapainya tujuan nasional Indonesia, Departemen Luar Negeri menekankan pada kerja sama diplomatic dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (*concentric circles*) yang terdiri dari: Lingkaran pertama adalah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya (*Tentang ASEAN*, 2009).

Data dari UNDP menunjukkan posisi Indonesia yang menempati peringkat 108 dari 169 negara dunia serta menempati peringkat ke 6 dari 10 negara yang tergabung dalam ASEAN, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Prosentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan 2010, negara ASEAN

No.	Negara	HDI Rank UNDP 2010	Nilai Human Development Index (HDI)	Pendapatan Nasional Brutto (GNI) per kapita	Prosentase Populasi dibawah garis kemiskinan (\$1,25 Perhari)	Prosentase Populasi dibawah garis kemiskinan nasional
1	Singapura	27	0.846	48,893	-	-
2	Brunei	37	0.805	49,915	-	-
3	Malaysia	57	0.744	13,927	< 2	-
4	Thailand	92	0.654	8,001	< 2	-
5	Filiphina	97	0.638	4,002	22.6	-
6	Indonesia	108	0.600	3,957	29.4	16.7
7	Vietnam	113	0.572	2,995	21.5	28.9
8	Laos	122	0.497	2,231	44.0	33.5
9	Cambodia	124	0.494	1,868	25.8	30.1
10	Myanmar	132	0.451	1,596	-	32.0

Sumber: Diadaptasi dari Human Development Index and its components (*human development*, 2010)

Dari tabel 1.1. diatas menunjukkan bahwa pendapatan nasional (GNI) suatu negara berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Negara Indonesia, jika dilihat GNI perkapita (3,957) berada pada peringkat keenam dibawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina dan diatas negara Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar. Demikian juga ternyata jika dilihat dari peringkat Indeks Pembangunan Manusia (HDI) akan berbanding lurus, dimana Indonesia tetap menempati posisi yang sama jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lain. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kurang lebih ada 29.4% penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan jika diukur dari batas garis kemiskinan adalah \$1,25 perkepala perhari. Prosentase ini tentu saja masih menunjukkan jumlah yang cukup besar karena tercatat hampir sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan.

Kausul tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi akar permasalahan pembangunan di Indonesia. Dan dari sepertiga penduduk Indonesia yang termasuk dalam kelompok penduduk miskin dimana salah satu diantaranya teridentifikasi sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Sebagaimana analisis dari Departemen Sosial RI (2005) bahwa:

Pembangunan nasional dan khususnya pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan sosial yang masih besar, baik kuantitas maupun kualitas. Dengan permasalahan sosial yang masih menempati urutan pertama didalamnya meliputi: kefakirmiskinan, keterlantaran dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) (hal.1).

Komunitas Adat Terpencil merupakan kelompok masyarakat yang secara geografis mendiami lokasi yang terisolir dan sulit terjangkau, dengan tingkat pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun, hidup dengan sistem ekonomi subsisten yang berdampak pada pengadaan sarana dan prasarana hidup yang terbatas. Sebagaimana deskripsi identifikasi keadaan dan permasalahan KAT secara kualitatif oleh Direktorat Pemberdayaan KAT Depsos RI (2003) berikut:

- a. Permukiman yang terpencil dan berpencar sehingga akses terhadap berbagai fasilitas menjadi sangat terbatas.

- b. Ekonomi subsisten, KAT rentan termarginalkan oleh kecepatan perubahan yang ada di lingkungannya yang bukan KAT.
- c. Teknologi sangat sederhana yang umumnya warisan leluhur tidak didukung oleh sarana dan upaya perubahan sesuai kondisi yang terjadi.
- d. Ketergantungan pada sumber daya alam yang sangat tinggi, yang rentan terhadap perubahan jumlah dan pendayagunaan sumber-sumber tersebut oleh unsur dari luar lingkungan mereka (hal. 9-10).

Deskripsi tersebut menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan sosial yang dialami oleh KAT, diantaranya kondisi keterasingan atau keterisolasian, tertinggal, dan terbelakang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan mereka hidup terbelenggu dalam kemiskinan, sebagaimana pendapat Chambers dalam Soetomo (2006) bahwa “Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang tak jarang melibatkan banyak faktor. Keseluruhan faktor saling kait mengkait dan saling memperkuat yang tidak jarang membentuk perangkap kemiskinan. Faktor tersebut adalah kemiskinan, isolasi, ketidakberdayaan, kerawanan, dan kelemahan fisik” (hal. 407-408).

Jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) sendiri tersebar di 30 Provinsi yang hampir mendiami seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemutakhiran data KAT secara nasional oleh Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Depsos RI “sebanyak 229.479 KK atau sebanyak 1,1 juta jiwa yang berada di 2.650 lokasi. Mereka tersebar di 246 Kabupaten, 852 Kecamatan, 2.037 Desa dan 2.650 lokasi” (hal. 2). Artinya hampir 90,91% dari 33 provinsi dapat dijumpai warga KAT, akan tetapi terlihat rendah secara kuantitatif jika membaca jumlah populasi KAT yang hanya berkisar 1,1 juta jiwa atau hanya sekitar 0,47% dari “total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 234,2 juta jiwa” (*Penduduk Indonesia*, 2010).

Meskipun secara kuantitas terlihat dalam kategori rendah namun negara wajib memberikan penghidupan dan kehidupan yang layak, sebagaimana diungkapkan Depsos RI (2005) “Seperti halnya permasalahan kemiskinan, permasalahan KAT ini merupakan fenomena yang menjadi ukuran ada tidaknya

kemajuan sosial (*social progress*) dari proses pembangunan” (hal. 1). Artinya jika secara kuantitas populasi KAT kecil, namun tak dapat dipungkiri mereka juga merupakan aset sumber daya manusia sebagai modal penggerak pembangunan nasional yang secara kualitas perlu mendapatkan perhatian.

Kewajiban negara tersebut sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 tentang hak warga negara bahwa “negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” (*Preamble*), dan “segenap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 ayat 2). Ditegaskan pula dalam pasal 18 b ayat (2) bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip NKRI”. Disamping juga termaktub dalam Undang-Undang RI No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal (4) dan pasal (5) ayat 2 huruf e, yaitu “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial” dan “penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yaitu keterpencilan”(Undang-Undang, 2009).

Dalam lingkup internasional secara tegas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pasal 2 menyatakan :

Indigenous peoples and individuals are free and equal to all other peoples and individuals and have the right to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in particular that based on their indigenous origin or identity (Masyarakat adat dan warga-warganya, bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka) (*Siapa Masyarakat*, 1999).

Landasan pijakan tersebut mengandung pengertian bahwa KAT merupakan bagian integral dari masyarakat dunia khususnya sebagai warga Negara Indonesia

yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga masyarakat Indonesia, oleh karenanya sudah menjadi keharusan negara untuk menjamin agar KAT juga dapat hidup sejahtera tentunya tanpa diskriminasi dengan menjadikan KAT sebagai sasaran kebijakan pembangunan.

Merujuk pada kondisi diatas maka perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup KAT terutama melalui program pembangunan yang tersusun secara terencana dan tersistematis secara khusus melalui kebijakan sosial, hal ini mengingat kompleksitas permasalahan sosial yang ada juga menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Sebagaimana pendapat Hall dan Midgley (2004):

However, the goal of promoting greater social integration and inclusion into the mainstream of substantial groups which have been actively discriminated against, trapping them in situations of poverty and vulnerability, has become increasingly important social policy objective. Improving the plight of many women, indigenous populations, the old and those at the bottom of the social ladder such as schedule castes and street children are increasingly evident on the social policy agenda as specialized areas of investigation and intervention.

[Bagaimanapun juga, tujuan untuk lebih meningkatkan integrasi sosial dan penyertaan mereka yang terdeskriminasi kedalam kelompok utama substansial, menjebak mereka dalam kemiskinan dan keretakan, merupakan sasaran utama dari kebijakan sosial. Meningkatkan kehidupan perempuan, masyarakat adat, lanjut usia dimana mereka hidup dalam tingkatan kasta yang rendah dan juga anak jalanan merupakan agenda nyata dari kebijakan sosial khususnya terkait dengan investigasi (*investigation*) dan intervensi (*intervention*)] (hal. 10).

Melalui kebijakan berarti pemerintah sebagai penanggung jawab pembangunan memiliki alasan atau argumen yang mengandung klaim bahwa pemerintah sebagai pemilik kebijakan memahami persoalan bangsa beserta solusinya. Yang berarti pula bahwa Negara melakukan perubahan-perubahan yang menyangkut perikehidupan masyarakat dilaksanakan secara tersistematis dan terencana melalui program-program pembangunan.

Fokus pembahasan tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT) sendiri mulai dibahas dalam agenda-agenda kerja pemerintah melalui kerangka kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 1976 dengan penyebutan tatanama (*nomenklatur*) KAT sebagai “Suku Terasing” kemudian tahun 1987 mengalami perubahan penyebutan dari “Suku Terasing” menjadi “Masyarakat Terasing”, terakhir tahun 1999 melalui Keppres No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, menetapkan perubahan atas istilah “Masyarakat Terasing” menjadi “Komunitas Adat Terpencil”. Disebutkan dalam Keppres No. 111/1999 dengan menimbang:

Bahwa Komunitas Adat Terpencil yang selama ini dikenal dengan sebutan masyarakat terasing perlu dibina kesejahteraan sosialnya dengan memberdayakannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar komunitas adat terpencil yang bersangkutan dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan (Direktorat PKAT, Depsos RI, 2002).

Berdasarkan amanat diatas terkandung makna bahwa pemberdayaan merupakan salah satu strategi kebijakan bagi KAT agar mereka nantinya dapat hidup mandiri, berdampingan dengan masyarakat lain serta berperan aktif dalam pembangunan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero (2008) bahwa :

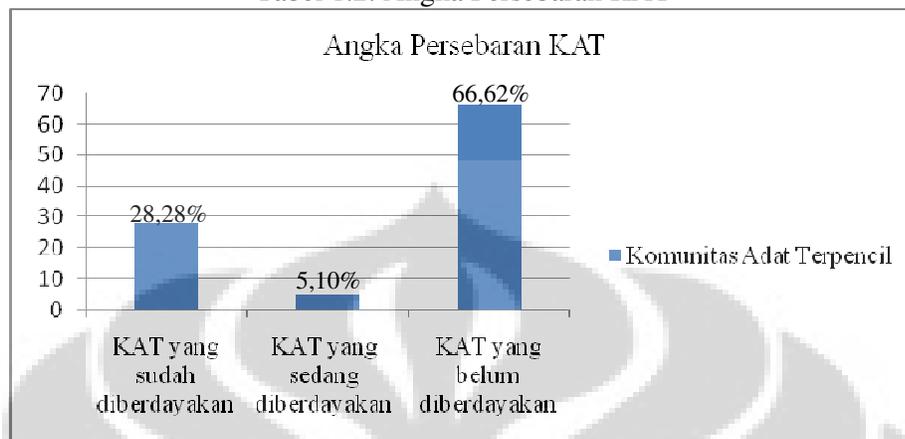
Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan aksi afirmatif (praktek atau prinsip,... dengan mendahulukan orang yang sering kali diperlakukan tidak adil terutama karena jenis kelamin atau ras) atau diskriminasi positif mengakui keberadaan kelompok-kelompok yang dirugikan (kadang-kadang dinyatakan secara spesifik dalam istilah-istilah struktural), dan berupaya untuk memperbaiki keadaan ini dengan mengubah aturan-aturan untuk menguntungkan kelompok yang dirugikan (hal. 147-148).

Pendapat diatas menunjukkan bahwa pemberdayaan sebagai strategi kebijakan diperuntukkan dengan mendahulukan kelompok yang dirugikan, dimana salah satu yang masuk dalam kategori kelompok yang dirugikan disebutkan oleh Ife dan Frank (2008) yaitu masyarakat pribumi, mereka yang terisolasi, mereka yang hidup di wilayah terpencil.

Secara khusus komitmen pemerintah dalam hal ini melalui Depsos RI sebagai pelaksanaan kebijakan, diwujudkan dalam sebuah program pemberdayaan yang dikhususkan bagi Komunitas Adat Terpencil yang dinamakan dengan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT), seperti yang tertuang dalam Kepmensos RI No. 06/PENGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang kemudian secara operasional dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Depsos RI No. 020.A/PS/KPTS/VI/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bahwa “Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan pada mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan nasional yang umumnya berada pada daerah-daerah yang sulit terjangkau” (Direktorat PKAT, Depsos RI, hal.7).

Dari program PKAT tercatat jumlah KAT yang telah diberdayakan hingga tahun 2008 sebanyak 64.900 Kepala Keluarga (KK), Jumlah KAT yang sedang diberdayakan berjumlah 11.692 KK, dan jumlah KAT yang belum diberdayakan berjumlah 152.887 KK dari 229.479 KK (jumlah KAT secara nasional) hasil pemutakhiran KAT tahun 2008. Gambaran lebih jelas tentang angka persebaran KAT dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:

Tabel 1.2. Angka Persebaran KAT



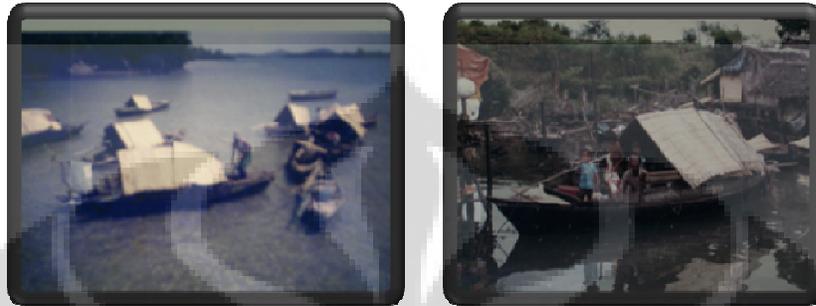
Sumber: Data Persebaran KAT tahun 2006 yang Dimutakhirkan Tahun 2008, (Depsos, 2008).

Diagram menunjukkan realisasi program PKAT yang dimulai pada tahun 1976 atau telah berjalan selama 34 tahun hanya dapat dinikmati sekitar 28,28% dari populasi yang ada, sedang lebih dari 50% populasi atau sekitar 66,62% dari jumlah populasi belum tersentuh program PKAT. Artinya masih banyak komunitas KAT yang belum tersentuh program PKAT dan diperlukan waktu yang cukup panjang dan pekerjaan yang banyak bagi pemerintah guna menyelesaikan agenda kerja program PKAT.

Salah satu komunitas adat yang juga merupakan bagian dari KAT dan merupakan sasaran dari program PKAT adalah Komunitas Suku Laut. Suku laut merupakan komunitas adat yang hidup mengembara di laut yang berdasarkan literatur *The National Museum of Singapore* dalam Ringkasan laporan Pendataan Masyarakat Terasing Di Daerah Perbatasan Riau oleh Direktorat Bina Masyarakat Terasing Departemen Sosial RI (1988) sebagian besar hidup bermukim di Kabupaten Kepulauan Riau (saat ini berubah status menjadi Propinsi Kepulauan Riau) :

Sebagian besar Orang Laut (Suku Laut) bermukim di daerah Kabupaten Kepulauan Riau. Orang laut adalah Suku Terasing yang hidup mengembara di Laut. Suku terasing ini disebut Orang Laut karena mempunyai ciri-ciri hidup berkeluarga dalam sampan dan mengembara sepanjang perairan. Pada

umumnya, orang Laut memiliki kebudayaan yang sama karena berasal dari kebudayaan yang sama yang masih sederhana, baik sosial maupun teknologinya (hal.3).



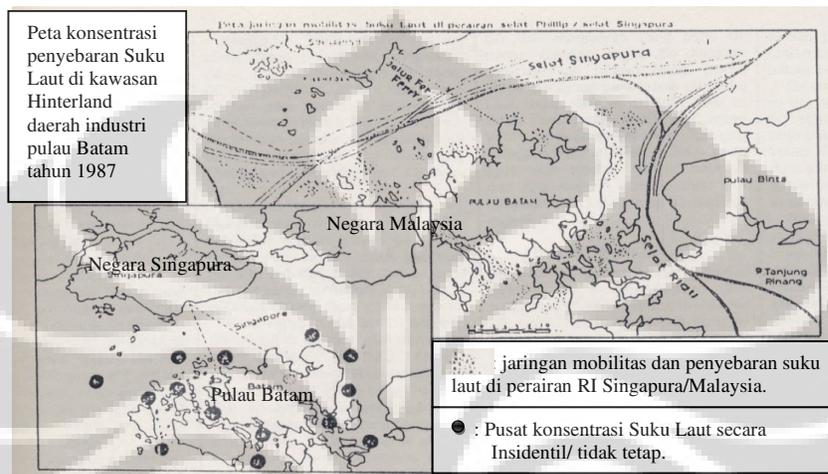
Gambar 1.2. Kehidupan suku laut sebelum dimukimkan

Sumber: Diadaptasi dari dokumentasi KKKS Batam, reproduksi oleh penulis oktober 2010.

Berdasarkan pendataan oleh Direktorat Bina Masyarakat Terasing Depsos RI (1988) bahwa dari mereka yang berada di kepulauan riau, suku laut yang masih tinggal diperahu/ sampan teridentifikasi hanya berada di kota Batam yang berjumlah sekitar 523 jiwa atau 82 KK. Dari 523 jiwa tersebut menyebar diantaranya di kecamatan Batam Timur sebanyak 79 Jiwa atau 16 KK, di kecamatan Batam Barat sebanyak 73 jiwa atau 14 KK dan terbanyak berada di kecamatan Belakang Padang yaitu sebanyak 371 jiwa atau 52 KK dengan rincian: di Kelurahan Belakang Padang sebanyak 231 jiwa atau 33 KK, Desa Kasu sebanyak 48 Jiwa atau 6 KK, Desa Pemping sebanyak 42 Jiwa atau 6 KK, Desa Pecung sebanyak 28 Jiwa atau 4 KK, dan Desa Terong sebanyak 22 Jiwa atau 3 KK.

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Suku Laut khususnya mereka yang masih hidup nomaden mengembara dalam perahu kajak hanya berada di kawasan Kota Batam yaitu sebanyak 523 Jiwa atau sekitar 11,23% dari jumlah keseluruhan Suku Laut yang ada di Kepulauan Riau, dan paling banyak dapat dijumpai di Kecamatan Belakang Padang dengan jumlah sebanyak 371 jiwa atau 52 KK yaitu sekitar 70,94% dari jumlah komunitas yang ada di Kota Batam.

Berbeda pada umumnya suku-suku lain, Suku Laut sejak awal memilih laut sebagai habitatnya, tempat membentuk lingkungan sosial dan budaya (Arba MF dan Rahman, 2002, hal. 23). Mobilitas kehidupan dilaut dapat dilihat dengan jelas sebagaimana ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1.2. Peta Mobilitas Suku Laut.
Sumber : Diadaptasi dari Sarinah terbit 22 Oktober 1990

Dari gambar dapat diketahui bahwa penyebaran suku laut khususnya mereka yang berada di wilayah Kota Batam berada di sekitar Selat Malaka, Selat Phillip, selat Singapura dan laut Cina Selatan. Mobilitas ini menyebabkan permasalahan teritorial karena menyangkut masuknya warga negara Indonesia ke wilayah negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia dan Vietnam disamping juga masalah sosial dan juga ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh Dirjen Bina Masyarakat Terasing Depsos RI (1988) bahwa mobilitas suku laut tersebut menyebabkan persoalan sosial: “di antaranya menyangkut konsentrasi teritorial, masalah politis, masalah ekonomi, masalah sosial budaya, dan masalah pertahanan dan keamanan” (hal. 9-12).

Mendasar pada permasalahan sosial yang ada maka pemerintah dalam hal ini Depsos RI menetapkan Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dengan program Pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil (PKAT) guna meningkatkan kesejahteraan sosial suku laut khususnya yang ada di wilayah

Batam yang tercermin dalam tujuan program sebagaimana termuat dalam Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam oleh Direktorat Bina Masyarakat Terasing Depsos (1987) yaitu:

Tujuan utama dari kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut adalah guna meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial Suku Laut sesuai dengan falsafah Pancasila dan berkembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan Suku Laut dalam rangka terciptanya wilayah daerah perbatasan yang makin mantap. Sedangkan Tujuan antara program yaitu; 1. Mengadakan perubahan kebiasaan hidup Suku Laut yang mengembara di laut, kearah kehidupan yang menetap dalam pemukiman di darat secara bertahap. 2. Meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, agama, sosial budaya, dll. dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan Suku Laut. 3. Meningkatkan kualitas organisasi masyarakat khususnya dalam pembinaan Suku Laut (hal. 4).

Dari kausul diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari program adalah adanya perubahan pola kehidupan nomaden hidup di laut menjadi menetap dengan membentuk permukiman didarat. Permukiman suku laut yang ada di wilayah Batam pada awal program dikonsentarsikan pada dua tempat yaitu pulau Bertam dan pulau Gara, dengan proyek percontohan yang melibatkan unsur masyarakat difokuskan pada pulau Bertam-Kota Batam. Hal ini sebagaimana terungkap dalam seminar Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat Terasing di Jaya Pura-Irian jaya pada tahun 1992 yang disampaikan oleh Drs. Muchroji dari Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial dalam makalahnya sebagai berikut:

Didaerah Kodya Batam (Saat ini berubah status menjadi Kota Batam) dijumpai permukiman masyarakat terasing suku laut yang dikelola oleh LSM Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam. Pemukiman ini berlokasi di Bertam. Pelaksanaan pemukiman masyarakat terasing disini mengikuti pola yang dipakai oleh Departemen sosial dimana kegiatan utamanya adalah penyuluhan dan bimbingan sosial...hasilnya suku laut yang bermukim di pulau Bertam tersebut tidak lagi berkelana di laut, mau tinggal menetap, mau

menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dibangun FKKS dengan bantuan organisasi luar negeri, mau berobat ke puskesmas yang juga dapat bantuan dari organisasi sosial asing, mau memeluk agama yang selama ini mereka tidak kenal, mau membudidayakan tanaman rumput laut yang sama sekali asing bagi mereka dan banyak hal lagi.

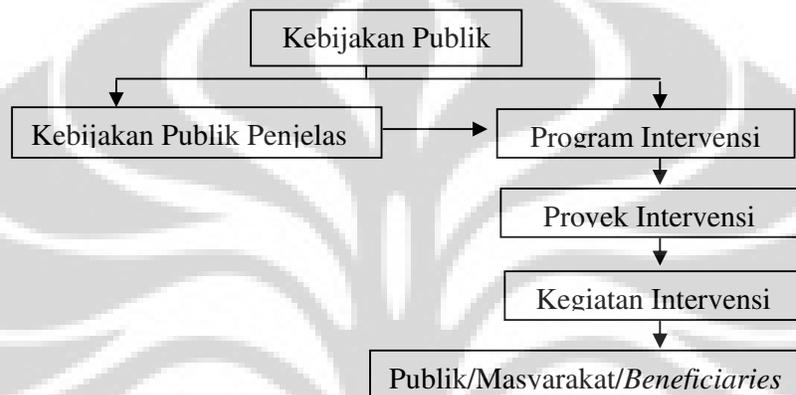
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pelaksana program PKAT khususnya untuk komunitas suku laut dengan penempatan lokasi permukiman di pulau Bertam-Kota Batam dilaksanakan melalui koordinasi Depsos RI dengan kerjasama pihak Organisasi Sosial (LSM) Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam. Pernyataan tersebut juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa program PKAT tersebut merupakan proyek percontohan pemberdayaan KAT khususnya pada komunitas suku laut dengan melibatkan unsur masyarakat dalam hal ini mereka yang terhimpun dalam Organisasi Sosial FKKS Batam.

Dari sebuah tahapan kebijakan, pelaksanaan (*implementasi*) merupakan tahapan yang penting untuk dideskripsikan. Dari implementasi pada akhirnya dapat diketahui tingkat keberhasilan kebijakan yang bersangkutan. “Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi” (Nugroho D, 2006, hal. 119). Pendapat yang senada diungkap oleh Suharto (2008) “kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan” (hal. 191).

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan/ implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting untuk dikaji, dengan mengkaji implementasi kebijakan akan dapat diambil suatu kesimpulan (*conclusion*) apakah kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran, tujuan kebijakan dapat tercapai, serta dampak yang muncul akibat dari kebijakan sehingga dapat dideskripsikan layak, tidak layak, atau perlunya perbaikan kebijakan sebagai kelanjutan dimasa yang akan datang.

Pembahasan tentang implementasi tidak terlepas dari konsep program, karena Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang berarti bahwa

program merupakan ranah dimana kebijakan dilaksanakan. Sebagaimana pendapat Nugroho D. (2006) bahwa “Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (hal. 141). Alur yang lebih jelas dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:



Gambar 1.4. Rangkaian dalam implementasi kebijakan

Sumber: Diadaptasi dari Nugroho D. (2006, hal. 141)

Setelah melakukan filterisasi dari penelusuran penelitian terhadap penelitian terdahulu (secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 1), dari beberapa judul yang ada penulis kemudian mengambil empat penelitian terutama yang terkait dengan konteks penelitian. Keempat penelitian, yaitu; Syafrizal (2001) dengan judul “Struktur masyarakat Suku Laut dan Pelaksanaan Program PKSMT (Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing) (Studi Kasus di desa Sungai Bela, Kabupaten Tingkat II Indragiri Hilir, Propinsi Riau)”, kedua penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial-Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial-Departemen Sosial RI (2005) dengan judul “Pengembangan Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil”, ketiga Taupiqurrahman (2006) dengan judul “Analisis Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam Pembangunan Daerah di Hulu Sungai Selatan” dan terakhir Rakhmani (2009) dengan judul “Penguatan Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif

Tiga Kelompok Usaha Bersama Di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan).

Penelitian Syafrizal menarik untuk ditelusuri karena menggambarkan struktur masyarakat suku laut terkait dengan program kebijakan Depsos RI. Dari latar belakang, permasalahan, serta tujuan yang diambil dapat diambil analisa bahwa hasil kajian hanya melihat struktur masyarakat KAT sebagai salah satu elemen yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan oleh Depsos RI. Dari penelitian kedua dapat digali gambaran mengenai pengembangan model pemberdayaan dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi religi, dan kondisi ekologi dari KAT. Sedangkan kelebihan yang dapat diambil yaitu menggambarkan analisis kebijakan Pemberdayaan KAT serta kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan metode penelitian Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk menganalisa konsep pemberdayaan dan Analitical Hierarcy Process (AHP) guna menganalisa kebijakan. Penggunaan model AHP mengandung kelemahan seperti yang diungkap Taupiqurrahman (2006) bahwa “ketergantungan model ini pada *input* berupa persepsi seorang *expert* akan membuat hasil akhir dari model ini menjadi tidak ada artinya apabila si *expert* memberikan penilaian yang keliru. Kondisi ini ditambah dengan belum adanya kriteria yang jelas untuk seorang *expert*” (hal. 38). Dan untuk telaah penelitian keempat diperoleh gambaran tentang pengembangan berbasis komunitas yang didukung oleh pendamping dalam memberdayakan KAT menjadi kelompok yang mandiri. Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada usaha ekonomi produktif dengan mengambil setting di desa Hamak Utara kecamatan Telaga Langsat kabupaten Hulu Sungai Selatan propinsi Kalimantan Selatan.

Kehidupan komunitas adat khususnya suku laut sendiri sedikit banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan setempat diantaranya berasal dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Program PKAT. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana realitas proses pelaksanaan program dilapangan, adakah faktor-faktor penghambat

dan pendukung pelaksanaan program, serta bagaimana dampak yang muncul dari respon komunitas atas dinamika perubahan yang terjadi. Dari beberapa pertanyaan dan juga dengan mempertimbangkan *research gap* atas telah penelitian terdahulu, agar hasil yang diperoleh dapat terdeskripsikan secara komprehensif maka dalam penelitian kali ini mengambil judul, **“Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Studi pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam - Kota Batam)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Program PKAT pada komunitas suku laut di Kota Batam didasarkan pada dua hal yang menjadi pijakan yaitu letak Batam sebagai wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura, serta Pulau Batam yang tumbuh sebagai daerah industri dengan otoritas penuh dalam pengembangan industri (Arba MF, Syarif dan Rahman, Abdul, 2002, hal. 31).

Implementasi kebijakan melalui program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil berdasarkan data persebaran KAT 2008 oleh Departemen Sosial RI menunjukkan bahwa 125 jiwa suku laut yang merupakan Komunitas Adat terpencil (KAT) berada di pulau Bertam Desa Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam tercatat telah diberdayakan, dengan pelaksanaan program dari awal tahun 1989/1990 sampai akhir tahun 1993/1994.

Tabel 1.3. Persebaran Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kota Batam

Kecamatan	Desa	Lokasi	Suku	KK	Jiwa	Status pemberdayaan	Tahun	
							Awal	Akhir
Belakang Padang	Kasu	Pulau Bertam	Laut	25	125	Sudah	1989/1990	1993/1994
Jumlah				25	125			

Sumber: Data persebaran KAT tahun 2006 yang dimutakhirkan tahun 2008, Depsos 2008.

Dari tabel menunjukkan bahwa pada tahun 1989/1990 pemerintah dalam hal ini Depsos RI telah melaksanakan program PKAT dengan sasaran pada komunitas suku laut berjumlah sebanyak 125 jiwa atau 25 KK dengan lokasi permukiman berada di Pulau Bertam-Kota Batam dan berakhir pada tahun 1993/1994.

Berakhirnya program (*terminasi*) yang berarti bahwa tujuan-tujuan program dirasa telah tercapai, dan ditunjukkan dengan perubahan status komunitas suku laut menjadi sudah mandiri (berdaya).

Program PKAT suku laut di pulau Bertam merupakan program unggulan dari pemerintah dengan pelaksana di bawah koordinasi Departemen Sosial dan merupakan proyek percontohan pembinaan Suku Laut melalui peran serta masyarakat dalam hal ini kerjasama Depsos RI dengan organisasi sosial yaitu Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Batam yang sebelumnya bernama Forum Komunikasi Dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Sosial dalam Laporan Program FKKS dan Pengarahan Menteri Sosial RI tanggal 21 Oktober 1988 mengenai pemukiman suku laut di pulau Bertam “Memang mereka itu masih dalam taraf yang sederhana. Dan saya tidak berani menggunakan istilah primitif. Itu mesti akan terjadi seperti itu. Jawabannya bagaimana cara menangani... kita terimakasih karena Bertam sudah jalan dan nanti dari situ berjalan ke lain tempat”. Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pemberdayaan suku laut pada awalnya dimulai dengan penempatan lokasi permukiman warga suku laut di pulau Bertam.

Sebagai proyek percontohan menjadikan pulau Bertam berubah menjadi pemukiman yang ramai dengan dibangunnya beberapa unit rumah tambahan dan fasilitas pendukung, sebagaimana diungkap oleh Arba dan Rahman (2002) bahwa:

Pada tahun 1988, saat pertama dibangun perumahan Suku Laut, yang pada waktu itu berjumlah 14 unit rumah, mulailah Bertam menjadi pulau yang hidup. FKKS yang menggantikan Kosgoro dalam pembinaan Suku Laut di Bertam kemudian secara bertahap meningkatkan jumlah perumahan. Pada tahun 1990 atas bantuan Yayasan NEBA di Belanda ditambah lagi 10 unit rumah. Tahun 1991 Pemukiman bertambah lagi 10 unit rumah, atas sumbangan dari Ibu Tien Soeharto. Tahun 1992 Ibu Sri Soedarsono menambah satu unit rumah lagi. Tahun 1995 setelah peralihan pembinaan dari KKKS ke Depsos dan kemudian Kotamadya Batam pada tahun 1993, pihak pemerintah daerah menambah 5 unit rumah lagi (hal. 63).

Namun demikian dengan dijadikannya pulau Bertam sebagai proyek percontohan tidak membuat pulau Bertam tumbuh menjadi permukiman yang berkembang baik dari penambahan jumlah sarana dan prasarana maupun dari jumlah warga suku laut yang menetap di pulau Bertam, seperti diungkap oleh Ketua FKKS/ KKKS Batam sebagai berikut:

Suku Laut yang mendiami Pulau Bertam terancam punah karena kurang mendapat perhatian pemerintah daerah. Dari jumlah sebelumnya mencapai 70 kepala keluarga pada tahun 1976, kini hanya tersisa 35 KK. Berkurangnya Suku Laut ini ada yang disebabkan pergi karena tidak lagi mendapat perhatian pemerintah. Mereka kembali ke habitatnya, yakni perahu dijadikan rumah. Awal pembangunan Batam, Suku Laut direlokasi ke Pulau Bertam dan disediakan rumah yang dibangun di pinggir laut. Tapi rumah yang dibangun tahun 1980-an itu sudah tidak bisa digunakan lagi, akibatnya ditinggal oleh penghuninya. Rumah mereka pun sudah rusak parah (*Suku Laut*, 2010, paragraf 3).

Dari pemberitaan diatas menunjukkan bahwa pulau Bertam merupakan permukiman awal bagi suku laut yang ada di Kota Batam. Informasi tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah warga yang bermukim pada tahun 2010 di pulau Bertam sebanyak 35 KK atau kurang lebih 50% dari jumlah KK sebelumnya yang menetap di pulau Bertam, sedangkan sisanya yaitu kurang lebih 50% yang lain memilih keluar dari pulau Bertam dan kembali hidup nomaden sebagaimana kehidupan sebelum mereka dimukimkan di pulau Bertam dengan mengembara di lautan menggunakan perahu kajang. Pemberitaan tersebut juga mengandung pengertian bahwa sebagai permukiman yang merupakan proyek percontohan program PKAT bagi suku laut dengan segala kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang diberikan kepada komunitas suku laut di pulau Bertam belum mampu mempertahankan warga komunitas untuk tetap tinggal menetap dipermukiman pulau Bertam.

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan (3 Juni s/d 5 Agustus 2009) menunjukkan kondisi yang sama, terlihat bahwa beberapa sarana dan

prasarana yang sebelumnya digunakan warga menjadi tidak layak digunakan misalnya; kondisi jembatan yang sudah mulai lapuk, bangunan rumah yang juga mulai lapuk dan berlubang di bagian alas dan dinding sehingga kurang layak huni, bangunan fasilitas layanan sosial seperti balai kesehatan yang sudah roboh dan telah lama tidak difungsikan lagi serta jumlah penduduk pulau Bertam yang semula berjumlah 125 Jiwa pada saat program dinyatakan telah selesai menjadi 114 Jiwa atau berkurang sebanyak 11 jiwa. Hal ini menunjukkan tingkat mobilitas yang rendah dari komunitas suku laut terutama menetap di pulau Bertam. Sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.5. Kondisi Pemukiman Suku Laut, dan Jembatan yang tidak layak pakai
Sumber: Dokumentasi praktikum, Juli 2009.

Kondisi serupa juga diungkap oleh Sekretaris RT 20 pulau Bertam sebagaimana hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada saat kegiatan praktikum di pulau Bertam sebagai berikut:

Dulu waktu pertamanya kali masuk pemukiman, banyak sekali bantuan yang datang, yang darinya pemerintah, K3S Batam (KKKS Batam), juga dari NEBA ada sembako, pembuatan rumah, termasuk jembatan yang sekarang sudah banyak lobang, juga dibuatnya tempat kesehatan juga dokter dan perawatnya, bangunan sekolah juga gurunya.. tapi sekarang jarang pemerintah datang, bantuan lebih banyak dari Bu Dar (yang dimaksud adalah Ibu Sudarsono, ketua KKKS Batam) tiap bulan ramadhan ada sembako, buka puasa bersama, buat anak sekolah diberi seragam, sepatu. Bahkan sekarang banyak yang pergi ada yang kembali ke laut atau mereka pindah ke belakang padang. Rumah tak ada sudah rubuh yang dipunya hanya sampan. Jadi sekarang tinggal

114 Jiwa. Kalau seperti ini terus bisa jadi Bertam makin sunyi (September, 2009).

Informasi diatas menunjukkan bahwa kondisi warga suku laut yang ada di pulau Bertam saat ini mengalami berbagai persoalan baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Kondisi ini menyebabkan beberapa warga diantaranya menjalani kehidupan semula sebelum bermukim yaitu hidup nomaden di laut dan sebagian diantaranya mobilisasi di tempat lain.

Dengan mendasarkan hal diatas dan guna menjawab berbagai masalah yang muncul sesuai dengan kebutuhan penelitian maka permasalahan penelitian kali ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam?
3. Bagaimana dampak yang terjadi setelah implementasi program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Merefleksi pada latar belakang dan permasalahan yang diambil dalam ruang lingkup program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam, maka tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan dan menganalisa pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.
2. Memetakan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.
3. Mendiskripsikan dan menganalisa dampak yang terjadi setelah implementasi program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan realitas sosial yang terkait dengan kebijakan khususnya implementasi program PKAT dalam menangani permasalahan sosial (KAT), disamping itu juga menemukan faktor penghambat

dan pendukung program untuk selanjutnya di jelaskan dampak yang muncul dari program PKAT, pada nantinya hasil penelitian dapat menambah wacana terkait objek penelitian baik secara teorisasi maupun aplikasi, dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis;

1. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pijakan informasi, referensi dan kajian bagi para akademisi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial KAT khususnya program PKAT.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya bagi Departemen sosial dan lebih khusus lagi Dinas Sosial Batam dan Pemerintah Daerah Kota Batam terkait dengan program PKAT Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam. Disamping juga bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terfokus pada program PKAT khususnya pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipandang paling tepat digunakan karena dapat menjelaskan, mengetahui, mendeskripsikan proses dan makna dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (PKAT) pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam. Penelitian kualitatif menekankan realitas yang terbangun secara sosial, teguh pada posisi yang *emis* (berupaya menemukan fakta ‘apa adanya’ di lapangan bukan ‘apa yang seharusnya’) serta hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti sehingga menghasilkan kajian yang mendalam dan komprehensif, tersajikan dalam bentuk narasi yang sederhana dan mudah dipahami sehingga dapat memperjelas kompleksitas permasalahan dalam penelitian yang terkait dengan pelaksanaan program; baik dalam komunitas sasaran, antar pelaksana program maupun antar komunitas dengan pelaksana (Denzin dan Lincoln, 2009). Penelitian kualitatif, *they emphasize conducting detailed examinations of cases that arise in the natural flow of social life. They try*

to present authentic interpretations that are sensitive to specific social historical contexts. (peneliti kualitatif menekankan pada pengujian kasus (*cases*) yang terjadi dalam alur alamiah kehidupan sosial secara rinci (*detailed*). Mereka mencoba menghadirkan interpretasi yang autentik yang peka terhadap konteks historis (*historical*) sosial tertentu) (Neuman, 2006, hal. 151).

Senada dengan pendapat diatas, Creswell (2002) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan penciptaan gambaran secara holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan paradigma informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (hal. 1). Dengan demikian melalui pendekatan ini akan tersaji deskripsi holistik pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam untuk selanjutnya tergali dan terpaparkan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program.

1.5.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif sesuai dengan fokus penelitian karena berusaha menggambarkan fenomena sosial secara terperinci dari pelaksanaan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam. Penelitian deskriptif menurut Neuman (2006) *“Descriptive research present a picture of spesific details of situation, social setting or relationship... the outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject”* [penelitian deskriptif memberikan gambaran yang terperinci tentang suatu situasi sosial, setting sosial atau hubungan sosial... hasil dari study deskriptif adalah gambaran subject secara detail] (hal. 35). Senada diungkap oleh Bungin (2007) bahwa *“tujuan menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas sosial yang ada itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu”* (hal. 8).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif akan memberikan penggambaran tentang pelaksanaan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada komunitas Suku Laut pulau Berta-Kota Batam serta situasi dan kondisi masyarakat yang melingkupi sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kebijakan. Selanjutnya akan dideskripsikan dampak yang muncul dari pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam - Kota Batam.

1.5.3. Lokasi dan Jangka waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam. Sebelum dilakukan pemilihan lokasi, penulis terlebih dahulu melakukan observasi baik dengan penelusuran kepustakaan maupun observasi langsung di lapangan. Alasan pemilihan lokasi penelitian diantaranya:

1. Komunitas yang bersangkutan merupakan sasaran dari kebijakan pemberdayaan KAT (perubahan atas nomenklatur sebelumnya yaitu “Masyarakat Terasing”).
2. Terkait dengan PKAT, pulau Bertam-Kota Batam ditetapkan Departemen Sosial sebagai proyek percontohan pembinaan dengan melibatkan peran masyarakat khususnya bagi Komunitas Suku Laut di kota Batam.
3. Kota Batam secara strategis merupakan wilayah perbatasan antara negara Indonesia dengan negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia serta negara Vietnam sehingga keberadaan suku laut di wilayah tersebut menjadi prioritas tersendiri dari program PKAT. Sebagaimana tertuang dalam Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam oleh Direktorat Bina Masyarakat Departemen Sosial (1987) bahwa “Kondisi hidup dan penghidupan Suku Laut yang berada pada lintas pelayaran yang ramai serta berbatasan dengan negara maju, merupakan titik rawan bagi masuknya pengaruh yang dapat merugikan tidak hanya bagi Suku Laut yang bersangkutan tetapi juga bagi keamanan daerah perbatasan tersebut maupun keamanan negara” (hal. 1).
4. Lokasi penelitian dalam hal ini pulau Bertam-Kota Batam merupakan tempat dimana praktikum sebelumnya dilakukan oleh penulis.

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan dari bulan Agustus s/d Desember 2010. Penentuan waktu penelitian dengan mempertimbangkan bahwa waktu yang dimaksud adalah waktu penelitian intensif di lapangan hingga pengolahan data dan analisis data.

1.5.4. Teknik Pemilihan Informan

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif karenanya informan dipilih dengan menggunakan teknik nonprobabilitas (*nonprobability*) sampling. Sebagaimana pendapat Neuman (2006) bahwa “*Qualitatif researchers tend to use nonprobability or nonrandom samples*”. (Peneliti kualitatif cenderung menggunakan nonprobabilitas atau non random sampling) (hal. 220).

Sedangkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengingat waktu Pelaksanaan Program PKAT pada komunitas suku laut di Pulau Bertam-Kota Batam, sesuai dengan subjek yang diambil dalam penelitian kali ini berlangsung antara tahun 1989/1990 s/d 1993/1994 artinya ada jarak waktu kurang lebih 16 tahun dari sekarang sejak program tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan (*terminasi*). Dengan mengingat jarak waktu pelaksanaan program yang cukup lama dengan pelaksanaan penelitian dan guna mendapatkan data dan informasi yang reliabel, jelas dan mendalam maka dalam penelitian kali ini menggunakan metode *snowball* sampling.

Snowball sampling dalam Neuman (2006) “*a nonrandom sample in which the researcher begins with one case, and then based on information about interrelationship from that case, identifies other case, and repeats the process again and again*”. (Bagian dari nonrandom sampling, dimana peneliti memulai dari satu keadaan (*case*), dan berbasis pada informasi tersebut akan dapat teridentifikasi keadaan berikutnya, proses tersebut selanjutnya dilakukan berulang-ulang) (hal 223). Pernyataan senada diungkap oleh Sugiyono (2008) bahwa teknik *nonprobabilitas sampling* adalah teknik pemilihan informan yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih, sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sample (informan) sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama

menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Jaringan yang terbentuk dari beberapa informan yang tergali pada nantinya tergambar dalam sosiogram, lebih lanjut dari Neuman (2006) "*Reseachers represent such a network by drawing a sociogram-a diagram of circles connected with lines. The circles represent each person or case, and the lines represent friendship or other linkages*". (Peneliti mempresentasikan dengan beberapa jaringan yang digambarkan dengan sosiogram, yaitu diagram yang terbentuk dari bulatan-bulatan yang digabungkan dengan garis. Bulatan tersebut representasi dari individu atau kasus, sedangkan garis merepresentasikan hubungan atau link yang lain) (hal. 223).

Informan dipilih dengan terlebih dahulu dikenai syarat atau kriteria tertentu yang melekat pada diri informan sehingga data yang diperoleh nantinya sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Syarat-syarat yang digunakan sebagai standar dalam penentuan Informan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (PKAT).
2. Sasaran program PKAT dalam hal ini Warga komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.
3. Memahami, mengetahui dan mengerti program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) khususnya PKAT pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.

Sesuai dengan kriteria Informan yang telah ditentukan dan guna kebutuhan penelitian maka informan dikategorikan menjadi tiga:

1. Pemerintah.

Dalam hal ini adalah lembaga Departemen sosial, Dinas Sosial Batam, Pemerintah Batam, serta instansi yang terkait dengan program PKAT. Searah dengan Kepmensos RI No. 06/PEGHUK/2002 Bab V Pasal 8 tentang tugas dan wewenang bahwa Pada tingkat nasional tanggung jawab Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil menjadi tugas Departemen Sosial khususnya oleh

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Kemudian dalam Pasal 11 disebutkan Kewenangan daerah Kabupaten sebagai daerah otonom dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dilakukan melalui kegiatan operasional: pemetaan sosial, penjajagan awal, studi kelayakan, penyuluhan, bimbingan dan motivasi serta pemberian bantuan serta perlindungan dengan memperhatikan standart pelayanan minimal. Kategori ini juga mencakup pelaksana/tenaga lapangan (*Community Worker*) atau disebut juga pelaku perubahan (*Change Agent*) yang berfungsi sebagai ujung tombak pelaksana program. Yang dimaksud dengan tenaga lapangan (pendamping) adalah mereka yang melakukan pekerjaan sosial bersama masyarakat baik dari Depsos (Satgasos) maupun dari Instansi terkait.

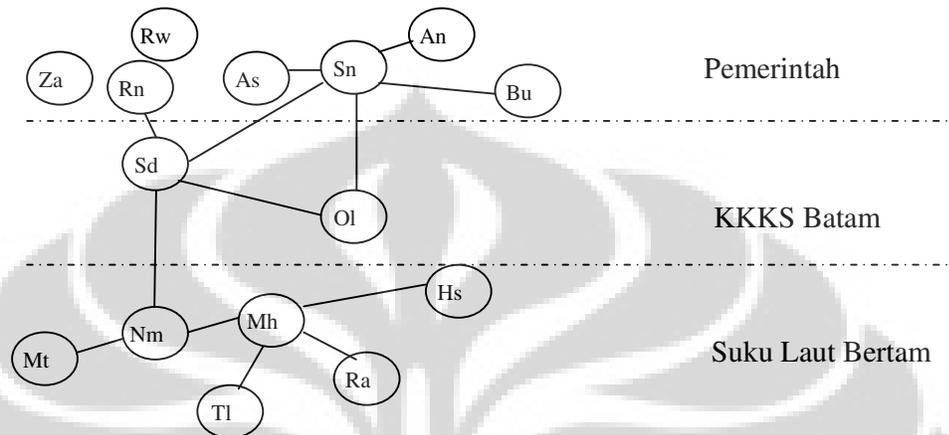
2. Organisasi Sosial.

Yang dimaksud dengan organisasi sosial yaitu organisasi pelayan sosial yang dalam pelaksanaan kegiatannya memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya organisasi yang mempunyai program terkait dengan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam. Dengan mendasarkan pada dokumentasi dan informasi yang penulis dapatkan dengan disesuaikan pada konteks penelitian maka Organisasi Sosial yang dimaksud adalah Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Batam.

3. Masyarakat.

Yang dimaksud dengan masyarakat yaitu komunitas sasaran kebijakan pemberdayaan KAT sesuai dengan penelitian yang diambil, dalam hal ini Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam. Kriteria masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam program PKAT.

Berdasarkan hasil penelitian tergambar diagram sosiogram dengan jaringan yang terbentuk sebagaimana berikut:



Gambar 1.4. Sosiogram Informan Penelitian
(Alur dalam Memperoleh Informasi)

Sumber: Diadaptasi dari Newman, 2006 dan diolah kembali

Informan dalam penelitian ini diawali dengan Kaseksi PKAT dan Penyuluhan Sosial Dinas Sosial Kota Batam (As). Dari Informan (As) kemudian menghubungkan penulis dengan informan (Sn) yang memahami pelaksanaan program PKAT suku laut yang ada di pulau Bertam, dimana pada saat pelaksanaan program beliau merupakan salah satu Satgasos atau *Community Worker* yang mendapatkan tugas penempatan di pulau Bertam oleh Depsos RI sebagai pendamping kegiatan dilapangan dan menetap di pulau Bertam. Dari informan (Sn) selanjutnya penulis mendapatkan informasi baru yang berhubungan dengan penanggung jawab pelaksana program secara operasional yaitu organisasi sosial KKKS Batam dalam hal ini ketua KKKS Batam yaitu informan (Sd), disamping juga informasi yang terkait dengan petugas pelaksana kegiatan yang juga menetap di pulau Bertam yaitu; informan (Bu) merupakan petugas pelaksana (*Community Worker*) yang bertugas sebagai guru agama dari Departemen Agama, dan juga informan (Ol) yang merupakan *Community Worker* yang ditugaskan oleh KKKS Batam. Dari informan (Sn) juga diperoleh tambahan informan yang

relevan dengan fokus penelitian dan mendukung informasi penelitian, yaitu informan (An) yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.

Penggalian data selanjutnya penulis lakukan pada organisasi KKKS Batam dalam hal ini dengan informan (Sd) yang merupakan Ketua KKKS (Sebelumnya bernama FKKS) Batam, dari informan (Sd) juga menyarankan agar penulis menghubungi informan (Ol) dan informan (Sn) yang merupakan petugas pelaksana (*Community Worker*) di lapangan dari KKKS Batam dan Depsos RI sebagaimana telah penulis lakukan. Informan (Sd) selanjutnya menghubungkan penulis dengan informan (Rn) yang merupakan Mantan Staf ahli dari Depsos RI yang ditugaskan pada badan Otorita Batam yang bertugas mendampingi, memberikan arahan terhadap pelaksanaan program serta sebagai penghubung antara Depsos RI dan KKKS Batam. Dari informan (Sd) penulis juga mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penerima manfaat program (*beneficiaries*) yang juga merupakan warga pulau Bertam yaitu informan (Nm).

Berdasarkan informasi diatas, penggalian data berikutnya penulis lakukan dengan informan (Nm). Penggalian data tidak begitu mengalami kendala, disamping disebabkan karena letak pemukiman komunitas suku laut terpusat pada satu lokasi dan merupakan satu-satunya komunitas yang mendiami pulau Bertam sehingga memudahkan penulis dalam berinteraksi juga sikap warga pulau Bertam yang terbuka terhadap orang asing, selain itu mereka menggunakan bahasa Indonesia (Melayu) dalam kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami, disamping karena sebelumnya penulis telah berinteraksi, mengenal, dan tinggal beberapa hari di rumah warga Bertam pada saat kegiatan praktikum. Dari informan (Nm) dan dengan berdasarkan fokus penelitian kemudian diperoleh informan (Mh) yang merupakan Sekretaris RT 20/RW 06 pulau Bertam dan Informan (Mt) yang merupakan Ketua RT 20/RW 06 pulau Bertam. Pertemuan Penulis dengan Informan (Mt) hanya sebatas permohonan ijin untuk melaksanakan penelitian terkait dengan tema penulisan, hal ini disebabkan kondisi

yang bersangkutan yang sedang sakit dan secara fisik sudah sulit untuk diajak berkomunikasi. Penggalan data selanjutnya penulis lanjutkan dengan berdasar pada Informan (Mh) yaitu; informan (Hs) merupakan Mantan Ketua RT dan juga warga pertama yang menetap di pulau Bertam, informan (Ra) yaitu Wakil Ketua RT.20/RW.06 Bertam, dan informan (Tl) yang merupakan tokoh pemuda. Semua informan tersebut juga merupakan penerima manfaat (*beneficiaries*) pada saat program PKAT pada komunitas suku laut sedang dilaksanakan.

Guna mendukung data penelitian, penulis juga menghubungi informan (Za) yang merupakan Sekretaris Kelurahan Kasu, sebagaimana diketahui bahwa secara administratif pulau Bertam merupakan bagian dari Kelurahan Kasu. Disamping itu penggalan informasi juga penulis lakukan pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Departemen Sosial yaitu dengan informan (Rw) guna mengetahui lebih dalam tentang program PKAT hingga pada saat penelitian berlangsung.

Untuk memperjelas informan penelitian, berikut adalah daftar keseluruhan informan penelitian dan jenis informasi yang diperoleh sebagaimana terlihat dalam tabel 1.4. dibawah ini:

Tabel 1.4. Jenis Informasi dan Informan Penelitian

No	Informasi yang ingin diperoleh	Informan		Jmh
		Kelompok	Kedudukan/Kode Informan	
1.	Pelaksanaan Program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam	Pemerintah	Kasie Pemberdayaan SDM KAT, Direktorat PKAT-Depsos RI (Rw)	1
			Mantan Staf ahli Depsos RI Wilayah Kota Batam (Rn)	1
			Mantan Satgasos BMT sekaligus sebagai Kasub perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam (Sn)	1
2.	Faktor pendukung dan penghambat program PKAT pada	Organisasi Sosial	Pendamping dari Departemen Agama Kota Batam (Bu)	1
			KKKS Batam - Ketua (Sd) - Pendamping (Ol)	2

	komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam	Masyarakat - Wakil Ketua RT (Ra) - Sekretaris RT (Mh) - Mantan Ketua RT (Hs) - Warga (Nm) - Warga (Tl)	5
3.	Dampak yang terjadi setelah implementasi program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam	Pemerintah	Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam - Kaseksi PKAT & Penyuluhan Sosial (As)
		Pemerintah Kota Batam - Kabid Pemberdayaan Masy. (An) - Seklur Kasu (Za)	2

Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010.

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian kali ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui :

1. Kajian kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang akan berguna dalam memberikan wawasan dan pemahaman dasar kerangka pemikiran ataupun definisi konseptual serta pendapat para pakar, baik diambil dari: buku, jurnal, bahan elektronik dan lain sebagainya, khususnya tentang pembangunan sosial, kebijakan pembangunan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta komunitas adat terpencil, selain itu juga dilakukan telaah dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian, berupa: peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksana, dokumen, laporan dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.
2. Wawancara mendalam. Dilakukan secara langsung dengan bercakap-cakap, bertatap muka dalam suasana santai dan memberi keleluasan kepada informan untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalamannya tentang pelaksanaan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada Komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam. Dengan alat bantu pedoman wawancara semi terstruktur diharapkan wawancara dapat dilakukan secara bebas, mendalam dan bersifat tidak terbatas atau berujung terbuka dimana jawaban tidak hanya terbatas pada satu tanggapan. Serta alat bantu *tape*

recorder yang berfungsi sebagai alat perekam dari kegiatan wawancara yang tengah berlangsung sehingga diperoleh keakuratan transkrip hasil wawancara.

3. Observasi. Observasi dilakukan, baik terhadap individu dalam hal ini informan, dalam komunitas terhadap implementasi kebijakan PKAT, interaksi antar komunitas dan komunitas lain, kondisi alam dan potensi setempat, serta kegiatan-kegiatan lain yang relevan dengan penelitian.
4. Guna mendukung data yang telah ada, juga digunakan alat bantu kamera. Dengan alat bantu kamera akan tergambar dengan jelas situasi dan kondisi daerah penelitian yang tercetak melalui foto-foto yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

1.5.6. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data mentah, dilakukan melalui kajian dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, wawancara dengan informan dan observasi lapangan. Pada tahap ini dilakukan pencatatan-pencatatan secara apa adanya, baik melalui tulisan, recorder maupun kamera. Hasil yang diharapkan dari pengumpulan data mentah ini berupa: catatan hasil wawancara dan observasi, kaset rekaman sebagai hasil perekaman melalui recorder, dan foto yang diambil melalui camera.
- b. Transkrip data, data mentah yang berhasil diperoleh kemudian dirubah ke dalam bentuk tertulis baik yang berasal dari catatan tulisan tangan maupun melalui *tape recorder*. Begitu juga dengan hasil foto yang berasal dari kamera dituliskan isi obyek yang terekam oleh kamera tersebut. Kesemua transkrip data tersebut ditulis seperti apa adanya, dan dilakukan segera setelah wawancara dan observasi dilakukan.
- c. Pembuatan koding. Tahap ini merupakan kegiatan membaca secara hati-hati dan teliti seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip yang dilakukan diupayakan untuk menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut kemudian

diambil kata kunci yang kemudian akan diberi kode. Beberapa diantaranya, kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pelaksanaan (*implementasi*) program, pemberdayaan, partisipasi, pendampingan, kebiasaan, norma, perilaku, interaksi, dampak personal/ spiritual, ekonomi, lingkungan, budaya, dan sosial politik.

- d. Kategori data, pada tahap ini mulai dilakukan penyederhanaan data dengan cara mengikat konsep-konsep kunci dalam kategori. Kategori yang digunakan sebagai satu besaran utama dikelompokkan dalam: pelaksanaan (*Implementasi*), faktor pendukung dan penghambat, dan dampak program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada Komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam.
- e. Penyimpulan sementara, dengan berdasarkan pada data yang ada, baik data yang berasal dari wawancara, observasi maupun telah dokumen. Penyimpulan sementara dilakukan setelah membaca dan menelaah secara berulang dan mendalam, dan untuk memudahkan penyimpulan tersebut dilakukan dengan membuat matrik gambar hasil penelitian sementara.
- f. Trianggulasi, tahap ini adalah kegiatan untuk *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Trianggulasi yang dilakukan, baik dalam hal sumber data, metode maupun teori. Trianggulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. Sesuai dengan tujuan penelitian trianggulasi dilakukan kepada: komunitas sasaran, pelaksana program di lapangan (*Community Worker*), aparat pemerintah daerah, aparat Departemen Sosial RI, aparat Dinas Sosial Kota Batam, aparat dari instansi yang terkait dengan program dalam hal ini petugas pendamping dari Departemen Agama, Lembaga non pemerintah dalam hal ini petugas dari KKKS Batam dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Sedangkan untuk trianggulasi dengan metode dilakukan dengan cara: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan

data hasil penelitian melalui ketiga teknik pengumpulan data yaitu kajian literatur dan dokumentasi, observasi dan wawancara; serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dari berbagai informan, data dokumen, dan hasil observasi serta foto dengan metode yang sama. Triangulasi teori dilakukan dengan mencari keterkaitan data dengan teori. Konsep yang dijadikan rujukan diantaranya: Komunitas Adat Terpencil (KAT), pelaksanaan (*Implementasi*) program pemberdayaan, dan Kesejahteraan Sosial.

- g. Penyimpulan akhir, langkah ini dilakukan karena data telah dianggap sudah jenuh, dimana ketika dilakukan penambahan data baru justru akan membuat tumpangtindih data. Terakhir berbagai data dan temuan, dikaji kembali secara berulang dan diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga akhirnya sampai pada kesimpulan akhir.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri atas 6 (enam) Bab yaitu; Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Deskripsi Lokasi Penelitian, Temuan lapangan, Pembahasan Hasil, dan Kesimpulan dan Saran. Secara detail dari masing-masing Bab dapat diperinci sebagai berikut:

- Pada Bab 1, dibahas tentang latar belakang yang berisi; gambaran umum kondisi komunitas adat terpencil, pemberdayaan yang telah dilaksanakan dengan menyertakan kondisi penghambat dan pendukung pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga diuraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Disamping itu juga diuraikan penggunaan metode penelitian yang didalamnya mencakup pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, gambaran teknik pemilihan informan, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data dalam membahas hasil temuan lapangan, serta sistematika penulisan penelitian.
- Pada Bab 2, dibahas tentang; konsep, pendapat para pakar, ahli dan praktisi kebijakan secara khusus pada program, baik melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun sumber lainnya yang berkenaan dengan Komunitas Adat (*indigenous People*), pelaksanaan (*implementasi*) program

pemberdayaan, serta konsep tentang Kesejahteraan Sosial. Dan pada bagian akhir bab ini digambarkan sistematika model penelitian yang menggambarkan alur penelitian yang dilakukan.

- Dari Bab 3 terdeskripsikan tentang gambaran umum lokasi penelitian pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam dan gambaran umum pelaksanaan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada komunitas yang bersangkutan serta Profil Lembaga Pelaksana Program dalam hal ini Organisasi FKKS (Saat ini berganti nama menjadi KKKS) Batam.
- Bab 4 yaitu Temuan Lapangan. Pada Bab ini berisi uraian pelaksanaan, faktor-faktor pendukung dan penghambat serta dampak pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.
- Bab 5 yaitu Pembahasan, diulas analisa penelitian dengan mengkaitkan konsep, pendapat ahli dengan pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambat, dan dampak pelaksanaan program PKAT pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam- Kota Batam.
- Bab 6 yaitu Kesimpulan dan Saran. Pada kesimpulan diuraikan secara singkat tentang pelaksanaan, faktor pendukung/ penghambat serta dampak pelaksanaan PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam. Dengan simpulan tersebut kemudian direkomendasikan perbaikan pelaksanaan program Pemberdayaan pada Komunitas dimana penelitian dilaksanakan yang bertujuan guna perbaikan program terkait yang akan datang.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

DAN MODEL OPERASIONAL PENELITIAN

Teori dan konsep bagi sebuah penelitian digunakan sebagai alat analisis yang berfungsi sebagai landasan logika berfikir sehingga hasil penelitian dapat searah dengan kajian penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu guna memperdalam dan memperjelas kajian penelitian kali ini dalam hal Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam maka penulis menggunakan teori dan konsep yang berhubungan dengan; Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pelaksanaan (*Implementasi*) Program Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Sosial. Kemudian diakhir subbab penulis juga akan menguraikan Model Operasionalisasi penelitian sehingga nantinya dapat tergambar dengan jelas alur dari penelitian ini.

2.1. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Dari beberapa penelusuran pustaka, penulis menemukan terdapat beberapa istilah yang semakna sebagai penyebutan Komunitas Adat diantaranya; *Indigenous People*, Suku Asli (*tribals*), pribumi (*natives*), Orang Asli (*aborigines*), kaum minoritas (*minorities*), orang gunung (*highlanders*), orang laut (*hinterland*) dan orang hutan (*forest people*). Penggunaan istilah *Indigenous People* dengan mengacu pada penggunaan istilah formal dari UN *Economic and Social Council Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* dalam IUCN (1997) bahwa:

Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that have developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present nondominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems. (komunitas,

orang, warga pribumi adalah mereka yang mempunyai keterkaitan sejarah (*historical continuity*) dengan masa sebelum invasi dan kolonialisme yang telah dikembangkan di wilayah mereka, serta secara umum memiliki perbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lain di sekitarnya, atau merupakan bagian dari mereka. Mereka membentuk sektor-sektor tidak dominan masyarakat dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan identitas etnik dari para leluhur kepada generasi mendatang, dan sebagai dasar keberlanjutan akan keberadaan mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya, lembaga adat dan sistem hukum mereka sendiri) (hal. 27).

Penerjemahan *indigenous people* ke dalam bahasa Indonesia bukan hanya persoalan linguistik. Beberapa kalangan yang terlibat dalam perdebatan mengenai wacana masyarakat adat mempunyai kerangka konseptual yang juga berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah tersebut. Sebagaimana diungkap oleh Hikmat (2008) bahwa:

Oleh sebagian kalangan, misalnya istilah "*indigenous people*" diterjemahkan menjadi "orang-orang pribumi asli", sementara yang lain menerjemahkannya menjadi "suku terasing". Istilah pertama digugat karena secara konseptual sulit sekali menentukan siapa orang Indonesia yang benar-benar asli. Sementara istilah kedua, tampak sekali merupakan penamaan pihak luar terhadap sebuah kelompok tertentu yang berkonotasi merendahkan, baik dalam pengertian geografis maupun psikologis (Muzzakir, Amin dalam TIFA, 2009, hal. 76-77).

Istilah lain atas penyebutan KAT oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai organisasi sosial yang didirikan pada tahun 1999 atas prakarsa beberapa pimpinan adat, aktivis, dan akademisi menyebutnya sebagai Masyarakat Adat. Masyarakat adat sebagaimana hasil dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara bulan Maret 1999 adalah "Sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat" (*Siapa Masyarakat*, 1999)

Dari beberapa istilah dan berdasarkan beberapa masukan baik dari pakar, LSM dan pemerintah daerah kemudian ditetapkan penggunaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai penyebutan atas “*indigenous people*” dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 111/1999 sebagaimana tertuang dalam Sejarah Perkembangan Komunitas Adat Terpencil oleh Direktorat PKAT Depsos RI (2003) sebagai berikut:

Dalam perkembangan lebih lanjut istilah masyarakat terasing banyak dikritik oleh para pakar, LSM dan pemerintah daerah, karena ada kesan seolah-olah merendahkan suku-suku tertentu, dengan demikian istilah tersebut ditinjau kembali. LSM AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pernah menyelenggarakan seminar Masyarakat Adat pada bulan Maret 1999 yang merekomendasikan bahwa istilah masyarakat terasing kurang sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM)... Melalui rapat pembahasan dengan sekretaris Negara disetujuiilah menjadi Keputusan Presiden Nomor 111/1999 (hal.26-27).

Penggunaan nomenklatur KAT sendiri oleh Departemen sosial mengalami beberapa kali perubahan (dapat dilihat lebih lengkap dalam Lampiran 2). Perubahan Nomenklatur (tatanama) KAT, pada awalnya menggunakan tatanama “Suku Terasing” kemudian berubah menjadi “Masyarakat Terasing” dan sekarang disebut dengan istilah “Komunitas Adat terpencil (KAT)” (Asep Sasana Purnama, Baladbangsos seri IT-02, hal. 61-62). Hingga sampai pada kesimpulan untuk menggunakan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana tercantum dalam Kepres RI No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial KAT, Pasal 1 angka (3), dengan mendefinisikan KAT sebagai “Kelompok Sosial Budaya yang bersifat lokal dan terpecar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik”.

Dengan karakteristik Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana tercantum dalam Kep. Mensos No. 06/PENGHUK/2002 Pasal 1 ayat (4) adalah sebagai berikut;

- a. Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen. Komunitas Adat Terpencil umumnya hidup dalam kelompok kecil dengan tingkat

komunikasi yang terbatas dengan pihak luar. Disamping itu kelompok komunitas adat terpencil hidup dalam satu kesatuan suku yang sama dan bersifat tertutup.

- b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan. Pranata sosial yang ada dan berkembang dalam komunitas adat terpencil pada umumnya bertumpu pada hubungan kekerabatan dimana kegiatan mereka sehari-hari masih didasarkan pada hubungan ikatan tali darah dan perkawinan. Pranata sosial yang ada tersebut meliputi antara lain pranata ekonomi, pranata kesehatan, pranata hukum, pranata agama, pranata kepercayaan, pranata politik, pranata pendidikan, pranata ilmu pengetahuan, pranata ruang waktu, pranata hubungan sosial, pranata kekerabatan, pranata system organisasi sosial.
- c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau. Secara geografis komunitas adat terpencil umumnya berada didaerah pedalaman, hutan, pegunungan, perbukitan, laut, rawa, daerah pantai, yang sulit dijangkau. Kesulitan ini diperkuat oleh terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, baik ke ataupun dari kantong komunitas adat terpencil. Kondisi ini mempengaruhi dan menghambat upaya pemerintah dan pihak luar dalam memberikan pelayanan pembangunan secara efektif dan terpadu.
- d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten. Aktivitas kegiatan ekonomi warga komunitas adat terpencil sehari-hari hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (kebutuhan sehari-hari)
- e. Peralatan dan Teknologinya sederhana. Dalam upaya memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik dalam kegiatan pertanian, berburu maupun kegiatan lainnya. Komunitas adat terpencil masih menggunakan peralatan yang sederhana yang diwariskan secara turun temurun.
- f. Ketergantungan kepada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi. Kehidupan komunitas adat terpencil sangat menggantungkan kehidupan kesehariannya baik itu fisik, mental dan spiritual pada

lingkungan alam seperti umumnya aktivitas keseharian warga berorientasi pada kondisi alam atau berbagai kejadian dan gejala alam.

- g. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik. Sebagai konsekuensi logis dari keterpencilan, akses berbagai pelayanan sosial ekonomi dan politik yang tersedia dilokasi atau disekitar lokasi tidak ada atau sangat terbatas sehingga menyebabkan sulitnya warga komunitas adat terpencil untuk memperolehnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi oleh Komunitas Adat Terpencil maka diperlukan adanya identifikasi akan permasalahan sosial dan kebutuhan dari KAT, hal ini diperlukan agar memberikan kemudahan untuk memetakan, mendiskripsikan dan menganalisa kondisi KAT.

Tabel 2.1. Identifikasi Kondisi KAT

No.	Kondisi Aspek	Permasalahan	Kebutuhan	Potensi
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan tetap • Kepemilikan alat-alat rumah tangga dasar 	Mata Pencaharian tetap/produksi yang berdaya saing	SDA, Organisasi adat, nilai, kearifan lokal
2.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Anak tidak sekolah • Angka kesakitan dan kematian tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan anak • Perawatan Kesehatan keluarga 	SDA, Organisasi adat, nilai, kearifan lokal
3.	Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi sangat sederhana • Ancaman terhadap Identitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan teknologi tepat guna • Pemeliharaan identitas 	SDA, Organisasi adat, nilai, kearifan lokal
4.	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi rendah dalam kegiatan politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi sosial 	Organisasi adat
5.	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Rentan terhadap eksploitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan Advokasi sosial 	Organisasi adat

Sumber: Diadaptasi dari Suradi dalam Sikat 2006

Sedangkan jika ditinjau dari habitat bermukim KAT dibedakan atas empat kategori, berdasarkan pada Kepmensos RI No. 06/PENGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan KAT: 1. Komunitas adat yang tertinggal

didataran tinggi dan/ atau daerah pegunungan. 2. Komunitas adat yang tertinggal di daerah dataran rendah dan/atau daerah rawa. 3. Komunitas adat yang tertinggal di daerah pedalaman dan/atau daerah perbatasan. 4. Komunitas adat yang tertinggal di atas perahu dan/atau daerah pinggir pantai.

Berdasarkan karakteristik yang muncul kemudian Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI (2004) mengelompokkan komunitas tersebut berdasarkan pada kondisi obyektif komunitas adat terpencil, baik dari aspek karakteristik, tempat tinggal atau habitatnya dan sistem mata pencahariannya dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

1. Kategori I (kelana), merupakan komunitas adat terpencil yang masih hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, belum mengenal teknologi dengan penggunaan alat kerja yang terbatas di lingkungan mereka semata yang diperoleh secara turun temurun, hidup masih terpencar dan berpindah dalam jumlah yang masih sangat kecil, belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar dari komunitas mereka, komunikasi yang hanya dapat diketahui oleh kelompok/etnis mereka sendiri;
2. Kategori II (menetap sementara), merupakan komunitas adat terpencil yang masih hidup berpindah menetap dalam kondisi yang sangat sederhana, dengan menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana yang didapat dari luar komunitas mereka, hidup masih terpencar dan berpindah dalam jumlah kecil dalam orbitasi tertentu, sudah ada kontak (interaksi) dengan dunia luar dari komunitas mereka, mulai mengenal bercocok tanam.
3. Kategori III (menetap), merupakan komunitas adat terpencil yang mulai menetap di tempat tertentu dan untuk kehidupan keseharian sudah ada kontak/interaksi dengan warga lainnya di luar komunitas mereka, berkelompok dalam jumlah lebih besar, sudah mengenal teknologi sederhana yang diperoleh dari luar komunitas mereka, mulai mengenal sistem bercocok tanam dengan bibit yang didapat/dicari sendiri dari lingkungan serta mulai melemahnya peran tokoh adat dalam kehidupan kemasyarakatan (hal. 16-17).

2.2. Pelaksanaan (*Implementasi*) Program Pemberdayaan.

Secara politis, pembahasan pemberdayaan sebagai bagian dari strategi program pembangunan sosial menjadi pembahasan hangat pada aras internasioanal dengan prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) pada tahun 1995 dalam *World Summit for Social Development* di kopenhagen-Denmark, Hikmat (2006). Konferensi tersebut melahirkan kesepakatan bahwa “perlu nya perhatian masyarakat internasional yang lebih besar pada usaha-usaha penanggulangan ketidakadilan sosial, disintegrasi sosial, dan kemiskinan dalam sistem pembangunan sosial. Selanjutnya sejak tahun 1999 komisi *Human Resources Developmnet* dari *Economic and Social Comission for Asia and Pasific* (ESCAP) merekomendasikan pentingnya strategi pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (*participatory community empowerment*) dalam melaksanakan agenda pembangunan.

Pernyataan diatas memberikan indikasi bahwa konsep pemberdayaan masuk dalam agenda-agenda pembangunan khususnya pembangunan sosial sebagai strategi intervensi yang dirumuskan dalam sebuah paket kebijakan, Suharto (2008) menyatakan bahwa “sebagai sebuah kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial, kebijakan sosial menunjuk pada seperangkat kewajiban negara (*state obligation*) untuk melindungi dan memberikan pelayanan dasar terhadap warganya. Pemenuhan kebutuhan hidup minimum, pendidikan wajib, perawatan kesehatan dasar, dan perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan” (hal.x). Selanjutnya Nugroho D. (2006) berpendapat bahwa “kebijakan publik yang terbaik adalah mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saing masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskannya ke dalam pola ketergantungan” (hal. 22).

Agenda pembahasan KAT oleh pemerintah mulai digulirkan sejak tahun 1976 melalui program Pembinaan Kesejahteraan Suku Terasing, kemudian berubah menjadi Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing, selanjutnya menjadi Program Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Adat terpencil, dengan dikeluarkan Kepmensos RI No. 06/PENGHUK/2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil maka program tersebut dirubah menjadi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Sebagaimana tertuang dalam Sejarah Perkembangan Komunitas Adat Terpencil oleh Direktorat PKAT (2003):

Apabila dimasa lalu pembinaan bersifat *top down* maka pembinaan KAT lebih bersifat pemberdayaan, dimana KAT dilihat sebagai subjek dan pihak luar melalui peran sertanya dengan menitik beratkan upaya mereka agar KAT sendiri lebih mampu menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka (hal. 50).

Kausul tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan PKAT lebih mengedepankan konsep pemberdayaan yang berarti bahwa aspirasi, inisiatif, dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi. Yang tentu saja sesuai dengan visi program PKAT sendiri yaitu Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil yang mandiri didalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan. (Kepmensos RI No. 06/PENGHUK/2002, Bab II pasal 3, hal. 18).

Kembali pada konsep pelaksanaan program pemberdayaan secara khusus Soetomo (2011) mengemukakan bahwa:

Operasionalisasi dari konsep pemberdayaan pada umumnya lebih difokuskan pada level komunitas. Hal itu disebabkan karena komunitas dianggap sebagai basis kehidupan masyarakat, dengan demikian apabila proses pembangunan harus dimulai dari bawah, maka awalnya harus berangkat dari kehidupan paling dasar ini. Disamping itu juga didasarkan pada asumsi, bahwa masyarakat pada tingkat komunitas sebagai basis kehidupanlah yang paling mengetahui persoalan dan kebutuhan yang paling aktual... Pertimbangan lain adalah, bahwa dalam proses pembangunan yang menggunakan paradigma dan perspektif sebelumnya yang bersifat sentralistis, *top-down* dan berorientasi keseragaman, masyarakat terbawah pada tingkat komunitas inilah yang paling termarginalisasi, sehingga apabila harus dilakukan pemberdayaan maka prioritas harus diberikan mereka. oleh sebab itu, dalam level yang lebih

operasional, proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya menggunakan pendekatan *community based development*, artinya adalah bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan berbasis komunitas (hal. 95-96).

Dari pendapat diatas menunjukkan bahwa dalam implementasi konsep pemberdayaan secara operasional mendasarkan pada pendekatan *Community Development* atau pengembangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam pemberdayaan lebih berorientasi pada partisipasi masyarakat yang artinya bahwa proses pembangunan harus dimulai dari bawah atau pembangunan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat, karena komunitas sebagai basis kehidupan masyarakat adalah yang paling mengetahui persoalan dan kebutuhan aktual yang diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam pembahasan kali ini akan dibagi atas beberapa konsep yang mengulas tentang; Pelaksanaan (*Implementasi*) Program, Konsep Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat (*Community Development*), serta Pelaku Perubahan (*Community Worker*).

2.2.1. Pelaksanaan (*Implementasi*) Program.

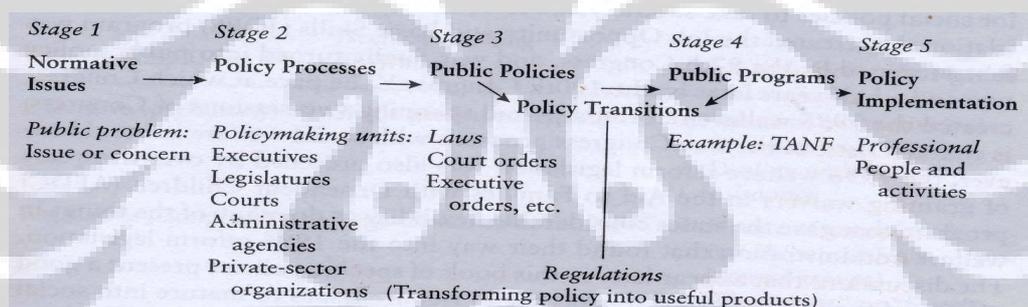
Guna memperjelas pemahaman tentang Pelaksanaan Program, dalam kajian ini akan dibagi atas beberapa bahasan, yaitu: Konsep Pelaksanaan (*Implementasi*) Program, dan Pendekatan dalam Pelaksanaan (*Implementasi*) Program.

2.2.1.1. Konsep Pelaksanaan (*Implementasi*) Program.

Mazmanian dan Sabatier (1983) sebagaimana dikutip oleh deLeon dan deLeon (2001) mendefinisikan Implementasi sebagai “*implementation is the carrying out of basic policy decision...the ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and, in a variety of ways, “structures” the implementation process*” (implementasi adalah upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan... Idealnya, keputusan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menetapkan tujuan-tujuan yang akan diraih, dan dengan berbagai cara, sebagai “kerangka (*structure*)” proses pelaksanaan) (Nugroho D, 2006, hal. 119). Studi implementasi menurut Jenkins (1978) adalah “studi perubahan:

bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan” (Parsons, 2008, hal. 463).

Implementasi merupakan hasil akhir dari proses kebijakan dimana program ditetapkan, Dobelstein (2003) menyatakan: *The final product of the policy process is usually a program or commitment that directs the accomplishment or fulfillment of the policy in the particular way... policy implementation usually takes place within an organizational context, such as... a department of social services. Profesional people execute the policy through program.* (Produk akhir dari proses kebijakan biasanya adalah sebuah program atau komitmen yang mengarahkan pada pencapaian atau pemenuhan kebijakan dengan cara tertentu... pelaksanaan kebijakan biasanya terjadi dalam konteks organisasi, seperti oleh departemen pelayanan sosial... Para Profesional melaksanakan kebijakan tersebut melalui program)(hal. 50).



Gambar 2.1. Alur Proses Kebijakan
Sumber: Diadaptasi dari Dobelstein (2003, hal. 33).

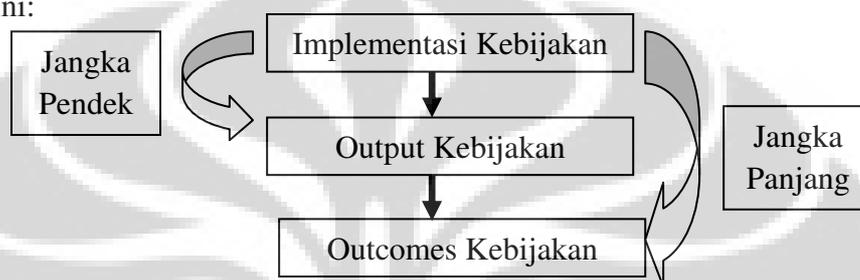
Suharto dalam bukunya yang membahas tentang kebijakan menyatakan bahwa implementasi (2005) dikatakan sebagai “mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program (*program proposals*) atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program” (hal. 80). Demikian juga Indiahono (2009) yang mendefinisikan implementasi:

menunjuk pada aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik dilakukan oleh pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Pada tahap ini akan dilihat apakah kebijakan aplikabel dilapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang diharapkan. *Output* sendiri adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul

Universitas Indonesia

sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Sedangkan *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam jangka waktu yang lama pasca *implementasi* kebijakan (hal. 143).

Dimensi waktu *output* dan *outcomes* dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 2.2. Dimensi waktu output dan outcomes Kebijakan

Sumber: Diadaptasi dari Indiahono (2009, hal. 143)

Dari penelusuran kajian yang ada sehingga implementasi dari sebuah kebijakan adalah upaya untuk melaksanakan kebijakan melalui program, baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh organisasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program hingga nantinya dapat diketahui *output* (hasil) serta *outcomes* (dampak) yang ditimbulkan dari implementasi.

2.2.1.2. Pendekatan Pelaksanaan (*Implementasi*) Program

Pendekatan Implementasi secara garis besar terbagi atas tiga paradigma yaitu pendekatan *top-down*, *bottom-up*, dan pendekatan *gabungan antara top-down dan bottom-up* dengan masing-masing pendekatan dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

1. Pendekatan Sistem Rasional Top Down (*top-downer perspective*)

Pressman dan Wilavsky (1973) mengungkapkan bahwa “Model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan, dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. Implementasi adalah soal pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan oleh

Universitas Indonesia

kebijakan” (Parsons, 2008, hal. 468). Sebagaimana diungkapkan oleh Kusumanegara (2010) bahwa:

pendekatan *top-down* memulai analisisnya dengan pembuatan keputusan yang dibuat oleh aparat pemerintah pusat... mereka mengidentifikasi enam variabel yang menghubungkan kebijakan dengan performanya yaitu; 1. Standart dan tujuan kebijakan. 2. Sumberdaya kebijakan (uang dan insentif lainnya). 3. Komunikasi dan aktifitas pelaksanaan antar organisasi. 4. Karakteristik agen pelaksana (ukuran staff, derajat kontrol hirarkis, vitalitas organisasi). 5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi (sumber-sumber ekonomi di dalam yurisdiksi implementasi, opini publik, dukungan kelompok kepentingan), dan 6. Sikap para pelaksana. Kemudian Nugroho (2006) menyatakan bahwa dalam perspektif *top-down* ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik (hal. 112).

Parsons (2008) selanjutnya mengatakan bahwa pendekatan ini sengaja mengesampingkan segala hal yang berhubungan dengan cinta, benci, cemburu, dan faktor motivasional. Fermana (2009) memberikan konklusi bahwa dalam relasi sosial yang koersif yang membahas tentang siapa objek keputusan, paradigam *top-down* gagal menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat karena keputusannya yang bersifat tirani dan elitis. Pendapat senada diungkapkan oleh Parsons (2008) yang menyatakan bahwa:

model rasional pada dasarnya adalah sebuah teori preskriptif... Penekanan terlalu banyak dikenakan pada definisi tujuan yang ditentukan dari atas, bukan pada peran pekerja di lapangan. Model ini banyak mengasumsikan tentang definisi tujuan dan interaksi manusia dan perilaku... mengesampingkan pertimbangan tentang seberapa riilkah orang berperilaku secara aktual, dan lebih berusaha memahami hubungan logis antara input, proses, dan output (hal. 468-469).

2. Pendekatan *Bottom-Up*

Model bottom-Up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus... model *bottom-up* menekankan pada fakta bahwa implementasi “di lapangan” memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Para profesional punya peran penting dalam menjamin pelaksanaan sebuah kebijakan... tentu saja ini, ini menimbulkan analisis dan preskripsi (Parsons, 2008, hal. 471). Searah pendapat Kusumanegara (2010) bahwa:

penganut pendekatan *bottom-up* berpandangan bahwa cara yang baik adalah mengidentifikasi para aktor yang terlibat dalam implementasi di tingkat terbawah (para pelayan masyarakat)... dengan demikian pendekatan *bottom-up* mengabaikan kontrol dari pembuat keputusan di pusat, dan cenderung pada pandangan bahwa kebijakan ditentukan oleh tawar-menawar (secara eksplisit maupun implisit) diantara para anggota organisasi dan para kliennya... dengan kata lain kebijakan harus terdesentralisasi (hal. 116).

Nugroho (2006) juga menyatakan hal sama bahwa dalam pendekatan ini variabel perilaku dari aktor pelaksana implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan kebijakan. Dengan demikian melalui pendekatan ini implementasi dapat dilihat sebagai interaksi antar berbagai organisasi sebagaimana Hjern dan Porter (1981) yang mengungkapkan bahwa: “pendekatan *bottom-up* program dapat dilihat sebagai sesuatu yang diimplementasikan dalam “kumpulan organisasi”. Seharusnya, suatu kebijakan publik yang menganut model demokrasi dirumuskan dari bawah *bottom up*” (Parsons, 2008, hal. 486). Juga dengan “melibatkan masyarakat sebagai stakeholder berinteraksi secara humanis” (Fermana, 2009, hal. 47). Pendapat yang sama diungkap Parsons (2008) yang menyatakan bahwa “model *bottom-up* adalah sebuah proses pembuatan kebijakan dan (kemungkinan) pemberdayaan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai target dari keputusan” (hal. 489).

3. Pendekatan *Top-down* dan *Bottom-Up* (*Hybrid*)

Nugroho (2009) Mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas *top-down* dan *bottom-up*. Senada dengan pendapat tersebut Kusumanegara (2010) berpendapat bahwa:

tidak ada satu jenis eksplanasi dalam studi implementasi. Di satu pihak pasti ada tekanan dari pembuat keputusan nasional untuk menetapkan berbagai ketentuan implementasi. Tetapi secara bersamaan juga ada respon aktor-aktor lokal dan non negara terhadap tekanan negara tersebut. Dalam hal ini implementasi merupakan arena konsensus preferensi aktor negara dan non negara (hal. 119).

Kemudian Mazmanian dan Sabatier (1979) dengan karyanya yang mendukung sintesis gagasan teorisasi *top-down* dan *bottom-up* dengan mengemukakan bahwa:

enam syarat yang mencukupi dan mesti ada untuk implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan yang telah dinyatakan secara legal, yaitu: 1. Tujuan yang jelas dan konsisten, 2. Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan, 3. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan, 4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan, 5. Perubahan dalam kondisi sosio-ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan (Parsons, 2008, hal. 488).

Penggunaan paradigma implementasi kebijakan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan kebijakan, Elmore (1978) mengatakan bahwa :

suatu variasi kerangka perlu digunakan dalam analisis dan implementasi: “pemetaan mundur” (*bottom-up*) dan “pemetaan maju” (*Top-Down*); dan bahwa pembuatan kebijakan, agar efektif dalam implementasinya, harus mengadopsi banyak kerangka. Aplikasinya dalam studi proses kebijakan

berarti bahwa analisis tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasilkan sintesis tetapi agar lebih sensitif terhadap kerangka (nilai, realitas, dan penilaian tindakan) dari teorisasi, elite kebijakan, dan mereka yang berada di “tingkat lapangan” (Parsons, 2008, hal. 490).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nugroho (2006) yang mengemukakan bahwa penggunaan jenis kebijakan publik akan memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan. Kebijakan yang bersifat *top-downer* biasanya menyangkut kebijakan-kebijakan yang bersifat sangat strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara, sedangkan kebijakan *bottom-upper* biasanya berkenaan dengan hal-hal yang tidak secara langsung dengan *national security*. Pilihan kebijakan yang efektif dapat berbentuk kombinasi implementasi kebijakan publik yang partisipatif, artinya bersifat *top-downer* dan *bottom-upper*.

2.2.2. Pemberdayaan.

2.2.2.1. Konsep Pemberdayaan

Payne (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah “*to help client gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to client*” (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya) (Adi, 2008, hal. 77-78).

Sedangkan menurut Shardlow (1998) mengemukakan pemberdayaan sebagai “gagasan yang memiliki kesamaan dengan prinsip “*Self-Determination*” “yaitu mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga klien memiliki kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depan” (Adi, 2008, hal. 78). Ife dan Tesoriero (2008) menyatakan bahwa “pemberdayaan bertujuan

meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*)” (hal. 130). Secara formal definisi pemberdayaan dalam Kepres RI No. 111 Tahun 1999, Pasal 1 angka (1), mengandung arti adanya “pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan sendiri nasib dan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya”.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah melalui UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada pasal (1) angka 10 mendefinisikan “Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya” (*Undang-Undang, 2009*).

Dari beberapa konsep pemberdayaan bahwa pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya memberikan kemampuan, pengetahuan, keterampilan pada masyarakat dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber sehingga masyarakat mempunyai daya atau mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri (*Self Determination*) guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, untuk kemudian secara bertahap masyarakat juga didorong meningkatkan kapasitas dirinya untuk mengambil peran sejajar dengan mereka yang lebih berdaya. Upaya yang dilakukan tanpa pemaksaan kehendak, bukan proses yang dipaksakan tetapi lebih pada kesadaran dengan menggali prakarsa aktif, inisiatif, partisipasi masyarakat.

2.2.2.2. Pemberdayaan sebagai Proses

Upaya pemberdayaan masyarakat menurut Adi (2008) dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun suatu proses:

Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Sementara pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (*on going process*) yang juga berlaku dalam suatu masyarakat, dimana dalam suatu

komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri (hal. 83-85).

Hal yang sama diungkap oleh Suharto dalam bukunya mengenai pemberdayaan (2005) bahwa :

pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah sedangkan sebagai tujuan pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupan (hal. 59-60).

Pembahasan pemberdayaan masyarakat sebagai program dan sebagai proses yang berkelanjutan sebenarnya merupakan pemikiran yang juga terkait dengan posisi agen pemberdaya masyarakat. Adi (2008) menyatakan bahwa: “Bila si agen pemberdaya masyarakat merupakan pihak eksternal (dari luar komunitas), program pemberdayaan masyarakat akan diikuti dengan adanya terminasi atau *disengagement*, sedangkan bila agen pemberdaya masyarakat berasal dari internal komunitas, pemberdayaan masyarakat akan dapat lebih diarahkan ke proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan (*on going process*)” (hal. 88).

Kausul diatas bermakna bahwa pemberdayaan bukan merupakan proses yang serta merta ada dan tidak juga hanya didasarkan pada batasan waktu tertentu, dibutuhkan langkah-langkah dan prasyarat khusus sebelum dilaksanakan hingga akhirnya masyarakat dapat dikatakan mandiri pada saat dimana mereka mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya.

2.2.2.3. Bentuk Kekuasaan dalam Pemberdayaan

Ife dan Tesoriero (2008) mengemukakan tujuh bentuk kekuasaan dalam strategi pemberdayaan:

- (1). Kekuasaan atas pilihan pribadi dan peluang hidup. Strategi pemberdayaan berupaya memaksimalkan pilihan efektif seseorang untuk meningkatkan kekuasaan atas keputusan yang menyangkut masa depan pribadi. Yang termasuk dalam kategori kekuasaan ini diantaranya keputusan tentang gaya hidup dimana akan tinggal, pekerjaan, pilihan atas tubuh, seksualitas, kesehatan dsb.
- (2). Kekuasaan untuk mempertahankan HAM, dengan proses pemberdayaan akan menjamin bahwa suara orang yang tertindas dan termajinalisasi akan terdengar dan akan terlibat dalam strategi aksi sosial dan politik untuk dipertahankan.
- (3). Kekuasaan atas definisi Kebutuhan. Perspektif pemberdayaan mensyaratkan bahwa masyarakat memiliki akses kepada pendidikan dan informasi, juga penghormatan dan pengakuan atas kearifan lokal, pengetahuan dan pengalaman pribumi sebagai sesuatu yang relevan dan sah sehingga pada nantinya kebutuhan dapat ditetapkan dan didefinisikan oleh masyarakat sendiri.
- (4). Kekuasaan atas Gagasan. Proses pemberdayaan mengharuskan memasukkan kekuasaan untuk berfikir secara otonom dan tidak mendikte pandangan-dunia seseorang baik dengan paksaan atau dengan penyangkalan atas akses kepada kerangka acuan alternatif, mengekspresikan gagasan di forum publik, peningkatan kapasitas masyarakat untuk melakukan dialog dengan sesamanya dan kemampuan gagasan masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada kultur publik.
- (5). Kekuasaan atas lembaga-lembaga. Lembaga yang dimaksud diantaranya; lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, keluarga, agama, sistem kesejahteraan, struktur pemerintah, serta mengubah lembaga agar lebih mudah diakses, responsif dan akuntabel kepada seluruh masyarakat.

- (6). Kekuasaan atas sumber daya. Strategi pemberdayaan berupaya memaksimalkan kekuasaan efektif atas distribusi dan pemanfaatan sumber daya, dan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi atas akses kepada sumber daya.
- (7). Kekuasaan atas kegiatan ekonomi. Proses pemberdayaan berupaya memastikan bahwa kekuasaan dan kegiatan ekonomi didistribusikan dengan merata, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan mengakses mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran.
- (8). Kekuasaan atas reproduksi. Gagasan reproduksi bukan hanya proses melahirkan tetapi juga membesarkan anak, pendidikan dan sosialisasi atau dapat dikatakan semua mekanisme yang mereproduksi orde sosial, ekonomi dan politik dalam generasi yang baru dapat terdistribusi secara adil tanpa memandang perbedaan kelas, ras dan gender (hal. 140).

2.2.2.4. Partisipasi

Partisipasi menurut Soetomo (2006) didefinisikan sebagai “keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatannya tersebut” (hal. 439-450). Partisipasi yang sesungguhnya menurut Mikkelsen (2005) yaitu “berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, ia adalah tujuan dalam suatu proses demokrasi” (*genuine participation, initiated and managed by people themselves, is a goal in democratic process*) (Adi, 2008, hal. 108). Sedangkan Adi (2008) mendefinisikan partisipasi sebagai “Adanya keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi” (hal. 110). Karakteristik partisipasi dalam Ife dan Tesoriero (2008) bahwa:

terdapat empat karakteristik dari pendekatan demokrasi partisipatif yang penting bagi pengembangan masyarakat yaitu; desentralisasi, akuntabilitas, pendidikan, dan kewajiban. Desentralisasi partisipatif memerlukan struktur

pembuatan keputusan yang terdesentralisasi, dengan prinsip yang diusung adalah tidak ada keputusan atau fungsi yang secara terpusat lebih daripada yang diperlukan. Fungsi-fungsi terpusat ketika ada sebaiknya berupa koordinasi, informasi, dan penyediaan sumber daya serta dukungan bagi aktivitas dan struktur yang terdesentralisasi. Akuntabilitas dalam demokrasi yang partisipatif memandang bahwa rakyat tidak hanya dilibatkan dalam membuat keputusan tetapi juga mensyaratkan bahwa mereka bertanggung jawab untuk menjamin bahwa keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan. Memulai suatu program demokrasi partisipatif tanpa suatu proses pendidikan yang efektif adalah resep menuju kegagalan. Demokrasi partisipatif memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan didalamnya juga menuntut agar rakyat bertanggung jawab untuk berpartisipasi bersama hak tersebut terdapat kewajiban untuk mendapat informasi yang jelas atas isu-isu yang relevan. Partisipasi tidak dapat dipaksakan, tetapi suatu iklim dapat diciptakan yang bisa membuat orang akan merasakan kewajiban moral yang kuat untuk berpartisipasi (hal. 290-293).

Pendapat serupa dari Soetomo (2006) bahwa tanpa adanya determinasi dan kesadaran bukanlah termasuk dalam kategori partisipasi tetapi lebih pada mobilisasi.

Sedangkan iklim yang dapat mendorong partisipasi sebagaimana disebutkan oleh Ife dan Tesoriero (2008) bahwa terdapat kondisi-kondisi yang mendorong partisipasi diantaranya; 1. Orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting. 2. Orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan. 3. Berbagai bentuk partisipasi harus dihargai. 4. Orang harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam partisipasinya 5. Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan.

Merujuk pada pengertian diatas sehingga yang dimaksud partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara sadar dalam seluruh proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, implementasi hingga evaluasi terhadap

perubahan yang terjadi. Partisipasi bukan hanya dipandang sebagai upaya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan tetapi lebih juga adanya ketetapan hati (*determinasi*) dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Tumbuhnya kesadaran dan keikutsertaan aktif masyarakat dapat juga disebabkan oleh bagaimana cara pelaku perubahan dalam menumbuhkan dan mengajak rakyat untuk berpartisipasi. Notoatmadjo (2007) mengidentifikasi hal tersebut dalam dua cara, yakni:

1. Partisipasi dengan paksaan (*Enforcement participation*). Artinya memaksa masyarakat untuk kontribusi dalam suatu program, baik melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan maupun dengan perintah lisan saja. Cara ini akan lebih cepat hasilnya, dan mudah. Tetapi masyarakat akan takut, merasa dipaksa, dan kaget, karena dasarnya bukan kesadaran (*awareness*), tetapi ketakutan. Akibatnya lagi masyarakat tidak akan mempunyai rasa memiliki terhadap program.
2. Partisipasi dengan *persuasi* dan *edukasi*. Yakni suatu partisipasi yang didasari pada kesadaran. Sukar ditumbuhkan, dan akan memakan waktu yang lama. Tetapi bila tercapai hasilnya ini akan mempunyai rasa memiliki, dan rasa memelihara. Partisipasi ini dimulai dengan penerangan, pendidikan dan sebagainya. Baik secara langsung maupun tidak langsung (hal. 126).

Pretty dan Vodouhe (1996) mengemukakan bahwa ada 7 (tujuh) tipologi partisipasi yang menggambarkan tingkatan partisipasi dari partisipasi yang paling rendah yang dinamakan *Passive Participation* (Partisipasi Pasif) hingga partisipasi yang menempati level tertinggi dengan terbentuknya *Self-Mobilization* (Kemandirian). Tipologi tersebut terurai secara jelas dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Tipologi Partisipasi: Bagaimana Masyarakat Berpartisipasi dalam Program dan Proyek Pembangunan.

Typology	Characteristics of Each Type
1. <i>Passive Participation</i> (Partisipasi Pasif)	<i>People participate by being told what is going to happen or has already happened. It is a unilateral announcement by an administration or project management without any listening to people's responses. The information being shared belongs</i>

Universitas Indonesia

	<p><i>only to external professionals.</i></p> <p>(masyarakat menerima informasi apa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek dengan tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang di pertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran).</p>
<p>2. <i>Participation in Information Giving</i> (Partisipasi Informatif)</p>	<p><i>People participate by answering questions posed by extractive researches using questionnaire surveys or similar approaches. People do not have the opportunity to influence proceedings, as the findings of the research are neither shared nor checked for accuracy.</i></p> <p>(masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk proyek namun tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian. Akurasi hasil penelitian tidak di bahas bersama rakyat).</p>
<p>3. <i>Participation by Consultation</i> (Partisipasi Konsultatif)</p>	<p><i>People participate by being consulted, and external agents listen to views. These external agents define both problems and solutions and may modify these in the light of people's responses. Such a consultative process does not concede any share in decision making, and professionals are under no obligation to take on board people's views.</i></p> <p>(masyarakat berpartisipasi secara konsultatif sedangkan orang luar mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya. Belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk di tindak lanjuti)</p>
<p>4. <i>Participation for Material Incentive</i> (Partisipasi Insentif)</p>	<p><i>People participate by providing resources, for example labour, in return for food, cash, or other material incentives. It is very common to see this called participation, yet people have no stake in prolonging activities when the incentives end.</i></p> <p>(Masyarakat memberi imbalan dan jasa untuk memperoleh imbalan isentif berupa upah walau tidak di libatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang di lakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif di hentikan)</p>
<p>5. <i>Funcional Participation</i> (Partisipasi Fungsional)</p>	<p><i>People participate by forming groups to meet predetermined objectives related to the project. These instructions tend to be dependent on external initiators and facilitators, but may become self-dependent.</i></p> <p>(masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek setelah ada keputusan-keputusan utama yang telah di sepakati. Pada tahap awal masyarakat bergantung pada</p>

	pihak luar tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriaannya).
6. <i>Interactive Participation</i> (Partisipasi Interaktif)	<p><i>People participate in joint analysis, which leads to action plans and the formation of new local institutions or the strengthening of existing ones. It tends to involve interdisciplinary methodologies that seek multiple perspectives and make use of systemic and structured learning processes. These groups take control over local decisions, and so people have a stake in maintaining structures or practices.</i></p> <p>(Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Cenderung menggunakan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan mereka. Sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan).</p>
7. <i>Self-Mobilization</i> Kemandirian	<p><i>People participate by taking initiative independent of external institution to change systems. They develop contacts with external institutions for resources and technical advice they need, but retain control over how resources are used. Such self-initiated mobilization and collective action may or may not challenge existing inequitable distribution of wealth and power.</i></p> <p>Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak di pengaruhi oleh pihak luar). Untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan dukungan dan bantuan teknis serta sumber daya yang di perlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada atau di gunakan).</p>

Sumber: Diadaptasi dari Pretty dan Vodouhe dalam Swanson, Bentz, and Sofranko (*Improving Agricultural*, 1996, Chap. 6).

Dalam Prosesnya, partisipasi bisa saja bernilai negatif atau menyimpang dari arti yang terkandung didalamnya, Cooke dan Kothari (2001) mencatat bahwa “partisipasi bisa saja menghasilkan tirani baru dengan cara partisipasi digunakan untuk memelihara kekuatan yang telah dipegang oleh yang kuat” (Ife dan Tesorieros, 2008, hal. 298). Sebagaimana juga diungkap oleh Mc Ardle (1989) serta Rose dan Black (1983) bahwa:

hal terpenting dalam pemberdayaan adalah partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan... namun demikian, pada kenyataannya seluruhnya dikerjakan oleh para profesional atas nama “pemberdayaan”... Pendekatan tersebut dapat gagal menjalankan fungsinya dalam proses kontrol terhadap masyarakat untuk akses terhadap sumber. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru menjadikan masyarakat menjadi tidak mampu diberdayakan (Hikmat, 2006, hal. 6).

Arnstein (1969) mengusulkan “model partisipasi yang dapat memperjelas sifat berlawanan dari konsep partisipasi” (Ife dan Tesoriero, 2008, hal. 299). Seperti yang terlihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.3. Jenjang Partisipasi Warga Negara

Sumber: Diadaptasi dari the journal of the american planning association. dalam Ife dan Tesoriero (2008, hal. 299)

Tokenisme menurut Ife dan Tesoriero (2008) adalah “praktek memberikan kebaikan-hati secara resmi kepada wakil kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat hanya untuk tujuan menghasilkan suatu penampilan yang jujur/adil (hal. 293). Tokenisme dalam keadaan terburuk akan membuat orang-orang yang tak berdaya semakin tak berdaya dan terasing.

Notoatmodjo (2007) bahwa didalam partisipasi, setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4M, yakni *manpower*

(tenaga), *money* (uang), *material* (bentuk-bentuk lain seperti kayu, bambu, beras, batu dan sebagainya). Dan *mind* (ide atau gagasan) (hal. 125).

Kemudian *UK Health for All Network* dalam Ife dan Tesoriero (2008) mengembangkan tipologi partisipasi lainnya dengan memberikan deskripsi tingkatan partisipasi lebih dalam dari tertinggi dari partisipasi yaitu deliberatif, partisipatori demokrasi ke tangga yang terendah dimana partisipasi sama sekali tidak dilaksanakan, seperti yang tergambar dalam skema dibawah ini:



Demokrasi,
partisipatif
deliberatif

tinggi	memiliki kontrol	organisasi meminta masyarakat mengidentifikasi masalah dan membuat keputusan kunci tentang tujuan dan cara-cara. Bersedia membantu masyarakat pada setiap langkah untuk menyelesaikan tujuan-tujuan.
	Mendelegasikan	Organisasi mengidentifikasi dan mempresentasikan sebuah masalah kepada masyarakat, menetapkan batas-batas dan meminta masyarakat membuat serangkaian keputusan yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah rencana yang akan diterimanya.
	Merencanakan bersama	Organisasi mempresentasikan sebuah rencana sementara yang dapat berubah dan terbuka untuk menerima masukan dari mereka yang terkena pengaruh. Kemudian mengharapkan dapat mengubah rencana sedikit atau banyak
	Menasehati	Organisasi mempresentasikan sebuah rencana dan mengundang pertanyaan-pertanyaan. Bersiap mengubah rencana hanya jika sangat diperlukan
	Dikonsultasikan	Organisasi mencoba mempromosikan sebuah rencana. Berupaya mengembangkan dukungan untuk mempermudah penerimaan atau memberikan sanksi secukupnya kepada rencana sehingga persetujuan administratif dapat diharapkan.
	Menerima informasi	Organisasi membuat sebuah rencana dan mengumumkannya. Masyarakat dipanggil rapat untuk maksud pemberian informasi. Persetujuan diharapkan.
	Nihil	Masyarakat tidak diberitahu apa-apa
rendah		

Gambar 2.4. kontinum partisipasi

Sumber: Diadaptasi dari UK Health for All Network dalam Ife dan Tesoriero (2008, hal. 301)

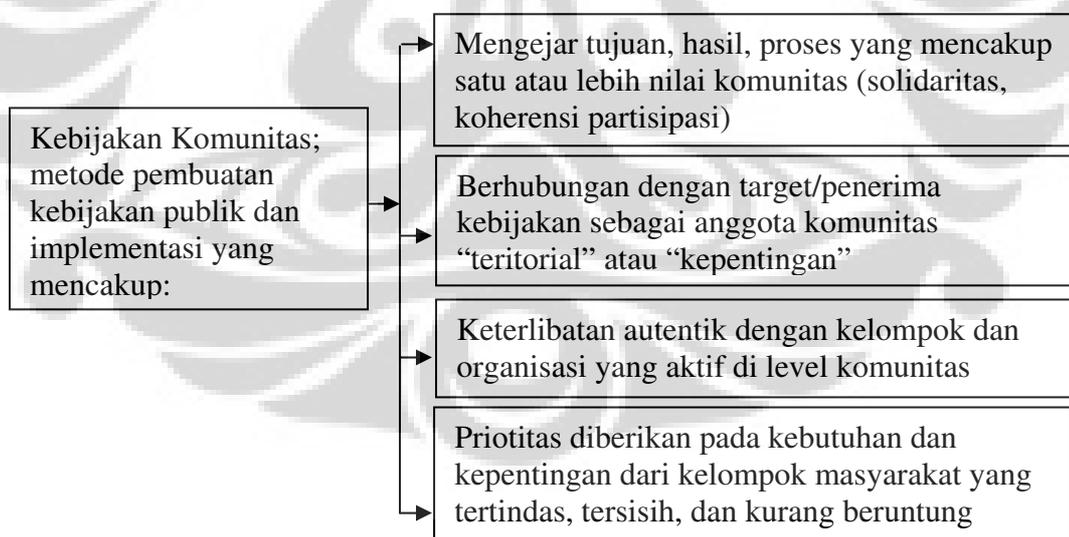
Gambar diatas menunjukkan bahwa partisipasi tertinggi terwujud ketika masyarakat berperan mulai dari proses awal mengidentifikasi masalah. Partisipasi menjadi syarat bagi terwujudnya program pemberdayaan masyarakat, ketika

Universitas Indonesia

syarat tersebut kurang dapat dipenuhi yang terjadi adalah kegagalan program secara tidak langsung berakibat tujuan pemberdayaan tidak tercapai yang ada akan menimbulkan ketidakberdayaan komunitas sasaran.

2.2.3. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*).

Salah satu solusi yang dapat digunakan sebagai strategi intervensi guna menjawab beberapa permasalahan pembangunan adalah dengan mengedepankan aspek komunitas dalam agenda kebijakan pembangunan, Ife dan Tesoriero (2008) menyatakan bahwa prinsip dasar dari pengembangan masyarakat (*community development*) adalah kearifan datang dari “bawah” ketimbang dari “atas”. Dan salah satu alasan untuk beralih kepada pengembangan masyarakat sebagai sebuah alternatif bagi bentuk layanan kemanusiaan adalah bahwa pengembangan masyarakat menjanjikan suatu solusi yang lebih mencukupi bagi banyak masalah sosial kontemporer seperti; pengangguran, kemiskinan, kejahatan, kesendirian serta efektif secara nyata mengurangi masalah kesepian, stress dan penyakit mental. Butcher (1993) mendeskripsikan “sintesis kebijakan komunitas” (Parsons, 2008, hal. 507). Sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.5. Komunitas dan Kebijakan Publik

Sumber : Diadaptasi dari Butcher dalam Parsons (2008, hal. 507).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Soetomo (2006) bahwa dengan Intervensi melalui strategi *community development* akan memberikan manfaat yaitu: 1. Mempercepat proses perubahan dan pembaharuan pada tingkat

komunitas lokal, 2. Mendorong integrasi masyarakat lokal dalam masyarakat nasional melalui kontribusi timbal balik antara masyarakat lokal dan masyarakat nasional, 3. Memberikan iklim yang kondusif bagi masyarakat pada tingkat komunitas untuk menciptakan, mengembangkan dan memanfaatkan peluang bagi peningkatan taraf hidupnya (hal. 143).

Pendapat diatas memberikan petunjuk bahwa *Community Development* dapat menjadi strategi *intervensi* yang efektif yang mengedepankan konsep pemberdayaan, dimana komunitas sebagai pihak yang mengetahui akan permasalahan dan kebutuhan yang mereka rasakan (*Bottom-Up*), merangsang, membantu dan mengajarkan pola perubahan baru, menumbuhkan keterlibatan (partisipasi) bagi *beneficiaries* (komunitas sasaran) dalam keseluruhan proses *implementasi* sehingga dapat memberikan iklim yang kondusif bagi masyarakat pada tingkat komunitas untuk menciptakan, mengembangkan dan memanfaatkan peluang bagi peningkatan taraf hidupnya. Pendapat diatas juga menunjukkan adanya perbedaan domain antara kewajiban pemerintah dalam ranah pembuatan keputusan (*Top-Down*) dan implementasi.

2.2.3.1. Konsep Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan konsep yang mempunyai keterkaitan dengan proses pemberdayaan dan merupakan langkah awal yang perlu diperhatikan sebelum pemberdayaan dilaksanakan, sebagaimana diungkap oleh Ife dan Tesoriero (2008) bahwa :

*Bagaimana mungkin terdapat layanan berbasis-masyarakat jika tidak ada masyarakat yang menjadi basisnya... dengan demikian sebuah strategi layanan berbasis masyarakat tidak akan efektif kecuali jika, pada saat yang sama, diambil langkah-langkah untuk membalikkan kecenderungan dari penghancuran struktur masyarakat.. oleh karena itu, layanan berbasis masyarakat perlu didampingi oleh suatu program *pengembangan masyarakat* yang bertujuan membangun kembali struktur-struktur tersebut (hal. 32).*

Demikian juga diungkap oleh Adi (2008) bahwa model intervensi pengembangan masyarakat merupakan “suatu model yang sangat memerhatikan aspek manusia

serta pemberdayaan masyarakat dimana didalamnya kental terasa adanya unsur pendidikan dalam upaya mengubah suatu komunitas” (hal. 201).

Pengembangan masyarakat sendiri oleh Dunham (1958) didefinisikan sebagai: “berbagai upaya yang terorganisasi yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela” (Adi, 2008, hal. 219). Deskripsi yang serupa mengenai pengembangan masyarakat dari Ife dan Tesoriero (2008) bahwa pelaksanaan sebuah program pengembangan masyarakat dapat berfungsi sebagai basis untuk menangani banyak masalah sosial dalam masyarakat kontemporer. Dengan layanan berbasis masyarakat diharapkan masyarakat bertanggung jawab bukan hanya memberikan layanan tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan layanan kepada mereka yang membutuhkan, penetapan prioritas dalam lingkup dan diantara layanan-layanan yang bersaing, dan memantau serta mengevaluasi program-program yang ada.

Mengacu pada konsep diatas maka dimaksud dengan pengembangan masyarakat dalam penelitian ini adalah upaya perubahan terencana dalam bentuk layanan yang berbasis masyarakat dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela dengan penekanan pada aspek partisipasi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara mandiri.

2.2.3.2. Pendekatan dan Gagasan Pengembangan Masyarakat

Terdapat dua pendekatan pengembangan masyarakat, sebagaimana diungkap oleh Glen (1993) yaitu “pendekatan direktif (*Instruktif*) dan pendekatan non direktif (*Partisipatif*)” (Adi, 2008, hal. 227). Dalam pendekatan direktif peranan *community worker* (pelaku perubahan) bersifat lebih dominan dibanding dengan pendekatan non direktif, ini dikarenakan prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari *community worker*. Hal ini sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Batten (1967) bahwa :

dalam prakteknya *community worker* memang mungkin menanyakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau cara apa yang perlu dilakukan untuk menangani suatu masalah, tetapi jawaban yang muncul dari masyarakat selalu diukur dari segi 'baik' dan 'buruk' menurut *community worker*. Segi negatif dari pendekatan ini dari *community worker* adalah berkurangnya kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar dari masyarakat, sedangkan bagi masyarakat dapat memunculkan ketergantungan terhadap *community worker* sebagai pelaku perubahan. Untuk pendekatan non direktif atau partisipatif, pemeran utama dalam perubahan adalah masyarakat itu sendiri, *community worker* lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Peran *community worker* berubah menjadi katalisator, pemercepat perubahan (*enabler*) (Adi, 2008, hal. 228).

Dari dua pendekatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan *non direktif* atau partisipatif sesuai dengan model intervensi dalam pengembangan masyarakat. Keaktifan masyarakat dalam menentukan kebutuhannya serta merespon permasalahan sosial yang ada di komunitas akan merangsang tumbuhnya kemampuan masyarakat menentukan arah langkah masa depan (*Self Determination*) dan serta menolong diri (*Self Help*) mereka sendiri menuju kemandirian mereka.

Sedangkan guna memperlancar tercapainya tujuan dalam pendekatan pengembangan masyarakat, terdapat beberapa gagasan yang berawal dari konsep perubahan dari bawah (*bottom-up*) yang dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero (2008), yakni :

1. Menghargai Pengetahuan Lokal. Gagasan ini merupakan komponen esensial dari kerja pengembangan masyarakat, dengan mengasumsikan bahwa "masyarakat yang paling tahu" yang berarti bahwa anggota masyarakat memiliki pengalaman dari masyarakat baik tentang kebutuhan maupun masalah, kekuatan dan kelebihan serta ciri-ciri khas dari masyarakat tersebut. Masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan, kearifan dan keahlian, dan peran pekerja masyarakat (*community worker*) adalah untuk mendengarkan dan

belajar dari masyarakat, bukan mengajari masyarakat tentang problem dan kebutuhan mereka. Namun demikian terdapat saat-saat ketika pengetahuan eksternal dari para pekerja masyarakat dapat disumbangkan, berguna dan perlu. Prinsip yang penting adalah gagasan berbagi pengetahuan: pekerja masyarakat membawa keahlian dan kearifan tertentu seperti juga para anggota masyarakat. Sedangkan Bentuk dari pengetahuan lokal dapat berupa spiritualitas, kekuatan gaib, kecantikan, alam, dongeng dan pengetahuan tentang wilayah. Disamping itu musik, seni, teater, puisi, gunung-gunung, laut, hutan, binatang, tarian, cinta, tawa, permainan dan cerita rakyat dapat juga menjadi pembawa pengetahuan yang penting.

2. Menghargai Kebudayaan Lokal. Pluralisme Kultural memungkinkan pekerja masyarakat terlibat dengan masyarakat dengan suatu cara yang tidak mesti mengesahkan nilai-nilai dan praktik kebudayaan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia tetapi lebih memfasilitasi masyarakat untuk terlibat dalam proses perubahan dan pengembangan kebudayaan. Berusaha memaksakan suatu set nilai yang lain hanya karena pekerja lebih terbiasa dan nyaman merupakan salah satu bentuk imperialisme kultural yang melemahkan dan berlawanan dengan prinsip pengembangan masyarakat.
3. Menghargai Sumber daya Lokal. Prinsip penting dalam pengembangan masyarakat adalah *keswadayaan*. Keswadayaan berarti bahwa masyarakat pada hakekatnya bergantung pada sumber daya mereka sendiri, ketimbang bergantung pada sumber daya yang diberikan secara eksternal. Dengan otonom dan keswadayaan terdorong munculnya harga diri, kebanggaan masyarakat dan kebebasan.
4. Menghargai Keterampilan Lokal. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pekerja masyarakat untuk mengetahui keterampilan lokal adalah dengan membuat daftar keterampilan untuk sekedar mengetahui berbagai keterampilan yang dimiliki anggota masyarakat. Dengan menggunakan keterampilan lokal akan memberikan kepada masyarakat sebuah kesempatan untuk memberikan kontribusi yang bermakna, dan memperkuat tingkat keswadayaan dan modal

sosial dalam lingkup masyarakat itu sendiri. Yang tak kalah penting adalah konsep *berbagi keterampilan*: pekerja masyarakat dapat mempelajari keterampilan baru dari masyarakat, sebagaimana anggota masyarakat dapat mempelajari keterampilan baru dari pekerja masyarakat.

5. Menghargai Proses Lokal. Penting bagi para pekerja masyarakat untuk berupaya memahami proses-proses masyarakat lokal, bagaimana biasanya berbagai proses lokal dilakukan, dan dengan bekerja dalam lingkup tradisi. Namun demikian tidak berarti bahwa pekerja masyarakat menerima dan mengesahkan semua proses lokal sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam terutama dengan menghindarkan pada proses lokal yang bersifat eksklusif.
6. Bekerja dalam Solidaritas. Mengandung arti bahwa pekerja masyarakat bukanlah aktor yang bebas yang mengikuti agendanya sendiri ketimbang menyediakan waktu dan menerima kesulitan-kesulitan untuk memahami sifat dari masyarakat lokal, tujuan dan aspirasi warga dan cara-cara berfungsinya masyarakat. Agenda dengan pasti berada dibawah kendali masyarakat yang bersangkutan dan pekerja masyarakat tidak melakukan hal-hal untuk, kepada atau atas nama masyarakat tetapi dengan masyarakat (hal. 242-262).

2.2.3.3. Dimensi Pengembangan Masyarakat

Ife dan Tesoriero (2008) berpendapat bahwa ada beberapa dimensi yang berpengaruh dalam proses Pengembangan Masyarakat, keenam dimensi tersebut yaitu:

1. Pengembangan Sosial. Dalam pengembangan sosial terdapat empat kelompok yang merupakan aktivitas dalam pengembangan sosial, yakni; pengembangan pelayanan, balai masyarakat, perencanaan sosial dan semangat sosial. Dalam Pengembangan Pelayanan tujuan dari pengembangan sosial adalah tersedianya pelayanan masyarakat, membantu pelayanan yang ada untuk berfungsi efektif melalui koordinasi dan perencanaan yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi warga secara luas dan perwakilan pandangan dari mereka yang dirugikan. Sedangkan Balai Masyarakat (*The Neighbourhood House*)

merupakan setting informal yang tidak kaku yang berfungsi sebagai poin sentral dari aktifitas lingkungan sekitar yang dapat digunakan sebagai basis untuk perawatan anak, pendidikan, pengembangan keterampilan, informasi dan penyerahan, diskusi kelompok dan sebagainya sebagai basis dalam penyediaan pelayanan kemanusiaan pada level lokal dengan pelibatan penuh masyarakat mulai dari tahap perencanaan. Agar balai masyarakat dapat berfungsi secara efektif, warga setempat harus memiliki kontrol yang besar atas pelaksanaan dan pemanfaatan sumber daya baik pendanaan maupun sumber daya manusia. Perencanaan dan koordinasi terjadi pada akar rumput dan peran “ahli” yaitu memfasilitasi proses ini dan memberikan keahlian teknis untuk membantu orang-orang membuat keputusan mereka tentang prioritas masyarakat. Aktivitas terakhir dalam pengembangan sosial adalah Solidaritas sosial. Program pengembangan sosial dalam hal ini memfasilitasi orang-orang dalam masyarakat untuk saling berbicara, berinteraksi lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. peran pekerja sosial dalam hal ini sebagai katalisator yang bertujuan untuk mengantarkan orang-orang membantu menentukan potensi mereka untuk pengalaman masyarakat dan aksi mereka dengan mendasarkan pada peningkatan kesadaran, hubungan dialogis dan praktek yang sangat reflektif.

2. Pengembangan Ekonomi. Pengembangan ekonomi masyarakat dibedakan atas dua bentuk, *pertama* pendekatan yang lebih konservatif. Dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan menarik industri dengan berupaya menemukan cara-cara baru yang membuat masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam ekonomi *mainstream* dengan cara menghimpun inisiatif. Pendekatan ini berusaha menarik industri baru ke wilayah lokal dengan memberikan lingkungan yang bagus untuk berinvestasi. Cara lain dilakukan dengan memulai industri lokal yang dapat dilakukan melibatkan pemanfaatan kekayaan sumber daya lokal, bakat, minat dan keahlian beserta penaksiran keuntungan-keuntungan alam dari lokalitas tertentu dan kemudian memutuskan apa jenis industri baru yang mungkin berhasil dengan mempertimbangkan

identitas lokal yang berbasis pada budaya dan tradisi lokal. Namun demikian terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa dalam inisiatif *mainstream* bisa saja terjadi jika industri yang berbasis lokal menjadi berhasil, besar kemungkinan akan diambil alih atau dikuasai oleh pemain-pemain yang kuat sehingga keuntungan untuk masyarakat lokal akan berkurang dan tidak selalu berpihak pada masyarakat lokal. *kedua*, pengembangan ekonomi masyarakat yang radikal, dilakukan dengan membentuk ekonomi berbasis lokal yang dapat mewujudkan prinsip otonomi. Prespektif ini juga menjamin bahwa nilai surplus dari produktivitas lokal masih berada dalam masyarakat yang menciptakannya bukan berpindah ke masyarakat lain. Bentuk pengembangan ekonomi yang radikal seperti koperasi atau bank masyarakat (*Credit Unions*).

3. Pengembangan Politik. Tujuan dari pengembangan politik adalah untuk mengubah distribusi kekuasaan dalam masyarakat (pengembangan politik internal) sehingga kekuasaan dapat dibagi lebih adil, memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi lebih efektif dalam arena yang lebih luas menyangkut masyarakat lain dan institusi lain (pengembangan politik eksternal). Agar sukses, seleksi dan pengembangan strategi kampanye harus didasarkan pada analisis konteks sosial, politik dan budaya masyarakat lokal dan bukan dipaksakan dari luar.
4. Pengembangan Budaya. Dalam pengembangan masyarakat, salah satu komponen dalam pengembangan budaya adalah melestarikan dan menghargai budaya asli/ pribumi/ adat (*indigenous*). Pengembangan masyarakat dengan masyarakat pribumi akan sangat berharga hanya jika pengembangan dilakukan dengan melibatkan tradisi budaya pribumi. Tujuan utama dari pengembangan ini adalah mengakui dan memperkuat budaya pribumi/asli melalui strategi pemberdayaan yang efektif yang membantu mereka untuk memiliki kendali nyata terhadap masyarakat mereka sendiri dan nasib mereka sendiri. Para pekerja masyarakat harus siap menerima bahwa ketidakberdayaan adalah problem mereka, karenanya pekerja masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung warga pribumi dalam perjuangan untuk mengubah struktur

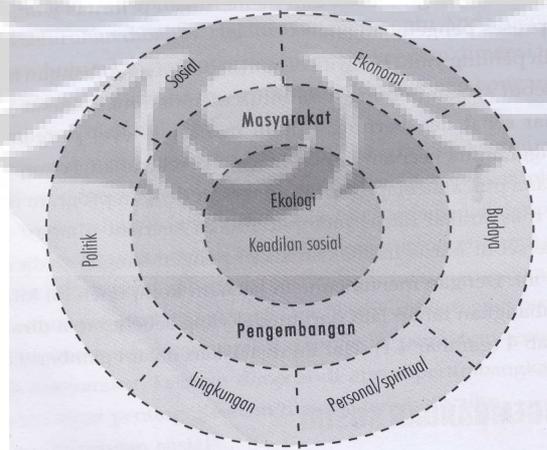
yang menindas. Peran pekerja masyarakat dalam hal ini adalah sebagai katalisator dan dalam peran yang lebih besar guna membantu warga pribumi dalam perjuangan politik (penasehat politik) serta membantu mereka membangun strategi untuk aksi sosial dengan tetap memberikan penegasan bahwa pada akhirnya perjuangan mereka sendirilah yang menentukan. Konsep ideal dari pemberdayaan budaya bagi masyarakat adat adalah terdapatnya pekerja masyarakat pribumi. Isu yang sering muncul diseperti masyarakat adat adalah tanah dan spiritualitas, karenanya salah satu inisiatif penting dalam pengembangan budaya yaitu pembentukan program yang menggunakan nilai-nilai spiritual dan tradisi asli sebagai satu cara mengorganisasikan pendekatan-pendekatan alternatif terhadap problem-problem sosial dan pelayanan kemanusiaan seperti isu kesehatan, alkohol, perumahan dan keadilan. Namun demikian ada kalanya masyarakat adat yang membentuk bagian dari sebuah kelompok komunitas yang lebih luas, sehingga dalam kasus tersebut tujuan dari pemberdayaan budaya mensyaratkan upaya menentang rasisme, penerimaan oleh orang-orang non pribumi bahwa kelompok pribumi tersebut memiliki sesuatu yang diakui untuk dapat disumbangkan kepada masyarakat, dan pada saat yang sama terbentuk penerimaan keterpaduan budaya pribumi sehingga diakui masyarakat yang lebih luas.

5. Aspek pengembangan masyarakat terakhir dalam dimensi budaya adalah budaya partisipasi, bukan mempertahankan tradisi budaya. Aktivitas budaya tersebut merupakan fokus penting untuk identitas masyarakat, partisipasi, interaksi sosial dan pengembangan masyarakat. Satu cara untuk mendorong masyarakat yang sehat yaitu dapat mendorong partisipasi yang luas dalam aktivitas budaya, sehingga seni, musik, teater, tarian dan olah raga menjadi sesuatu yang mereka lakukan, bukan mereka tonton (menghindari komodifikasi budaya). Partisipasi budaya sebagai cara penting untuk membangun modal sosial, memperkuat masyarakat, dan menegaskan identitas.
6. Pengembangan Lingkungan. Pengembangan ini dengan mendasar pada pandangan bahwa masyarakat perlu bertanggung jawab atas perlindungan dan

rehabilitasi lingkungan fisik baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Perencanaan perkotaan dan regional dalam pengembangan ini mengharuskan adanya mekanisme yang memadai bagi warga untuk terlibat dalam keputusan-keputusan tentang atribut fisik perkotaan, pinggiran kota, dan daerah. Perhatian terhadap lingkungan sering terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang lebih mendesak seperti; kelangsungan hidup, air bersih, makanan yang sehat dan udara bersih.

7. Pengembangan Personal/Spiritual. Pendekatan ini berupaya menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan individual masyarakat melalui jaringan, struktur dan interaksi masyarakat. Pendekatan ini berupaya menghapus komodifikasi perkembangan personal dan memindahkannya ke dalam interaksi sosial manusia. Dengan interaksi sosial dukungan terhadap individu akan selalu lebih siap tersedia. Perkembangan dan pengembangan personal sangat penting untuk memberikan rasa lebih bermakna bagi masyarakat dalam kehidupan mereka, rasa memiliki tujuan dan berharga. Setiap orang memiliki sifat dasar spiritual, yakni perasaan spiritual yang menyatukan orang-orang, binatang, tanah, dan segala sesuatu ke dalam satu kesatuan, dan membatasi hubungan seseorang dengan lingkungan alam. Bentuk spriritual yang tepat bermula dari menghormati dan memperkokoh tradisi agama dan spiritualitas masyarakat.

Keenam dimensi tersebut dapat dideskripsikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.6. : Dimensi dalam pengembangan Masyarakat

Sumber: Diadaptasi dari Ife dan Tesoriero (2008, hal. 412)

Universitas Indonesia

2.2.3.4. Tahapan dalam Pengembangan Masyarakat

Tahapan intervensi dalam pengembangan masyarakat, khususnya yang biasa dilakukan beberapa organisasi pelayanan masyarakat sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, meliputi : a) persiapan petugas (dalam hal ini tenaga *community worker*), terutama diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan pengembangan masyarakat, apalagi ketika *community worker* memiliki latarbelakang yang sangat berbeda satu sama lain untuk kemudian memilih alternatif teknik-teknik yang akan dilakukan dalam perubahan di masyarakat tersebut, b) persiapan lapangan, pada awalnya dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, formal maupun informal, kemudian *community worker* mencoba menerobos jalur formal untuk mendapatkan perizinan dari pihak terkait, menjalin kontak dengan tokoh informal (*informal leader*) agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Pada tahap inilah terjadi kontak dan kontak awal dengan kelompok sasaran. Kontak awal ini harus tetap ditindaklanjuti agar terdapat kedekatan antara *community worker* sebagai pelaku perubahan dan komunitas sasaran. Komunikasi yang baik pada tahap awal biasanya akan mempengaruhi keterlibatan warga pada fase berikutnya, fase ini dikenal sebagai fase *engagement* dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat.
2. Tahap *assessment*, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan/ *felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan/*expressed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Pada tahap ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Pada tahap ini juga pelaku perubahan memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, tahap perencanaan. Pengkajian (*assessment*) yang dilakukan pada suatu komunitas dapat dilakukan secara individual (*individual assessment*)

Universitas Indonesia

melalui tokoh-tokoh masyarakat ataupun anggota masyarakat tertentu, tetapi dapat juga dilakukan secara berkelompok (*group assessment*). Terhadap terjadinya perbedaan cara pandang antar *community worker* dengan komunitas sasaran dan pelaku perubahan perlu diadakan upaya menjembatani perbedaan tersebut melalui penyadaran masyarakat ataupun memberikan informasi pada masyarakat agar mereka dapat berdiskusi dan mempertimbangkan keadaan lingkungan mereka secara lebih rasional. Dalam kondisi ini maka petugas menjalankan peran edukasional dalam menjembatani perbedaan cara pandang tersebut.

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan secara partisipatif. Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Program dan kegiatan yang mereka kembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan sehingga tidak muncul program-program yang bersifat insidental (*one shot programme*) ataupun amal (*charity*) yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang. Dalam proses ini, petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
4. Tahap memformulasikan rencana aksi. Pada tahap ini pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini biasanya diperlukan bila masyarakat mempunyai berbagai usulan yang tidak bisa dituntaskan sebelumnya sehingga *community worker* sebagai fasilitator dapat membantu mereka untuk menentukan program mana yang akan mereka prioritaskan terlebih dahulu. Pada tahap ini juga pelaku perubahan kadangkala dibutuhkan masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis,

terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana, khususnya bagi kelompok yang belum pernah mengajukan proposal kepada penyandang dana tersebut. Pada tahap ini, diharapkan *community worker* dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

5. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga. Dalam upaya melaksanakan program pengembangan, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.
6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Akan tetapi, kadangkala dari hasil pemantauan dan evaluasi ternyata hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan, bila hal ini terjadi, evaluasi proses diharapkan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan suatu program atau kegiatan sehingga bila diperlukan, dapat dilakukan kembali *assessment* terhadap permasalahan yang dirasakan masyarakat ataupun terhadap sumber daya yang tersedia, karena pelaku perubahan juga menyadari bahwa tolok ukur (*benchmark*) suatu masyarakat juga dapat berkembang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan yang sudah terjadi. Feurstein (1990) mengemukakan beberapa kriteria yang paling sering

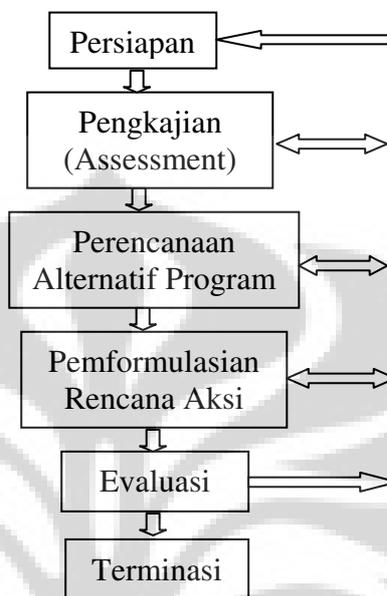
digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan antara lain: indikator ketersediaan (*indicators of availability*), indikator relevansi (*indicators of relevansi*), indikator keterjangkauan (*indicators of accessibility*), indikator pemanfaatan (*indicators of utilization*), indikator cakupan (*indicators of coverage*), indikator kualitas (*indicator of quality*), indikator upaya (*indications of efforts*), indikator efisiensi (*indicators of efficiency*), dan indikator dampak (*indicators of impact*) (Adi, 2008, hal. 254-256). Indikator menurut Direktorat PKAT (2001) disebutkan sebagai :

ukuran kuantitatif dan/ kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan (hal. 16).

7. Tahap terminasi, yaitu tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Meskipun demikian, tidak jarang *community worker* tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, apalagi bila *community worker* merasa bahwa tugasnya belum diselesaikan dengan baik, tidak jarang petugas tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran (Adi, 2008, hal. 244-246).

Dalam pengembangan masyarakat yang harus menjadi perhatian bahwa langkah-langkah dalam tahapan bersifat siklikal atau sebagai siklus yang berputar yang berarti bahwa dari tahapan yang telah dilakukan siklus dapat berbaik kembali ke beberapa tahapan yang lain. Sebagaimana dalam Adi (2008) bahwa: “dalam tahap pengembangan masyarakat bersifat siklikal atau ada pula yang

mengatakan sebagai siklus spiral” (hal. 258), sehingga bila digambarkan secara sederhana bentuk tahapan yang bersifat siklikal akan seperti dibawah ini :



Gambar 2.7. Tahapan dalam Model Intervensi Pengembangan Masyarakat.
Sumber: Diadaptasi dari Adi (2008, hal. 258)

2.2.3.5. Potensi Komunitas dalam Hubungan dengan Pengembangan Masyarakat

Potensi Komunitas, sebagaimana pendapat Adi (2008) menyebutnya sebagai kekuatan sosial yang merupakan aset komunitas dan sekaligus menjadi sumber daya terkait dengan pengembangan masyarakat, dikelompokkan kedalam 6 (enam) kategori, yaitu:

a. Modal fisik (*physical capital*)

Modal fisik terdiri dari dua kelompok utama, yaitu bangunan dan Infrastruktur. Lawang (2005) menyebut modal dengan kapital dan menyatakan bahwa kapital fisik bersifat nyata (*tangible*), dapat dipegang dan dapat diukur. Kapital fisik sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu keperluan tertentu dalam proses produksi barang atau jasa, yang memungkinkan orang memperoleh keuntungan pendapatan di masa yang akan datang.

b. Modal finansial (*financial capital*)

Modal finansial adalah dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan

dalam komunitas. Modal finansial menurut Suharto (2008) adalah “sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi perusahaan atau sejumlah uang yang dihimpun atau ditabung untuk investasi di masa depan” (hal. 96). Lawang (2005) menambahkan kapital finansial lebih sebagai “kapital yang berfungsi menata kesempatan atau peluang untuk memperoleh uang” (hal. 10).

c. Modal lingkungan (*environmental capital*)

Modal lingkungan dalam perencanaan partisipatif adalah modal lingkungan yang dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat, dapat juga berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta mempunyai nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup dari manusia dan makhluk hidup lainnya.

d. Modal teknologi (*technological capital*)

Dalam perencanaan partisipatif modal teknologi yang penting adalah modal yang dimiliki ataupun dapat dimanfaatkan oleh suatu komunitas. Dalam hal ini terkait dengan ketersediaan teknologi tepat guna bermanfaat untuk masyarakat, dan bukan sekedar teknologi digital yang canggih, akan tetapi belum tentu bermanfaat bagi masyarakat tersebut.

e. Modal manusia (*human capital*)

Modal manusia berbicara mengenai sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, baik itu teknologi yang sederhana maupun teknologi yang canggih. Suharto (2008) mengklasifikasikan “modal manusia meliputi keterampilan atau kemampuan yang dimiliki orang untuk melaksanakan tugas tertentu” (hal. 97).

f. Modal sosial (*social capital*)

Modal sosial adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya, dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Putnam (1993) memberikan definisi modal sosial adalah “bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan,

yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi” (Field, 2010, hal. 6). Loury (1977) mendefinisikan modal sosial sebagai “kumpulan sumber yang melekat dalam relasi keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas dan yang bermanfaat untuk perkembangan kognitif dan sosial anak-anak atau pemuda” (Coleman, 2008, hal. 368). Norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standart-standart sekuler seperti halnya kode etik profesional. Lawang (2005) mendeskripsikan sifat norma sebagai; 1. Norma muncul sebagai pertukaran yang saling menguntungkan. Kalau dalam pertukaran, keuntungan hanya pada salah satu pihak saja maka pertukaran sosial selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Kalau dari beberapa kali pertukaran prinsip saling menguntungkan dipegang teguh, dari situlah muncul norma dalam bentuk kewajiban sosial. 2. Norma bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu (hal. 70). Kepercayaan (*trust*) oleh Fukuyama (1995) didefinisikan sebagai “harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama” (Suharto, 2008, hal. 99). Sedangkan kepercayaan menurut Lawang (2005) didefinisikan sebagai “hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial” (hal. 46). Lebih dalam penjelasan tentang Interaksi sosial oleh Lawang (2005) “menunjuk pada apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersama-sama secara sadar dalam mewujudkan harapan dari masing-masing pihak terhadap satu sama lain... semakin tinggi saling percaya antar mereka yang bekerjasama, semakin kurang resiko yang ditanggung, dan semakin kurang pula biaya (uang dan sosial) yang dikeluarkan” (hal. 47). Jaringan (*networking*) oleh Putnam (1993) “berwujud kerjasama antar manusia” (Suharto, 2008, hal. 99). Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Jaringan yang terbentuk dapat dikatakan sebagai

modal sosial jika merujuk pada prinsip sifat jaringan sebagai berikut; 1. Jaringan sosial apapun harus diukur dengan fungsi ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial sekaligus. Fungsi ekonomi merujuk pada produktifitas, efisiensi dan efektifitas yang tinggi, sedangkan fungsi sosial merujuk pada dampak partisipatif, kebersamaan yang diperoleh dari suatu pertumbuhan ekonomi. 2. Masih dalam fungsinya untuk memperlancar (pelumas) kegiatan ekonomi, jaringan sosial harus memiliki sifat keterbukaan pada semua orang untuk memberikan kesempatan kepada publik menilai fungsinya yang mendukung kepentingan umum. 3. Kombinasi dari fungsi ekonomi dan sosial sekaligus yang terdapat dalam kapital sosial, jaringan sosial harus bersifat emansipatoris dan integratif (Lawang, 2005, hal. 68-69). Putnam (1993) menambahkan bahwa “modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan” (Suharto, 2008, hal. 98).

Cox (1995) dan Onyx (1996) berpendapat bahwa “modal sosial dilahirkan dari bawah (*bottom-up*), tidak hierarkis dan berdasar pada interaksi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, modal sosial bukan merupakan produk dari inisiatif dan kebijakan pemerintah. Namun demikian, modal sosial dapat ditingkatkan atau dihancurkan oleh negara melalui kebijakan publik” (Suharto, 2008, hal. 100).

Hikmat (2006) dalam penjelasan lain mengklasifikasikan kekuatan masyarakat tersebut dalam 3 (tiga) jenis, yaitu; sebagai kekuatan pendorong, kekuatan bertahan, dan kekuatan pengganggu.

Kekuatan pendorong merupakan kekuatan yang kehadirannya harus ada atau diciptakan terlebih dahulu pada awal proses perubahan sosial dan dibertahankan selama proses perubahan berlangsung. Kekuatan ini dapat ditemukan dalam kehidupan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri; 1. Merasa tidak puas dengan situasi dan kondisi yang telah dirasakan dan biasanya selalu diikuti oleh perasaan adanya sesuatu yang belum terpenuhi, 2. Rasa bersaing

untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan. 3. Menyadari adanya kekurangan, dan karena itu berusaha untuk mengejar kekurangan. Kekuatan kedua dinamakan kekuatan bertahan, sikap bertahan dapat bersumber dari perasaan takut mengalami kegagalan, ketidaktahuan terhadap inovasi yang bersangkutan, apatis, keinginan mempertahankan tradisi tertentu, atau sumber daya mengadakan perubahan yang terbatas. Kekuatan ketiga adalah kekuatan pengganggu. Kekuatan pengganggu yang timbul dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu; 1. adanya kekuatan di masyarakat yang bersaing untuk memperoleh pengaruh dan dukungan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam alokasi biaya, tenaga, maupun tujuan yang ingin dicapai, 2. Kerumitan inovasi baru yang diperkenalkan untuk menimbulkan perubahan, 3. terbatasnya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan tersebut, termasuk tenaga, biaya, dan tenaga ahli (hal. 72-76).

2.2.3.6. Kendala dalam Pengembangan Masyarakat

Dalam prosesnya tidak semua kegiatan pengembangan masyarakat mudah untuk dilaksanakan, Watson dalam buku *Planning of Change* edisi kedua, menjelaskan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengembangan masyarakat, yaitu : pertama, kendala yang berasal dari kepribadian meliputi :

- a. Kestabilan (*homeostatis*), merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan (*stabilizing forces*) dorongan-dorongan dari luar. Karenanya suatu proses pelatihan yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum tentu dapat membuat perubahan yang permanen pada diri individu.
- b. Kebiasaan (*habit*), faktor internal lain yang dapat menghambat suatu perubahan adalah faktor kebiasaan, setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan (*otonomi fungsional*).
- c. Hal yang utama (*primacy*), bila tindakan yang pertama dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi suatu situasi tertentu,

- ia cenderung mengulanginya pada saat yang lain (ketika menghadapi situasi yang sama).
- d. Seleksi ingatan dan persepsi (*selective perception and retention*), penyeleksian persepsi yang ada dapat membantu *community worker* dan masyarakat dalam mengambil keputusan, tetapi di sisi lain penyeleksian ini dapat pula menghambat perubahan yang akan terjadi. Misalnya, bila seseorang antipati terhadap salah satu pembimbing keterampilan yang berasal dari suku tertentu hanya berdasarkan stereotif yang ia kembangkan sebelumnya tanpa memperhatikan kemampuan dari pembimbing keterampilan tersebut.
 - e. Ketergantungan (*dependence*), ketergantungan terhadap seseorang dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Bila dalam suatu kelompok masyarakat terlalu banyak orang yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain maka proses pemandirian masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan.
 - f. Superego, bahwa superego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaruan dan kadangkala menganggap pembaharuan sebagai sesuatu yang tabu.
 - g. Rasa tidak percaya diri (*self distrust*). Rasa tidak percaya diri yang tinggi juga membuat seseorang tidak yakin akan kemampuannya sehingga berbagai potensi yang dimilikinya sulit untuk muncul ke permukaan.
 - h. Rasa tidak aman dan regresi (*insecurity and regression*). Faktor internal lain yang dapat menghambat partisipasi yang efektif adalah kecenderungan untuk mencari rasa aman yang ia peroleh di masa lalu, mereka merasa bahwa perubahan yang akan terjadi justru akan dapat meningkatkan kecemasan dan ketakutan (*anxiety*) mereka. Berdasarkan hal ini mereka menjadi pihak yang cenderung untuk menolak pembaruan.
 - i. Faktor predisposisi (*Predisposing Factors*), Green dan Kreuter menyatakan sebagai faktor yang muncul sebelum (*antecedents*) perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh

seseorang. Seperti pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, dan persepsi dari komunitas sasaran.

Selanjutnya, yang kedua, faktor yang berasal dari sistem sosial, meliputi :

- a. Kesepakatan terhadap norma tertentu (*conformity to norms*), norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis mengikat sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu. Pada titik tertentu, norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaruan) yang ingin diwujudkan. Misalnya pada komunitas yang mempunyai norma yang menghalalkan perjudian, minuman keras, dan prostitusi, maka akan sulit bagi pelaku perubahan untuk merombak norma tersebut.
- b. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*systemic and cultural coherence*), perubahan pada suatu sistem sosial ataupun budaya yang sudah menyatu pada masyarakat tentunya akan sangat sulit dilakukan, karena komunitas sasaran sudah terbiasa dengan sistem sosial dan budaya yang ada.
- c. Kelompok kepentingan (*vested interests*), adanya berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat tidak jarang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan masyarakat karena mereka cenderung ingin menyelamatkan, mengamankan dan memperluas aset yang mereka miliki tanpa memperhatikan kepentingan kelompok lain.
- d. Hal yang bersifat sakral (*the sacrosanct*), salah satu yang mempunyai nilai kesulitan untuk berubah yang tinggi adalah ketika suatu teknologi ataupun program inovatif yang akan dilontarkan ternyata membentur nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dianggap sakral dalam suatu komunitas.
- e. Penolakan terhadap "orang luar" (*rejection of "outsiders"*), dari sudut pandang psikologi dikatakan bahwa manusia mempunyai sifat yang universal, salah satunya adalah ia mempunyai rasa curiga dan rasa terganggu (*hostility*) terhadap orang asing. Oleh karena itu, seorang *community worker* harus mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik agar ia tidak menjadi "orang luar" dalam masyarakat (Adi, 2008, hal. 259-272).

Faktor penguat Perubahan (*Reinforcing Factors*), Green dan Kreuter (1991) yang berpendapat bahwa faktor ini adalah “sesuatu yang muncul sebelum (*antecedent*) perilaku itu terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud. Faktor penguat perubahan terkait dengan *covert* (belum nyata) dan *overt behaviour* (perilaku nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain) dari pihak yang terkait dengan komunitas” (Adi, 2008, hal. 272).

Sedangkan faktor Pemungkin Perubahan (*Enabling Factors*) menurut Green dan Kreuter (1991), faktor ini adalah “faktor yang mengikuti (*subsequent*) suatu perilaku dan menyediakan ‘imbalan’ (*reward or incentive*) yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap tetap bertahannya perilaku tersebut” (Adi, 2008, hal. 273). Hal yang termasuk dalam *enabling factors* yaitu ketersediaan layanan kesehatan, keterjangkauan komunitas sasaran dengan layanan, tersediannya pelatihan guna mengembangkan keterampilan baru yang dapat dimanfaatkan individu, organisasi, ataupun komunitas untuk melakukan perubahan perilaku dan lingkungan.

2.2.4. Pelaku Perubahan (*Community Worker*) dalam Pelaksanaan Program.

2.2.4.1. Definisi Pelaku Perubahan (*Community Worker*)

Salah satu unsur yang tidak dapat dinafikkan kehadirannya dan memegang peranan penting dalam pelaksanaan program adalah pelaku perubahan (*Change Agent*) atau secara khusus dalam program pemberdayaan disebut sebagai agen pemberdaya masyarakat (*Community Worker*). Ife dan Tesoriero (2008) mendefinisikan *Community Worker* sebagai :

kegiatan atau praktek, dari seseorang yang berusaha memfasilitasi proses pengembangan masyarakat tersebut, baik dengan cara orang itu dibayar maupun tidak dalam melakukan peran tersebut. layanan berbasis masyarakat dilihat sebagai struktur-struktur dan proses-proses untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan mengerahkan sumber-sumber daya, keahlian dan kearifan dari komunitas itu sendiri (hal. 3).

Kemudian Adi (2005) mendefinisikan *community worker* atau secara general disebut sebagai pekerja sosial sebagai “seseorang yang berprofesi di

bidang pekerjaan sosial. Serta membedakan istilah tersebut dengan relawan yaitu mereka yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, tetapi bukan berasal (lulusan) atau tidak mendapat pendidikan khusus dari sekolah pekerjaan sosial ataupun ilmu kesejahteraan sosial” (hal. 94).

Terkait dengan pendidikan yang ditempuh dengan peran sebagai *community worker*, Ife dan Tesoriero (2008) menyatakan bahwa :

dalam program kerja masyarakat mana pun, akan banyak melibatkan orang-orang yang berbeda, dan tugas yang penting adalah belajar dari berbagai pengalaman orang lain, baik itu termasuk berasal dari pendidikan formal maupun tidak. Pelatihan atau pendidikan secara mudah merupakan sebuah atribut seorang pekerja masyarakat yang akan membawanya pada sebuah pekerjaan, dan sering kali bukan yang paling penting... pendidikan dan pelatihan seharusnya tidak dipikirkan terjadi pada para pekerja hanya sebelum mereka memulai bekerja. Keduanya adalah proses kehidupan yang tak pernah berakhir dan seorang pekerja masyarakat akan selalu tumbuh, belajar, dan berkembang (hal. 662).

Sedangkan pada tataran implementatif Nugroho D. (2006) menyatakan bahwa *Community Worker* mempunyai kehormatan fungsional untuk melakukan keleluasaan atau *diskresi (discretion)* dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagaimana penjelasan dibawah ini;

Dalam implementasi kebijakan, ada satu hal yang penting ditambahkan, yaitu *diskresi*, atau ruang gerak bagi individu pelaksana lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus ketika kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi lapangan (hal. 148).

Sesuai dengan definisi diatas terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka yang dimaksud dengan *Community Worker* adalah seseorang yang melakukan kerja masyarakat, berusaha memfasilitasi proses pengembangan masyarakat, mendapat tanggung jawab dan bertanggung jawab untuk

melaksanakan program atau secara khusus terkait dengan program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.

Sedangkan jika dilihat dari pelaksanaan pendampingan dapat dibedakan atas dua sisi yaitu secara internal dan eksternal, Ife dan Tesoriero (2008) menjelaskan bahwa :

yang dimaksud dengan Pekerja Masyarakat (*Community Worker*) internal adalah pekerja yang hidup dalam masyarakat yang ia kerjakan, atau secara jelas dikenal sebagai bagian dari masyarakat itu. Sedangkan Pekerja Masyarakat (*Community Worker*) eksternal adalah seseorang yang datang dari tempat lain, yaitu (setidaknya pada awalnya) seorang asing pada masyarakat dan terlihat sebagai ‘orang luar’. Dari pendekatan masyarakat, pendekatan internal pasti menjadi sebuah pilihan yang lebih disukai, sementara kerja masyarakat eksternal lebih terlihat sebagai problematik... ketika memungkinkan, seorang pekerja masyarakat seharusnya mencoba untuk bekerja dari sebuah pendekatan internal daripada eksternal. Hal ini berarti bahwa, jika ditetapkan sebagai seorang pekerja masyarakat dalam sebuah masyarakat yang bukan milik orang itu, ia perlu mencoba untuk menjadi seorang pekerja internal, misalnya dengan secara sengaja hidup dalam masyarakat itu jika memungkinkan, dengan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat dan dengan mengenali sebanyak mungkin para anggota yang lain dari masyarakat tersebut (hal. 665-668).

2.2.4.2. Peran dan Keterampilan *Community Worker* dalam Pengembangan Masyarakat.

Peran dan keterampilan yang harus dimiliki seorang pelaku perubahan diinfentarisir oleh Ife (1997) sekurang-kurangnya ada 4 (empat) peran dan keterampilan, yaitu : “peran dan keterampilan fasilitatif (*facilitative roles and skills*), peran dan keterampilan edukasional (*educational roles and skills*), peran dan keterampilan perwakilan (*representational roles and skills*), serta peran dan keterampilan teknis (*technical roles and skills*)” (Adi, 2008, hal. 89).

Dari keempat peran dan keterampilan tersebut Ife lebih memfokuskan pada peran dan keterampilan fasilitasi dan edukasional yang menurut Ife (2002) “merupakan peran yang lebih mendasar dan langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat” (Adi, 2008, hal. 90). Secara lebih detail diuraikan bahwa peran dan keterampilan fasilitasi, diantaranya :

- a. Animasi sosial adalah kemampuan petugas untuk membangkitkan energi, inspirasi dan antusiasme masyarakat, termasuk menstimulasi dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.
- b. Mediasi dan negosiasi dimana seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut. Sebagai sorang negosiator seorang pelaku perubahan harus mampu menengahi dan mencari titik temu yang dapat dikerjakan bersama tanpa menimbulkan pertentangan dan perpecahan yang lebih dalam.
- c. Pemberi dukungan, yaitu menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas. Dukungan tidak hanya bersifat ekstrinsik ataupun materiil tetapi juga bersifat intrinsik seperti pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan terhadap apa yang telah dilakukan warga seperti menyediakan waktu bagi warga bila mereka ingin berbicara guna membahas permasalahan yang mereka hadapi.
- d. Membentuk konsensus merupakan kelanjutan dari peran mediasi yang melibatkan penekanan terhadap tujuan umum bersama, mengidentifikasi landasan dasar yang sama dari berbagai pihak dalam masyarakat dan membantu warga untuk bergerak ke arah pencapaian konsensus. Pencapaian konsensus adalah kesepakatan melakukan suatu tindakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan keragaman dalam masyarakat sehingga tercapai rasa menghargai keragaman budaya dan pandangan yang ada.

- e. Fasilitasi kelompok merupakan keterampilannya untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil, termasuk memfasilitasi tuntutan masyarakat yang beranekaragam, serta memfasilitasi kelompok agar mau bertindak konstruktif dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Dalam pengembangan kelompok terkait dengan peran pelaku perubahan terdapat dua orientasi yang pertama *task oriented* dengan lebih memfokuskan pada membantu kelompok mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan *process oriented* sebagai orientasi yang kedua lebih mengarah pada penciptaan kelompok tersebut; bagaimana agar warga mau berpartisipasi dalam kelompok, serta bagaimana perasaan mereka setelah bergabung dengan kelompok. Ife berpendapat bahwa justru orientasi proses lebih memainkan peran utama dibanding dengan sekedar orientasi hasil yang akan dicapai.
- f. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan adalah kemampuan pelaku perubahan untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam kelompok maupun komunitas.
- g. Mengorganisasi terkait fungsinya sebagai organisator. Dalam keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berfikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, hal mana yang tidak perlu dilakukan sendiri, dan memastikan semua mungkin untuk diwujudkan.

Untuk peran-peran edukasional diantaranya meliputi:

- a. Membangkitkan kesadaran masyarakat, diawali dengan upaya untuk menghubungkan antara individu dan struktur yang lebih makro (struktur sosial dan politik) dengan tujuan agar masyarakat mau dan mampu mengatasi 'ketidakberuntungan struktural' mereka.
- b. Menyampaikan informasi yaitu dengan memberikan informasi yang relevan mengenai masalah yang sedang dihadapi komunitas sasaran, dapat juga dengan memberikan informasi tentang kesuksesan suatu program yang telah

berhasil dilaksanakan pada daerah yang memiliki kemiripan dengan komunitas sasaran.

- c. Mengonfrontasikan, teknik ini digunakan bila pelaku perubahan telah mempertimbangkan bahwa jika kondisi yang sekarang terjadi tetap dibiarkan, keadaan akan dapat semakin memburuk.
- d. Pelatihan adalah peran edukasional yang paling spesifik karena secara mendasar memfokuskan pada upaya mengajarkan komunitas sasaran bagaimana cara melakukan sesuatu yang akan berguna bagi mereka secara khusus dan lebih luas lagi bagi komunitasnya. Pelatihan pada dasarnya akan lebih efektif bila keterampilan yang diajarkan adalah keterampilan yang diinginkan oleh masyarakat (hal. 90-104).

Yang perlu dicermati adalah kadang kala seorang pelaku perubahan berperan ganda bahkan lebih. Dalam artian bahwa bisa saja dalam satu kegiatan pelaku perubahan menggunakan beberapa keterampilan dan menjalankan beberapa peran karena tumpangtindih tugas yang disandangnya.

2.2.4.3. Dukungan (*support*) kepada pelaku perubahan

Kerja masyarakat bisa menjadi sebuah pekerjaan yang sulit, akan tetapi kerja ini tidak bisa dilakukan sendirian. Para pekerja masyarakat pasti membutuhkan banyak dukungan (*support*) dari orang lain, Ife dan Tesoriero (2008) mengemukakan bahwa karena kerja masyarakat merupakan sebuah tugas menantang dan sulit, hal tersebut secara pribadi menuntut dan membuat frustrasi, dan terkadang membuat depresi dan mengecewakan. Karena itu diperlukan *support* dalam pelaksanaan tugasnya, diantaranya berasal dari:

1. Para majikan. Jika seorang pekerja masyarakat dipekerjakan oleh sebuah otoritas pemerintahan atau beberapa agensi eksternal maka si majikan tersebut harus bertanggung jawab memberikan si pekerja dengan berbagai dukungan, dan bantuan yang memadai. Dukungan berbentuk dukungan logistik dan pengawasan. Dukungan logistik berupa berbagai hal yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Dukungan pengawasan merupakan hak lain seorang pekerja masyarakat, dukungan ini melibatkan seorang pekerja masyarakat yang

mampu mendiskusikan sebuah pekerjaan dengan yang lainnya, yang mungkin lebih berpengalaman, pekerja yang dapat membantu mengusahakan pekerjaan itu bisa mempunyai perspektif dan menawarkan berbagai saran yang berguna.

2. Para teman sekerja. Seorang pekerja masyarakat jarang bekerja seorang diri dalam sebuah masyarakat. biasanya terdapat sejumlah orang yang memiliki peran yang berhubungan secara dekat, meskipun mereka tidak menganggap diri mereka memiliki label 'pekerja masyarakat' namun mereka mengambil sebuah perspektif pengembangan masyarakat dalam kerja mereka. dalam banyak cara, kelompok ini bertindak sebagai sebuah kelompok rujukan utama bagi seorang pekerja masyarakat, dalam kelompok inilah yang paling terlihat memberikan timbal balik yang membangun dan berbagai ide baru kepada seorang pekerja, dan merupakan sebuah sumber kritis dukungan emosional dan moral.
3. Para pekerja dalam berbagai masyarakat yang lain. Sumber penting lain dari dukungan adalah teman para pekerja masyarakat yang bekerja dengan masyarakat lain. Pada tingkatan formal dapat dilakukan dengan seminar, konferensi, dan kursus pelatihan. Sedangkan pada tingkatan non-formal dapat dilakukan dengan makan siang bersama, berbagai pesta dan berbagai peristiwa sosial yang lain yang dapat menyuguhkan tujuan ganda, informatif dan menyenangkan. Bentuk dukungan tidak harus dengan tatap muka dapat juga dilakukan dengan Newsletter; internet, telekonferensi, buletin elektronik dan email.
4. Para anggota komunitas. Dukungan datang dari masyarakat sendiri. Yang ideal dari alternatif berbasis masyarakat akan melihat masyarakat mampu memberikan seluruh dukungan yang diperlukan bagi para anggotanya. hal ini dapat dikatakan sebagai investasi pribadi para pekerja masyarakat dalam sebuah masyarakat atau suatu prinsip akan betul-betul dihargai dan selalu diingat oleh masyarakat.
5. Berbagai jaringan kerja Aktivis. Merupakan keterlibatan para pekerja masyarakat dalam sebuah kapasitas pribadi, dalam berbagai organisasi yang beragam atau berbagai gerakan sosial. keanggotaan aktif dalam sebuah

organisasi memberikan satu kesempatan bagi para pekerja untuk bertemu orang lain yang berbagai nilai-nilai yang serupa dan memperkuat komitmen pribadi mereka, disamping itu dapat menjadi sebuah sumber yang baik sekali terhadap ide baru bagi seorang pekerja masyarakat, dan merepresentasikan pengalaman praktik yang penting.

6. Berbagai jaringan kerja pribadi. Dalam hal ini dukungan keluarga, teman, rekan kerja dan teman serumah. Dengan dukungan dari orang-orang terdekat, para pekerja masyarakat minimal dapat mengatur kehidupannya sendiri seperti memelihara kesehatan mental dan mengurangi tingkat stress.

2.3. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam artian luas menurut Adi (2008) mencakup “berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka. Tetapi juga memperhatikan aspek sosial, mental, dan segi spiritualnya (hal. 44). Dalam arti luas, dalam konteks Indonesia, kata kesejahteraan sosial sering dikaitkan dengan bidang yang dikerjakan atau ditangani oleh Menko Kesejahteraan Rakyat serta Menko Ekuin (ekonomi, keuangan, Industri, dan Perdagangan), yang didalamnya terdapat Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan berbagai Kementerian terkait lainnya. (Adi, 2008, hal. 46-47)

Midgley (2005) memberikan batasan kesejahteraan dengan merujuk pada : satu kondisi sosial bukan pada kegiatan amal yang dilakukan kelompok-kelompok philantropi (philantropi diartikan sebagai kegiatan yang berusaha untuk mengangkat kesejahteraan sosial dengan mendukung pembagian milik pribadi misalnya dengan kegiatan amal dan layanan kepada orang-orang yang membutuhkan), juga bukan bantuan publik yang diberikan pemerintah (hal. 18).

Sebagaimana pendapat Friedlander (1980) mendefinisikan Kesejahteraan sosial dengan “*Social welfare is the organized sytem of social services and institutions,*

designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life and health” (Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan) (Adi, 2008, hal. 47-48).

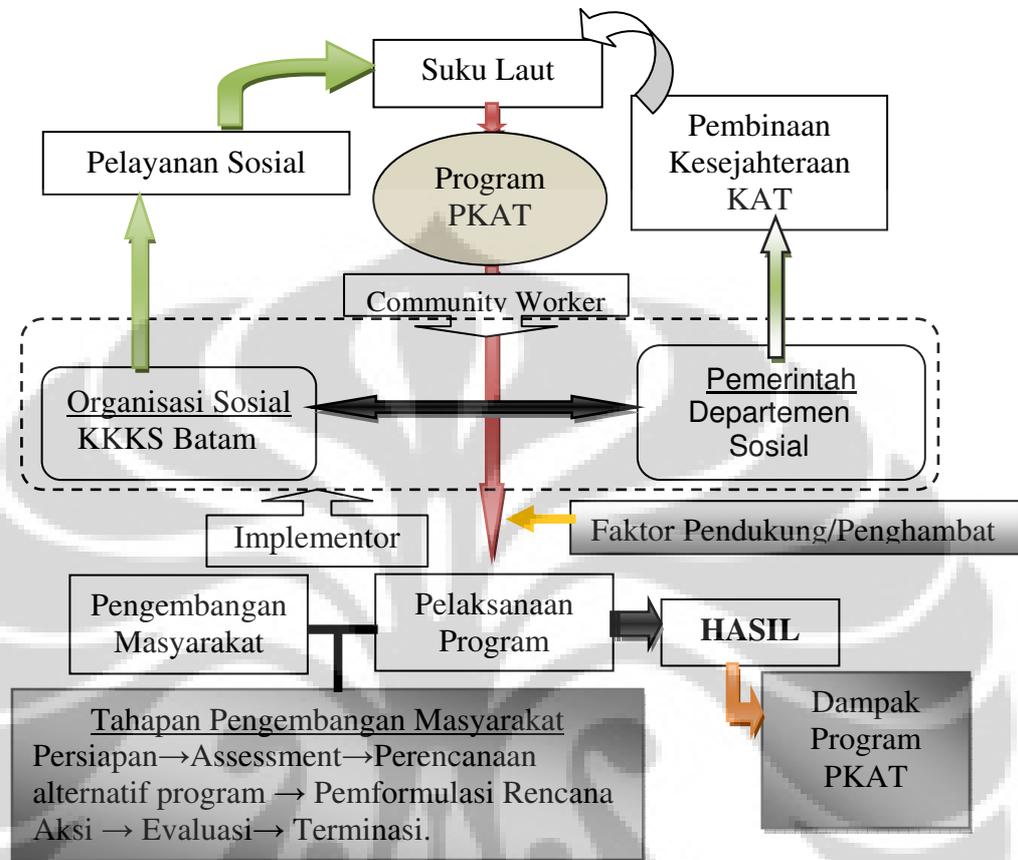
Lebih rinci Midgley (2005) mendeskripsikan bahwa semua manusia, keluarga, komunitas dan masyarakat memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar manusia dapat mencapai kebahagiaan (*social contentment*)... Kebutuhan tersebut merujuk pada kebutuhan biologis dasar untuk kelangsungan hidup seperti nutrisi, air yang dapat diminum, tempat berteduh, dan keamanan, taraf pendidikan yang baik, kesehatan yang layak, juga interaksi sosial yang harmonis, air minum dan keamanan sosial (hal. 21-22).

Secara formal kesejahteraan sosial menurut UU No.11 tahun 2009 pasal 1 angka (1) dalam (Undang-Undang, 2009) didefinisikan sebagai “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Dari beberapa definisi diatas sehingga yang dimaksud kesejahteraan sosial merupakan usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai kebahagiaan (*social contentment*) dan standar hidup yang memuaskan (*well being*) secara ekonomi, fisik, sosial, mental, dan segi spiritual. Suatu kondisi yang terbentuk ketika masyarakat dapat mengatur masalah-masalah sosialnya, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi dan sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan.

2.4. Model Operasional Penelitian

Model Operasional dalam sebuah penelitian berfungsi untuk memperjelas arah penelitian sehingga pada nantinya dapat tergambar tujuan sesuai dengan fokus penelitian yang diambil. Berdasarkan alur pikir yang ada sehingga tergambar model operasional penelitian sebagaimana dibawah ini :



Gambar 2.8. Metode Operasional Penelitian

Sumber: Adi (2008), Parsons (2008), Indiahono (2009) diolah kembali

Model Operasional sebagaimana tergambar diatas bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut yang bermukim di pulau Bertam-Kota Batam. Program PKAT merupakan penjelasan dari kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada KAT dalam bentuk kebijakan Pembinaan Kesejahteraan KAT khususnya pada komunitas suku laut di pulau Bertam-Kota Batam. Dalam proses pelaksanaan tersebut melibatkan unsur implementor atau pelaksana program yang berasal dari kalangan pemerintah dalam hal ini Departemen sosial, Dinas Sosial, dan Pemerintah setempat serta Organisasi Sosial yaitu KKKS Batam, dan juga *Community Worker* atau pekerja masyarakat yang secara operasional langsung bersentuhan dengan komunitas sasaran.

Pemberdayaan merupakan kajian yang dapat dipandang sebagai sebuah program dan juga sebagai sebuah proses. Sebagai program, Pemberdayaan dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan, Assesment, perencanaan hingga tahap terminasi, dan juga dengan memperhatikan faktor penghambat dan pendukung dari program PKAT tersebut. Keseluruhan proses pada nantinya menghasilkan keluaran baik hasil (*out put*) yang mendasar pada tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya secara terperinci, maupun *out comes* yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung dan positif maupun negatif pada kehidupan KAT suku laut yang bermukim di pulau Bertam-kota Batam. Sebagai sebuah proses, maka pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup (*on going process*) tidak berhenti ketika program dinyatakan telah selesai (*terminasi*).

BAB 3
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN,
PELAKSANAAN PROGRAM PKAT DAN
PROFIL LEMBAGA KKKS BATAM

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Kondisi Historis

Suku Laut merupakan warga penghuni pertama di pulau Bertam-Kota Batam. Komunitas ini mendiami pulau Bertam setelah sebelumnya hidup nomaden di laut dengan menggunakan sampan yang beratapkan “kajang” mengitari wilayah perairan Batam dan selat Singapura. Data dari Depsos RI dan KKKS Batam menunjukkan bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa Proto Melayu yang datang ke kawasan nusantara terutama pesisir timur dari daratan Asia melalui Semenanjung Tanah Melayu atau wilayah Negara Malaysia sekitar tahun 2500-1500 SM.

Suku laut termasuk bangsa yang sudah maju atau *Neolithicum* dan merupakan bagian dari jaman kebudayaan batu besar atau *Megalithicum* dengan membawa budaya dan adat istiadat yang khas dan telah mengenal cara bercocok tanam. Sekitar tahun 300 SM bangsa ini terdesak oleh kedatangan bangsa Deutro Melayu yang lebih maju dan tangguh, beberapa dari mereka masuk ke dalam hutan hingga sekarang dikenal dengan suku Talang Mamak dan sebagian menyingkir ke laut yang kemudian disebut sebagai Suku Laut. Kemampuan navigasi laut yang dimiliki Suku Laut sangat terkenal hingga pada suatu waktu mereka mendapatkan tugas untuk menjaga keamanan laut terutama pada jaman kerajaan Sriwijaya. Suku inilah yang kemudian mengembara di lautan hingga sebagian kemudian menetap di Pulau Bertam-Kota Batam hingga sampai saat penelitian ini dilaksanakan.

3.1.2. Kondisi Geografis

Pulau Bertam merupakan salah satu gugusan pulau yang ada di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Desa Kasu Kecamatan Belakang Padang yang berjarak dari pulau Batam sekitar 7 mil dari pelabuhan

Tanjung Uncang Batam atau 10 mil dari pelabuhan Sekupang Batam. Secara geografis wilayah Kota Batam sendiri mempunyai luas wilayah 1.570,35 km², yang terdiri dari 186 pulau besar dan kecil dengan pulau terbesar yaitu pulau Batam dengan luas 415 Km² atau yang disebut sebagai *Bonded area* sedangkan pulau-pulau kecil disekitarnya disebut sebagai daerah *Hinterland* termasuk pulau Bertam didalamnya.

Secara umum letak pulau Bertam dalam peta sulit ditemukan, salah satu yang menjadi sebab karena ukuran pulau yang relatif kecil sehingga kurang dapat teridentifikasi. Letak pasti pulau Bertam baru dapat ditemukan dalam rencana tata kota oleh Dinas Pertanahan Batam (secara jelas dapat dilihat dalam lampiran 3). Pulau Bertam merupakan pulau berbentuk cembung berteluk yang memiliki pantai pasir berwarna putih yang jika air laut surut akan tampak garis tepi lebih dari 100 meter. Teluk bagi komunitas suku laut berfungsi sebagai tempat yang potensial untuk mendapatkan tangkapan ikan sehingga bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.

Namun demikian yang terjadi saat ini, kondisi air semakin hari semakin keruh karena tercemar dengan polusi yang berasal dari industri (galangan kapal) juga pengerukan pasir laut yang ada disekitar pulau akibatnya membuat hasil tangkapan warga semakin menurun. Seperti diketahui bahwa perkembangan pembangunan Batam tumbuh pesat dengan keberhasilannya mengembangkan Batam sebagai daerah industri, perdagangan, galangan kapal dan pariwisata terutama setelah dikeluarkannya Keppres No 41 tahun 1973 dan Keppres No 05 tahun 1983 sebagai daerah yang mempunyai otoritas pengembangan wilayah. Kondisi tersebut memberikan peluang positif yaitu memberikan kesempatan lapangan kerja yang lebih luas untuk warga namun juga memberikan dampak negatif diantaranya polusi udara dan polusi air laut yang berakibat pada berkurangnya habitat ikan sehingga secara langsung mempengaruhi hasil tangkapan ikan warga Bertam.

Sebagaimana diketahui bahwa industri galangan kapal sebagian besar terletak sepanjang daerah Sekupang-pulau Batam (kurang lebih 45 menit dari Bertam dengan menggunakan kapal *boat*) dan Tanjung Uncang-pulau Batam

(kurang lebih 15 menit dari Bertam dengan menggunakan kapal *boat*) dekat dengan garis pantai. Daerah tersebut merupakan kawasan tempat nelayan mencari ikan tak terkecuali warga dari pulau Bertam dan daerah yang dekat dengan permukiman warga Bertam.

Letak pulau Bertam strategis sebagai jalur penghubung antara Pulau Batam dengan Pulau Belakang Padang (Kota Kecamatan) dengan pelabuhan sekupang juga pulau Kasu (Kota Kelurahan). Pulau Bertam berhadapan dengan pulau Lingka dan bersebelahan dengan pulau Gara, tidak jauh dari pulau tersebut terdapat pulau janda berhias, pulau padi, pulau nipah, dan pulau pasir.



Gambar 3.1. Pulau Lingka dilihat dari Pulau Bertam, serta Aktivitas Anak Sekolah dari Pulau Gara menuju Pulau Bertam.
Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010

3.1.3. Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk Pulau Bertam berdasarkan hasil penelitian pada bulan September 2010 dengan dibantu Sekretaris RT 20 dan salah seorang warga, berjumlah 116 Jiwa yang terdiri dari; 55 jiwa (47,41%) Perempuan dan 61 jiwa (52,59%) laki-laki, dengan 31 Kepala Keluarga. Komposisi penduduk menurut umur sebagaimana ditunjukkan dengan tabel 3.1. dibawah ini;

Tabel 3.1. Penduduk Bertam-Kota Batam Menurut Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 4 Th.	9	7,76
2.	5 – 16 Th.	36	31,03
3.	17 – 40 Th.	38	32,76
4.	□ 40 Th	33	28,45
Total Jumlah		116	100

Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat komposisi yang beragam menurut usia dimana sebanyak 38 jiwa atau kurang lebih 32,76% merupakan usia produktif yang dapat dimanfaatkan sebagai aset Sumber Daya Manusia bagi komunitas. Sedangkan sebanyak 33 jiwa atau kurang lebih 28,45% merupakan penduduk dengan usia diatas 40 tahun. Dan hanya 9 jiwa atau kurang lebih 7,76% merupakan usia balita.

Dari jumlah tersebut hampir mayoritas penduduk merupakan warga suku laut yang semula hidup nomaden disekitar pulau Batam. Menurut data Depsos Kota Batam pada tahun 1996, jumlah penduduk pulau Bertam sebanyak 27 KK, atau kurang lebih 116 jiwa. Artinya hampir 14 tahun sejak Depsos kota Batam mengadakan pendataan jumlah warga Bertam tidak mengalami penambahan.

3.1.4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama mayoritas warga adalah sebagai nelayan. Hanya beberapa warga yang memilih untuk bekerja selain nelayan diantaranya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Guru, dan membuka warung. Pekerjaan utama sebagai nelayan karena tidak ada keahlian dan keterampilan lain yang dimiliki warga selain menangkap ikan. Kemampuan dan keahlian navigasi yang diterima secara turun temurun membuat warga lebih mengandalkan pekerjaan sebagai nelayan. Kemampuan navigasi digunakan untuk memprediksi cuaca, arah angin, gelombang sehingga dapat diketahui di lokasi mana dan kapan waktu yang sesuai untuk membuang *sauh* mencari tangkapan ikan.

Ketergantungan warga terhadap hasil tangkapan laut terlihat dari kehidupan warga, beberapa warga akan lebih memilih membawa seluruh keluarga dan juga hewan peliharaan, termasuk anak mereka yang masih sekolah untuk membolos dan ikut "*bertandang*" (beberapa hari bahkan bulan meninggalkan rumah untuk mencari ikan di pulau-pulau lain sekitar pulau Bertam) dibanding dengan meninggalkan atau menitipkan anak mereka di rumah untuk bersekolah. Selain sebagai nelayan sebagian warga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pembuat perahu atau sebagai pemulung besi maupun plastik yang dijumpai pada saat melaut. Pilihan pekerjaan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari

warga yang bersangkutan misalnya satu dari mereka yang bekerja sebagai PNS (guru) disebabkan karena memiliki tingkat pendidikan S1 (Strata 1).

Guna memenuhi kebutuhan hidup maka hasil tangkapan ada yang langsung dijual untuk kemudian dibelikan kebutuhan pokok, sebagian yang lain dikonsumsi sebagai lauk pauk. Ikan dijual dalam bentuk ikan segar kecuali untuk ikan teri dan gamat (*Sea Cucumber*) sejenis teripang diolah terlebih dahulu dengan merebus untuk kemudian dikeringkan. Gamat merupakan tangkapan *favorite* karena menjanjikan harga yang lebih tinggi dibanding ikan biasa, untuk gamat kering dengan ukuran 1cm dapat dijual dengan harga Rp. 135.000/Kg atau kurang lebih 13,5 kali dari harga ikan segar. Namun demikian perolehan gamat masih tergantung pada tangkapan di laut dan belum ada warga yang membudidayakan sehingga tidak setiap saat warga dapat memperoleh gamat.

Secara kualitas memang sulit untuk menghitung berapa pendapatan masyarakat dalam setiap harinya, namun jika melihat kondisi permukiman dan rumah sebagian besar warga menunjukkan kehidupan yang secara kualitas menunjukkan keadaan yang kurang sejahtera. Beberapa kondisi dan aktifitas diatas dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini;



Gambar 3.2. Permukiman warga suku laut di pulau Bertam, kondisi salah satu rumah warga, keahlian warga membuat perahu, serta pengolahan sederhana gamat dengan cara dikeringkan.

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Oktober 2010

3.1.5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan warga rendah, banyak dijumpai warga buta huruf dari mereka yang buta huruf lebih banyak berasal dari para orang tua. Hal ini terjadi karena pada saat mereka masih nomaden sebelum dimukimkan, kesempatan untuk

bersekolah hampir tidak ada. Kegiatan yang dilakukan lebih banyak membantu orang tua mencari ikan. Tingkat pendidikan warga Bertam dapat dilihat sebagaimana tabel 3.2. dibawah ini:

Tabel 3.2. Tingkat Pendidikan Warga Pulau Bertam-Kota Batam

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Buta huruf	50	43,10
2	SD Tidak tamat	14	12,07
3	SD	23	19,83
4	SLTP Tidak Tamat	4	3,45
5	SLTP	5	4,31
6	SMU Tidak Tamat	2	1,72
7	SMU	3	2,59
8	S1 (Strata 1)	2	1,72
9	Belum Masuk Usia Sekolah	13	11,21
Jumlah		116	100

Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010

Tingkat pendidikan warga menunjukkan variasi dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Tercatat mereka yang mempunyai tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 2 orang atau kurang lebih 1,72%. Namun demikian juga banyak ditemui warga yang tidak dapat membaca dan menulis dengan tingkat buta huruf yang tinggi yaitu sekitar 43,10% atau hampir sebagian dari jumlah warga Bertam.

Program Kejar paket A pernah dilakukan namun putus ditengah jalan. Hal ini disebabkan kurang motivasi warga untuk belajar, anggapan dari warga sekolah hanya membuang waktu disamping karena belum bisa membagi waktu antara belajar dan melaut. Menurut mereka belajar mengurangi waktu untuk mencari ikan sehingga tangkapan ikan menjadi berkurang. Seperti diketahui bahwa untuk makan dan mendapatkan penghasilan utama mereka harapkan dari cara mencari ikan baik dikonsumsi maupun dijual.

Dan dari 116 jiwa sebanyak 35 jiwa atau kurang lebih 30,17% warga tergolong dalam kelompok usia wajib sekolah yaitu antara usia 7-18 tahun. Berdasarkan data penelitian menunjukkan 2 orang atau sekitar 5,71% dari kelompok usia sekolah tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah dan selebihnya yaitu sekitar 94,29% mengenal pendidikan. Hal ini menunjukkan orang tua sudah mulai mengerti pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka.

Penyediaan fasilitas sekolah yang berupa gedung Sekolah Dasar (SD) yang berada di pulau Bertam menjadi salah satu faktor pendorong tersebut. Disamping itu gedung sekolah juga dapat menjadi sarana bagi warga untuk berinteraksi dengan warga dari pulau lain, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 3.3. Variasi Tempat Tinggal Siswa SDN Lokal Jauh 006
Pulau Bertam-Kota Batam

No.	Tempat Tinggal	Kelas						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Pulau Bertam	6	4	-	3	2	1	16 Siswa
2.	Pulau Gara	6	2	6	2	1	2	19 Siswa
3.	Pulau Lingka	7	4	2	3	4	-	20 Siswa
Total Jumlah								55 Siswa

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2010.

Dari tabel diatas menunjukkan adanya tingkat variasi dari siswa yang bersekolah di SDN Lokal Jauh 006 pulau Bertam, dengan tercatat sebanyak 19 siswa atau sekitar 34,55% berasal dari pulau Gara, dan sebanyak kurang lebih 36,36% atau sebanyak 20 siswa berasal dari pulau Lingka, dan sisanya sekitar 29,09% atau sekitar 16 siswa berasal dari pulau Bertam.

Bersekolah juga dapat digunakan sebagai aktivitas untuk mengajarkan para anak didik kebiasaan yang bermanfaat untuk masa depan mereka diantaranya kegiatan gemar menabung seperti yang telah dilakukan oleh siswa SDN Lokal Jauh 006 yang merupakan gagasan dari salah satu guru yang juga merupakan informan dalam penelitian kali ini. Hasil tabungan dapat dimanfaatkan siswa diantaranya untuk pembayaran uang SPP, pembelian buku atau pembelian peralatan sekolah yang lain.



Gambar 3.3. Siswa SDN Lokal Jauh 006 , Guru serta penulis didepan Gedung Sekolah, Kegiatan Gemar Menabung Siswa SDN Lokal Jauh 006, dan Aktivitas Belajar Siswa di luar Waktu Sekolah.

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Oktober 2010.

3.1.6. Pola Pemukiman

Rumah di pemukiman Suku laut yang berada di pulau Bertam mayoritas adalah rumah yang berasal dari pelaksanaan program Pembinaan Masyarakat terasing atau sekarang dinamakan KAT. Bentuk rumah dibuat dalam bentuk berhadap-hadapan dan menjorok ke laut. Rumah dibuat diatas pantai dengan pancang-pancang kayu dengan ketinggian kurang lebih antar 2 - 3,5 meter. Ruang terdiri dari depan ruang keluarga dan kamar tidur, sedangkan bagian belakang diperuntukkan sebagai dapur. Untuk MCK berada di luar rumah dibangun menyatu dengan rumah induk. Sebagian warga telah merombak bentuk rumah disesuaikan dengan jumlah anak yang semakin besar disamping juga dari segi ekonomi. Namun juga ditemukan adanya rumah dalam keadaan roboh rata dengan tanah disebabkan oleh bencana alam juga karena usia bangunan yang sudah tua. Antar rumah dihubungkan dengan pelatar dengan batas dermaga yang juga merupakan hasil dari pelaksanaan program, dengan panjang kurang lebih 10 meter menuju ke daratan. Jembatan yang dibangun sudah kurang lebih 13 tahun terlihat mulai lapuk bahkan beberapa sudah mulai berlobang menyebabkan rentan jatuh bagi mereka yang melewatinya.

Pantai hanya sebagai tempat membangun rumah penduduk, sedangkan fasilitas umum misalnya masjid, sekolah, tempat mandi umum, juga sumur sebagai sumber mata air tawar, dibangun di daratan dengan kontur tanah yang lebih tinggi. Beberapa bangunan terlihat sudah rusak bahkan beberapa telah rubuh sehingga tidak dipergunakan lagi, misalnya bangunan balai kesehatan, rumah tinggal bidan, rumah tinggal guru, dan beberapa rumah warga yang dibangun didaratan.

Di pemukiman ini juga terdapat tanah lapang yang cukup luas berada di depan gedung sekolah. Tanah lapang ini tempat warga berkumpul tidak hanya berasal dari warga Bertam tetapi juga dari warga Lingka dan Gara. Tanah lapang tersebut merupakan satu-satunya yang ada dari ketiga pulau tersebut. Kegiatan yang dilakukan misalnya untuk kegiatan olahraga seperti sepak bola, bola volley atau kegiatan santai misalnya pertunjukkan “joget”.



Gambar 3.4. Bentuk permukiman warga Suku Laut di Pulau Bertam, Warga Pulau Bertam, Gara dan Lingka sedang menikmati pertandingan sepak bola, pemanfaatan tanah lapang untuk olah raga, serta hiburan “joget” di pulau Bertam-Kota Batam.

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Oktober 2010.

3.1.7. Kesehatan

Bentuk rumah panggung lebih banyak kurang mendukung dari segi kesehatan. Hampir seluruh warga membuang sampah mereka tidak hanya sampah rumah tangga tetapi juga MCK, langsung kebawah rumah. Anggapan mereka sampah akan langsung dibawa air laut pada saat pasang dan sehingga ketika surut lingkungan kembali bersih. Yang terjadi sebaliknya, banyak sampah yang tidak terbawa air laut, tersangkut di bawah rumah warga disamping itu pencemaran air laut juga menambah lingkungan menjadi lebih kotor dan kurang sehat.

Rusaknya sarana kesehatan menunjukkan bahwa warga Bertam kurang terjangkau dan terpantau aspek kesehatannya oleh pemerintah, hal ini didukung dengan tidak datangnya petugas kesehatan kurang lebih selama 4 bulan terakhir pada saat penelitian ini dilaksanakan. Berobat dilakukan warga di puskesmas terdekat dengan pulau Bertam yang berada di pulau Kasu (Kota Kelurahan) kurang lebih 20 menit perjalanan di laut dengan menggunakan perahu *boat*, sedangkan jika warga menderita sakit berat hingga tidak dapat ditangani puskesmas maka mereka akan dirujuk di Rumah Sakit Budi Kemuliaan tanpa biaya pengobatan (gratis). RS Budi Kemuliaan merupakan mitra dari KKKS Batam dalam bidang kesehatan yang juga dipimpin oleh Ibu Sri Soedarsono. KKKS atau sebelumnya bernama FKKS Batam merupakan salah satu pelaksana program pemberdayaan yang ada di Pulau Bertam.

Namun demikian fasilitas tersebut belum maksimal dimanfaatkan hal ini disebabkan biaya perjalanan menuju rumah sakit ditanggung sendiri oleh warga dengan jarak tempuh yang cukup jauh untuk menuju ke rumah sakit. Dari pulau Bertam dengan perjalanan laut menuju Tanjung Uncang-pulau Batam kemudian perjalanan darat kurang lebih 1 jam untuk sampai di Rumah Sakit. Karena itu untuk kelahiran anak, warga juga mempercayakan kepada dukun beranak yang juga merupakan isteri dari Bapak Sekretaris RT. Keahlian yang dimiliki beliau merupakan warisan turun temurun.



Gambar 3.5. Sampah yang menumpuk di bawah rumah warga, Bangunan Rumah Bidan yang sudah tidak bisa digunakan, dan Salah satu warga Bertam yang juga merupakan dukun beranak bersama cucu.

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Oktober 2010

3.1.8. Keagamaan, Sosial dan Budaya

Sebagian besar warga beragama Islam yaitu sebanyak 26 KK dan selebihnya memeluk agama Nasrani yaitu sebanyak 5 KK. Agama Islam dan Nasrani mereka anut setelah masuk permukiman di Bertam. Sebelumnya mereka tidak menganut agama manapun tetapi sangat percaya dengan adanya Tuhan, yang ditunjukkan dengan berbagai ritual adat, misalnya yang terkait dengan kelahiran, perkawinan, dan kematian. Namun demikian meski beragama Islam ada beberapa adat istiadat yang masih dilaksanakan diantaranya terkait dengan kehamilan yang bertujuan untuk menjaga usia kandungan dan kesehatan bayi, masyarakat meyakini ada beberapa mitos yang tidak boleh dilanggar, yaitu Jika masuk hutan dan ada bekas makan babi, tidak boleh dilangkahi atau di lewati. Tidak mengganggu binatang, tidak memukul monyet. Jika dilanggar nantinya dalam kandungan bisa sampai 12 bulan anak baru bisa lahir, juga dikawatirkan bayi akan terkena bala dari binatang yang diganggu. Tidak boleh memaku jika hari sudah

Universitas Indonesia

sore dan juga tidak boleh memotong seng, jika dilanggar dapat dikuatirkan bayi yang lahir nantinya dalam keadaan cacat atau sumbing. Disamping itu mereka juga mengenal acara adat yang dipimpin oleh yang dituakan atau dikenal dengan panggilan Nenek Nora yang dipercaya berusia kurang lebih 100 tahun yang tinggal di pulau teluk Paku kecamatan Bulang lintang sekitar kurang lebih 40 menit perjalanan laut dengan menggunakan perahu *boat* dari pulau Bertam. Untuk kegiatan ini warga mengeluarkan uang Rp. 50.000,- sebagai balas jasa yang telah diberikan.

Untuk kematian menggunakan tata cara agama Islam dengan dipandu oleh seorang Ustad bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama Kristen menggunakan tata cara agama yang bersangkutan. Setiap warga yang meninggal nantinya akan dimakamkan yang terletak di belakang Masjid pulau Bertam. Namun demikian ada acara khusus yang dilaksanakan untuk mendoakan jenazah dan orang yang ditinggalkan yaitu acara 3 hari, 7 hari sampai dengan 40 hari. Acara ini dikemas sesuai dengan ajaran agama masing-masing juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga.

Sedangkan hiburan yang biasa dilakukan warga dikenal dalam bentuk pertunjukan “joget”. Pertunjukan “joget” dilakukan oleh 10 penari yang kesemua masih dalam usia remaja dan berasal dari luar pulau, dengan iringan musik modern yang menghentak dan tidak ada ketentuan serta aturan baku bagaimana para penari harus mengerakkan badan. Kebiasaan ini dilakukan warga tiga bulan sekali sebagai hiburan melepas lelah setelah seharian mencari ikan, karenanya biasanya dimulai pada jam 24.00 WIB setelah beberapa saat para warga pulang melaut dan berakhir pada jam 02.00 WIB atau kurang lebih 2 jam.

Namun demikian jika dilihat dari segi ekonomi “joget” memunculkan kebiasaan pemborosan, untuk sekali bergoyang dengan 1 orang penari dan 1 lagu warga harus mengeluarkan biaya Rp. 4.000,- dengan durasi waktu kurang lebih 5 menit, sehingga pengeluaran keseluruhan warga untuk sekali pergelaran joget adalah $[(2 \times 60 \text{ menit}) / 5 \text{ menit}] \times \text{Rp. } 4000 \times 10 \text{ penari}$ atau kurang lebih Rp. 960.000,- dan selama 1 tahun dapat terkumpul kurang lebih Rp. 3.840.000,-.

Kegiatan ini telah menjadi tradisi warga Bertam sehingga setiap warga baik perempuan maupun laki-laki akan datang dan ikut larut dalam “joget”.

3.1.9. Politik Pemerintahan

Secara formal pola hubungan antar warga berdasarkan struktur pemerintahan resmi yang ada di Indonesia, dengan bentuk pemerintahan setingkat RT (Rukun Tetangga) yang dalam tugasnya dibantu oleh Wakil RT dan Sekretaris RT. Pulau Bertam sendiri merupakan wilayah RT 20 RW 06 Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam. Peran RT dalam hubungan kemasyarakatan sama dengan peran Kepala Suku yang sebelumnya mereka percaya. Berdasarkan pada Dokumentasi dari KKKS tentang pola pembinaan Suku Laut disebutkan bahwa Tiap kelompok masyarakat Suku Laut dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang mempunyai pengaruh besar dalam sukunya. Kepala suku yang menentukan apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan oleh warga masyarakatnya. Kepala suku laut biasanya disebut “Batin” atau “Yang dipertuan” yang membawahi puaknya disekitar perairan Selat Philip/Selat Singapura. Dalam struktur kepemimpinan suku laut, Batin hanya sebagai pembantu dari puncak pimpinan yang bergelar “Datuk penghulu” merupakan orang yang sangat dihormati serta ditakuti, karena dipercaya sebagai orang sakti yang mempunyai kekuatan gaib. Pola pergantian dalam struktur kepemimpinan ini berdasarkan keturunan.

Sedangkan secara formal, peran RT sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Penunjukkan dan Pengangkatan RT tertanggal 7 Juni 2009 adalah sebagai berikut: 1. Membantu terwujudnya kehidupan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. 2. Menggerakkan swadaya, gotong-royong dan partisipasi masyarakat. 3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional. 4. Menjabatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan pemerintah. 5. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

3.1.10. Perhubungan, Penerangan dan Telekomunikasi

Mobilitas keluar masuk pulau Bertam baik warga pulau Bertam maupun warga di luar pulau tergantung pada transportasi laut dengan kepemilikan pancung ataupun perahu boat, kondisi ini disebabkan karena tidak adanya sarana dan prasarana penghubung darat menuju pulau Bertam dengan pulau lainnya. Sulitnya perjalanan menuju pulau Bertam salah satu penyebabnya dikarenakan tidak tersedianya transportasi laut umum setiap saat dan setiap waktu dari Batam (Kotamadya) menuju ke pulau Bertam dan sebaliknya, ataupun dari Bertam ke Belakang Padang (Kota Kecamatan) begitu juga sebaliknya, dan juga dari pulau Kasu (Kota Kelurahan) ke pulau Bertam begitu sebaliknya. Perjalanan menuju pulau Bertam hanya dapat dilakukan jika ada permintaan dengan cara menyewa perahu boat atau kita meminta warga Bertam untuk menjemput menuju pulau Bertam.

Dari segi penerangan, hampir semua warga menggunakan diesel sebagai energi penerangan. Sebelumnya warga menggunakan sumber energi tata surya yang merupakan salah satu hasil program pemberdayaan melengkapi fasilitas sarana prasarana untuk pemukiman warga, namun karena mahalnya peralatan yang rusak dan kurangnya perawatan sehingga menyebabkan alat tersebut tidak lagi digunakan. Sedangkan fasilitas listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) belum menjangkau pulau Bertam.

Dijumpai juga hampir semua warga telah mempunyai televisi, dan juga alat elektronik lainnya seperti radio dan juga tape. Alat modern seperti Laptop juga telah dimiliki oleh sebagian kecil warga, mereka juga telah mengenal dan menggunakan handphone sebagai alat komunikasi, disamping juga mengenal dan menggunakan internet sebagai alat informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa warga Bertam terbuka menerima perubahan dan telah mengenal dan menggunakan alat modern khususnya dalam hal komunikasi dan informasi yang tidak berbeda dengan masyarakat lainnya.

3.1.11. Peranan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga

Perempuan baik isteri/ibu maupun anak mempunyai peranan penting dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya berperan domestik para isteri juga membantu

dan mendampingi suami mencari ikan, hal ini dilakukan baik sebelum mereka dimukimkan maupun sesudah mereka dimukimkan. Ketika sebelum dimukimkan segala pengelolaan kebutuhan suami dan anak menjadi tanggung jawab mereka, kondisi ini didukung bahwa orang suku laut dikenal setia dan menghormati terhadap pasangan hidupnya. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya tingkat perceraian dan poligami pada warga suku laut yang telah menikah.

Sedangkan bantuan yang diberikan guna menambah penghasilan suami diwujudkan dengan cara membantu menangkap ikan. Setelah dimukimkan yang dilakukan para isteri adalah dengan cara menemani suami mereka mencari ikan pada saat “bertandang” yaitu pergi berperahu beberapa hari bahkan sampai berbulan-bulan untuk mencari ikan diluar pulau Bertam. Selain salah satunya juga membuka usaha warung yang menjual kebutuhan warga Bertam. Anak perempuan mempunyai kesempatan sama dengan anak laki-laki baik dalam pembelajaran cara menangkap ikan maupun dalam pendidikan.



Gambar 3.6. Salah satu keberhasilan warga dalam bidang pendidikan, Kegiatan ibu mengantar anak pergi kesekolah, dan salah satu usaha yang digeluti para perempuan guna menambah penghasilan keluarga.
Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010

3.2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (PKAT)

Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada komunitas Suku Laut yang ada di pulau Bertam digulirkan pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial RI pada tahun 1989 dan berakhir pada tahun 1993 dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing. Program ini berdasar pada keadaan Suku Laut yang hidup nomaden mengembara yang dapat menimbulkan kerawanan keamanan negara mengingat Batam merupakan wilayah

perbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura, disamping adanya pemukiman suku laut yang belum memenuhi syarat sejahtera.

Pola pembinaan dilaksanakan secara terencana dan terprogram sebagai bagian integral dari pembangunan daerah, pembangunan daerah industri pulau Batam serta pembangunan Hankamnas di daerah Perbatasan. Pelaksanaan program ini melibatkan unsur masyarakat sebagai implementor dalam hal ini organisasi sosial yang dalam programnya memberikan pelayanan sosial pada komunitas suku laut yaitu KKKS (sebelumnya bernama FKKS) Batam.

3.2.1. Pelaksana Kegiatan

3.2.1.1. Pelaksana Kegiatan dari Pemerintah

Dengan merujuk pada Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam maka, pelaksana fungsional kegiatan di Pemerintah Menjadi Tanggung jawab Ditjen Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, dengan pelaksana teknis dilakukan oleh Direktorat Bina Masyarakat Terasing sekarang dengan nama Ditjen Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Dinas Sosial Propinsi Riau melalui aparatnya di Kota Batam dan Kabupaten Kepulauan Riau bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada pelaksana di lapangan sesuai prosedur yang berlaku. Dan aparat yang diperbantukan pada Otorita Batam (Informan Rn) sebagai penanggung jawab fungsional bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial suku laut di daerah Kota Batam. Data penelitian menunjukkan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh Informan (Rn) pada saat program berlangsung sebagai lulusan Pascasarjana (S2) Lemhannas Kra XXII pada tahun 1989, lulusan tahun 1976 Strata 1 (S1) Flinders University bidang Study Management.

Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan pendamping lapangan (*Community Worker*) yang dinamakan Satuan Tugas Sosial (Satgasos) dan instansi terkait. Satgasos adalah petugas dari Departemen sosial yang direkrut dari lulusan SMU yang merasa terpanggil untuk melakukan pekerjaan sosial kepada anggota masyarakat yang memerlukan. Satgasos dilatih secara khusus selama 3 bulan dengan memberikan berbagai pengetahuan tentang Usaha Kesejahteraan Sosial,

Universitas Indonesia

keterampilan-keterampilan dan latihan fisik serta bimbingan tentang jiwa kejuangan. Setelah melalui tahap pelatihan selanjutnya mereka ditugaskan mengamalkan ilmu yang didapat selama 2 tahun, selanjutnya setelah melalui penilaian mereka mendapatkan kesempatan untuk memilih yaitu; 1. Melanjutkan sekolah, 2. Melaksanakan usaha wiraswasta, 3. Menjadi pegawai negeri.

Data penelitian menunjukkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Satgas sosial, informan (Sn) pada saat pelaksanaan program sebagai lulusan SMU yang kemudian mendapatkan pelatihan tentang Pekerja Masyarakat dari Departemen Sosial selama 3 bulan untuk kemudian ditempatkan di pulau Bertam-Kota Batam. Informan sendiri berasal dari pulau Jawa sehingga bukan merupakan warga asli pulau Bertam.

Tugas Satgasos sendiri dalam pembinaan meliputi; 1. Mengadakan penyuluhan sosial, 2. Mengadakan bimbingan sosial dan motivasi, 3. Memberikan latihan-latihan keterampilan, 4. Mengembangkan sumber daya manusia melalui gotong royong, 5. Melakukan koordinasi dengan petugas-petugas dari instansi lain, 6. Membuat perencanaan, 7. Melaksanakan program-program yang digariskan, 8. Mendayagunakan sumber dan potensi yang ada di lingkungannya, 9. Melaksanakan proyek-proyek usaha kesejahteraan sosial yang didaerah kerjanya untuk membantu pimpro atau petugas proyek lainnya.

Pelaksanaan program juga melibatkan instansi terkait dari unsur pemerintah yaitu dari Departemen Agama (Depag), dengan menempatkan salah satu petugas pendamping lapangan yang berasal dari pulau Batam untuk tinggal dan menetap di pulau Bertam. Berdasarkan data penelitian menunjukkan tingkat pendidikan informan (Bu) pada saat pelaksanaan program adalah Madrasah Aliyah atau setingkat SMU. Keahliannya dalam ilmu agama yang diperoleh dari pondok pesantren menjadi alasan untuk mengajarkan pengetahuan agama di pulau Bertam.

3.2.1.2. Pelaksana Kegiatan dari FKKS/ KKKS Batam

Pelaksanaan program dibawah pimpinan langsung ketua FKKS/ KKKS Batam dalam hal ini Ibu Sri Soedarsono. FKKS Batam merupakan lembaga koordinasi dari berbagai organisasi yang melakukan pelayanan sosial di wilayah

Batam. Sehingga dalam pelaksanaan lebih lanjut program PKAT ini juga melibatkan organisasi mitra dari FKKS/ KKKS Batam.

Sedangkan untuk pelaksanaan pendampingan masyarakat ditunjuk pekerja sosial (*Community Worker*) yang nantinya akan bertempat tinggal di pulau Bertam. Hal ini bertujuan agar muncul kedekatan antara pendamping dengan masyarakat sasaran sehingga nantinya memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan. *Community Worker* yang ditempatkan di pulau Bertam yaitu Informan (OI) berasal dari pulau Sumatera, pada saat program berlangsung memiliki tingkat pendidikan S1 (Strata 1) jurusan Antropologi, Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Kualifikasi tersebut yang menjadi pertimbangan Ketua KKKS Batam untuk menempatkan informan (OI) di permukiman pulau Bertam.

3.2.2. Pendanaan Program

Dengan keterbatasan sumber dana yang tersedia, menyebabkan kegiatan dilaksanakan menurut skala prioritas program dan diharapkan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak pelaksana (Depsos RI dan FKKS Batam). Pembiayaan tersebut sesuai yang tercantum dalam Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam oleh Ditjen Bina Masyarakat Terasing tahun 1987 yang berasal dari: 1. Sumber Pemerintah, 2. Sumber Masyarakat, 3. Sumber Luar Negeri. Sedangkan fungsi pemerintah adalah sebagai pendorong timbulnya swadana masyarakat.

Dokumentasi FKKS Batam bahwa jumlah anggaran yang telah digunakan selama pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Tahap I tahun 1988 sebesar	: Rp. 27.157.250,00 (Pembangunan 14 unit rumah)
Tahap II tahun 1990 sebesar	: Rp. 5.500.000,00 (Pembangunan 5 unit rumah)
Tahap III tahun sebesar	: <u>Rp. 18.664.700,00 (Pembangunan 15 unit rumah)</u>
Total	: Rp. 45.321.950,00 (Pembangunan 34 unit rumah)

Harga tiap rumah menelan biaya sekitar Rp. 1.000.000,00 dari biaya tersebut, FKKS mendapatkan bantuan dana untuk tiap-tiap rumah dari Depsos RI sebesar Rp. 450.000,00 atau kurang lebih 45% dari total biaya yang diperlukan, dan untuk selebihnya menjadi tugas FKKS Batam untuk mencukupi kekurangan biaya yang ada. Data dari FKKS menunjukkan bahwa bantuan beberapa unit rumah selanjutnya diperoleh dari; 10 unit rumah dari lembaga sosial Belanda, 10

Universitas Indonesia

unit rumah tipe 21 dari Ibu Negara Tien Suharto, serta pada tahun 1992 atas nama pribadi Ketua FKKS Batam menambah satu unit rumah sehingga berjumlah 35 unit rumah. Dengan demikian dari 35 unit rumah yang dibangun, pembangunan 21 unit rumah disediakan oleh FKKS Batam sedangkan sisanya sebanyak 14 unit dari Depsos RI.

Peran mitra anggota yang tergabung dalam FKKS Batam turut memperlancar program diantaranya dari total dana yang dikeluarkan dengan berdasarkan data tahun anggaran 1992/1993 untuk kegiatan-kegiatan dari FKKS Batam terdapat bantuan dari YPAB sebesar Rp. 25.000.000,00 yang diperuntukkan bagi proyek Suku Laut di Pulau Bertam.

Demikian juga peran swasta ikut memperlancar kegiatan diantaranya dari yayasan NEBA sebagai penyandang utama pendanaan dalam kegiatan budidaya rumput. Total pengeluaran dari NEBA sebanyak Rp. 46.800.000,00 dengan perincian sebagaimana tercatat dalam laporan proyek budidaya rumput laut pada suku laut di pulau Bertam, sebagai berikut:

<i>Seaweed Cultivation Project</i> (Proyek penanaman rumput laut)	
<i>Begroting</i> (Anggaran)	
<i>Droogruimte</i> (alat pengering)	: Rp. 5.700.000,00
<i>Opslagloods</i> (gudang)	: Rp. 4.000.000,00
<i>Boot bulktransport</i> (perahu)	: Rp. 18.500.000,00
<i>3 kleine bootjes</i> (perahu kecil)	: Rp. 9.600.000,00
<i>Zonneenergie</i> (energi tata surya)	: <u>Rp. 9.000.000,00</u>
Total	Rp. 46.800.000,00

Kegiatan lain yang merupakan kerja sama antara FKKS dengan pihak swasta dan pemerintah adalah proyek pembangunan listrik masuk desa. Sponsor utama kegiatan ini adalah yayasan NEBA, sedangkan yayasan NEBA sendiri memperoleh pendanaan dari *Rabobank Foundation* dari negeri Belanda. Perencanaan proyek ditangani oleh Direktorat Teknologi Energi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPP Teknologi) sedangkan pelaksana proyek oleh PT R&S Rekadaya Energi Surya serta Rabo Bank Duta Jakarta. Bantuan lain bagi kelancaran program yang berhasil diterima oleh FKKS Batam pada tahun 1990 yaitu berasal dari Ibu-Ibu Kedutaan Besar RI di Singapura

sebesar \$ 200 US untuk anak-anak Suku Laut, dan bantuan TV 20 inci dari Menteri Penerangan RI.

3.2.3. Pelaksanaan Program PKAT

Proses pemberdayaan berkaitan erat dengan konsep pengembangan masyarakat, karenanya tahapan intervensi yang digunakan juga mendasar pada pada tahapan intervensi dalam pengembangan masyarakat. hal ini searah dengan Tahapan Pelaksanaan dalam program KAT sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Dirjen PKAT No. 020.A/PS/KPTS/VI/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan PKAT yang dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan dan terminasi. Dengan kegiatan yang melingkupi;

1. Persiapan Pemberdayaan, adalah serangkaian kegiatan awal sebelum pemberdayaan dilaksanakan, meliputi pemetaan sosial, penjajagan awal, studi kelayakan, penyusunan perencanaan program dan kegiatan penyiapan kondisi masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan kondisi yang kondusif bagi warga KAT untuk melakukan transformasi sosial yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan warga KAT. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa; a). pemetaan sosial yaitu proses memetakan data dasar mengenai topografi, geografi, dan demografi calon lokasi KAT. Sebagai pelaksana kegiatan ditunjuk dari petugas pusat (dan petugas daerah. b). penjajagan awal merupakan tindak lanjut dari pemetaan sosial sebagai proses identifikasi dan verifikasi dari hasil pemetaan sosial untuk menentukan kepastian lokasi KAT dan ciri-ciri KAT. Pelaksana kegiatan dari petugas pusat dan petugas propinsi, petugas kabupaten dan petugas kecamatan, serta Instansi Teknis terkait di daerah. c). Studi Kelayakan adalah suatu kajian pada suatu lokasi hasil penjajagan awal untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan, masalah, potensi KAT, sumber daya alam dan sumber daya sosial. Pelaksana kegiatan adalah; petugas pusat dan petugas daerah, Perguruan Tinggi, Instansi Teknis Terkait di daerah. d). Penyusunan rencana program dan kegiatan adalah proses merencanakan program dan kegiatan pemberdayaan KAT berdasarkan hasil studi kelayakan. Dan e). Penyiapan Kondisi masyarakat, merupakan proses menyiapkan masyarakat agar mereka mengerti,

memahami, menerima, dan mau melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan pemberdayaan sesuai rencana yang telah disusun. Prinsip dasar dalam kegiatan ini yaitu; penghormatan atas peningkatan mutu hidup KAT, Penghormatan atas hak dasar, penghormatan atas tradisi dan budaya, penghormatan atas lingkungan, dan Harmonisasi catur daya: manusia (kualitas SDM), lingkungan (termasuk fisik dan sosial), usaha (ekonomi, mata pencaharian, pendapatan, jenis usaha) dan budaya (bahasa, teknologi, pranata sosial, kesenian, nilai dan norma).

2. Pelaksanaan Pemberdayaan. Pada hakekatnya ditujukan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia KAT, kualitas Lingkungan sosial KAT, dan Perlindungan KAT. Kegiatan yang dilakukan terkait **Pemberdayaan SDM** berhubungan dengan aspek; a). kehidupan KAT seperti komunikasi, interaksi, tumbuhnya rasa kebersamaan, rasa aman, pendidikan, kesehatan kehidupan beragama dsb. b). Penghidupan seperti kemampuan melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, keterampilan dalam rangka peningkatan ekonomi warga, koperasi, kemitraan dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan **Pemberdayaan Lingkungan** yaitu 1). Penataan permukiman di tempat asal; dengan cara membangun permukiman sosial lengkap, bantuan stimulus pemugaran perumahan dan lingkungan, dikembangkan sebagai lokasi transmigrasi dengan menerima pendatang dari luar yang berpihak kepada proses pemberdayaan KAT. 2). Penataan perumahan dan permukiman di tempat baru; dengan cara membangun permukiman sosial secara lengkap, mengikutsertakan sebagai warga dampingan pada lokasi transmigrasi. 3). Diserfikasi usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. 4). Pengembangan irigasi pengairan. 5). Peningkatan prasarana perhubungan, pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan terkait dengan **Perlindungan KAT**, yaitu; 1). Internal; seperti hak ulayat, hukum adat, sistem kepemimpinan lokal. 2). Eksternal melalui advokasi dan legislasi.

3. Terminasi. Setelah pelaksanaan pemberdayaan pemerintah berakhir selanjutnya tugas pelaksanaan program diserahkan kepada pemerintah daerah setempat dengan tetap memperhatikan prinsip kesinambungan program PKAT.

Pola pemukiman yang diterapkan melalui program PKAT dikategorikan atas 2 (dua) alternatif: 1. Tipe pemberdayaan di tempat baru (*ex situ development*), merupakan usaha membangun sarana dan prasarana permukiman sosial lengkap, jika ditempat asalnya sesuai dengan study kelayakan termasuk daerah rawan bencana alam yang dapat membahayakan kehidupan KAT, sehingga warga harus meninggalkan lokasi asalnya. 2. Tipe pemberdayaan di tempat asal (*in situ empowerment*), merupakan usaha pemberdayaan komunitas adat terpencil melalui sistem Zonasi; a). Zona Inti (Zona Permukiman), adalah suatu zona utama bagi kehidupan KAT secara khusus dimanfaatkan untuk proses kegiatan sosial. Yang termasuk Zona Inti: Kelompok Perumahan sebagai tempat tinggal, ruang sosialisasi dapat berupa ruangan khusus di lingkungan perumahan seperti halaman bersama yang terletak ditengah-tengah perumahan. Atau ruang bersama dalam satu rumah tinggal, tempat-tempat yang dikeramatkan, lahan kuburan. b). Zona kehidupan, adalah kegiatan utama yang berhubungan dengan bagaimana mempertahankan hidup. Yang termasuk dalam zona kehidupan yaitu: arena perladangan; area persawahan; area untuk beternak; area yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan ritual sehubungan dengan kegiatan perladangan, persawahan, dan beternak; dan hutan dengan tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi masyarakat KAT. c). Zona Penyangga, merupakan zona yang dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pada zona kehidupan. Kegiatan pada zona ini adalah pengambilan hasil hutan untuk keperluan hidup. Yang termasuk zona penyangga adalah area berburu, area perairan, dan hutan. d). Zona Perbatasan, adalah zona terluar dan mengelilingi dari semua zona. Zona ini untuk menentukan batas wilayah suatu komunitas dengan komunitas lain. Titik atau garis terluar pada zona ini dicirikan dengan suatu tanda yang disepakati antar komunitas yang bersangkutan.

3.3. Profil Lembaga FKKS/ KKKS Batam

3.3.1. Kedudukan Lembaga dan Klasifikasi, Peranan dan Fungsi Lembaga Dalam Menangani Masalah Sosial

FKKS/ KKKS Batam sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial yang berada di wilayah Batam, dengan mengingat bahwa Batam sendiri sebagai daerah industri dan perdagangan yang memberikan akses terhadap munculnya permasalahan dan kerawanan sosial yang memerlukan penyelesaian yang tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh lembaga non pemerintah dan masyarakat. Seperti diketahui bahwa pulau Batam pada era tahun 1978 ditetapkan sebagai *Bonded Zone Island*, atas kelanjutan awal pembangunan nasional sebagai pusat pengembangan industri lepas pantai dan Penunjang Migas.

Perubahan-perubahan fisik Batam menjadi kota industri, alih kapal, Pariwisata dan Jasa berkembang pesat sejak tahun 1983 sampai 1997. Perubahan tersebut membawa efek juga terhadap kondisi sosial budaya masyarakat yang ditandai dengan jumlah migrasi para tenaga kerja dan pencari kerja di pulau Batam. Kepedulian dan rasa tanggung jawab masyarakat dan pemerintah terhadap permasalahan sosial yang muncul akibat perubahan tersebut kemudian dilembagakan dalam wadah Forum Komunikasi & Konsultasi Sosial (FKKS) yang kemudian mengalami perubahan menjadi badan khusus (BKSN) pada tahun 1993 berubah nama menjadi KKKS (Koordinator Kegiatan Kesejahteraan sosial) Batam.

Sebagai lembaga sosial yang melakukan pelayanan sosial sudah menjadi kewajiban bagi lembaga untuk mengetahui sejauh mana permasalahan sosial yang ada dalam hal ini terkait dengan penerima layanan atau Depsos RI menyebutnya sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya di kota Batam. Dari hasil identifikasi beberapa PMKS yang terdata oleh Lembaga FKKS/ KKKS Batam adalah sebagai berikut: Pekerja Seks Komersial, Waria, Gelandangan Pengemis, Fakir Miskin, Korban Bencana Alam, Anak Terlantar, Komunitas Adat Terpencil, Penyandang Cacat, Rumah Tidak Layak Huni, Keluarga pahlawan, Lansia, Eks Narapidana, Eks Korban NAFZA, Wanita Rawan

Sosial Ekonomi, Anak Nakal, Korban Tindak Kekerasan/ *Trafficking*, dan Gangguan Jiwa

Dalam mengimplementasikan programnya, FKKS Batam lebih banyak memberikan pelayanan secara tidak langsung yakni bermitra dengan lembaga-lembaga yang mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan sosial terhadap PMKS. Teknologi transformasi yang diterapkan FKKS/ KKKS Batam pada kliennya adalah *people changing* dan *people sustaining* terlihat dalam kegiatan yang telah dilaksanakan serta fungsi lembaga yaitu : *Kegiatan Umum* yaitu menjadi wadah konsultasi, advokasi, koodinasi, fasilitasi, kerjasama dalam Usaha Kegiatan Sosial baik skala Daerah, Regional, Nasional dan International yang ditangani secara rutin. *Kegiatan Rutin* antara lain menyelenggarakan event kegiatan Seminar, Lokakarya, Diskusi mengenai Usaha Kesejahteraan Sosial secara umum, Menyenggarakan Diklat-diklat perkuatan anggota acara rutin dan berkesinambungan, menghimpun dan menggalang kerjasama kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial, Kemanusiaan, Kesehatan, Kemasayarakatan dan Pendidikan, mewakili organisasi dalam pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial kemasayarakatan, serta memberikan santunan dan bantuan serta sumbangan rutin. *Kegiatan Kemitraan* dalam Bidang Pendidikan dilaksanakan bersama dengan; Dinas Pendidikan, Yayasan Keluarga Batam (YKB), Yayasan pembinaan Asuhan Bunda (YPAB), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), bidang Kesehatan dilaksanakan bersama dengan Dinas Kesehatan, Perkumpulan Budi Kemuliaan, Puskesmas-puskesmas, PKBI, Bank Mata, Yayasan NEBA- Belanda, Budha Suci, PMI Batam & *Red Cross* Singapore, bidang Sosial dilaksanakan bersama dengan Dinas Sosial, YPAB, PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Al- Hidayah, dan KKKS Prov. Riau.

3.3.2. Falsafah Lembaga FKKS/ KKKS Batam

Visi organisasi FKKS/ KKKS Batam adalah “Terwujudnya FKKS/ KKKS sebagai Organisasi Nirlaba tingkat Kota yang bersifat terbuka, independen, mandiri dan profesional untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial”.

Dengan MISI: 1. Memobilisasi Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya di Kota Batam dan sekitarnya, Propinsi Kepri serta lainnya. 2. Melakukan kerjasama, koordinasi, konsolidasi, fasilitasi dengan semua pihak baik unsur masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan UKS di Batam dan sekitarnya. 3. Melakukan pemberdayaan anggota FKKS/ KKKS di Batam. 4. Melaksanakan *capacity Building* secara internal.

Untuk filosofie yang dianut oleh FKKS/ KKKS didalam menyusun program kerjanya selalu berpegang guna membantu masyarakat dalam bidang UKS., yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

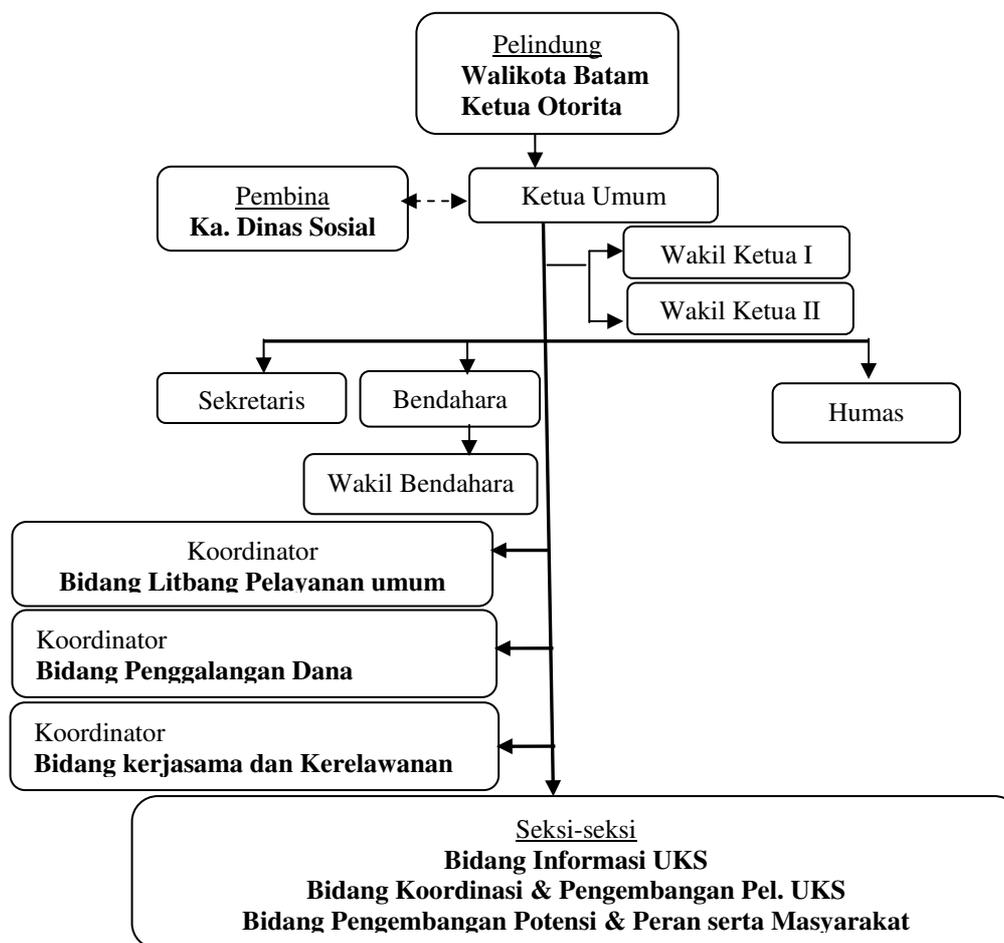
3.3.3. Latar Belakang Berdirinya Lembaga FKKS/ KKKS Batam

FKKS (Forum Komunikasi & Konsultasi Sosial) yang berdiri pada tanggal 04 April 1986 atas hasil musyawarah 27 (dua puluh tujuh) adalah organisasi non pemerintah sebagai pelaku peran serta masyarakat dalam pembangunan Batam yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sosial. Berdirinya FKKS Batam mendapat pengakuan berupa Surat keputusan dari Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam No. 3148 A/Kep/KA/VII/86 serta diresmikan oleh Menteri Sosial pada kunjungan kerja di pulau Batam pada tanggal 6 Mei 1986.

Pada tahun 1993 nama Forum Komunikasi & Konsultasi Sosial (FKKS) dirubah menjadi Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui SKB Mendagri dan Mensos RI No. 78rrH 1993-39/HUK/1993 tentang petunjuk pelaksanaan Pembinaan Organisasi Sosial/ Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Usaha Kesejahteraan Sosial. Dengan landasan Hukum: (1). Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 40/HUKIKEP/XIII/1980, tentang Organisasi Sosial. (2). UU RI No. 6 Tahun 1974 jo UU RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (3). Instruksi Mendagri No. 8/1990 tentang Pembinaan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). (4). SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial No. 78/Th.1993-39/HUK/1993.

3.3.3. Struktur Lembaga FKKS/ KKKS Batam

Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang terstruktur dengan pihak lain tidak atas keinginan sendiri karena dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Karenanya sebuah organisasi sosial yang baik tentu memiliki perangkat organisasi yang lengkap. Salah satunya adalah struktur dan pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara satu bagian dengan bagian yang lain (dapat dilihat dalam lampiran 4). Struktur organisasi dapat terlihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 3.5. Struktur Kepengurusan KKKS Kota Batam

Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010

3.3.4. Kedudukan Lembaga FKKS/ KKKS Batam dalam Jaringan Kerjasama antar Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Sosial

FKKS/ KKKS Batam merupakan lembaga Koordinasi yang bergerak di bidang pelayanan sosial, karenanya guna mencapai tujuan yang sama dalam bidang pelayanan sosial maka FKKS Batam mengadakan kerjasama dengan

Universitas Indonesia

lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama untuk melaksanakan Usaha kesejahteraan sosial. Beberapa organisasi sosial yang telah menjadi mitra kerjasama lembaga FKKS/ KKKS Batam adalah sebagai berikut; 1. Yayasan Keluarga Batam (YKB), 2. Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB), 3. Yayasan Dana Bhakti Anak Indonesia, 4. Yayasan Budi Kemuliaan, 5. Yayasan Jantung Sehat, 6. Yayasan Pendidikan Ibnu Sina (YAPIS), 7. Yayasan Tunas Karma (YOS SUDARSO), 8. Yayasan Sosial Immanuel, 9. Yayasan Kemala Bhayangkari, 10. Yayasan Amanah, 11. Yayasan Tarbiyatul Hidayah, 12. Yayasan Al-Azhar, 13. Yayasan Hang Tuah, 14. Yayasan Pembinaan Generasi Muda Press, 15. Yayasan Darul Falah, 16. Persatuan Ahli Kecantikan Kulit Dan Rambut "Mutiara Kusuma", 17. KOSGORO Kodya Batam, 18. JALASENASTRI, 19. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), 20. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), 21. MUI Kodya Batam, 22. MDI Kodya Batam, 23. BDI Kodya Batam, 24. BKSG Kodya Batam, 25. Pramuka Kwarcab Kodya Batam, 26. Persit Kartika Chandra Kirana, 27. Al-Hidayah Kodya Batam, 28. GUPPI Kodya Batam, 29. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), 30. Dharma Wanita Kelompok Pulau Batam, 31. PKK Kodya Bata

3.3.5. Pola Pendanaan Lembaga FKKS/ KKKS Batam

Salah satu sumber daya yang tidak dapat diabaikan untuk keberlangsungan dari organisasi salah satunya yaitu dana. *Fundraising* atau penggalangan dana merupakan komponen yang sangat penting akan keberhasilan suatu organisasi. Hal ini disebabkan karena diantaranya untuk keberlangsungan hidup organisasi/lembaga, guna perluasan dan pengembangan lembaga, mengurangi ketergantungan lembaga, untuk menciptakan organisasi yang aktif dan berkesinambungan. Karenanya penting untuk menciptakan organisasi yang secara finansial kuat dan positif karena bila finansial menjadi dilema akan mempengaruhi moral dari organisasi.

Melihat urgensi dari pendanaan, lembaga FKKS/ KKKS Batam menetapkan bahwa penggalangan dana menjadi paket program yang tak terpisahkan dari program yang ada. Data yang diambil berdasarkan pada hasil rapat kerja pada tahun 2006, bahwa sisa dana yang ada menunjukkan;

Tabel 3.4. Sisa Dana lembaga KKKS Batam tahun 2006

No.	Jumlah	Keterangan
1.	Rp. 7.110.958,00	Sisa dana KKKS Batam di bank sampai dengan Maret 2006
2.	Rp. 90.000.0000,00	Pinjaman dana kepada YPAB untuk biaya rutin periode Januari 2001 s/d Maret 2006

Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010.

Tercatat beberapa sumber pendanaan lembaga berasal dari: Sumbangan BKKKS Prov. Riau, Pemko Batam, Otorita Batam, Sumbangan masyarakat, Usaha sendiri, Peninjauan dana dari YPAB, dan dari hasil bunga Bank.

BAB 4

TEMUAN LAPANGAN

4.1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.

Latar belakang Pemberdayaan Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan (Rw) dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Departemen Sosial RI, merupakan bagian dari program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) yang pada saat pelaksanaan program bernama Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT). Program PKAT pada komunitas suku laut di pulau Bertam berdasarkan data dari Depsos dilaksanakan pada tahun 1989/1990 dan berakhir dengan dinyatakan sebagai masyarakat yang telah mandiri pada tahun 1993/1994.

Pemberdayaan KAT yang ada di Batam merupakan bagian dari program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT). Pelaksanaan sudah lama ya bisa dilihat dalam profil KAT yang sudah dimutakhirkan. Meskipun demikian untuk tujuan program sama dengan program saat ini, hanya ada perubahan nama menjadi KAT atau Komunitas Adat Terpencil dari sebelumnya Masyarakat Terasing. Pendekatan yang digunakan pun sama, yang membedakan penyebutan nama antara Masyarakat Terasing dengan KAT di cakupannya, nah setelah pergantian nomenklatur cakupan dan jumlahnya menjadi lebih luas dan banyak. Semula 18 Propinsi sekarang menjadi 30 propinsi. Karena persamaan tersebut kalau mbak (penulis) lihat dalam data KAT (*Data Persebaran Komunitas Adat Terpencil tahun 2006 yang Dimutakhirkan Tahun 2008*) maksudnya program yang sama atau kelanjutan program sebelumnya. (Rw. Kasie Pemberdayaan SDM KAT Direktorat PKAT-Depsos RI, 22 November 2010)

Informasi yang ada menunjukkan bahwa program pemberdayaan pada Komunitas Suku Laut di pulau Bertam masih dengan penggunaan nama atau nomenklatur “Masyarakat Terasing” sedangkan sesuai dengan Kepres No. 111 tahun 1999 nomenklatur tersebut ditinjau ulang menjadi “Komunitas Adat

Terpencil”. Dari informan Rw penulis juga memperoleh informasi bahwa arti yang terkandung dari kedua nomenklatur tersebut adalah sama dalam hal pendekatan dan metode yang digunakan, dan yang membedakan adalah cakupan secara geografis menjadi luas dengan jumlah komunitas yang semakin banyak.

Hal yang berbeda penulis dapatkan dari telaah dokumentasi tentang sejarah perkembangan Komunitas Adat Terpencil oleh Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Departemen Sosial disebutkan bahwa Sebelum adanya Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 1999 tentang pembinaan “Komunitas Adat Terpencil” (KAT), Komunitas Adat Terpencil semula disebut dengan istilah “Masyarakat Terasing” diikuti pula dengan perubahan dalam metode dan penanganannya.

Namun memang jika dilihat cakupan geografis dan kuantitas sasaran layanan menjadi lebih luas dan lebih banyak. Secara operasional, bahwa Masyarakat Terasing dengan KAT mempunyai arti yang sama. Persamaannya adalah pada Masyarakat Terasing dan KAT, secara geografis mereka bertempat tinggal di daerah yang terpencil dan terisolir, serta secara sosial budaya masih terbelakang. Kausul yang tertuang dalam Sejarah Perkembangan Komunitas Adat Terpencil oleh Direktorat PKAT juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PKAT lebih mengedepankan konsep pemberdayaan yang berarti bahwa aspirasi, inisiatif, dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi. Yang tentu saja sesuai dengan visi program PKAT sendiri yaitu Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil yang mandiri didalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan. (Kepmensos RI No. 06/PENGHUK/2002, Bab II pasal 3, hal. 18).

Sedangkan pada program sebelumnya dari nomenklatur “Masyarakat Terasing” penyebutan pemberdayaan lebih pada pembinaan dengan sifat *top down*. Perbedaan khusus lainnya untuk KAT ditambah dengan masyarakat yang tinggal disekitar lokasi tetapi mengalami kesulitan dalam akses pelayanan sosial dasar. Dengan adanya penambahan ini, yang tadinya masyarakat terasing hanya terdapat di 18 Propinsi, dengan istilah KAT menjadi 26 Propinsi.

Untuk Isu strategik yang melatar belakangi program Pemberdayaan bagi komunitas suku laut di pulau Bertam-Kota Batam, yaitu; adanya kesenjangan kehidupan suku laut nomaden hidup di laut dengan pertumbuhan pembangunan Batam yang pesat; kehidupan nomaden membuat suku laut hidup kurang sejahtera diantaranya dari sarana prasarana hidup, kesehatan, maupun pendidikan disamping itu juga dapat mengancam keamanan negara karena mereka melintasi batas negara tanpa prosedur resmi yang terjadi dari interaksi yang terjalin dengan penduduk Singapura; serta pengembangan pulau Batam menjadi daerah pengembangan industri dan perdagangan sebagai akibat dari posisi strategis pulau Batam sebagai daerah perbatasan negara Indonesia.

Sedangkan tujuan dari program pemberdayaan ini sebagaimana tercantum dalam pola pembinaan kesejahteraan sosial suku laut di Batam adalah meningkatnya kondisi kesejahteraan sosial suku laut sesuai dengan falsafah Pancasila dan berkembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan suku laut dalam rangka terciptanya wilayah daerah perbatasan yang makin mantap. Dengan tujuan antara yaitu; 1. Mengadakan perubahan kebiasaan hidup Suku Laut yang mengembara di laut, kearah kehidupan yang menetap dalam permukiman di darat secara bertahap. 2. Meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, agama, sosial budaya, dll dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan Suku Laut. 3. Meningkatkan kualitas organisasi masyarakat khususnya dalam pembinaan suku Laut.

Kausul diatas juga didukung oleh pernyataan dari Informan (Rn) dan informan (Rw) sebagaimana dibawah ini:

Menurut informan Rn bahwa tujuan pemberdayaan suku laut adalah: a. Untuk kehidupan yang layak dan bermartabat. b. Untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. (Rn, Mantan Staf Ahli Depsos RI Wilayah Kota Batam, 4 Januari 2011)

Tujuan dari pemberdayaan KAT adalah memberdayakan KAT agar mereka dapat hidup mandiri artinya tidak tergantung pada masyarakat lain sebagaimana layaknya masyarakat awam, tentu saja dengan memperhatikan

adat istiadat, budaya dan norma komunitas. (Rw, Kasie Pemberdayaan SDM KAT Direktorat PKAT-Depsos RI, 22 November 2010)

Informasi tersebut diatas juga menunjukkan bahwa tujuan dari PKAT adalah membentuk kemandirian komunitas sasaran dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan penghidupan sehingga tidak tergantung dengan masyarakat lain dengan memperhatikan adat istiadat, budaya dan norma dari komunitas sasaran. Sesuai dengan kausul yang tercantum dalam Kepmensos RI No. 06/PENGHUK/2002 pada pasal 5 bahwa; Tujuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertujuan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat. Kehidupan nomaden komunitas Suku Laut dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4.1. Suku Laut Sesekali Mendarat untuk Melakukan Barter, dan Suku Laut Hidup Mengembara secara berkelompok di Laut.

Sumber: Dokumen Penelitian, 2010.

Jika dilihat secara sistematis, pelaksanaan program pemberdayaan pada komunitas suku laut di pulau Bertam terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu persiapan, pelaksanaan, dan terminasi program.

4.1.1. Persiapan

Tahapan Persiapan yang dilakukan oleh Departemen Sosial RI sebagai penanggung jawab fungsional dan teknis pelaksanaan program PKAT khususnya

untuk komunitas Suku Laut yang hidup nomaden di wilayah perairan Batam dalam dua bentuk yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan.

4.1.1.1. Persiapan Petugas

Persiapan petugas dilakukan dengan bekerjasama dengan Organisasi Sosial Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam. FKKS Batam dipilih menjadi pelaksana (*implementor*) program disebabkan selain dari faktor internal Depsos RI dalam hal ini kurangnya sumber daya pendanaan juga dikarenakan salah satu program dari organisasi tersebut adalah memberikan pelayanan sosial khususnya kepada komunitas Suku Laut khususnya mereka yang berada di wilayah Kota Batam. Hal ini sebagaimana informasi dari Informan (Rn), bahwa;

Prosedur pelaksanaan program: a. Pada awal tahun 1986, Departemen Sosial memfasilitasi berdirinya Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial yang didalamnya bergabung berbagai organisasi nirlaba, relawan sosial tokoh masyarakat dan warga pada umumnya. b. Kegiatan FKKS berkembang pesat dan salah satu programnya adalah tentang Pemberdayaan Suku Laut. c. Departemen Sosial RI (Depsos) memanfaatkan sumber dan potensi FKKS Batam dan dunia usaha untuk bekerjasama dalam penanganan suku laut di Bertam. d. Kerjasama antara Depsos dengan FKKS mendapat dukungan positif dari semua pihak di Batam dan Luar Batam. e. Anggaran Depsos sangat terbatas jumlahnya yang hanya tersedia 50% dari biaya yang diperlukan untuk membiayai rencana Pemberdayaan Suku Laut. Proyek tersebut berupa permukiman yang terdiri atas rumah-rumah dan fasilitas permukiman lainnya. f. FKKS Batam ditetapkan oleh Depsos RI sebagai pelaksana, menggunakan Anggaran Pembangunan, dengan prosedur pemberdayaan mengikuti arahan, kebijakan dan panduan dari Depsos RI. (Rn, Mantan Staf Ahli Depsos RI Wilayah Kota Batam, 4 Januari 2011)

Dari Informasi diatas menunjukkan bahwa FKKS Batam dipilih menjadi mitra kerja Depsos RI dalam pelaksanaan program PKAT pada Komunitas Suku Laut di wilayah Batam salah satunya dikarenakan program pelayanan sosial yang diperuntukkan bagi komunitas Suku Laut yang telah dilakukan oleh FKKS Batam.

Demikian juga dalam kausul yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Suku Laut di pulau Batam oleh Depsos RI 1987 yang menyebutkan bahwa;

Yang diharapkan akan berperan serta sebagai pelaksana utama kegiatan ini adalah Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam, yang selama ini telah merintis berbagai upaya kearah pembinaan kesejahteraan Suku Laut di daerah Batam.

Informasi diatas menunjukkan bahwa lembaga FKKS Batam ditunjuk oleh Depsos RI sebagai pelaksana utama program dengan mendasar bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan upaya pelayanan sosial pada komunitas Suku Laut disamping karena program pemberdayaan bagi suku laut searah dengan tujuan dan peran dari organisasi FKKS Batam.

Disisi lain, pihak FKKS Batam menetapkan pemberdayaan komunitas suku laut sebagai salah satu program utama pelayanan sosial yang akan dilaksanakan dengan berdasarkan pada hasil Musyawarah Kesejahteraan Sosial (MKS). Sesuai dengan dokumentasi penelitian yang penulis peroleh bahwa musyawarah tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 November 1986 dengan agenda pengukuhan program kerja FKKS 1987 s/d 1993 bertempat di BICC lantai 4 Batam. Pengukuhan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Ibu Mensos RI dalam hal ini Ibu Nani Soedarsono, SH. beserta Direktur Jenderal Departemen Sosial RI, Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam, Walikota Batam serta 27 Orsos yang tergabung dalam FKKS Batam.

Kegiatan ini dilakukan setelah sebelumnya FKKS Batam termasuk didalamnya 27 Organisasi Sosial yang ada di Batam melakukan Inventarisasi Organisasi Sosial dan permasalahan sosial yang ada di wilayah Batam. Inventarisasi dilakukan dalam kurun waktu mulai tanggal 24 April s/d 20 Mei 1986, serta pada tanggal 21 November 1986 pada saat Musyawarah Kerja Sosial (MKS) di Batam yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina kesejahteraan Sosial.

Bentuk persiapan selanjutnya terkait dengan Sumber Daya Finansial. Dari segi finansial dengan melihat adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki Depsos

RI, maka dilakukan *resource sharing* anggaran antara Depsos RI dengan FKKS Batam. Selanjutnya FKKS Batam mengadakan penggalangan dana yang diantaranya berasal dari mitra kerja yang tergabung dalam FKKS Batam, unsur pemerintah, lembaga swasta dan juga dari bantuan lembaga asing yaitu *Nedherland Batam* (NEBA). Adanya keterbatasan anggaran dari Depsos RI juga diungkapkan oleh Informan (Sd) sebagai Ketua FKKS Batam sebagaimana dibawah ini:

Pertama kali Saya hanya dapat sekali *budget* dari pemerintah yaitu dari Depsos. Saya hanya dapat atap dengan ini aja. Setelah sisanya itu saya cari sendiri. Tetapi ada lah sebagai *embrio* modal. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)

Persiapan lain terkait dengan pelaksanaan program PKAT pada Komunitas Suku Laut yang berada di wilayah Batam adalah penempatan seorang pendamping dari Direktorat Bina Masyarakat Terasing Depsos RI untuk kelancaraan pelaksanaan program sekaligus sebagai kontrol fungsi Koordinasi penghubung antara lembaga tersebut dengan FKKS Batam dengan penugasan Informan (Rn) yang sebelumnya diperbantukan pada Institusi Otorita Batam, seperti yang tertuang dalam Pola Pembinaan Suku Laut di wilayah Batam sebagai petunjuk mekanisme pelaksanaan Program sebagai berikut:

Aparat Departemen Sosial RI yang diperbantukan pada Otorita Batam sebagai penanggung jawab fungsional bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial Suku Laut di daerah Kotamadya Batam tersebut

Hal ini juga diungkapkan oleh Informan (Sd) yang juga merupakan Ketua FKKS Batam, sebagai berikut:

Ibu kan masuk disini tahun 1986 (awal mula tinggal di Pulau Batam), tahun 86 itu pertama kali Pak (Rn) (Salah satu informan), orang pertama yang diperbantukan Depsos datang kesini melihat kita bersama Pak Habibie (Mantan Pejabat Otorita Batam, Mantan Menristek, Mantan Presiden RI dan

juga kakak kandung dari Informan Sd). Dia Kesini, melihat kegiatan kita dan bilang ibu nggak bisa begini, perlu satu wadah. Makanya dia (Informan Rn) mendirikan sebuah Forum yang bernama FKKS (Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial) semua ditatar. Ada 400 orang saya ditatar, mulai dari yang Ibu pimpinan sampai ke *grass root level*. Trus pada waktu bulan November penutupan HKS trus kita bikin Musyawarah sosial ada apa sih yang ada disini?. Nah disini timbul 2 program besar itu. Nah kita liat WTS (Wanita Tuna Susila) dan Suku Laut. Nah saya ambil 2 itu. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Untuk mekanisme pelaksanaan program secara terperinci tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Pembinaan Suku Laut di Kota Batam 1987 yang disahkan oleh Direktorat Bina Masyarakat Terasing Ditjen Binkesos Departemen Sosial RI, sebagaimana kausul dibawah ini:

- a. Tingkat Pusat. Departemen Sosial cq. Ditjen Bina Kesejahteraan Sosial secara fungsional bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial Suku Laut, yang pelaksanaannya secara teknis dilakukan oleh Direktorat Bina Masyarakat Terasing.
- b. Tingkat Propinsi Riau. Kanwil Departemen Sosial Propinsi Riau secara fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembinaan kesejahteraan sosial Suku Laut, melalui penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi sipil dan militer yang berkopetensi dalam penanganan masalah ini serta berkewajiban membina dan mengembangkan peran serta masyarakat seperti pilar-pilar partisipan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, exponen pembangunan dan warga masyarakat pada umumnya.
- c. Tingkat Kabupaten/Kotamadya. Pemerintah Kotamadya Batam bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh jajaran instansi sektoral sesuai dengan rencana pengembangan daerah Batam secara keseluruhan. Kanwil Dep. Sosial Propinsi Riau melalui aparatnya di Kotamadya Batam dan Kabupaten

Kepulauan Riau bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada pelaksana di lapangan sesuai prosedur yang berlaku.

Kausul tersebut menunjukkan bahwa operasional kegiatan di lapangan, dilakukan koordinasi, arahan dan pengawasan oleh Depsos RI beserta jajarannya yang terkait kepada FKKS Batam terhadap jalannya proses pelaksanaan program sebagai realisasi dari tanggung jawab Depsos RI terhadap tercapainya tujuan program.

Bentuk koordinasi, arahan dan pengawasan secara formal diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh FKKS Batam pada tahap I pada tanggal 21 Oktober 1988 bertempat di Wisma Batam yang dibuka dan dihadiri oleh Menteri sosial RI, Sekjen Departemen Sosial RI, Ka. Kanwil Depsos Prop. Riau, Ka. Kandepsos Tanjung Pinang, Camat, Kabalak dan Asisten Balak Otorita Batam, Walikotamadya Batam, Ka. Polres, Kesra Pemda, Ka. Bag. Kesra Kodya Batam, Ka. Ins. Bea dan Cukai, Ka. Kantor Imigrasi, Kejaksaan Negeri, Ketua Pramuka, Ketua AMPI, dan Kerohanian Balak Batam.

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya FKKS Batam menerima kunjungan Kerja Menteri Sosial RI di Batam pada tanggal 15 s/d 16 Juli 1988 yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di Batam dan bertempat di Gedung FKKS Batam dengan dihadiri oleh Menteri Sosial RI (Prof. Dr. Haryati Soebadio), Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial, Humas Departemen Sosial, 200 wakil PSM, Karang taruna, Walikotamadya Batam, Pemda TK I, Ka. Kanwil Sosial TK I, Dan Dim 0316 Batam, Ka. Polres Kepri, Kajari Batam, Ka. Bag Kesra, Ka. Kandep Kesehatan, Ka. Kandepnaker, Ka. BKKBN, Ka. Sospol Kodya Batam, Camat, Ka. Balak Otorita Batam, serta Pengurus Orsos yang tergabung dalam FKKS Batam.

Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 1990 bertempat di Wisma Batam yang dibuka dan dihadiri oleh Ketua MPR/DPR RI yang juga selaku Ketua Umum Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat (Bpk. Kharis Suhud), Inspektur Jenderal Departemen RI, Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Depsos RI, Direktur Jenderal Penerangan Umum, kepala Badan Pelaksana Otorita Batam,

Walikotamadya Batam, serta pengurus Orsos yang tergabung dalam FKKS Batam.

Dari beberapa informasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program PKAT tersebut terdapat dua lembaga yang terlibat, yaitu pemerintah dalam hal ini Direktorat Bina Masyarakat Terasing Ditjen Bina Masyarakat Terasing Departemen Sosial RI sebagai penanggung jawab fungsional dan teknis pelaksana program dan Organisasi Sosial FKKS Batam sebagai pelaksana operasional implementasi program di lapangan.

4.1.1.2. Persiapan Lapangan

a. Motivasi dan Pendaftaran Calon Pemukim

Kegiatan motivasi dilaksanakan guna mempersiapkan ke arah pemukiman yang teratur dan tertib. Sedangkan pendaftaran calon pemukim dimaksudkan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran secara lebih terperinci. Pendataan jumlah komunitas sasaran khususnya yang ada di wilayah Batam dilakukan dengan mendasar pada Konsep Pembinaan Suku Laut di pulau Batam (1987) yang menyebutkan perlunya penajaman komunitas sasaran, sehingga pada nantinya dapat memperjelas kepada siapa program diperuntukkan dan menghindari kesalahan sasaran program. Seperti disebutkan dalam Juklak, bahwa:

Sasaran Populasi (Pembinaan Suku Laut) adalah sebagai berikut : Suku Laut. (a). Sasaran utama adalah perorangan, keluarga dan masyarakat Suku Laut yang berada di perairan kawasan Kotamadya Batam yang bermukim : 1). di atas perahu 2). di darat/pulau. (b).Sasaran lainnya adalah Suku Laut yang berada di kawasan Kepulauan Riau yang bermukim: 1). di atas perahu dan 2). di darat/pulau-pulau.

Jumlah populasi sasaran dengan mendasarkan pada hasil pendataan suku laut yang berada di dalam wilayah teritorial Kotamadya Batam dan kabupaten Riau yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam, dari Team Survey Suku Laut yang dibentuk melalui Surat Keputusan Walikotamadya Batam No. KPH 84/I/1986 tertanggal 12 September 1986, seperti dibawah ini:

Tabel 4.1. Jumlah Warga Suku Laut Menurut Jumlah dan Persebarannya

Di Daerah Perbatasan Riau

No	Wilayah Persebaran	Konsentrasi Pemukiman	Jumlah	
			Jiwa	KK
I.	KODYA BATAM			
	1. Kec. Batam Timur	a. Pulau Malang b. Pulau Todak c. Pulau Kubung d. Di atas perahu	11 65 87 79	3 12 15 16
	2. Kec. Batam Barat	a. Pulau Padi b. Pulau Boyan c. Di atas perahu	103 17 73	21 3 14
	3. Kec. Belakang Padang	a. Pulau Tumar b. Di atas perahu sekitar: - Kel. Belakang Padang - Desa Kasu - Desa Pemping - Desa Pecung - Desa Terong	20 231 48 42 28 22	3 33 6 6 4 3
II.	KABUPATEN KEPRI			
	1. Wilayah Kepri Barat	a. Kec. Senayang b. Kec. Singkep c. Kec. Lingga d. Kec. Kundur e. Kec. Moro	134 619 1511 806 -	98 121 263 179 -
	2. Wilayah Kepri Timur	a. Kec. Bintan Timur b. Kec. Bintan Barat c. Kec. Siantan d. Kec. Jemaja	264 207 290 -	144 83 144 -
Jumlah Seluruhnya			4657	1171

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Oktober 2010.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah populasi sasaran dari program sebanyak 1171 KK atau 4657 jiwa yang mendiami wilayah Kotamadya Batam dan Kabupaten Kepulauan Riau. Dari jumlah tersebut hanya sekitar kurang lebih 17,74 % atau 826 jiwa didalam 139 KK suku laut mendiami wilayah Kodya Batam dengan rata-rata perkepala keluarga terdapat 5 atau 6 anak.

Tidak semua komunitas sasaran dapat dimukimkan di pulau Bertam, sehingga pelaksana melakukan proses seleksi yang juga dilakukan secara Informal dengan bekerjasama dengan komunitas sasaran untuk menginventarisir mereka yang bersedia dimukimkan. Proses seleksi dilakukan melalui strategi khusus

sehingga program dapat menjangkau komunitas sasaran dengan tepat. Strategi yang ada dilakukan baik dengan mendatangi komunitas sasaran yang tinggal secara nomaden di laut juga secara formal maupun juga dengan menerapkan metode *rewards* and *punishment* sebagaimana diungkapkan oleh Ketua FKKS Batam, Informan (Sd) sebagai berikut:

Tidak mudah mengajak suku laut berubah perlu strategi tertentu saya bilang “kamu mau saya kasih rumah, anak sekolah, hidup tenang.. semua gratis”. Ibu *survey* sendiri bukanya sombong ibu berdua dengan teman naik pancung, udah ombak gede-gede..kalau maut dimanapun datang bisa sewaktu-waktu.. Dari sampan ke sampan kemana mereka pergi, kemana berhenti.. Ada juga dari pulau Padi “Along” (Kepala Suku) *jesuit* (Binaan dari pihak gereja di Batam) punya, karena dia juga pengen pindah Bertam Ibu bilang “kamu boleh tinggal di Bertam asal kamu tidak pergi lebih dari 3 bulan dari Bertam”. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Informasi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan Motivasi dilakukan dengan cara informal dengan mendatangi komunitas sasaran mengingat bahwa komunitas Suku Laut hidup secara nomaden di laut dan tidak memiliki tempat tinggal menetap sehingga pelaksana mempunyai inisiatif untuk mendatangi komunitas yang bersangkutan. Salah satu strategi yang digunakan dengan memberikan imbalan (*rewards*) kepada kelompok sasaran yang bersedia untuk dimukimkan berupa rumah sebagai tempat tinggal dan pendidikan untuk anak-anak mereka serta *punishment* atau hukuman berupa dicabutnya hak menempati rumah dan menetap bagi mereka yang meninggalkan rumah lebih dari tiga bulan lamanya. Strategi tersebut dipandang berhasil dengan dimukimkannya 14 KK komunitas Suku Laut di pulau Bertam pada tanggal 17 Agustus 1988.

Kondisi ini searah dengan apa yang diungkapkan oleh Informan (Hs) yang juga merupakan penghuni pertama di permukiman pulau Bertam sebagai berikut:

Rumah pertama tetapi nggak bagus juga dari Pak Suntaram. Akhirnya datanglah Bu Sd karena pak taram cerita-cerita ke warganya (Suku Laut yang ada di pulau Bertam) “mau nggak di bangun kalian rumah diatas laut”.

Yach karena pikiran kita nggak ada yach maulah kita. Khan pertama khan 7 rumah di bangun di sini, kemudian datang lagi 2 rumah lagi. Trus kita tanyain lagi ke laut “mau nggak naik tinggal” barulah datang yang lain. (Hs, *Beneficiaries Program*, 19 Oktober 2010)

Ungkapan diatas juga menunjukkan adanya keikutsertaan pelaksana program sebelumnya (Bapak Suntaram dari KOSGORO) untuk memotivasi komunitas suku laut untuk menetap di permukiman pulau Bertam. Keterangan tersebut senada dengan apa yang tercatat dalam laporan kegiatan “Sambutan Ketua FKKS dalam Rangka Kunjungan Bapak Kharis Suhud” pada tanggal 29 Maret 1990 oleh ketua FKKS Batam dalam hal ini Informan (Sd) berikut ini:

Pembinaan Suku Laut di Bertam telah dimulai oleh KOSGORO Batam lebih dari 3 tahun sebelum berdirinya FKKS Batam. Kosgoro ikut serta dalam kelahiran FKKS Batam dan masih ikut aktif tahap awal berdirinya FKKS Batam bersama-sama dalam upaya pembinaan suku laut di pulau Bertam.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa sebelum program pemberdayaan bagi Komunitas Suku Laut dilaksanakan telah terlebih dahulu terdapat program bagi komunitas suku laut khususnya yang ada di Pulau Bertam dengan pelaksana Bapak Suntaram dari KOSGORO sebagai Lembaga yang mengadakan upaya pembinaan Suku Laut sebelum FKKS Batam. Dengan salah satu kegiatannya yaitu membuat rumah panggung semi darat di pulau Bertam.

Proses seleksi terhadap Komunitas Sasaran juga dilakukan dengan bekerjasama dengan komunitas sasaran untuk menginventarisir mereka yang bersedia bermukim di permukiman. Hal ini dibenarkan oleh Informan (Ra) sebagai berikut:

Bapak menetap di Bertam sebenarnya awalnya karena ke tempat saudara istilahnya berkunjung. Mungkin setelah dilihatnya Bapak balik lagi ditanyanya oleh pak Hs, jadi Bapak datang setelahnya Pak Hs tinggal di Bertam “mau gak dapat rumah” ya namanya dapat gratis rumah senang hati Bapak. Apalagi Bapak liat di Bertam Pak Hs senang tinggal di rumah baru.

(Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Informasi tersebut menegaskan bahwa adanya peran komunitas sasaran dan peran serta petugas program yang sama sebelumnya dapat turut memperlancar perekrutan komunitas sasaran untuk tinggal dan menetap di permukiman dan meninggalkan kehidupan sebelumnya sebagai *sea-nomads* yang hidup mengembara di laut. Disamping itu juga terdapat informasi tentang strategi yang digunakan oleh lembaga pelaksana untuk mengajak Suku Laut bermukim diantaranya dengan memberikan harapan kepada kelompok sasaran berupa imbalan atau hadiah (*rewards*) rumah dan pendidikan anak jika kelak mereka bersedia untuk menempati lokasi penempatan permukiman Suku Laut, serta hukuman (*punishment*) akan dicabut ijin dan hak tinggal di rumah permukiman bagi mereka yang meninggalkan rumah lebih dari 3 bulan.

b. Study Kelayakan & Pembuatan Buku Pedoman Kegiatan

Kegiatan study kelayakan melibatkan penelitian dan survey baik dari pakar maupun kalangan akademisi, diantaranya secara teknis sebagaimana diketahui dengan melibatkan Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing-Depsos RI, Staf Ahli Depsos yang ditempatkan pada Otorita Batam, Prof. Dr. Ir. Otto Sumarwoto sekaligus pakar ekologi dari Jurusan Arsitek Institute Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, juga Orsos yang tergabung dalam FKKS Batam. Metode yang dilakukan dengan cara informal yang dilakukan dengan melakukan kontak langsung dengan komunitas sasaran juga dengan cara formal melalui seminar-seminar terkait yang diselenggarakan oleh FKKS Batam, sebagaimana informasi dari Informan (Sd) berikut:

Terus terang awalnya saya tidak mengenal suku laut. Saya mulai mengenal suku laut karena ada musyawarah (Musyawarah Kesejahteraan Sosial). Apa itu suku laut?, Saya baru tau trus saya datang kesana?. Oh begini mereka tinggal suku laut. Adakan seminar-seminar sampai yakin Ibu pilih Bertam. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Hal tersebut juga terdokumentasikan dalam “Laporan Program FKKS dan Pengarahan Menteri Sosial RI tanggal 21 Oktober 1988” oleh Ketua FKKS Batam sebagai berikut:

Kalau Boleh saya tambahkan sedikit mengenai Suku Laut. Memang didalam perencanaan kami pada tahap permulaan secara kecil dan pelan-pelan kami juga mengadakan kerjasama dengan Bapak Otto Sumarwoto dari ITB, beliau juga akan mengirim KKN mahasiswa kesini dengan dibantu oleh kami dan mahasiswa itu sendiri.

Study kelayakan secara formal dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 November 1986 di Batam melalui koordinasi dengan Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing-Depsos RI yang bertujuan untuk menginventarisasi karakteristik komunitas Suku Laut sehingga dapat diperoleh gambaran secara detail dari komunitas sasaran. Karakteristik dari komunitas Suku Laut sebagaimana terdokumentasikan dalam “Ringkasan Laporan Pendataan Masyarakat Terasing di Daerah Perbatasan Riau” yang meliputi ciri-ciri fisik, non fisik, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi sosial budaya adalah sebagai berikut:

1. **Ciri-ciri Fisik.** Postur tubuh Suku Laut umumnya cenderung menampilkan otot yang keras dengan *type atletis*, walaupun sebagian diantara golongan lanjut usia memperlihatkan *type piknis* (kurus). Sebaliknya golongan usia muda berpenampilan keras karena mereka harus berjuang menaklukkan alam sekitarnya untuk mempertahankan hidupnya (laut merupakan ladang yang tidak ramah karena seringkali badai dan ombak merenggut nafkah mereka). Ciri fisik lainnya adalah bahwa warna kulit mereka agak hitam dikarenakan sengatan matahari yang menyengat kulit di tengah laut.
2. **Ciri-ciri non Fisik.** Selain penampilan secara fisik, kekhususan ciri Suku Laut secara non fisik memperlihatkan kondisi yang berbeda dengan warga masyarakat umumnya di daerah perbatasan ini. Sampan merupakan rumah tinggal bagi keluarga mereka dengan ukuran yang relatif kecil (5 x 1½m). Mereka mempunyai kebiasaan hidup berkelompok, dalam jumlah antara 3 sampai 7 sampan. Kebersamaan dalam kelompok ini terutama diikat oleh

hubungan kekerabatan dengan keluarga batih. Setiap keluarga terdiri dari suami-isteri dan beberapa anak yang hidup bersama (tanpa bersekolah) dalam sampan yang beratapkan rumbia/kajang. Selain itu, secara mental-spiritual mereka umumnya masih menganut kepercayaan Anemisme sehingga keterikatan pada upacara tradisional yang bersifat ritual masih sangat kuat.

3. **Kondisi sosial ekonomi.** Kehidupan keluarga Suku Laut pada umumnya ditunjang oleh kemampuannya mempertahankan hidup di laut, meskipun umumnya mereka memiliki tingkat pendidikan persekolahan yang sangat rendah bahkan tidak sama sekali. Meskipun demikian, kepandaian yang mereka peroleh secara turun-temurun sangat membantu/menunjang kehidupan mereka. Mata pencaharian mereka yang utama adalah menangkap ikan. Oleh karena itu, laut adalah ladang mereka yang sangat mengikat, di mana mereka hidup secara berkelompok untuk mencari ikan dengan berpindah-pindah tempat dari satu pulau ke pulau yang lain dan jarang mendarat kecuali untuk mengambil air atau menjual hasil ikan kepada “tauke” (para tengkulak keturunan Tionghoa dari Singapura yang sangat mereka percayai). Sistem penjualan yang mereka anut cenderung bersifat “barter” dengan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula dan sebagainya. Makanan utama mereka adalah nasi namun dalam jumlah relatif terbatas, karena ikan dan kepiting yang mereka tangkap sukar ditukar dengan beras pada sang “tauke”. Banyak di antara mereka akhirnya terikat sistem ijon.
4. **Kondisi Sosial Budaya.** Telah berabad-abad lamanya, kehidupan Suku Laut terjalin dalam ikatan tradisional. Kepala Suku Laut biasa disebut “Batin” atau “Yang Dipertuan” yang membawahi puaknya yang bertebaran di sekitar perairan Selat Phillip/Selat Singapura. Di kawasan ini, ada sejumlah Kepala Suku (Batin) yang masing-masing mempunyai ratusan anggota puak. Salah satu diantaranya adalah “Yang Dipertuan Suku Laut” bernama A Long (68 tahun) yang menguasai sebagian besar kawasan Selat Phillip dan Selat Singapura di belahan barat pulau Batam. Dalam struktur kepemimpinan Suku Laut, Batin (Yang Dipertuan) hanya merupakan “pembantu” dari seorang

pucuk pimpinan yang bergelar “Datuk Penghulu”, orang yang sangat dihormati. Ia diangkat dan diganti berdasarkan keturunan. Datuk Penghulu ini dipandang sebagai orang Sakti yang memiliki kekuatan gaib yang amat ditakuti. Oleh karena itu, warga suku laut sangat taat dan patuh kepadanya.

Karakteristik Suku Laut tersebut juga terdeskripsikan oleh Badan Kerjasama Gereja (BKSG) dalam Kertas Kerja BKSG Kodya Batam yang disampaikan pada Musyawarah Kesejahteraan Sosial (MKS) tanggal 20-24 November 1986 di Batam, bahwa:

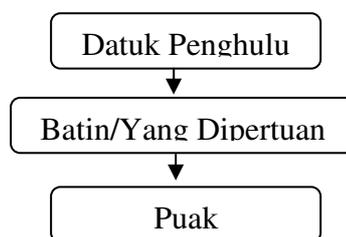
Dalam sampan mereka juga ikut seekor anjing sebagai penjaga, beberapa burung nuri yang ditangkap dengan getah dan mereka tidur menyatu dibawah satu atap. Bila anak mereka sudah meningkat remaja maka mereka harus pisah dari sampan kecil yang digandengkan pada sampan orang tuanya. Karena hidup mereka yang kurang layak inilah yang banyak menyebabkan mereka terserang penyakit seperti mutaber, kulit bahkan banyak diantara mereka yang mengalami kematian bayinya karena kondisi pada saat melahirkan diatas perahu tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Cara mereka menangkap ikan ialah dengan cara menombak ikan. Selain itu juga dengan cara tradisional lainnya sehingga hasil ikan yang mereka dapat hanya bisa dimakan sendiri sebab ikan yang mereka dapat kebanyakan sudah hancur kena tombak dan tidak bisa laku dijual kepada tengkulak ikan.

Kondisi kehidupan Komunitas Suku Laut juga diungkapkan oleh Informan (Sd) yang mengungkapkan, bahwa:

Nah itu khan kelihatan khan di foto-foro itu rumah perahu kajang. Itu ada ayam kenapa, ada anjing kenapa dan ada burung kenapa?. Kalo ayam bunyi itu berarti masih jam 2-3 malam belum pagi. Kalo burung berbunyi itu berarti matahari udah ada, dan mereka keluar dari kajang, nah kalo mereka mendarat disuatu tempat disana. Di lepaskan anjingnya. Kalo aman berarti anjingnya kembali, kalau tidak berarti tidak aman disana. Kalo kembali mereka akan menambatkan kapalnya disana. Kalo dia (Suku Laut) mau *in*

the hoy (memadu kasih) dengan istrinya di kasih palang gini (X) itu berarti jangan di ganggu. Mereka langsung bermain disana. Dan besok dah punya anak lagi dia. Hidupnya disitu terus; masak, tidur, melahirkan juga. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Dari beberapa deskripsi diatas bahwa sebagaimana komunitas adat pada umumnya secara struktur komunitas Suku Laut juga dipimpin oleh seorang kepala suku, demikian juga dengan Suku Laut yang ada di wilayah Batam yang juga dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang diberi gelar “Batin atau Yang Dipertuan” dan berdasarkan data penelitian untuk mereka yang di Batam dipimpin oleh Pak Along (Alm). Batin atau Yang Dipertuan sendiri akan membawahi beberapa “Puak” khususnya yang berada di sekisar perairan Selat Phillip/Selat Singapura. Batin merupakan pembantu dari pucuk pimpinan yang bergelar “Datuk penghulu”. Struktur kepemimpinan suku laut dapat dijelaskan sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4.2. Susunan Kpemimpinan Komunitas Suku Laut
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2010

Disamping itu mereka juga memiliki norma-norma dan nilai hidup, misalnya mereka hidup mengelompok dalam satu keluarga dengan jumlah antara 3 sampai 7 atau lebih sampan. Kebersamaan dalam kelompok terutama diikat oleh hubungan kekerabatan dengan keluarga batih. Setiap keluarga terdiri dari suami-isteri dan beberapa anak yang hidup bersama dalam sampan yang beratapkan rumbia atau kajang. Bagi anak yang telah menginjak remaja usia antara 13-18 tahun mereka sudah harus memiliki sampan sendiri terpisah dari orang tua. Dan setelah menikah nanti sampan akan dikembalikan pada orang tua atau jika orang tua dengan suka rela memberikan pada anak maka sampan bisa menjadi hak anak

untuk memilikinya. Cara hidup berkelompok sebagaimana diutarakan oleh Informan (Ra) sebagai berikut:

Mendarat setiap hari, ditepi tepi pantai itu. Bapak biasanya kalau dulu-dulu seringnya di Nongsa, Jodoh, Pinang, Tanjung Uban sekeliling pokoknya daerahnya itu. Kelompok itu rame kadang sampai-sampai dua puluh sampan.. ya.. belasan sampan, masih saudara semua, kakak, adik, pamannya, kakeknya, bibinya semua kami berkumpul. Kalau sudah dewasa anak harus punya kajang sendiri, usia 12 tahun, 13 tahun..17..18 tahun lah. Nanti kalau mereka sudah berumah tangga sendiri sampan itu dikembalikan kepada orang tuanya, mereka punya hak sendiri. Mereka beli sendiri usaha sendiri tapi ada juga yang dikasih dari orang tuanya “pakailah kamu untuk rumah tangga kamu” begitulah caranya. (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Interaksi dengan masyarakat sekitar sangat terbatas, kondisi ini dipengaruhi dengan mobilitas hidup yang tidak permanen. Mereka hanya melakukan interaksi dengan anggota keluarga atau sesama komunitas Suku Laut yang dikenal. Hubungan dengan dunia luar diluar komunitas Suku Laut hanya dilakukan dengan *tauke* dan pemerintah yaitu ketika mereka akan melakukan *barter* dengan *tauke* di Singapura. *Tauke* merupakan tengkulak keturunan tionghoa yang dipercaya Suku Laut untuk menampung hasil tangkapan mereka. Sistem jual beli lebih cenderung bersifat *barter*, namun demikian adakalanya mereka terjerat sistem *ijon* dengan para *tauke*. Interaksi ini lah yang menyebabkan Suku Laut sangat tergantung dengan para *tauke* di Singapura. Kondisi yang sama disampaikan oleh Informan (Ra) Seperti yang diungkapkan dibawah ini:

Ya, Bapak putar-putar sekelilingnya pulau Batam ke Singapura liat mana nantinya ikan yang ada juga cuacanya, pernah tapi dulu karena dulunya masih bebas belum ada batas-batas, kita ndak pakai *paspor* ndak pakai apa kalau kita banyak muatan kita masuk ke Singapur itu anggarannya satu minggu kita dikasih *permit* ndak sampai sepuluh hari tangkapan itu hasilnya kalau dulu ya itu bermacam macam, jenis; ada yang kelapa kering,

siput-siput, agar-agar itulah jenisnya itu. Sampai Singapur sudah dijual ditukarin barang sistem *barter*. Jadi hasil nanti pulang dibawakkan nanti itu barang dijual lagi seperti *radio tape* ya.. dulu sangat sukar kalau mau belinya tv ini (di Batam).. susah.. tapi setelahnya masuk ke Singapur udah bebas baru adanya tv ini, satu biji dibelikan tv di perahu ini seribu orang menontonnya di perahu ini (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Dan jika dilihat dalam norma dan nilai kehidupan komunitas Suku Laut, berdasarkan beberapa informasi diatas bahwa mereka sangat menghormati adat kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka. Misalnya penghormatan bagi pasangan suami-isteri yang sedang memadu kasih yaitu jika terdapat sampan yang dengan sengaja menjauh dari kerumunan kelompok dan terdapat tanda silang di depan sampan dengan menyilangkan kedua buah tongkat dayung dapat dipastikan mereka membutuhkan *privacy* yang tidak boleh diganggu oleh anggota kelompok lain. Hal tersebut telah menjadi hukum yang tidak tertulis dan tidak akan dilanggar oleh anggota komunitas.

Berbicara tentang aspek *religi*, mereka cenderung menganut kepercayaan *Anemisme* ditunjukkan dengan keterikatan pada upacara-upacara tradisional yang bersifat ritual dan sangat kental dengan beberapa upacara adat. Kebiasaan lain yang mereka miliki adalah kepemilikan hewan peliharaan diantaranya; ayam, burung, dan anjing yang masing-masing tidak hanya untuk dimiliki tetapi mempunyai makna. Jika ayam berkokok maka menandakan waktu pagi menjelang, suara burung menandakan matahari sudah mulai bersinar, dan anjing akan berguna jika mereka ingin merapatkan sampan di daratan yaitu jika anjing dilepas dan kembali menandakan daratan cukup aman bagi mereka untuk mendarat namun jika anjing tidak lagi kembali mereka percaya bahwa daratan tersebut tidak aman untuk disinggahi.

Pekerjaan utama sebagai nelayan dan mereka cenderung tidak mempunyai pekerjaan sampingan, namun demikian pekerjaan tersebut tidak diimbangi dengan teknologi yang memadai. Untuk mencari ikan mereka masih menggunakan

teknologi yang sederhana, hal ini ditunjukkan dengan penggunaan alat-alat sederhana yang mereka gunakan untuk mendapatkan ikan diantaranya menggunakan: pancing, *rawai*, tombak (*nyuluh*), memasang bubu, atau menggunakan jaring dan *kelong*. Dengan peralatan tersebut menyebabkan ikan ditangkap dalam keadaan rusak sehingga ada kalanya ikan tidak dapat dijual. Disamping penggunaan alat sederhana, mereka juga kurang memiliki keahlian dalam pengolahan ikan sehingga ikan dijual dalam keadaan segar. Kedua hal tersebut diantaranya yang menyebabkan terbentuknya sistem ekonomi subsisten.

Ketergantungan pendapatan sebagai nelayan dan kehidupan sea-nomads yang dijalani didukung oleh keahlian dan kemampuan mereka dalam Navigasi, kondisi ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan (OI) sebagai berikut:

Sea nomaden hidup hanya mengandalkan kemampuan navigasi.. pandai dia (Suku Laut), barter juga mereka dengan orang Singapore. pandai kan.. kalau tak pandai macam mana bisa barter. Ilmu perbintangan pun mereka mahir..”o..ini sekarang jam berapa” ..”o ini harusnya kemana”..”koordinat mu di mana sekarang?” kalau kita pakai GPS kalau mereka tidak perlu pakai GPS. Mereka (Suku Laut) tahu.. titik-titik mana wilayah indonesia mana singapura dari mana mereka tahu..ya tentu dari ilmu bintang yang dimiliki dan kalau mereka tertangkap misal e..”kalian (Suku Laut) udah perairan anu ya..tak boleh kalian kesini ya”..o.. baru tahu mereka..o..kalau di tokong anu itu indonesia kalau itu.. karang apa bentuknya apa..tahu mereka itu. (OI, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Namun demikian jika dilihat secara ekonomi yang tampak dari karakteristik Komunitas Suku Laut diatas menunjukkan bahwa mereka hidup dalam keadaan kurang sejahtera baik dari sarana tempat tinggal mereka yang hidup diatas “perahu kajang” dengan ukuran relatif kecil kurang lebih (5 x 1½m) bersama binatang peliharaan, maupun dari prasarana diantaranya dari aspek kesehatan dengan banyak ditemui beberapa penyakit misalnya mutaber, penyakit kulit bahkan angka kematian bayi yang relatif tinggi, disamping sebagian besar mereka tidak mengeyam pendidikan formal sehingga dapat dipastikan banyak dari mereka

dalam kondisi buta huruf. Hal tersebut merupakan salah satu yang mengindikasikan bahwa komunitas Suku Laut layak untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah khususnya melalui program Pemberdayaan bagi komunitas yang bersangkutan.

Mengacu pada karakteristik yang berhasil terdeskripsikan, kemudian pada tanggal 29 September s/d 2 Oktober 1987 dan bertempat di Ruang A Gedung FKKS Batam JL. R.E. Martadinata Sekupang-Batam diadakan kegiatan “Pertemuan Konsultasi dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut dan Latihan Penyegaran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Batam”, dengan maksud dan tujuan: Sebagai forum untuk menghimpun berbagai masukan guna merumuskan langkah-langkah operasional ke arah implementasi Pola Pembinaan Suku Laut secara terpadu, terencana dan profesional; dan bagi para PSM dimaksudkan untuk saling tukar menukar informasi dan pengalaman serta untuk menambah atau menyegarkan kembali pengetahuan yang pernah diterima pada tahun sebelumnya.

Dalam kegiatan ini penanggung jawab fungsional dari penyelenggaraan seluruh kegiatan ada pada Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing-Departemen Sosial RI, pihak FKKS Batam sebagai penyelenggara pertemuan dan latihan. Koordinasi pelaksanaan dengan konsultasi kepada Kanwil Depsos Propinsi Riau, Balak Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam. Dengan jumlah peserta yang hadir pada saat kegiatan dilaksanakan diikuti oleh 70 orang peserta yang meliputi unsur Departemen Sosial Pusat, BPPP Teknologi, Mabes ABRI, Otorita Batam, Kanwil Depsos Propinsi Riau, Pemerintah Kotamadya Batam, Instansi sipil dan militer di Batam serta unsur masyarakat dan organisasi sosial termasuk unsur perorangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Melalui musyawarah ini, kemudian pemerintah dalam hal ini Direktorat Bina Masyarakat Terasing Ditjen Binkesos Depsos RI mengeluarkan konsep “Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam pada tahun 1987” yang sekaligus melegitimasi FKKS Batam sebagai pelaksana program dan juga dijadikan landasan dalam pelaksanaan program pemberdayaan suku laut oleh FKKS Batam.

c. Penyiapan Areal Pemukiman

Penyiapan areal permukiman dilaksanakan guna menyiapkan lokasi permukiman warga Suku Laut. Penentuan lokasi pemukiman dengan mempertimbangkan kemungkinan terbaik bagi taraf kehidupan dan prospek masa depan suku laut serta penentuan calon warga yang akan ditetapkan sebagai prioritas warga yang akan tinggal di wilayah permukiman. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan (Sd), (Sn), dan dari warga (Ra) dibawah ini:

Saya pilih Bertam mulanya karena mereka kesana ambil air minum, yang lain tidak ada makanya ambil Bertam, Jadi setelah ibu *survey*, “kenapa mereka suka kumpul disitu?”, ada pulau padi disitu tapi dia ke disitu (Bertam). (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Kalo sumberdaya alamnya sih biasa aja, berbatu-batu, tak ada bedanya tanahnya juga tidak bisa diolah samalah dengan tanah-tanah yang lain. Yang jelas kalo sumber air tawar sih ada, terus juga akses khan tidak terlalu jauh dari tanjung uncang juga sudah dekatlah pulau Bertam ke Batam. Kalau dari Sekupang itu kira-kira 20 menitlah. (Sn, Mantan Pendamping/ Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Dulu sini kan hutan lebat itu, ndak ada penduduk sama sekali, ada sungai cukup segini saja masuk air saja untuk akses ambil air saja. Dari kasunya juga dari pulau cicirnya juga pulau lengkangnya juga ambil air. (Ra, *Beneficiaries* Program/ Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Dari ketiga informan dapat diambil kesimpulan bahwa pulau Bertam menjadi pilihan sebagai lokasi permukiman warga suku laut dengan mempertimbangkan bahwa sebelumnya pulau tersebut telah menjadi tujuan komunitas suku laut untuk bermukim baik sementara waktu maupun menetap, terdapatnya sumber air tawar sebagai kebutuhan hidup warga, disamping itu juga pulau tersebut dekat dengan *bounded area* (Pulau Batam).

Penyiapan lokasi permukiman dilaksanakan dengan gotong-royong antara komunitas sasaran dan petugas pelaksana. Keikutsertaan calon penghuni lokasi

sebagaimana diungkapkan oleh Informan (Hs) dan juga Informan (Sd) sebagai berikut:

Ya, namanya senang mo dikasih rumah, rame-rame kita kerja. Memang ndak ke laut tapi ada gaji dari Bu Dar ya gak papa lah. Yang penting ada uang buat makan. (Hs, *Beneficiaries* Program, 19 Oktober 2010)

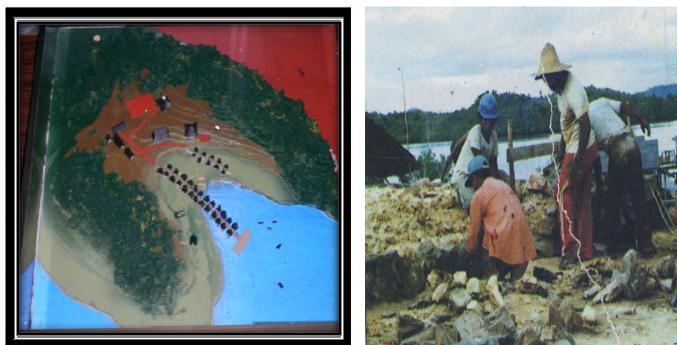
Itu dicanangkan membuat bangunan dari ITB, kemudian mereka bisa belajar jadi kuli bangunan, belajar bekerja di darat. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Perencanaan permukiman berdasarkan data FKKS Batam dari Laporan Kegiatan oleh ITB pada bulan Januari 1988, dijelaskan mengenai pembagian lahan dan hunian. Pembagian ini bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekosistem di pulau Bertam. Dari luas lahan di atas dan bawah, pemanfaatannya dibagi menjadi 30% untuk permukiman atau hunia warga dan 70% untuk hutan lindung. Model rumah tipe 28. Dimasing-masing permukiman akan dibangun jembatan atau pelatar sebagai penghubung dengan jarak dari permukiman yang ada di selatan sampai dengan permukiman di sebelah utara kurang lebih 75 m, dengan posisi rumah berhadap-hadapan dan dihubungkan dengan sebuah pelatar atau jembatan sebagai penghubung. sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan (Sd) dibawah ini:

Pada awalnya memang mereka buat konsep rumah dibuat cembung, kalo atik (penulis) lihat di Gara (permukiman suku laut yang ada di Gara) nah seperti itu awal mulanya. Saya bilang itu tidak cocok, kalo berhadap-hadapan (posisi antar rumah) interaksi bisa terjadi. Ada kontak sosial, mereka (Suku Laut) bisa belajar hidup bersama ya..seperti masyarakat pada umumnya. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)

Informasi diatas menunjukkan bahwa dalam penerapan konsep permukiman di Bertam dilakukan melalui perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli, namun demikian dalam pengimplementasian tetap dengan memperhatikan masukan dan saran dari pelaksana utama program dalam hal ini FKKS Batam. Maket perencanaan permukiman dan kegiatan Gotong-royong dalam pembangunan

permukiman di pulau Bertam-Kota Batam pada saat program PKAT berlangsung dan bentuk permukiman dapat dilihat sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 4.3. Maket Permukiman Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam dan gotong royong membangun fasilitas permukiman
Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010.

d. Penyiapan Tenaga Kerja

Tenaga Kerja yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang membantu membangun rumah-rumah sederhana yang nantinya dibangun di lokasi Permukiman Suku Laut yang ada di pulau Bertam. Penyiapan tenaga kerja dengan fokus adanya partisipasi komunitas sasaran melalui gotong-royong, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan (Sd) dibawah ini:

Itu rancangan bangunan dari ITB, kemudian mereka bisa belajar jadi kuli bangunan, belajar bekerja di darat, ya.. dengan gotong-royong. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Informasi diatas juga dibenarkan oleh Informan (Hs) yang merupakan penghuni pertama pulau Bertam, sebagaimana berikut:

Ya, namanya senang mo dikasih rumah, rame-rame kita kerja. Memang ndak ke laut tapi ada gaji dari Bu Dar ya gak papa lah. Yang penting ada uang buat makan. (Hs, *Beneficiaries* Program, 19 Oktober 2010)

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh komunitas sasaran (*beneficiaries*) dengan cara ikut menjadi bagian dari tenaga kerja yang membangun permukiman. Informasi diatas juga menunjukkan bahwa

sebagai ganti atas waktu yang hilang untuk mencari ikan, FKKS Batam memberikan ganti rugi berupa insentif atau gaji kepada mereka.

Implementasi program dilaksanakan secara terperinci dan terarah dengan mendasarkan pada perencanaan program. Secara sistematis, pelaksanaan program pemberdayaan pada komunitas suku laut di pulau Bertam dilaksanakan dengan merujuk pada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk teknis) yang telah dirumuskan dalam Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam. Namun demikian pelaksanaan di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Hal ini juga diungkapkan oleh Informan (O1), dan (Sn) sebagaimana berikut:

Itulah apa yang tertulis belum tentu bisa diterapkan, cam mana bisa mereka (Suku Laut) sebelum dimukimkan sudah bisa memasak. Dari dulu nenek moyang pun mereka hidup di laut kok.. kok kita mau bikin bercocok tanam.. mana lah bisa. Tanaman disini kan tidak menghasilkan apa-apa.. Mereka (Suku Laut) sekedar mengenal lah yang dari dulu mereka tidak tahu tanaman itu a.. itukan tumbuh sendiri dari mereka atau Tuhan ciptakan nah sekarang mereka pernah mengetahui memang ada kadar gizinya dan bisa ditanam ada juga nya hasilnya, hanya itu pemikiran yang kita (FKKS Batam) tanamkan pada mereka (Suku laut). (O1, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Memang waktu di lapangan kita tidak bisa menerapkan begitu saja kegiatan yang sudah direncanakan. Namun kalo dilihat bermanfaat sekali setidaknya bisa dijadikan arahan kegiatan apa yang bisa dilaksanakan. (Sn, Mantan Pendamping/ Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Informan (Sd) yang juga merupakan Ketua FKKS Batam, sebagai berikut:

Kegiatan yang ada saya sesuaikan dengan kondisi suku laut. Memang ada juga yang tidak ada di rencana awal (Juklak dan Juknis)..koordinasi jalan terus. Kita adakan seminar, undang Depsos, Menteri sosial, semuanya

datang bahas kegiatan yang cocok buat suku laut. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)

Dari Informasi diatas menunjukkan bahwa dalam implementasinya terdapat beberapa kegiatan yang tidak disesuaikan dengan perencanaan awal sebagaimana tercantum dalam Juklak dan Juknis pelaksanaan program, hal ini disebabkan karena apa yang tertuang dalam perencanaan awal tidak sesuai dengan situasi dan kondisi komunitas sasaran.

4.1.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan terbagi atas dua yaitu permukiman dan pembinaan. Kegiatan permukiman merupakan penempatan calon warga untuk mulai menempati rumah masing-masing dan berlangsungnya proses adaptasi warga dengan lingkungan sekitar. Sedangkan kegiatan pembinaan dilaksanakan dengan cara bimbingan guna meminimalisir dampak perubahan kehidupan yang terjadi setelah warga menempati permukiman.

4.1.2.1. Pemukiman

Kegiatan yang berhubungan dengan permukiman meliputi; pengadaan rumah sederhana dan sarana umum, penempatan petugas lapangan di lokasi permukiman dan pemberian Santunan biaya hidup.

a. Pengadaan Rumah Sederhana

Pengadaan rumah dibuat dengan perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli, sebagaimana diungkap oleh Informan (Sd) dan (Ol) dibawah ini:

Konsep yang dulu bikin rumah itu ITB yang bikin. Kerjasama semua lengkap di konsep itu pertama kali itu kan berdasarkan *research*. Itu dulu dibikin beberapa kali Uji coba yach, dulu pemerintah bilang di daratkan langsung nggak bisa, jadi mesti dekat laut. Ada jalan kesana. Saya bilang jangan seperti disana sepanjang pesisir. Dia harus memiliki punya tetangga kiri dan tetangga kanan. Jadi kehidupan itu mesti dibiasakan. Itulah dulu konsep dari ITB. Itu Profesornya telah meninggal. Nah pada tahun 1986 saya mulai trus tahun 1988 pada saat 17 Agustus, pertama kali 14 rumah jadi. Saya bikin itu Bagus semua; listrik Masuk, air pokoknya jadi

percontohan. Trus 1993 kita nggak bisa terusin, saya serahkan kepada menteri. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Saya mau yang sudah lebih maju sedikit (rumah di darat), e..mereka oke lah mereka dari pasang surut.. dari laut yang gelombang-gelombang.. sampan kan dilaut.. gelombang.. gelombang, nah kita bikin rumah dipasang surut dulu.. air asin masih tetap ada ...buang kotoran pun..*blung* ilang.. *blung* ilang.. sampah pun juga begitu kan.. buang ilang... kan biasa juga di sampan pun mereka juga begitu kan... ini sudah *settle* (menetap), tidak goyang lagi.. nah..kan sudah lebih maju.. nah cobalah didarat.. kita buatlah konsep rumah di darat.. nah.. ternyata memang tidak cocok.. karena faktor apa.. kebiasaan.. bangun pagi ..*blung*.. lho kok masih di situ..bau..iya kan kok masih disitu kan bau.. mereka ada yang sebentar ada yang nggak tahan.. kan gitu...terakhir itu..kayaknya mereka sudah ndak cocok lah.. karena sudah biasa desir air *ser*..air laut..bau laut.. mentalnya tidak kuat di dalam..atau karena terlalu cepat (penempatan warga di rumah darat).” (Ol, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Keterangan diatas menunjukkan bahwa konsep awal model rumah berdasarkan keputusan dari pelaksana program dibentuk permukiman semi darat laut (pantai) dimana rumah dibangun dengan menggunakan pancang-pancang sehingga ketika air laut pasang akan masuk ke bawah rumah-rumah warga. Kondisi ini dibuat menyerupai dengan suasana pada saat mereka masih hidup di lautan sebelum bermukim sehingga meminimalisir rentang perubahan yang ada. Selanjutnya rumah-rumah dibuat berhadap-hadapan dengan dihubungkan oleh pelatar (jembatan) sehingga diharapkan memunculkan interaksi antar warga yang bermukim.

Tahap selanjutnya dibangun rumah berlokasi di darat dengan maksud untuk memindahkan warga secara bertahap dari lingkungan pantai menuju ke permukiman permanen di darat sebagaimana masyarakat awam lainnya. Konsep rumah di darat tidak berhasil dengan ditinggalkannya permukiman darat oleh warga kembali ke permukiman semi darat laut. Demikian juga pada saat

penelitian ini berlangsung, penulis melihat bahwa permukiman didarat sudah roboh hanya terlihat reruntuhan bangunan yang menunjukkan letak awal permukiman darat. Kondisi ini dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4.4. Reruntuhan sisa bangunan model rumah darat di Permukiman Suku Laut Bertam.

Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010.

Data dari FKKS Batam menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Permukiman dimulai pada tanggal 4 April 1987 hingga pada tanggal 17 Agustus 1988 sebanyak 14 KK Komunitas Suku laut dapat dimukimkan di pulau Bertam awal pertama kalinya. Dengan jumlah rumah yang berhasil dibangun yaitu: pada tahun 1988, pembangunan 14 rumah sederhana tipe 32 m² layak huni; tahun 1990 pembangunan 5 buah rumah tipe 28 m²; tahun 1991 Pembangunan 18 rumah tipe 28 m²; dan tahun 1992 dibangun 3 unit rumah dengan tipe 28 m². Sehingga total keseluruhan rumah yang berhasil dibangun pada saat pelaksanaan program adalah 40 unit rumah dengan perincian 5 unit rumah dibangun di darat dan 35 unit dibangun dengan konsep semi darat laut (pantai).

Kondisi rumah warga yang merupakan *out put* program pada saat penelitian ini dilaksanakan sebagian besar mengalami kerusakan baik pada atap, dinding maupun papan penyangga rumah. Penyebabnya diantaranya karena lapuk, tersapu ombak, dan tertimpa pohon yang tumbang. Ditemukan juga rumah yang terbakar tiga bulan yang lalu namun sampai penelitian ini dilakukan pemilik belum sanggup untuk membangun kembali. Kondisi tersebut menyebabkan ada sebagian rumah yang ditempati oleh dua atau tiga Kepala Keluarga sekaligus. Keadaan ini

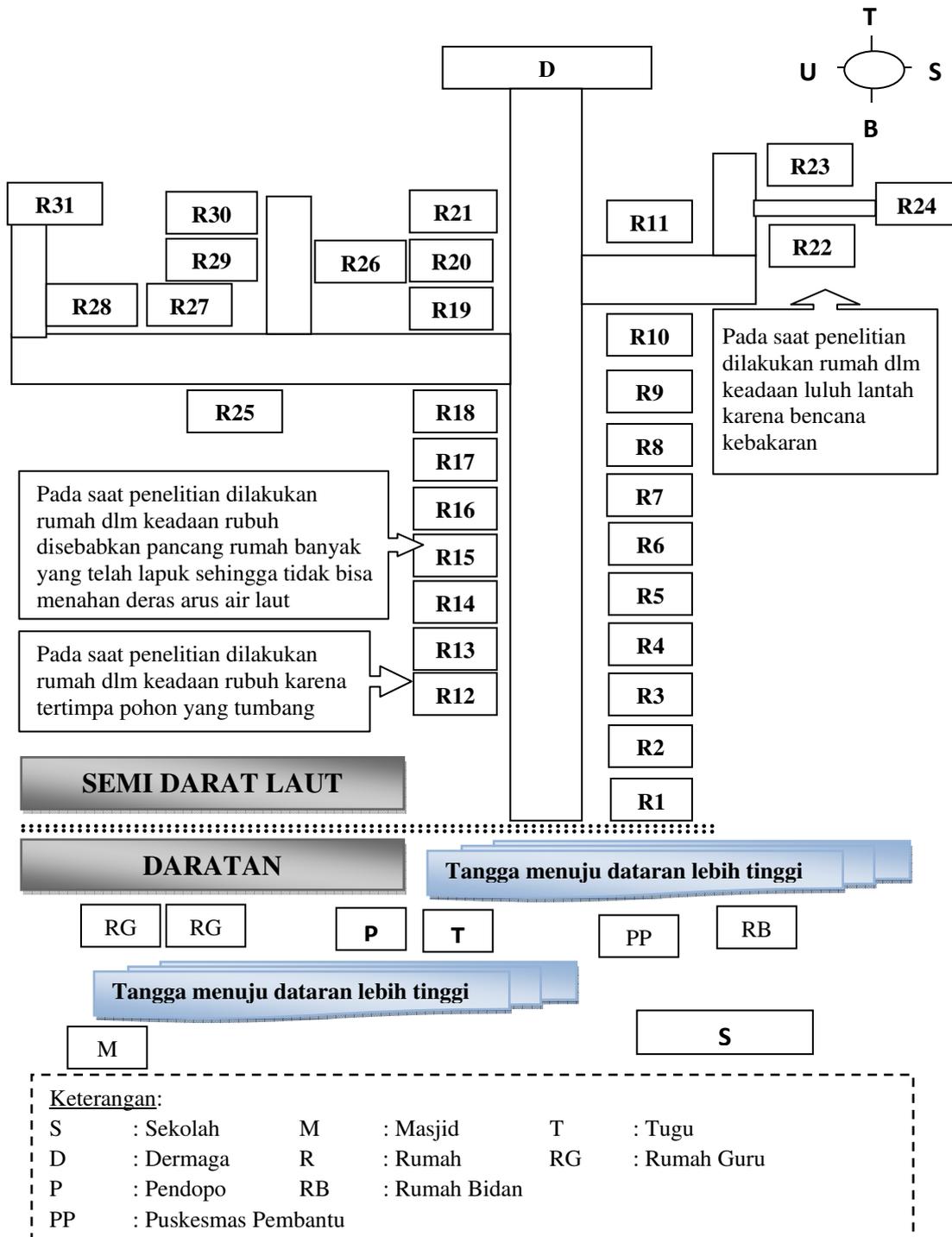
sebagaimana juga diungkapkan oleh Informan (Ra), (Tl), dan juga (Nm) sebagaimana berikut:

Jumlah rumah kemarin 30 (satu bulan yang lalu), dua rumah ada dua KK yang tinggal satu rumah pak Tamil, endi sama tata sama slamat jadi empat perKK. Satu keluarga dua kk. Kalau dihitung masih kurang lebih 29 an rumahnya yang ada.” (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010).

Sejak dibangun pertama kali belum pernah ada perbaikan rumah keseluruhan. Perbaikan hanya mengganti atap atau tiang rumah. Pendapatan kami tak tentu apalagi yang hanya mengandalkan mencari ikan. Sehari paling tidak dapat 15ribu an rata-rata. Ini saja seharian pasang *bubu* tidak ada ikan di dapat. Beli beras, minyak, sayur untuk makan 5 orang bisa habis sehari. Baru saja kemarin ada 2 rumah roboh lagi, rumah paling ujung dekat tangga naik dan di depan. Kalau yang diujung milik mertua kakak. (Tl, *Beneficiaries* Program, 17 Oktober 2010)

Dan yang didepan karena arus laut tiang rumah kurang kuat nahan jadi roboh. Sebulan kemarin rumah pak Rt terbakar sampai sekarang belum bisa perbaiki.” (Nm, *Beneficiaries* Program, 16 Oktober 2010)

Sedangkan jumlah rumah yang masih dapat digunakan warga di permukiman pulau Bertam pada saat penelitian dilakukan dapat ditunjukkan dengan menggunakan denah wilayah permukiman dibawah ini:



Gambar 4.5. Denah wilayah Prmukiman Bertam
 Sumber: Hasil diskusi dengan beberapa Informan, Oktober 2010

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Guna mendukung penyediaan fasilitas umum yang dibutuhkan warga Bertam maka pihak pelaksana juga membangun beberapa sarana dan prasarana penunjang, sebagaimana data dari FKKS Batam beberapa sarana dan prasarana yang dibangun sejak HUT FKKS ke dua tanggal 4 April 1988 sampai dengan tahun 1993 telah berkembang menjadi: 1 buah posyandu seluas 20 m², 1 buah bangunan SD dengan 6 lokal belajar seluas 96 m², 1 buah Masjid seluas 48m², 1 buah ruang serba guna seluas 36 m², 1 buah tempat monumen seluas 16 m², 2 buah sarana air minum dan air mandi, 1 buah yetti sepanjang 250 mtr dan pelantar seluas 18 m², jalan setapak 150 mtr yang telah disemenisasi, jalan lingkaran sepanjang 500 meter, listrik tenaga surya untuk semua rumah dan sarana lainnya yang ada. Gambaran lebih detail kondisi sarana dan prasarana pada saat pelaksanaan program dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Sarana Fisik Out Put Program PKAT pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam

Out put Program	Informasi Informan
1 buah posyandu seluas 20 m ²	<p>“Dulu Ibu bangun posyandu agar anak mereka bisa dapat imunisasi, bidan, dokter semua kirim. Kerja sama Ibu dengan Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Tapi sekarang apa...tidak dirawat bangunan.. hancur.” (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)</p> <p>“Sudah lama posyandu kita roboh nak (penulis). Bapak heran kenapa pemerintah lambat melihat itu padahal kesehatan penting. Kita sudah lapor ke pak sektetaris Lurah waktu datang ke Bertam tapi belum ada tanggapan. Kita warga hanya bisa apa, bidan juga sudah hampir 4 bulan tidak datang. sebelumnya kena marah penduduk karena datang tidak tepat waktu. Sepertinya setelah itu baru dia tak datang lagi kemari.” (Mh, <i>Beneficiaries</i> program Sekaligus Wakil Ketua RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)</p> <p>“Bapak rasanya pemerintah kurang paham dengan kita warganya. Posyandu yang sudah roboh tidak juga diperbaiki. Pening Bapak kalo memikirkannya. Kita berobat akhirnya ke Kasu kalau ada uang ya ke Batam. Serba repot.. bidan, dokter sudah jarang berkunjungnya ke Bertam...yach hanya sekali sebulan aja, ada</p>

	posyandu, bawa obat-obat suntik anak-anak, terus bawa obat untuk orang tua juga. Itu bidan dari Kasu” (Ra, <i>Beneficiaries Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam</i> , 15 Oktober 2010)
Pengamatan penulis: Bangunan posyandu mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan lagi.	
1 buah bangunan SD dengan 6 lokal belajar seluas 96 m ²	<p>“Untuk belajar ada Saya sediakan bangunan sekolah. Sederhana sih..tapi lengkap ada guru ibu datangkan. Seragam juga buku sepatu juga ada dulu bantuan sepeda untuk anak. Bangunan sekolah bisa jadi cikal bakal sekarang jadi lebih bagus ada Norma (Salah satu Informan) yang bisa diandalkan.” (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)</p> <p>“Saya tidak sekolah. Untuk anak sekolah penting sekolah apalagi dekat dengan rumah. Bangunan itu bangunan baru mbak (informan). Dulu seingat saya alas masih tanahuduknya pakai kayu kalau hujan bocor.” (Tl, <i>Beneficiaries Program</i>, 17 Oktober 2010)</p> <p>“Iya,karena dulu juga kami masih sekolah di lantai, menulis juga kayak giniuduknya (mempratekkan cara duduk bersila), Papan tulisnya disini, kalo basah yach kami duduk diatas sandal biar jangan basah. Sekarang ada bantuan pemerintah sudah ada 5 ruang kelas. Kurang sebenarnya untuk ruangan..ya kita terima apa yang ada yang terpenting anak-anak bisa sekolah.” (Nm, <i>Beneficiaries Program</i>, 16 Oktober 2010)</p>
Pengamatan penulis: Bangunan Sekolah telah mengalami rehab dan pembangunan gedung baru sehingga jumlah ruang keseluruhan menjadi 5 kelas. Jumlah ruangan kelas yang terbatas menyebabkan ada kelas yang digabung menjadi satu ruangan, hal ini menjadi salah satu kendala dalam proses belajar mengajar.	
1 buah Masjid seluas 48m ²	<p>“Bangunan masjid ada di atas sejak bu Dar. Kadang-kadang juga ke masjid kalau ada imam, sholat jum’at baru dipakai.” (Tl, <i>Beneficiaries Program</i>, 17 Oktober 2010)</p> <p>“Masjid dibangun dari jaman Ibu Dar sekarang sudah bagus ada bantuan dari jamaah Singapura. Masjid kalau rame hari Jum’at ada juga yang datang dari Lingka dan Gara karena memang ini masjid yang paling dekat. Dan juga ada imam masjid kebetulan kakak ipar saya, sekarang sedang ada kegiatan keluar pulau selama sekitar 3 bulan.”(Nm, <i>Beneficiaries Program</i>, 16 Oktober 2010)</p>
Pengamatan Penulis: Bangunan Masjid telah mengalami perbaikan sehingga memudahkan warga untuk menjalankan ibadah	
1 buah ruang serba	“Dulu masa Ibu Dar memang dibuatkan ruangan khusus untuk pertemuan. Kalau ada tamu dari Jakarta..dulu pertemuan ibu

guna seluas 36 m ²	menteri sering dilakukan disana. Sekarang sudah roboh lapuk karena memang dari kayu sekarang tinggal lantainya yang terlihat. Biasanya untuk kumpul-kumpul juga kalau ada joget.” (Mh, <i>Beneficiaries</i> program Sekaligus Wakil Ketua RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)
Pengamatan Penulis: Ruangan serba guna sudah lapuk hanya terlihat lantai yang menunjukkan luas batasan bangunan sebelumnya.	
1 buah tempat monumen seluas 16 m ²	“Ya tempat itu ada di sebelah tugu perahu tapi bangunannya sudah tidak ada lagi sudah hancur. Ada kalanya warga berkumpul juga joget seperti yang lalu. “(Ra, <i>Beneficiaries</i> Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)
Tempat monumen berdiri masih bisa dijumpai, namun <i>perahu kajang</i> sudah tidak ditemui lagi, yang tertinggal hanya pancang dan tempat sandar monumen berada	
2 buah sarana air minum dan air mandi	“Air minum kita ada sumur. Airnya masih bagus tapi sedikit, mandi kita kadang tampung air hujan. (Nm, <i>Beneficiaries</i> Program, 16 Oktober 2010) “Bangunan sumur air kita bangun gotong royong ya meski dengan upah, kalau tidak ada upah bagaimana mereka makan sedangkan mereka tidak melaut. Air sumur mudah didapat karena pada awalnya memang pulau Bertam dulunya tempat suku laut mendarat mencari air tawar.” (Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)
Pengamatan Penulis: Sarana air minum dan mandi masih digunakan warga dan kondisinya masih layak digunakan.	
1 buah yetti sepanyang 250 mtr dan pelantar seluas 18 m ²	“Dermaga sudah rusak berat. Tidak mungkin warga bisa membangun lagi. Rumah saja susah untuk diperbaiki lagi. Kemarin ada tamu dari Batam (Petugas dari Pemko Batam) mereka ada yang jatuh..itu tangga sudah lapuk dia salah injak.”(Hs, <i>Beneficiaries</i> Program, 19 Oktober 2010) “Pelatar ini dibuat sejak jaman Ibu Dar, sudah waktunya memang untuk diganti. Mengandalkan warga tidak mungkin, berapa pendapatan mereka ? untuk makan saja sekarang susah. Apalagi polusi pabrik makin susah dapat ikan. Kemarin pak Ol (salah satu Informan) terpelosok kaki nya, kayu yang diinjak kurang kuat nahan tubuhnya karena memang sudah banyak yang lapuk.” (Nm, <i>Beneficiaries</i> Program, 16 Oktober 2010) “Kalo pelatar.. apalagi setelah 18 tahun.. pelantar sudah rusak.. wajarlah karena pelantar dari kayu tahan hanya 5 tahun”. (Ol, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)
Pengamatan Penulis: Kondisi Yetti (dermaga) dan pelantar atau jembatan penghubung memprihatinkan karena banyaknya kayu yang telah lapuk sehingga	

ada beberapa warga yang terjerembab jatuh terperosok akibat kondisi tersebut	
jalan setapak 150 mtr yang telah disemenisasi	<p>“Rumah warga ibu buat dibawah diatas ada masjid, puskesmas, rumah bidan, lengkap sarana sekolah juga ada. Penghubung ibu buat tangga pakai semen biar bagus, rapi dilihat, tahan lama.”(Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)</p> <p>“Mungkin maksudnya tangga menuju keatas. Masih bagus untuk jalan ke atas.” (Nm, <i>Beneficiaries Program</i>, 16 Oktober 2010)</p>
Pengamatan Penulis: Jalan setapak masih dalam kondisi baik meskipun terlihat kurang mendapatkan perawatan dari warga	
jalan lingkar sepanjang 500 meter.	<p>“Rumah yang di darat saya buat penghubung, ada interaksi warga satu dengan lainnya. Bangunan ditata dari ITB saya dibantu buat”. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)</p> <p>“Bapak salah satu penghuni rumah yang di darat. Ada memang jalan satu rumah dengan lainnya. Sekarang sudah rusak tidak lagi digunakan cam mana dipakai. Serem kalau malam enak kumpul lagi di bawah”. (Hs, <i>Beneficiaries Program</i>, 19 Oktober 2010)</p>
Pengamatan Penulis: Jalan lingkar rusak berat. Jalan ini digunakan untuk menghubungkan rumah warga yang didarat, dan karena rumah sudah roboh sehingga jalan lingkar tidak lagi difungsikan.	
listrik tenaga surya untuk semua rumah dan sarana lainnya yang ada.	<p>“Kalau tenaga surya dulu program ada bantuan dari Pak Habibie karena beliau dulu Menristek kita dibantu buat listrik tenaga surya. Juga sebagian dari Neba. Ada saya punya file bisa nanti atik (penulis) lihat di kantor. Semua ada dibuat alatnya. Anak-anak jadi senang kan bisa belajar di malam hari. sekarang sepertinya sudah tidak dipakai lagi padahal itu mahal lho dibangun.”(Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)</p> <p>“Modul (alat tenaga surya untuk menghasilkan listrik) ini satu-satunya yang masih bisa digunakan. Alat penggantinya mahal ini karena Bapak rawat jadi masih bagus. Kalau alat rusak ya, dua kali lah dari harga alatnya..Kalo disini kami nggak bisa beli yang baru, biasanya kalau nak beli yang baru bisa sampai belasan juta ya, tapi yang kami beli yang orang habis pakai kualitas cukup harga murah sampai 3-4 juta, itupun bukan hanya satu dua bulan tapi satu tahun dua tahun kami menabung uang itu, memang agak sulit. Dan terangnya ndak tahan lama, apalagi cuaca ndak tentu tiba-tiba hujan. Lebih sering Bapak pakai genset lebih murah.”(Mh, <i>Beneficiaries program</i> Sekaligus Wakil Ketua RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)</p> <p>“Dari pagi sampai sore. Kita bisa sampai malam sampai besoknya lagi, yang penting akinya kuat.. satu hari panas kita bisa pake 3</p>

	hari..kalo akinya bagus 12 watt. Kalo aki yang bagus Sampai 5 tahunan. Kalo aki yang biasa 1 tahunan, kalo pake modul itu.. untuk tv yang warna gak bisa dia itu” (Nm, <i>Beneficiaries</i> Program, 16 Oktober 2010)
Pengamatan Penulis: Sebagian besar telah mengalami kerusakan dikarenakan biaya perawatan dan alat pengganti yang rusak mahal, warga beralih menggunakan genset. Dan hanya satu yang masih dalam perawatan dan masih bisa digunakan.	

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Oktober 2010.

Beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang telah dibangun pada saat program PKAT pada komunitas Suku Laut yang ada di Pulau Bertam berlangsung hingga saat penelitian ini dilaksanakan beberapa terlihat kurang terawat namun masih digunakan diantaranya dermaga (*yetti*), jembatan pelantar, jalan setapak, juga sumur sumber air tawar. Dan sebagian yang lain sudah tidak bisa lagi digunakan diantaranya rumah yang dibangun di darat semuanya sudah roboh dan tidak lagi digunakan, ruang posyandu, ruang serba guna, monumen perahu, serta peralatan listrik tenaga surya (*modul*) yang sebagian besar modul telah mengalami kerusakan sehingga tidak bisa lagi digunakan dan hanya sekitar 3 *modul* yang masih bisa difungsikan namun tidak maksimal. Untuk lebih jelasnya tentang gambaran sarana dan prasarana *out put* program PKAT pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam (dapat dilihat pada lampiran 5).

b. Penempatan Petugas Pendamping Lapangan

Yang dilakukan pelaksana dalam tahapan ini salah satunya yaitu penempatan petugas pendamping (*Community Worker*) yang tinggal di lokasi Permukiman. Data penelitian menunjukkan bahwa pendamping berasal dari berbagai instansi yang terkait, diantara dari Depsos RI, Depag RI, Dinas Kesehatan maupun dari FKKS Batam, seperti yang yang diungkapkan oleh salah satu petugas pendamping (Informan Bu) berikut ini:

Konflik ada tiap hari, kehidupan disana sangat berkesan untuk saya, itu makanya tiap-tiap malam saya tulis kejadian apa yang menimpa saya juga arsip kejadian-kejadian nanti-nanti kalau ada yang membutuhkan.. ya saya berikan. (Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)

Didalam buku harian tersebut menyebutkan terdapat beberapa petugas yang lama bertahan tinggal dan menetap di Pulau Bertam, diantaranya dua Satgasos dari Depsos dengan lama menetap 5 tahun (mulai bertugas pada tanggal 6 Juni 1991), satu Guru SD dengan lama menetap kurang lebih 6 tahun (dari mulai 6 Juni 1991) yang kemudian menikah dengan salah satu warga setempat, satu dari pekerja sosial dari FKKS Batam (mulai bertugas tahun 1990), dan satu dari Depag dengan lama menetap kurang lebih 8 tahun (mulai bertugas tanggal 15 Juli 1990).

Penempatan petugas pendamping (*Community Worker*) dengan berdasarkan pada penugasan dari instansi/lembaga yang terkait, sebagaimana yang dikemukakan oleh Informan (Sd) dan (Sn) sebagai berikut:

Dulu memang SATGAS tinggal disana, SATGAS sendiri dari Depsos. Memang sudah seharusnya pemerintah dong yang *care*. Mbak atik silakan hubungi pak (Ol) deh, dia itu pernah tinggal selama berbulan bersama dengan suku laut. Dia itu orang batak tetapi bahasanya udah suku laut. Dia itu punya konsep-konsep tentang program.” (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Kalo secara awalnya saya tidak terlalu ini (Tidak terlibat dalam proses persiapan), yach karena saya juga masuk pada tahun berapa yach setelah mereka dimukimkan. Memang pada saat itu tidak ada sebelumnya persamaan persepsi yang mesti dilakukan di sana (permukiman Bertam), karena saya datang pun sudah ada si (Bu) tapi kalo tukar pikiran sambil duduk-duduk sering dilakukan. Ada dua orang yang dikirim dari Depsos sebagai Satgasos, saya sendiri tahun 1990 dan seorang namanya pak (Hw). Sekarang dia menjadi Lurah di Tanjung Riau. Iya kami dulu yang diperbantukan untuk itu (pendampingan warga suku laut di Pulau Bertam). Beberapa petugas datang dan pergi jarang mereka menetap lama.” (Sn, Mantan Pendamping/Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Informasi diatas menunjukkan bahwa tugas sebagai *Community Worker* dipilih disebabkan karena mandat dari instansi/lembaga terkait. Disamping itu

tidak semua petugas dibekali dengan pelatihan khusus terkait pendampingan masyarakat dari instansi/ lembaga pengirim. Disamping itu juga menunjukkan bahwa pada tahap awal persiapan program belum didampingi oleh *Community Worker* (CW) yang tinggal dan menetap di lokasi Permukiman di Bertam, hingga tahun 1990 baru ada beberapa dari CW yang tinggal dan menetap dalam jangka waktu yang relatif lama untuk melakukan pendampingan di masyarakat. Informasi diatas sekaligus menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terlebih dahulu tidak dilakukan persamaan persepsi dari petugas pendamping terhadap metode maupun pendekatan yang akan digunakan pada saat akan melakukan pendampingan. Disamping itu dari informasi diatas juga menunjukkan bahwa selama proses pendampingan sering terjadi pergantian petugas pendamping.

Demikian juga yang tercatat dalam Laporan “Peranan Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) dalam Pembinaan Suku Laut di Pulau Bertam-Kepulauan Riau” pada tahun 1993 sebagai pertanggungjawaban FKKS Batam terhadap pelaksanaan program yaitu:

Hambatan utama yang kami peroleh, sehingga adanya keterlambatan dalam menyelesaikan proyek ini adalah tenaga profesional (pekerja sosial) yang mendampingi para suku laut sebaiknya sejak warga Suku Laut dimukimkan bahkan sejak dimulainya pendaftaran calon penghuni.

Kondisi seringnya pergantian petugas juga diungkapkan oleh Informan (Bu) seperti dibawah ini;

Mereka (Suku Laut) kurang dapat mencerna apa yang kita sampaikan..mungkin juga karena seringnya bergantian para petugas sehingga membuat mereka bingung, ”dulu dari petugas A dapat ini sekarang dari petugas B dapat ini” itulah jadinya.

Beberapa petugas pendamping pada saat program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 4.6. Informan Ol, Informan Bu, Informan Sn & salah satu Satgasos Depsos RI dalam Catatan harian salah satu petugas pendamping program pemberdayaan pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam
Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010.

Koordinasi yang dilakukan oleh FKKS Batam dengan sesama petugas pendamping yaitu dengan menugaskan seorang pendamping yang menetap di permukiman sebagai penghubung antara FKKS Batam dengan pendamping dari instansi lain sekaligus melakukan tugas pendampingan masyarakat, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Informan (Sn) yang merupakan petugas pendamping (*Community Worker*) pada saat pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam sebagai berikut:

Untuk pembinaan, yach semua modal semua keperluan itu semua dari K3S, termasuk untuk mengambil keputusan juga. hmmm sama seperti saya kalo ada keperluan untuk pemberdayaan yach saya akan ajukan proposal baru nanti datang dana buat kegiatan melalui kepercayaan Bu Dar, Si Ol (Salah satu Informan). Minta apa, yach dikasih.” (Sn, Mantan Pendamping/Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Dari keterangan tersebut diatas menggambarkan bahwa secara operasional kegiatan dilaksanakan berdasarkan keputusan persetujuan dari FKKS Batam setelah sebelumnya mengajukan proposal kegiatan untuk kemudian mendapatkan pendanaan dari FKKS Batam terkait kegiatan yang diusulkan. Informasi diatas juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program dibantu dengan menugaskan salah

seorang *Community Worker* (Informan OI) untuk ditempatkan di pulau Bertam yang bertujuan mengkoordinasikan kegiatan dan menjadi penghubung antar petugas (CW) dari instansi yang lain dengan FKKS Batam.

c. Santunan Biaya Hidup

Selain penempatan petugas pendamping masyarakat, pada tahap ini pelaksana program juga memberikan santunan biaya hidup kepada komunitas sasaran yang menetap di lokasi permukiman, seperti yang diungkapkan oleh Informan (Sd) dan (OI) dibawah ini:

Nah untuk itu mereka di gaji tetapi gajinya sebesar penghasilan mereka setiap hari, yaitu sebanyak 2 kg Ikan. Jadi mereka bisa makan juga sambik belajar. Nah dulu saya begitu. Saya tanya berapa penghasilan mereka. Dan mereka orang jujur mereka bilang hanya 2 Kg ikan perhari. Beda nih dengan kita yang kadang-kadang suka bohong.”(Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

saya kasih beras..saya *support* beras... ini beras satu bulan berapa kilo.. ini ikan terkurung (ikan sarden), ikan asin... itulah tambahan mereka nah anak-anaknya kita sekolahkan lah..ya kan, biasanya anaknya jajan apa segala macam kan tidak minta ke bapaknya sekarang kan minta sama bapaknya.. biasanya dulu kan dia ikut bapaknya... ya lempar pancing.. cari unduk-unduk.. kuda laut.. anak-anak banyak mendapatkan.”(OI, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa santunan biaya hidup diberikan sebagai pengganti pendapatan warga setiap harinya yaitu setara dengan pendapatan 2 kg ikan. Kegiatan ini diberikan dengan pertimbangan bahwa setelah dimukimkan pendapatan warga menjadi berkurang disebabkan karena mereka harus mengikuti beberapa kegiatan yang terkait dengan program sehingga mengurangi waktu mereka mencari ikan. Sebagaimana diketahui bahwa pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan utama yang dimiliki warga Bertam. Disamping karena anak-anak mereka yang semula mandiri mampu menambah

penghasilan orang tua dari hasil tangkapan ikan yang didapat menjadi harus bersekolah sehingga tidak lagi bisa membantu orang tua mereka mencari ikan.

4.1.2.2. Pembinaan

Bentuk pembinaan sebagaimana yang dilaksanakan pada program pemberdayaan suku laut di pulau Bertam disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dialami oleh *beneficiaries*. Kegiatan pembinaan sebagaimana terdokumentasikan dalam laporan pembinaan suku laut di pulau Bertam 1993 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1987 dilaksanakan kegiatan Bimbingan Hidup Bermasyarakat, Bimbingan Kesadaran Beragama, Bimbingan Pemeliharaan Kesadaran Diri maupun lingkungan, Bimbingan dalam Pertanian dan peternakan, perikanan. Tahun 1988 dilaksanakan kegiatan Bimbingan penyuluhan tentang makanan gizi dan KB, serta Bimbingan untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal bagi orang dewasa. Pada tahun 1990 dilaksanakan kegiatan Bimbingan Budi daya rumput laut, Mengenal penggunaan uang melalui simpanan pada Bank, Bimbingan Keterampilan Wanita.

a. Bimbingan Hidup Bermasyarakat

Kehidupan suku laut yang sebelumnya berpindah kemudian menjadi menetap menyebabkan adanya perubahan dalam pola hidup masyarakat. Kehidupan menetap dengan hidup berdampingan saling bertetangga membentuk pola interaksi yang lebih *intens* yang terjadi antar warga sangat berbeda dengan kehidupan *nomaden* yang semula dijalani masyarakat. Perubahan kondisi tersebut tentu saja dapat memunculkan konflik-konflik yang dapat memecah belah persaudaraan diantara mereka, sebagaimana yang diungkap oleh informan (O1), (Mh) dan (Ra) berikut:

Dipermukiman setelah dirumahan ternyata ketemu berdampingan. Sampan itu kan cuman 1,5 m kali berapa disitu hanya ada keluarga inti.. dan itu kan sentuhan psikologis kan sangat erat.. ayam ada, kucing, anjing ada. Karena interaksinya 12 jam disitu (sampan) mereka sudah dianggap keluarga ayamnya juga, anjingnya, kucingnya.. bahkan satu piring sama bersama.

”memang anjing itu habis darimana, orang disampan aja kok.. bersih?”
 “bersih dong” sama-sama mandi disana.. makanya dia dianggap satu keluarga iya toh. Nah ternyata.. dibuat rumah besar-besar kan.. ya tahulah anjing kalau ditaruh dalam rumah.. pergi sana-pergi sini lah, “ini kok luas sekali ini” ketemu sama kucing orang lain..”aung..aung” ”kok ada kucing” ndak pernah ketemu dengan kucing orang lain kan di sampan. Nah ini sekarang dia ketemu..berantemlah kucingnya..itu anggota keluarga kucing itu tadi iya kan...ah, berantemlah orangnya.. anjingnya dilepas.. lho anjingku..jumpa ini lho.. berantem dia.. berantem keluarganya. Ya tugas kita mendamaikan lah. Suku laut itu kan ada lima suku ya kita saja yang memberinya nama suku laut, kita memberi nama suku laut karena mereka di laut . padahal mereka itukan lima suku yang berbeda karena apa. Kalau ilmu antropologi kan memandang dengan gayanya berbeda, cara mata pencahariannya yang berbeda, bahasanya berbeda, segi tehnologi pangannya juga berbeda nah itukan berarti tidak sama.. apalagi struktur fisiknya tidak sama, mereka kan ada yang putih, hitam rambut keriting.”(Ol, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Suku laut itu bukan satu suku, suku laut itu ada lima suku. Kalau diliat perbedaanya ya dari cara bicara, asal mula datang baru bisa tahu dia masuk dalam suku apa. (Mh, *Beneficiaries* program Sekaligus Wakil Ketua RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Kami memang suku laut tapi bukan satu suku.. ada macam-macam suku..ada sekitar 7 suku terasing.. moro, daek , matang, batam. Suku laut yang ada di batam ini jadi masuk dalam satu rumpun. (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Sedangkan data dari FKKS Batam menggambarkan bahwa ada tiga klasifikasi suku laut terutama yang ada di pulau Bertam sebagai berikut: “Suku Laut yang ada tinggal di Pulau Bertam terdiri dari tiga macam Suku Laut yaitu : Suku Laut Mantang Aceh, Suku Laut Maphur dan Suku Laut Sema”.

Guna meminimalisir konflik yang ada maka dibuat susunan pemerintahan setingkat Rukun Tetangga (RT) yang berfungsi mengkoordinasi, penyalur aspirasi warga, serta menyelesaikan permasalahan yang disekitar warga permukiman. RT sendiri merupakan unit terkecil dari tata pemerintahan NKRI. Permukiman yang ada di pulau Bertam masuk pada RT 20. Dengan terbentuknya RT secara tidak langsung segala permasalahan yang menyangkut warga menjadi tanggungjawab Ketua RT untuk menyelesaikan. Hal ini berbeda ketika warga masih dalam kehidupan yang nomaden dimana konflik antar masyarakat suku laut lebih banyak didamaikan oleh kehadiran kepala suku, seperti yang diinformasikan oleh Informan (Ra), dan (Bu) berikut:

Setelah dibentuk RT Bertam masuk RT 20. Dulu ketuanya pak Mt (Ketua RT sekarang). Pemilihannya kita serahkannya pada ibu Sd, mungkin karena pak Hs dulunya warga paling lama di Bertam jadi ditunjuknya jadi ketua RT. Sekarang juga sama... Nggak ada musyawarah untuk pemilihannya RT, itu dipilih di kelurahan aja, mereka disana ditunjuk-tunjuk saja kita nggak tau.. RT Tidak dipilih, itu ditunjuk langsung di Kelurahan. Sampai sekarangpun tak diganti-ganti. Kalo dulu ya..pak along (Kepala Suku yang menetap di Pulau Padi) yang menanganani setiapnya ada masalah, tapi semenjak ada pak RT ya kepada RT lah kita mencoba menyelesaikan persoalannya warga. tapi kalo Pemilunya kita selalu ikut, disini pun ada TPSnya (Tempat Pemungutan suara).. ada kita disini TPS 17. Selamanya Bapak jadi Sekretaris RT semua warga yang harus memilih pastinya ikut. Kesadaran warga sudah bagus kalau masalah Pemilu.. ya Pemilu Walikota, DPRD, juganya Presiden. (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Kalau Pemilu disini semua ikut. Bapak sendiri orang Golkar tapi bukannya ikut-ikutan Bu Sd (Ketua FKKS Batam) dari hati Bapak. Kalo TPS disini masuk TPS 17 Bertam. (Hs, *Beneficiaries* Program, 19 Oktober 2010)

Informasi diatas menunjukkan bahwa pemilihan RT pada awalnya didasarkan pada penunjukkan dalam hal ini oleh pelaksana program yaitu FKKS

Batam. Pengetahuan warga tentang tata pemerintahan yang menyangkut kondisi kepengurusan dalam RT menunjukkan adanya kepedulian warga akan tata pemerintahan masyarakat. Selain itu sebagai warga negara Indonesia yang mewajibkan bagi setiap warga negaranya untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Guna melaksanakan kewajiban tersebut warga juga turut menyalurkan aspirasi mereka, sebagai salah satu fasilitas pendukung maka dibuat Tempat Pemilihan Suara (TPS) dalam hal ini TPS 17 yang berada di Pulau Bertam sehingga memudahkan warga dalam menyalurkan aspirasinya.

b. Bimbingan Kesadaran Beragama

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kesadaran beragama dengan melibatkan kerjasama dengan Departemen Agama dengan penugasan Guru Agama untuk menetap di pulau Bertam. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kondisi warga yang sebelumnya memilih untuk *anemisme*, mengingat salah satu kewajiban lain sebagai warga negara adalah untuk memeluk salah satu agama sah yang diakui pemerintah. Kebebasan dalam menentukan agama yang dianut seperti yang diutarakan oleh Informan (Hs) dan (Nm) berikut ini:

Yach kita juga senanglah daripada hidup di laut, kita nggak di ajari agama juga, kita juga bebas pilih agama. Islam itu tidak maksa. Dulu kami itu tidak kenal agama. Trus tahun 1982 datang kapal kristen di kasih makan, pakaian. Kita mau. Trus akhirnya Islam masuk ya ibu Sd yang bawa, kalo dipikir-pikir pak (Bu) lah yang buat. Anak saya aja ada yang kristen, 2 katolik sementara saya Islam. Nggak marah Bapak, yang penting baik-baik aja. Buat apa marah-marah. Itulah yang namanya Pancasila. Yang penting baik-baik sajalah. Tuhan khan satu. Jadi nggak ada gunanya kita membeda-bedakan.” (Hs, *Beneficiaries Program*, 19 Oktober 2010)

Khan kalo orang pendidikan khan ada toleransi beragama. Kadang-kadang juga kalo orang kristen datang ke rumah, eh ada yang bilang. Eh “jangan... jangan masuk karena mereka makan babi”, Khan nggak boleh begitu. Karena di bertam ini kan tidak hanya muslim juga ada kristennya kan.”(Nm, *Beneficiaries Program*, 16 Oktober 2010)

Aktifitas kegiatan keagamaan pada saat program dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana dalam gambar 4.8. dibawah ini:



Gambar 4.7. Pernikahan salah satu warga dengan CW secara Islam,
Peringatan hari Isyra'dan Mi'raj,
Dan satu aktivitas keagamaan khitanan masal
Sumber: Dokumentasi penelitian, September 2010

c. Bimbingan Pemeliharaan Kesehatan Diri maupun lingkungan

Bimbingan pemeliharaan kesehatan diri maupun lingkungan diarahkan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara-cara hidup sehat. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pola hidup warga yang kurang mendukung kesehatan diri dan lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh informan (Bu), (Sn) dan (Ol) berikut ini:

Waktu pertama mereka dimukimkan..maaf ya, jarak satu meter mereka datang mau mendekat ke kita sudah tercium pasti ini suku laut baru datang bertandang. Mereka kurang bersih ya lingkungannya, rumahnya ya kesehatan badannya. Karena itulah kemarin ada program bagaimana agar mereka paham bahwa kebersihan sangat berhubungan dengan kesehatan. Juga kalau Bapak sebagai kewajiban mengajak mereka bahwa kebersihan itu sebagian dari iman maka dari itu Bapak ajak mereka datang kerumah masing-masing juga bapak tunjukkan rumah yang kita tepati selalu dalam keadaan bersih..jadi mereka tahu “oo..Pak Bu tidak hanya dilidah tapi juga ada kerja nyatanya”..mereka lebih cepat ditunjukkan hal yang nyata daripada hanya berbuih-buih kita bilang. (Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)

Sebelumnya mereka sudah mengenal mandi dengan air tawar tapi belum teratur..masih jarang-jarang mandinya. Tetapi setelah mereka dimukimkan kebersihan dirinya dengan cara di bilangin. Kita khan sasarannya anak-anaknya yach. Jadi khan kita lihat anak-anaknya mandi pake sabun dan shampo. Sewaktu mereka masih di laut mereka juga masak pake air tawar juga. Mereka tau kog menggunakan air tawar. Kalo masalah itu mereka semua pahlamlah. (Sn, Mantan Pendamping/Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Kalau dulu kesana baunya minta ampun..macam mana mandi jarang, makan ikan, laut asin, mandi laut.. dari 100meter baunya pun sudah tahu saya itu orang laut..dulu mandi begitu saja, sekarang sampoaan..kita ajari pakai sabun biar wangi.. sekarang sudah bergaya, cantik-cantik kan. (Ol, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Keterangan diatas dibenarkan oleh Informan (Ra) sebagaimana diungkapkan dibawah ini:

Termasuknya juga Bapak, Bapak dulu lahir di sampan ya, lahirnya di sampan dan juga besarnya di laut ya, ehh termasuknya Bapak dulu dibilangnya ini, ceritanya jorok sekali ya, mandinya pakai air laut dan juga cuci MCK juga pakai air laut, hanya sekali-sekali saja mandi pakai air tawar. Kalau dibilangkan jaman-jaman dulu tahun-tahun '65 '67' banyak orang yang takut pada orang suku laut, gak mau mendekati. (Ra, *Beneficiaries* Program /Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Pas dibawah semua kita pakai air tawar, cuci baju, masak dulu memang sudah pakai air tawar..sejak dulu memang sudah mengenal air tawar..bahkan kalo mandi turun kebawah cari sumur..meski ndak punya sumur..numpang-numpang dengan orang melayu ditepi pantai numpang mandi, numpang nyuci, memang mandinya tidak seperti sekarang.. satu hari bisa tiga kali dua kali.. dulu satu hari sekali atau bahkan seminggu sekali... jadi nggak selalu mandi. Kita dulu kan jarang mendekati sumur, di laut itu kan susah kalau

sudah... sudah masuk dikampung orang permissinya ngambil air..itu paling nggak ada satu drum lebih dari pada itu lagi untuk makannya, untuk cuci pakaiannya, kalau nggak kita makannya pakai air asin mati kita. (Nm, *Beneficiaries Program*, 16 Oktober 2010)

Dari informasi diatas dapat dideskripsikan bahwa kehidupan Suku Laut yang semula berpindah-pindah hidup diatas “perahu kajang” mempengaruhi pola hidup mereka dalam memelihara kesehatan diri dan lingkungan. Sebelum dimukimkan mereka sebenarnya telah mengenal penggunaan air tawar dalam kegiatan sehari-hari, dalam setiap kesempatan warga akan ke darat untuk mengambil air tawar guna keperluan hidup.

Namun demikian karena keterbatasan baik karena kecilnya perahu kajang tempat mereka hidup maupun tempat untuk menampung air sehingga warga tidak setiap hari melakukan aktifitas mandi, kecuali untuk memasak warga selalu menggunakan air tawar. Yang dilakukan oleh pekerja lapangan (*Community Worker*) adalah dengan memberikan pengarahan, mengajak, dan memberikan contoh bagaimana cara hidup sehat baik terhadap diri maupun lingkungan. Pihak pelaksana kegiatan sendiri dalam hal ini KKKS Batam mempunyai peran dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Seperti diungkap oleh informan (Sn) dan (Sd) berikut:

Yach, kami pribadi yang berusaha, kami datangin dari rumah ke rumah. Kita bilangin papan rumahnya khan bisa dibersihkan, kalo nggak ada karpet yach di lap dan di cuci. Kemudian penempatan barang-barang. Seperti perahu kita bilang, perahu kalian itu kalo siapa melaut seminggu sekali dibersihkanlah biar nggak bau dan orang-orangnya juga nggak kebauan. Nah, kalau awal-awal sih saya masih hati-hati ngomong, khan masih kita pelajari khan. nah kalo lama-lama sih saya sudah tau dan akhirnya bilang apa adanya aja kepada mereka. Nah ketauan khan kalo seminggu mereka dah bertandang, nah kecium khan baunya, nah berarti rombongan mereka yang bertandang nih dah pulang. Dulu khan kesehatan, kita kerjasamanya dengan puskesmas keliling, dulu setiap 1 bulan sekali keliling dulu. Yach

kalo mereka berobat dan melahirkan disitu. Iya pake kapal. Itulah puskesmas keliling, nah sekarang khan kalo berobat yach datang aja ke puskesmas. Kecuali kalo parah yach baru dipersilahkan datang ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Sekarang pun kalau mereka (Suku Laut yang ada di pulau Bertam) sakit bisa berobat gratis di Budi Kemuliaan.” (Sn, Mantan Pendamping/Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Trus disana itu saya buat balai kesehatan untuk ibu dan anak disuku laut untuk daerah-daerah sana. Dulu khan tidak seperti sekarang tidak ada kapal. Dulu kan sewaktu suku laut masih belum punya daerah sana, saya punya kapal. Kapal itu berputar keliling 3 pulau besar. Namanya puskesmas keliling budi kemuliaan. Kalau mau lihat silakan lihat fotonya masih ada. Bisa cabut gigi, bisa periksa. Trus disitu juga saya buat perpustakaan keliling.” (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)

Dari informasi diatas menggambarkan bahwa kegiatan sebagai pelaksana program KKKS Batam juga bekerjasama dengan rumah sakit Budi Kemuliaan dengan menggunakan kapal yang dialihfungsikan sebagai puskesmas keliling. Informasi diatas juga menginformasikan bahwa sampai penelitian ini dilaksanakan, KKKS Batam masih memberikan pelayanan kesehatan secara gratis untuk mereka yang tinggal di Pulau Bertam



Gambar 4.8. Puskesmas keliling Budi Kemuliaan, Pos Pelayanan Kesehatan Awal Pertama Kali di Pulau Bertam, dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan di Batam.

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Oktober 2010.

d. Bimbingan dalam Pertanian, peternakan dan perikanan.

Ketergantungan penghasilan warga Bertam akan hasil tangkapan ikan di laut serta penggunaan alat tradisional dalam mencari ikan disamping juga kondisi pencemaran air laut yang semakin mempersulit warga Bertam untuk mendapatkan hasil yang melimpah dari melaut menyebabkan hasil tangkapan hanya cukup untuk konsumsi warga menjadi dasar pelaksanaan kegiatan bimbingan pertanian dan peternakan. Melalui kegiatan ini diharapkan warga mempunyai pendapatan tambahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Informan (Sd) dan (Ol) sebagai berikut:

Mereka itu kan orang laut (warga pulau Bertam) ya..yang dia bisa melaut, ambil ikan sini di pulau Bertam esoknya ke belakang padang..tapi kemampuan mereka sedikit masih sangat tradisional.. akhirnya apa..ikan tidak laku dijual.. mana ada toke yang mau membeli ikan rusak kan...saya perintahkan Ol sebenarnya kita sudah minta orang pertanian turun ke lapangan tapi tidak ada respon.. buat itu kegiatan yang bisa bikin mereka ada pendapatan baru, ajari tanam ubi, jagung, kacang.. bagaimana caranya mereka bisa hidup lebih sejahtera. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Dulu ikannya kan susah dijual.. karena ditombak, rusaklah ikan-ikan itu jadi busuk... orang tak mau lah...yang ditangkap biasa lah.... itu..*sea cucumber* atau teripang itu.. yang lain ditombak pakai orang itu kan.. jadi akhirnya bisa interaksinya bisa begitu... sebenarnya tujuannya bukan mandiri tapi bagaimana mereka tidak jadi suku laut lagi.. orang biasa nelayan biasa.” (Ol, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Keterangan diatas mendeskripsikan latar belakang program bimbingan pertanian, peternakan dan perikanan yang didasari oleh hasil tangkapan komunitas sasaran yang kurang bisa memenuhi kebutuhan hidup. Hasil tangkapan yang kurang bisa dijual karena dipengaruhi alat sederhana yang mereka gunakan diantaranya menggunakan pancing, *rawai*, tombak (*nyuluh*), memasang bubu,

atau menggunakan jaring dan *kelong*. Beberapa alat dan teknik yang digunakan Suku Laut untuk mencari ikan dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4.9. Beberapa Jenis Tombak yang Digunakan Suku Laut, Nelayan Suku laut, dan Salah Satu *Kelong* Milik Warga Bertam.

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2010

Kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, karakteristik tanah dan sifat warga yang kurang sabar membuat kegiatan kurang bermanfaat secara maksimal untuk kelompok sasaran, seperti yang diungkapkan oleh Informan (Ra), dan (Nm) dibawah ini:

dulu ada dulu dekat masjid ada tanaman nanas, jagung, kangkung, kacang panjangnya, sawinya..subur pertama..ketela, buah mentimunnya dulu subur pertama kalinya sudah jalannya yang kedua udah dia menurunkan.. layu.. habis kami setiap hari angkat pikul air dari sumur balik bukit sana, saya tu nyangkut sampai sore-sore diatas sana dulu males saya ngolah lama-lama kan capek saya tiap hari.. lama-lama habis gitu.. suburinya dulu mungkin karena ada pupuk kotoran itu ya... pak Sn itu pak Hw pak Bu juga ya yang ngajar kita. Kalau bertani disini bukan ndak bisa, Cuma masyarakat disini istilahnya apa yang kalau bapak mo ngomong ya ndak cocok.. ndak betah..karena hasilnya bertani ini mereka itu mereka rasanya lama disamping itu tanah itu tidak memungkinkan.. tanahnya keras, tanah panas.. tanah gusuran kan..maunya tanaman keras pun ndak bisa apalagi tanaman yang dingin. Dulu pernahnya kelapa, mangga, cempedak, ubinya, ndak subur. Kalau dipantai kayak gini memang agak subur.. tapi masuk ke dalam hutan-hutan itu dibersihkan ditanamnya nggak subur.. jadi dibertam ini ada

dua tanahnya campur satu tanah boksit satu tanah pasir gemburnya tanah putih.” (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

kalau dulu kami ya saya pernah perkebunan sekolah..pupuknya dibawa dari pekanbaru.. kurang berhasil karena tanahnya keras padahal pernah berhasil untuk sayuran kacang, tomat habis..sekali tanam sudah tidak bisa lagi.. tanahnya keras..nggak bisa..bisa cuman lama yang didalam sudah tidak subur lagi..dulu pertama kali kami bercocok tanam pertama kali panen ubinya kan besar bisa panen sampai sekarang sekecil-sekecil begini, beberapa bulan seperti itu istilahnya tanahnya tidak sehat keras.” (Nm, *Beneficiaries* Program, 16 Oktober 2010)

Informasi diatas semakin menegaskan kurang berhasilnya bimbingan pertanian yang lebih disebabkan karena kondisi tanah yang berbatu dan banyak mengandung biji bouksit tidak sesuai untuk daerah pertanian, serta masa panen yang terlalu lama menyebabkan warga enggan untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Keadaan tersebut dibenarkan oleh Informan (Ol) dan (Bu) yang juga merupakan *Community Worker* pada saat program dilaksanakan, seperti dibawah ini:

Kita kasihlah cara bercocok tanam, keterampilan-keterampilan, tindakannya.. nah kan sudah saya ajarin bagaimana itu tanam kacang, ketela, nanas.. nah kenapa tidak juga itu berhasil.. ya..karena tanahnya tidak cocok.. warganya malas.. biasanya bangun pagi ambil tombak, pancing pulang dapat ikan.. sekarang ... capek tanam lama dipetik.. mana lah tahan mereka. (Ol, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Pemberdayaan udah mulai dari penanaman rumput laut, keramba, Iya mengembangbiakan ikan, sampai pompong. Dulu mereka mendapatkan kredit untuk membeli pompong, agar mereka dapat fasilitas melaut. Tetapi banyak yang pompongnya rusak akhirnya gak bisa bayar. Beberapa kali di bayar tetapi akhirnya gak dibayar. Ya bagaimana bisa bayar semua hasil tangkapan digunakan untuk konsumsi tidak bisa disimpan.” (Sn, Mantan

Pendamping/Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Kita juga ada program pertanian..tidak bisa itu petani itu. Nggak tahan dia nunggu satu tiga bulan itu ..dia nunggu lebih baik nunggu hasilnya dari cabai yang kita tanam dari pada dia nanam sendiri..ya memang itu kendala kita, begitu kita ngajak..kita kan beri contoh ni.. artinya kan sudah dibagi..kebun si anu disini kebun si anu disini kan gitu kan kalau saya itu bagiannya di dekat apa namanya dekat masjid.. kita tanam singkong di sana tanam mentimun, tapi mereka tidak bisa meniru..apakah mereka tidak punya ilmu..kita sudah ber ilmu cara menanam cara merawat cuman mengamalkan saja sulit..karena mereka suka melaut.” (Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)

Keterangan tersebut juga menggambarkan peran CW dalam kegiatan ini bersama masyarakat Bertam. Peran dan keterampilan CW dalam kelancaran kegiatan ini menjadi penting hal ini mengingat tidak adanya keterlibatan dinas pertanian juga perikanan yang diharapkan dapat memberikan solusi serta pengarahan dalam bidang yang terkait.

Disamping juga menginformasikan bahwa pada awalnya warga terlihat tertarik untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan dari kegiatan perikanan juga kurang berhasil hal ini dikarenakan ketidakmampuan warga mengembalikan pinjaman dari pembelian pompong yang digunakan untuk memudahkan warga dalam mencari ikan, sedangkan pembibitan ikan mengalami kendala yang disebabkan kurang sabarnya warga untuk segera memetik hasil akibat lamanya periode antara proses pembibitan dengan panen ikan. Keikutsertaan warga dalam kegiatan perikanan dan peternakan dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4.10. Warga belajar membuat jaring untuk menangkap ikan dan belajar bertani.

Sumber: Dokumentasi penelitian, September 2010.

e. Bimbingan penyuluhan tentang makanan gizi dan KB

Pengetahuan mengenai gizi dan Keluarga Berencana didasarkan pada kondisi warga yang memiliki banyak anak serta pola makan yang kurang memperhatikan kandungan gizi pada makanan. Di lapangan menunjukkan rata-rata dalam satu Kepala keluarga dapat mempunyai 5 sampai dengan 6 orang anak bahkan bisa sampai 7 atau 8 orang anak. Seperti yang dikemukakan oleh Informan (Sd), dan (Sn) berikut ini:

Penyuluhan KB juga kita laksanakan. Mereka itu khan anaknya banyak, jadi yach kita bilang aja ke mereka untuk ikut KB. Jumlah sebenarnya banyak anak, tetapi karena mereka tidak mengerti cara merawat dengan baik dan kesehatan juga tidak terurus, akhirnya anak-anaknya *yach* banyak yang meninggal. Kadang ada yang 7 ada yang 8. Seperti pak Mh anaknya ada 5 orang, nah itu mereka katakan sikit. (Sn, Mantan Pendamping/ Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Saya punya dulu ada posyandu, bidan tugas disana tapi tidak menetap. Saya kasih itu boat buat transportasi. Anak-anak bisa diliat gizinya, ibu hamil juga.mereka gemar punya anak, satu keluarga bisa 5, 6 anak. mereka bidan, juga RS Budi Kemuliaan, kerjasama dengan Depsos.. lengkap, semua hancur..posyandu mana lagi ada, bangunannya pun mau roboh. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)

Ungkapan diatas seperti juga yang diungkapkan oleh Informan (Ra), (Tl) dan juga (Nm) di bawah ini:

Didalam *kajang* kadang-kadang ada 5 sampai 7 orang anak-anaknya berkumpul. Kalau anaknya empat masih sedikit orang bilanganya itu sampai belasan tahun sudah terpisah dari orang tua udah ndak campur jadi satu udah masing-masingnya perahu lagi. Kalau anak-anaknya lima ya sampai sampan lima itu nanti, ndak campur, mereka tinggal masing-masing. Dulu banyak anak tak masalah. Tapi sekarang sudah beda, setelah generasinya Bapak mereka punya 2 atau 4 anak. (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Anak saya 5 orang sudah cukup buat saya. (Tl, *Beneficiaries* Program, 17 Oktober 2010)

Sebenarnya dari dulu (sebelum dimukimkan) juga kalau makan sudah dimasak tapi hanya di rebus dan digarami. Perahu yang sempit tidak bisa digunakan untuk memasak yang rumit. Kalau anak sih sekarang sudah ada kesadaran bagi yang baru menikah ya lebih baik 2 atau 3 saja. Ya kan tergantung juga pada pendapatan kalo pendapatan sudah sedikit jadi kurang dibagi-bagi buat anak. Kalo empat sehat lima sempurna ya tergantung pendapatan (sambil tertawa). (Nm, *Beneficiaries* Program, 16 Oktober 2010)

Berdasarkan pada Informasi tersebut diatas menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan melalui pembentukan posyandu berupa penyuluhan baik oleh *Community Worker* maupun dengan kerjasama Dinas kesehatan melalui penempatan Bidan kesehatan dan bantuan dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang juga tergabung dalam FKKS Batam. Keterbukaan masyarakat untuk menerima pengetahuan baru serta keinginan untuk menerapkan pola hidup sehat disamping juga kehidupan baru untuk menetap tinggal di rumah juga menjadi faktor yang memperlancar kegiatan ini.

Keberhasilan dari kegiatan bimbingan Keluarga Berencana dapat dilihat dari jumlah anak yang dimiliki oleh pasangan suami isteri yang menikah setelah

mereka berada di permukiman pulau Bertam, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.3. Jumlah Anak Warga Bertam dari Pernikahan Setelah Warga Dimukimkan

No.	Nama KK	Anak	
		Jumlah	Usia Anak
1	Ismail Hakim	2	2,5 th dan 9 bulan.
2	Mustofa	2	11 th dan 7 th
3	Taher	2	12 th dan 11 th
4	Endi	1	2 th
5	Tata	1	5 th
6	Adi	2	10 th dan 4 th
7	Slamat	1	2,5 th
8	Rano	3	16 th, 10 th, dan 3,5 th
9	Titi	2	16 th dan 6 th
10	Abidin	1	5 th
11	Tamil	5	24 th, 12 th, 11 th, 7 th, dan 1 th
12	Sran	4	19 th, 18 th, 7 th, dan 1 bulan
13	Yuti	3	18 th, 15 th, dan 4 th
14	Kasim	2	16 th dan 7 th
15	Alan	2	7 th dan 1 bulan
16	Rusli	4	19 th, 14 th, 11 th dan 3 th.

Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010

Dari tabel yang ada menunjukkan bahwa dari 16 pasangan suami isteri yang menikah setelah warga dimukimkan di pulau Bertam, pada saat penelitian dilakukan menunjukkan bahwa sebanyak 11 KK atau kurang lebih 68,75 % pada saat penelitian dilaksanakan memiliki anak sebanyak 2 atau 1 anak. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 5 KK atau kurang lebih 31,25% memiliki anak lebih dari 2 orang.

f. Bimbingan untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal bagi orang dewasa

Pendidikan merupakan modal sosial yang penting bagi pembangunan bangsa khususnya dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Bagi warga suku laut khususnya mereka yang berada di pulau Bertam pada awalnya sebelum mereka dimukimkan, pendidikan belum menjadi bagian penting

yang harus dijalani. kondisi ini terjadi karena mereka hidup secara *nomaden* mengembara di laut secara turun-temurun sehingga kesempatan untuk menempuh pendidikan menjadi sulit dilaksanakan, akibatnya banyak dari warga baik yang berusia lanjut maupun anak-anak tidak dapat membaca dan menulis, seperti yang diungkapkan oleh Informan (Sd), (Bu) dan (Sn) dibawah ini:

Waktu saya kesana ternyata banyak yang putus sekolah. Pendidikan dasar dulu ada ya..tapi ya dulu hanya b a b a b i b i selesai pulang main tapi tidak ada suatu keterampilan. Tapi mereka nggak ada kerja selain melaut.” (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Bagaimana supaya mereka terangkat derajat ya salah satunya dengan itu pendidikan..kalau hanya dengan pertanian ndak bisa.. susah.. dan ndak terserap mereka. (Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)

Pendidikan saya kira yang berhasil. Anak-anak sudah banyak yang sekolah kan?. Mungkin karena ada Norma yang jadi panutan. Kalau waktu itu (Pada saat program PKAT berlangsung) ada bantuan seragam, buku-buku, sepatu dari YKB (Yayasan Keluarga Batam), tapi kalau guru-gurunya tetap dari dinas (Dinas Pendidikan Nasional). (Sn, Mantan Pendamping/ Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Gambaran diatas menunjukkan bahwa pada kehidupan *nomaden* membuat masyarakat Suku Laut menjadi kurang mengerti manfaat pendidikan bagi mereka. Informasi tersebut sekaligus menunjukkan latar belakang kegiatan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama FKKS Batam dengan organisasi mitra. Suasana pada saat pertama kali proses belajar mengajar dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4.11. Kondisi awal suasana belajar mengajar warga suku laut
Sumber: Dokumentasi penelitian, September 2010.

Dari beberapa informasi diatas juga menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan dalam pendidikan dapat dikatakan relatif berhasil dapat mengubah pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya kurang memperhatikan pendidikan menjadi menganggap bahwa pendidikan penting terutama untuk masa depan generasi penerus yang salah satunya ditauladani oleh meningkatnya kehidupan dari salah satu warga Bertam dari pendidikan formal yang telah dijalani. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Informan (Mh), (Tl), dan (Nm) dibawah ini:

Memang penting sekali sekolah..contohnya Nur (yang dimaksud adalah Informan Nm) ini, sekarang dah punya uang sendiri, membagi ilmu ke Masyarakat, bisa mengangkat nama orang tua ya.. bisa dikata lebih mandiri. Dulu anak perempuan hanya tergantung pada orang tua mereka.. kalo dah dewasa dikit menikah sekarang warga sudah merubah bersikap, iya kan Nur?. Waktu lama buat berubah.. bertahun-tahun, nah Norma (Informan Nm) ini memperlancar tugas Bapak untuk mengajak warga mensekolahkan anak mereka. Mereka lebih suka bukti dari pada janji tak ada hasil.”(Mh, *Beneficiaries* program Sekaligus Wakil Ketua RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Alhamdulillah.. anak saya bisa sekolah, gak kayak dulu, saya gak sekolah. (Tl, *Beneficiaries* Program, 17 Oktober 2010)

Sekarang anak perempuan dan laki-laki sama untuk melanjutkan sekolah. Orang tua lebih memilih apa keinginan mereka, karena biasanya kalau

dipaksa sekolah jarang dari mereka yang sampai lulus. (Nm, *Beneficiaries Program*, 16 Oktober 2010)

Keterangan diatas juga menginformasikan adanya kesadaran, keterbukaan warga tentang pentingnya pendidikan. Warga sendiri juga menyadari bahwa perlu waktu yang lama untuk mengubah *mindset* masing-masing individu namun demikian dengan keberhasilan salah satu warga yaitu Informan Nm menempuh pendidikan memberikan kepercayaan tersendiri akan mempercepat untuk memunculkan kesadaran warga akan pentingnya pendidikan. Kegigihan dan Ketekunan Informan (Nm) menempuh pendidikan dapat dilihat sebagaimana yang diungkapkan dibawah ini:

Beasiswanya hanya sampai SD. Kalo saya pas SMP udah MTS, udah diambil ama pak zulkarnain (Salah satu Dokter Gigi yang bertugas di pulau Bertam) sampe SMU. Setelah SMU cari uang sendiri. Minta bantu ama bu Sd hanya dikasih 75 ribu perbulan, nggak kuat saya. Kepala saya kebentur lagi karena korban tabrak lari. Yach makanya saya pulang lagi ke Bertam. Akhirnya saya ngelamar jadi guru bantu. Saya pikir saya harus merubah nasib sendiri, nggak ada yang bisa merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri biar tidak jadi seperti katak dalam tempurung. (Nm, *Beneficiaries Program*, 16 Oktober 2010)

Berdasarkan informasi diatas bahwa keberhasilan kegiatan ini didukung dengan sikap terbuka masyarakat dalam menerima perubahan. Warga sadar akan kebutuhan pendidikan bagi diri dan anak mereka. Keinginan yang kuat dari generasi muda untuk melanjutkan pendidikan juga tercermin dari penuturan informan diatas. Namun demikian khusus untuk pendidikan bagi para orang tua kurang berhasil dilaksanakan, kesadaran akan pentingnya pendidikan tidak dibarengi dengan keinginan dan tindakan untuk ikut dalam proses belajar.

Faktor pendukung lain dari keberhasilan bidang pendidikan adalah adanya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dalam hal ini bangunan sekolah. Letak bangunan sekolah yang berada di pulau Bertam memudahkan warga untuk melanjutkan pendidikan khususnya pendidikan Sekolah Dasar (SD). Penyediaan

fasilitas ini belum didukung oleh staf pengajar hal ini disebabkan tempat tinggal guru yang berada di luar pulau Bertam sehingga untuk melaksanakan tugas, mereka harus mengeluarkan biaya transportasi yang mahal menuju ke pulau Bertam. Disamping juga ditauladani oleh adanya salah satu warga yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan hingga lulus Strata 1 dan kemudian bekerja sebagai Guru PNS di SD setempat.

g. Bimbingan Budi daya rumput laut

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan agar meningkatkan pendapatan warga Suku Laut di pulau Bertam terutama pada saat cuaca buruk disaat mereka tidak melaut, serta memberikan tambahan pendapatan bagi para ibu dan anak setelah dimukimkan. Dasar pertimbangan dari kegiatan budidaya rumput laut ini diantaranya; ketergantungan warga dalam mencari pendapatan hanya sebagai nelayan dengan peralatan yang masih tradisional, semakin tercemarnya perairan Batam tempat para warga mencari ikan sehingga semakin mengurangi jumlah tangkapan ikan, kurang cocoknya kondisi tanah tempat warga bermukim untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik yang dapat dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual. Sebagaimana pendapat dari Informan Sn:

Mereka hanya tinggal melaut saja. Kapan saja mereka bisa ambil ikan bisa. Meskipun kita sering bilang laut kita itu selamanya ikannya ada tapi kenyataannya dengan polusi laut yang semakin parah khususnya yang ada di Batam mereka jadi sulit mendapatkan ikan. Karena itu kita ajarin mereka bagaimana membudidayakan rumput laut.” (Sn, Mantan Pendamping/ Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Kondisi obyektif tersebut juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan kegiatan budidaya rumput laut seperti yang termuat dalam proposal kegiatan budidaya rumput laut (pertanggal 1 Februari 1991) yang diperuntukkan bagi penyandang dana dalam hal ini yayasan Nedherland Batam (NEBA), diantaranya terlihat dalam kausul berikut;

1. *That the “Sea Nomade” of Bertam Island is directly dependent on the resources of the sea (fish) for their livelihood. This dependence means that their livelihoods are constantly under threat when the rainy season comes and rough waters render their fishing expeditions too dangerous.* (Bahwa “Suku Laut” dari Pulau Bertam sangat tergantung pada sumber daya laut (ikan) untuk mata pencaharian mereka. Ketergantungan ini akan mengancam jiwa mereka ketika pada saat mencari ikan musim hujan datang dan laut menjadi bergelombang)
2. *For their fishing expeditions, this community still relies on traditional fishing methods that bring small catches compared to what would be possible with more modern equipment.* (Untuk kegiatan memancing, komunitas ini masih mengandalkan metode penangkapan ikan tradisional yang menghasilkan tangkapan lebih sedikit dibandingkan dengan yang dapat dihasilkan oleh peralatan modern)
3. *Industrial pollution has polluted traditional fishing grounds and denied this community their major source of livelihood by destroying the fish in these waters* (Polusi industri telah mencemari wilayah nelayan tradisional dan menghancurkan ikan di perairan tersebut yang merupakan sumber utama mata pencaharian mereka)
4. *The land on which these fishermen's villages are established is not suitable for crop cultivation for either domestic consumption or sale.* (Tanah tempat tinggal nelayan tidak cocok untuk dilakukan budidaya tanaman baik untuk konsumsi domestik atau dijual)
5. *Having looked at this situation, the FKKS group on Bertam has decided to explore the possibilities of seaweed cultivation in the area* (Dengan melihat kondisi tersebut maka FKKS suatu organisasi yang ada di Bertam bermaksud untuk mengeksplorasi kemungkinan budidaya rumput laut di area tersebut).

Objectives (Tujuan)

1. *To increase the income levels of the “sea nomade” especially during the fishing off-season.* (Untuk meningkatkan pendapatan dari warga suku laut khususnya pada saat musim tidak mencari ikan).
2. *To provide alternative work for mothers and children that can negate the need for them to go to sea regularly fishing. This current custom is a barrier to formal education.* (untuk menyediakan alternative pekerjaan kepada ibu dan anak yang dapat menghindarkan mereka untuk tidak setiap saat pergi mencari ikan di laut. Karena kebiasaan ini dapat menghalangi pendidikan formal.)

Management of seaweed cultivation project will be in the hands of the FKKS group on Bertam Island in cooperation with the “Research and Technology Departmen” Jakarta, under The Minister for Technology and reseach (Menristek), Prof. Dr. Ing. B.J Habibie. (Manajemen dari proyek budidaya rumput laut ini dibawah kendali FKKS yang berada di pulau Bertam, dilaksanakan dengan kerjasama Departemen riset dan teknologi Jakarta, di bawah Menristek Prof. Dr. Ing. B.J Habibie).

Dari pernyataan Informan dan dokumentasi di atas dapat terdeskripsikan bahwa kehidupan suku laut sangat tergantung dengan sumber daya laut, pendapatan mereka hanya berasal dari berapa banyak ikan yang mereka dapatkan. Namun demikian ketergantungan ini tidak diimbangi dengan peralatan yang dimiliki, karena masih mengandalkan peralatan tradisional sehingga berakibat pada jumlah tangkapan yang hanya cukup untuk dikonsumsi. Jumlah sedikitnya tangkapan ikan juga dipengaruhi oleh kondisi air laut yang mulai tercemar oleh polusi dari limbah industri yang ada di sekitar pulau Bertam.

Kausul tersebut juga menegaskan bahwa pelaksana kegiatan budidaya ini dibawah pengawasan dari para pelaksana dari FKKS Batam yang berada di pulau Bertam dengan kerjasama dengan Departemen riset dan Teknologi Jakarta, departemen yang secara struktur berada dibawah Menteri riset dan Teknologi pada saat itu yaitu bapak Prof. Dr. Ing. B.J Habibie. Pelaksanaan kegiatan budi daya rumput laut dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4.12. kegiatan warga membuat *bidak* tempat pertumbuhan rumput laut
Sumber: Dokumentasi Penelitian, September 2010.

Pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut dilaksanakan melalui dua tahap, tahap pertama dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 1991 sedangkan pada tahap ke dua dilaksanakan pada bulan Maret 1992 sampai dengan bulan Januari 1993. Metode yang digunakan pada penanaman tahap pertama dengan menggunakan metode rakit sedangkan pada tahap ke dua dengan menggunakan metode *monoline*. Metode *monoline* digunakan hasil dari analisa tahap pertama bahwa metode rakit tidak efisien untuk digunakan khususnya pada wilayah perairan pulau Bertam. Penyebab salah satunya adalah perubahan musim dari musim utara, musim timur, musim selatan, disamping juga semakin banyaknya sampah di perairan Bertam dan juga pengetahuan masyarakat yang kurang mendukung budidaya rumput laut (salah dalam pemilihan bibit yang seharusnya tunas muda yang diambil dengan perbandingan 70:30, dimana 70 untuk bibit dan 30 untuk dijemur).

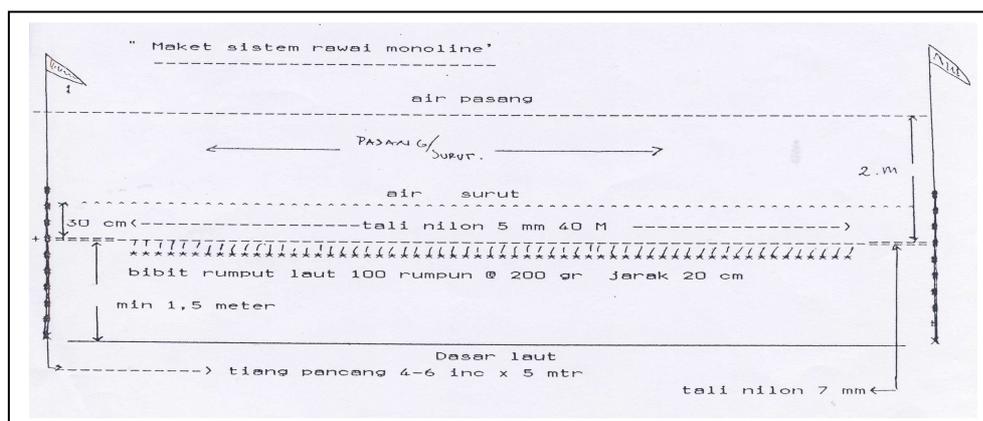
Budidaya rumput lautpun tidak berhasil. Masyarakat mau..termasuk Ibu dan mbak Nm ya bekerja 100 rakit mbak norma yang bekerja, hasil pun ndak ada...pulang sekolah waktu pagi mo sekolahnya merawat dulu rumput laut pulang dari laut baru mandi baru sekolah ndak berhasil. Lama sekali untuk menunggu panen datang..memang lebih cepatnya dalam mencari ikan...lalu karena air laut tercemar sehingganya tidak berhasil. Selain itu cuaca tidak mendukung kalo musim utara jangan dilakukan sampah banyak berserak sangat menganggunya pertumbuhan, musim selatan dan musim timur

sebenarnya yang cocok bagi pertumbuhannya rumput laut. (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Dari keterangan tersebut memberikan deskripsi bahwa pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut tidak berhasil dikarenakan adanya perubahan cuaca yang mempengaruhi pertumbuhan dari rumput laut, juga dikarenakan banyaknya sampah yang berserakan sehingga menghambat pertumbuhan rumput laut. Faktor lainnya adalah dari warga yaitu kurangnya pengetahuan warga akan budidaya rumput laut disamping kurang sabarnya warga dalam proses penanaman rumput laut hingga menunggu panen tiba. Hal yang sama sebagaimana saran hasil analisa dari pelaporan kegiatan budidaya rumput laut oleh petugas dari FKKS sebagaimana berikut:

Perlu diadakan pembinaan mental yang lebih baik. Budidaya rumput laut sebaiknya dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan September saja dengan perhitungan: Musim utara: sampah laut cukup banyak. (perlu diadakan peningkatan kerajinan untuk membersihkan rumput laut dari sampah minimal 2 hari sekali), Musim Timur: tidak ada masalah & Musim Selatan: tidak ada masalah. Kerugian: temporari budidaya rumput laut akan memakan biaya yang sangat besar yaitu pengadaan rakit dan bibit. Pengembangan yang memakan waktu memungkinkan masyarakat menjadi bosan. Perlu dikembangkan budidaya rumput laut sistem rawai (*monoline*). Kelebihan dari sistem monoline adalah: tidak terpengaruh limpahan air tawar, tidak terpengaruh banyak atas sampah-sampah terapung, sebab berada pada kedalaman minimal 2 meter pada saat air pasang, memakai tenaga tidak terlalu banyak, biaya lebih ringan.

Bentuk sistem *monoline* sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4.13. Metode budidaya rumput laut dengan sistem rawai (*monoline*).
Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pelaksana program menunjukkan bahwa budidaya rumput laut baik dengan menggunakan sistem rakit maupun sistem *monoline* pada perairan disekitar pulau Bertam secara keseluruhan mengalami kegagalan, ditandai dengan tidak dilanjutkannya program setelah penanaman tahap ke II dan juga belum tercapainya tujuan budidaya semula yaitu menambah penghasilan warga Bertam. Dan jika dilihat sampai dengan penelitian ini dilaksanakan bagi warga yang sebelumnya mendapatkan bimbingan budidaya rumput laut ternyata tidak ada yang berusaha untuk melanjutkan maupun mengembangkan program budidaya rumput laut yang sebelumnya mereka peroleh.

h. Mengenal penggunaan uang melalui simpanan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Kegiatan ini dilatar belakangi oleh adanya pola hidup boros dari sebagian warga dengan kebiasaan menghabiskan pendapatan pada hari itu juga, seperti yang diungkapkan oleh Informan (Sd) dibawah ini:

Orang laut itu dulunya boros, mereka suka foya-foya dapat hari inihari itu jugalah uang habis..minum-minum, dia bilang *fly*...ketawa-ketawa itu dulu kerjanya. Saya sedih lihat semua. Saya mau dia tahu manfaat uang..nabung, ada petugas BRI yang datang langsung ke pulau (Bertam) mereka kasih pengarahan..bagus semua datang. Sayang tidak jalan kenapa.. karena

mereka lebih suka boros. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)

Kegiatan bimbingan dalam pemanfaatan Bank dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah:



Gambar 4.14. Warga sedang mengikuti pengarahan dari petugas BRI
Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010.

Perilaku boros juga disampaikan oleh Informan (Sn) seorang *Community Worker* dan warga (Nm), sebagaimana informasi dibawah ini:

Sebenarnya samalah dengan masyarakat biasa, hanya karena komunitas mereka aja di Laut. Harusnya mereka khan diajarin cara memanage yang ada dengan baik. Tetapi mereka itu yach dapat hari ini uang harga ikan 10 kg yach habis juga 10 kg. Tidak memikirkan hari esok lagi. (Sn, Mantan Pendamping/Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Iya kadang-kadang orang sini kalo lagi ada dihabiskan gak mikirkan bagaimana makan besok. Tetapi masyarkaas bertam ini ada aneh-aneh juga kalo ada dapat hari ini 200rb yach 200rb juga akan habis. Sekarang tetap aja mereka tidak peduli dan tidak paham situasi. Apalagi perubahan cuaca ini, kalo hujan selama seminggu nah kalo ngak ada persiapan duit kita mo makan apa?. Emang mo makan batu (sambil tersenyum). Nah khan gak bisa melaut. Apalagi situasi Batam ini cuacanya tidak menentu. (Nm, *Beneficiaries* Program, 16 Oktober 2010)

Keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Informan (Ra), (Mh) dan (Tl) sebagaimana yang diungkapkan di bawah ini:

Nah, sekarang baru aja 2010 tangkapan di laut dah semakin berkurang, gimana lagi kalo dah 2011, 2012 kehidupan nelayan dah makin susah. Gimana lagi kehidupan anak-anak remaja pada saat sekarang. Yang mereka pikirkan dapat hari ini, hari ini juga dihabiskan. Dulu Bapak juga begitu, dapat duit 100rb habis juga 100 ribu. Sekarang aja dah insaf, dah mulai berubah karena kalo semua dihabiskan besok mau makan apa? Sudah tak ada lagi khan. Sekarang bapak harus mikir, OK lah ke Rumah sakit bolehlah gratis. Semua biaya selama di Rumah sakit di tanggung ama Ibu Dar, tetapi ongkos kita mau kesana khan tidak ditanggung ama bu Dar. Untuk keluarga yang menjenguk kita khan mereka butuh ongkos juga ke sana. Nah disitu kita harus mikir. Sekarang kita sehat tetapi kalo sakit yach kita bisa apa. Nah, misalnya kalo dapat 50 ribu, kita usahain bisa nabung 10rb. Ya kita tabung sendiri, perlu ongkos kalo ke Bank. Kalo hanya uang Rp. 10ribu tak perlu lah Bapak ke sana. Terus kalo ada nonton joget yach disitulah habis duitnya nonton joget. Syukur ajalah sekarang bapak ini udah insyaf dulu ikut juga kesana. (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Itulah masalahnya rata-rata suku laut suka menghabiskan uang sekejap, dapat 200rb habislah itu 200rb tak mungkin ada simpanan buat perbaiki jembatan, rumah. Pemerintah janji perbaiki jembatan, juga rumah tapi sampai sekarang belum juga ada. Kalau rumah sebenarnya kita bisa perbaiki sendiri seperti Bapak.. rumah sekarang bapak perbaiki dengan usaha bapak sendiri, Bapak tabung dari uang yang terkumpul tiap hari. Lihat hasil tangkapan juga kalau dapat banyak misalnya Rp. 500.000 ya.. bapak ambil Rp. 100.000. Ibu juga bapak kasih tahu buat nabung. Caranya beras yang akan kita makan diambil tiap hari satu gelas kalau nanti sudah dikumpul tiap bulan, Bapak nak jual nah uangnya Bapak simpan buat keperluan perbaiki rumah. Tak ada Bapak simpan uang di Bank. Bank hanya ada di Batam, habis biaya. (Mh, *Beneficiaries* program Sekaligus Wakil Ketua RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Orang sini ini jauh sekali mbak (Penulis) kalo untuk nabung, apalagi yang muda. Ya belum ada anak isteri. Hari ini dapat langsung buat jajan, joget. Kalo saya buat makan, joget kalo ada. (Tl, *Beneficiaries* Program, 17 Oktober 2010)

Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh Informan (Ra), (Mh) dan (Tl) diatas menunjukkan adanya sebagian warga yang mulai sadar dengan sendirinya untuk meninggalkan perilaku boros dan mulai menyimpan sebagian pendapatan mereka. Sedangkan sebagian yang lain, kesadaran tersebut belum diimbangi dengan perilaku menabung dikarenakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Perilaku boros cenderung dilakukan oleh para remaja, kondisi ini didukung karena mereka merasa memanfaatkan masa muda untuk bersenang-senang dari kerja kerasnya mencari ikan sebelum berkeluarga atau menikah.

Informasi diatas juga menunjukkan bahwa salah satu yang menyebabkan timbulnya perilaku boros hingga saat penelitian ini dilaksanakan adalah adanya tontonan "Joget". Joget merupakan salah satu bentuk kesenian yang sebelumnya hidup dikalangan komunitas Suku Laut. Kesenian ini telah lama ada, tumbuh dan dijadikan sebagai bentuk hiburan pelepas lelah. Namun demikian seiring waktu kesenian ini menjadi pudar, mereka tidak lagi sebagai pemilik joget tetapi sebagai penonton yang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk dapat menikmatinya.

Sedangkan bagi warga yang telah mulai menabung, mereka masih belum memanfaatkan keberadaan Bank meskipun sebelumnya pihak pelaksanaan program telah mengupayakan memperkenalkan fungsi dan manfaat bank dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan karena keberadaan lokasi Bank ada di pulau Batam sehingga warga masih harus dibebani dengan pengeluaran akan biaya transportasi.

i. Bimbingan Keterampilan Wanita.

Latar belakang dari kegiatan ini adalah waktu luang yang dimiliki oleh para isteri setelah dimukimkan. Sebelum dimukimkan mereka turut membantu suami mencari ikan untuk kemudian dikonsumsi atau dijual belikan. Namun setelah dimukimkan waktu luang menjadi lebih banyak, hanya beberapa kali mereka ikut

suami mencari ikan khususnya pada saat “*bertandang*”, seperti yang diungkap oleh Informan (Sd) dibawah ini:

Pembinaan perempuan belum maksimal, PKK dulu jalanlah karena PKK secara langsung mengajarkan perempuan berkarya. Bagi Suku Laut Ibu, Ibu yang menyediakan semua kebutuhan, Bapak lebih enak.. dia tinggal pancing dapat ikan toh selesai itu istirahat duduk-duduk, minum. Tugas rumah milik isteri. Ya, PKK kasih belajar, dia belajar masak selanjutnya makan ketela direbus ndak ada nasi tak apa-apa lah. Jadi bikin belajar sayur asem..belajar sayur untuk makan gitu. Ya dulu sayur hanya rebus-rebus saja kan. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)

Berdasarkan informasi diatas bahwa dalam kegiatan bimbingan kewanitaan diwujudkan dengan membentuk kelompok PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Dalam kegiatan ini tidak hanya melibatkan *Community Worker* tetapi juga dari ibu-ibu yang tergabung dalam PKK setempat. Kegiatan dilaksanakan baik secara resmi melalui pertemuan-pertemuan warga dengan *Community Worker* tetapi juga secara informal dengan kunjungan kerumah-rumah warga dalam situasi yang santai. Kegiatan ini kurang berhasil karena kurangnya pembinaan lanjutan khususnya oleh para *Community Worker*. Informasi diatas juga menunjukkan adanya peran penting isteri maupun ibu dalam keluarga. Peran mereka tidak hanya sebagai pengelola rumah tangga dalam sektor domestik tetapi juga turut berperan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Pentingnya peranan isteri serta kurang berhasilnya kegiatan sebagaimana yang diungkap oleh Informan (Ra), (Nm) dan (Hs) dibawah ini:

Sebenarnya ada keinginan untuk bekerja. Tetapi bagaimanapun di Batam ini sebenarnya bagaimanapun kita masih bisa bekerja. Sekecil apapunlah dapat menghasilkan. Bapak sendiri mau, sangat mau bekerja. Tetapi Ibu (Isteri Informan) melarang tidak diijinkan katanya “untuk apa lagi, udah anak kog yang bisa biyai kebutuhan untuk makan. Ibu bilang kamu dah tua, makan nggak makan dirumah aja”. (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Pelatihan menjahit khusus buat Ibu-ibu. Ada waktu itu Ibu Sd (FKKS) yang buat. Tak lama itu ya nor (Minta penegasan pada Informan Nm) waktu itu hanya sebentar (PKK). Ada juga memang dikasih mesin jahit tapi tak semuanya. (Hs, *Beneficiaries Program*, 19 Oktober 2010)

Dulu memang ada pelatihan menjahit, tapi tidak semua mendapatkan mesin jahit. Mesinnya sudah dijual (tertawa), karena tidak digunakan lagi. (Nm, *Beneficiaries Program*, 16 Oktober 2010)

Dari keterangan Informan diatas menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan khususnya pelatihan menjahit relatif tidak sesuai dengan warga. Hal ini dimungkinkan karena kurang tersedianya alat pendukung dalam hal ini mesin jahit, disamping juga pembinaan yang tidak maksimal. Dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan ini relatif kurang berhasil disamping juga ditunjukkan dengan tidak berfungsinya lagi kegiatan PKK yang dibentuk sebelumnya sebagai wadah ibu-ibu untuk mengembangkan diri dan berkarya.

4.1.3. Terminasi

Terminasi merupakan suatu keadaan dimana tujuan program PKAT dinyatakan telah tercapai sehingga memenuhi syarat untuk diserahkan dari pelaksana kepada Pemerintah. Khusus kegiatan terminasi dari program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam ditandai dengan penyerahan Permukiman suku laut di Pulau Bertam dari Ketua FKKS Batam dalam hal ini Ibu Sri Soedarsono kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Sosial RI yaitu Ibu Inten Soeweno pada tanggal 4 Agustus 1993 di Ruang Serba Guna Bertam dan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Propinsi Riau yaitu Bapak Soeripto. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Informan (Rn), (Sd), dan (Sn):

Sesuai dengan ketentuan Depsos RI dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Terasing tentang waktu terminasi suatu proyek PKMT, maka FKKS Batam menyerahkan urusan dan tanggung jawab proyek Pemberdayaan Suku Laut di pulau Bertam kepada Menteri Sosial pada tahun 1993. Kemudian menteri sosial RI menyerahkan permukiman Suku Laut Pulau Bertam kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau guna

pembinaan selanjutnya sebagai lazimnya permukiman lainnya diseluruh Indonesia. (Rn, Mantan Staf Ahli Depsos RI Wilayah Kota Batam, 4 Januari 2011)

Dengan *Ceremonial* itu saya serahkan kepada Ibu Menteri Ibu Intan, semua datang. Nah, kita serahkan kepada bu Intan. Trus bu Intan serahkan kepada Gubernur Riau, trus Gubernur Riau serahkan kepada Walikota. Saya sudah selesai Toh..saya udah gak ada ikatan apa-apa. Trus 1990 Bapak timbang terima Bapak tidak menjadi kepala disini lagi (Kepala Otorita Batam) setelah 10 tahun. Nah 1993 saya serahkan toh karena memang waktunya sudah selesai. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Terminasi dalam program PKAT dilaksanakan karena program telah selesai dan waktu yang ditentukan oleh program telah habis masa waktunya. Keterbatasan waktu dan biaya juga jadi pertimbangan mbak (penulis), sampai tahun ini saja masih banyak KAT yang belum tersentuh program. (Rw, Kasie Pemberdayaan SDM KAT Direktorat PKAT-Depsos RI, 22 November 2010)

Dari informasi diatas juga memberikan petunjuk bahwa tahapan terminasi cenderung dilaksanakan karena batas waktu pelaksanaan program telah selesai dan pihak pelaksana kegiatan merasa bahwa program telah selesai dilaksanakan. Disamping itu keputusan terminasi juga disebabkan salah satunya yaitu masih banyak Komunitas Adat Terpencil (KAT) secara nasional yang belum tersentuh program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT). Pelaksanaan terminasi juga dikemukakan oleh Informan (Sn), seperti diungkapkan dibawah ini:

Untuk pengalihan atau penyerahan itu, Departemen sosial langsung menyerahkannya kepada wali kota, ada acara disini (di Bertam-Kota Batam). Setelah serah terima oleh Menteri Sosial mengatakan silakan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Karena ini dianggap (Suku Laut yang ada di Pulau Bertam) sebagai “masyarakat biasa”. Nah berarti dah sama seperti masyarakat lainnya dan suku lainnya. Jadi tidak ada lagi keistimewaan karena suku laut yach harus mendapat bantuan khusus. Yach

jadi kalo ada program yach mereka juga dianggap sebagai “masyarakat biasa”. (Sn, Mantan Pendamping/Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Dari informasi yang ada menunjukkan bahwa tahap terminasi dilaksanakan secara simbolik ditandai dengan adanya serah terima program dari pelaksana kegiatan dalam hal ini diwakili oleh Ketua FKKS Batam kepada Mensos RI untuk selanjutnya dari Mensos RI diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Riau kepada Walikota Batam. Dengan penyerahan tersebut secara tidak langsung juga menandakan selesainya tugas FKKS Batam sebagai pelaksana program PKAT suku laut di Pulau Bertam.

Ceremonial pada saat serah terima program PKAT dari FKKS Batam kepada Menteri Sosial yang dilangsungkan di ruang Serba guna pulau Bertam-Kota Batam sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 4.15. Serah Terima Permukiman Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam dari Ketua FKKS Batam kepada Menteri Sosial RI.

Sumber: Dokumentasi penelitian, September 2010.

Pelaksanaan terminasi lebih didasarkan pada selesainya jangka waktu program disamping juga karena keterbatasan dana yang dimiliki lembaga pelaksana baik pemerintah maupun dari FKKS Batam. Infomasi tersebut juga menunjukkan bahwa setelah terminasi dilaksanakan secara langsung komunitas Suku Laut tidak lagi dikategorikan sebagai komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan perlakuan khusus terkait program pembangunan khusus untuk KAT

dari pemerintah, tetapi sudah masuk dalam kategori “masyarakat biasa” yang mandiri dalam arti sejajar dengan warga negara lain.

Untuk memperjelas pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam, berikut daftar ringkasan pelaksanaan program sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Ringkasan Pelaksanaan Program PKAT
Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam

Pelaksanaan Program	Kesimpulan Penulis
Persiapan ▪ Petugas <ul style="list-style-type: none"> - Penanggung jawab fungsional oleh Ditjen Bina Kesejahteraan Sosial - Penanggung jawab teknis oleh Direktorat Bina Masyarakat Terasing. - Pelaksana Utama Kegiatan oleh Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam. - Pemilihan Lembaga FKKS Batam sebagai lembaga pelaksana program karena telah merintis upaya kearah pembinaan kesejahteraan Suku Laut di daerah Batam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara operasional terdapat dua lembaga yang terlibat, yaitu pemerintah sebagai penanggung jawab fungsional dan teknis pelaksana program dan Organisasi Sosial FKKS Batam sebagai pelaksana <i>implementasi</i> program. - Organisasi FKKS Batam dipilih sebagai mitra Depsos RI dalam pelaksanaan program disebabkan faktor internal Depsos RI dalam hal kurangnya sumber daya pendanaan juga karena salah satu tujuan dan program kerja dari organisasi adalah memberikan pelayanan sosial kepada komunitas Suku Laut yang berada di wilayah Kota Batam. - Operasional kegiatan dan pengelolaan anggaran berdasarkan keputusan persetujuan dari FKKS Batam setelah sebelumnya CW mengajukan proposal kegiatan untuk kemudian mendapatkan pendanaan dari FKKS Batam. - Tahap persiapan belum maksimal dilaksanakan karena tidak ada persiapan tenaga pendamping masyarakat (<i>community Worker</i>), disamping persiapan anggaran dari
▪ Lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Motivasi dan Pendaftaran Calon Pemukim <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendatangi komunitas sasaran di laut. ✓ Menggunakan Strategi <i>reward</i> (yang bersedia untuk dimukimkan berupa rumah sebagai tempat tinggal dan pendidikan untuk anak-anak) dan <i>punishment</i> (pencabutan hak menetap dan menempati rumah bagi yang meninggalkan rumah lebih dari tiga bulan. ✓ Memanfaatkan pelaksana program sebelumnya (Kosgoro) dan komunitas sasaran dalam memotivasi anggota komunitas menetap di permukiman pulau 	

<p>Bertam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Study</i> kelayakan dan pembuatan Buku Pedoman hasil Seminar. <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>study</i> kelayakan melibatkan penelitian dan <i>survey</i> dari pakar maupun kalangan akademisi, diantaranya; Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing-Depsos RI, Staf Ahli Depsos yang ditempatkan pada Otorita Batam, Prof. Dr. Ir. Otto Sumarwoto sekaligus pakar ekologi dari Jurusan Arsitek Institute Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, juga Orsos yang tergabung dalam FKKS Batam. ✓ <i>Study</i> kelayakan dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 November 1986 di Batam melalui koordinasi dengan Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing-Depsos RI yang bertujuan untuk menginventarisasi karakteristik komunitas Suku Laut. ✓ Karakteristik komunitas Suku Laut terdokumentasikan dalam “Ringkasan Laporan Pendataan Masyarakat Terasing di Daerah Perbatasan Riau” yang meliputi ciri-ciri fisik, non fisik, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi sosial budaya. ✓ Tanggal 29 September s/d 2 Oktober 1987 diadakan kegiatan “Pertemuan Konsultasi dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut dan Latihan Penyegaran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai bahan dasar merumuskan implementasi Pola Pembinaan Suku Laut di Batam. - Penyiapan areal pemukiman <ul style="list-style-type: none"> ✓ pulau Bertam dipilih sebagai lokasi permukiman warga suku laut dengan mempertimbangkan bahwa 	<p>pemerintah yang terbatas hanya dapat mengcover 45% dari anggaran awal yang dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi <i>reward</i> dan <i>punishment</i>, memanfaatkan peran pelaksana program sebelumnya juga komunitas sasaran berhasil mengajak Suku Laut menetap di permukiman Bertam. - <i>Study</i> Kelayakan dilaksanakan cukup baik dengan melibatkan pakar dan kalangan akademisi. - tanggal 29 September s/d 2 Oktober 1987 diadakan koordinasi antar pelaksana dalam Pertemuan Konsultasi dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam, kemudian setelah itu Depsos RI mengeluarkan konsep “Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam tahun 1987” yang sekaligus mengesahkan FKKS Batam sebagai pelaksana program dan juga dijadikan landasan dalam pelaksanaan program pemberdayaan suku laut di Batam. - Pulau Bertam dipilih sebagai lokasi permukiman dengan mempertimbangkan pulau tersebut telah menjadi tujuan komunitas suku laut untuk bermukim baik sementara waktu maupun menetap, terdapatnya sumber air tawar sebagai kebutuhan hidup warga, disamping itu juga pulau tersebut dekat dengan Pulau Batam. - Pemilihan lokasi tidak mempertimbangkan dampak polusi industri disekitar Bertam yang berpengaruh hasil tangkapan ikan warga Bertam. - Penyiapan lokasi permukiman dilaksanakan dengan gotong-
--	---

<p>telah menjadi tujuan komunitas suku laut untuk bermukim baik sementara waktu maupun menetap, terdapatnya sumber air tawar sebagai kebutuhan hidup warga, disamping itu juga pulau tersebut dekat dengan <i>bonded area</i> (Pulau Batam).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ penataan permukiman melibatkan pakar dari ITB. ✓ Dari luas lahan, pemanfaatannya dibagi menjadi 30% permukiman atau hunia warga dan 70% hutan lindung. ✓ Model rumah tipe 28 dengan posisi rumah berhadap-hadapan dan dihubungkan dengan sebuah pelatar atau jembatan sebagai penghubung. <p>- Penyiapan tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Community Worker</i> dipilih karena tugas dari instansi/lembaga terkait tanpa proses seleksi. ✓ <i>Community Worker</i> berasal dari berbagai instansi yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai latar belakang pendidikan, antara lain dari: Depsos RI, Depag, juga dari FKKS Batam. <p>✓</p>	<p>royong antara komunitas sasaran dan petugas pelaksana dengan imbalan gaji untuk komunitas sasaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan konsep permukiman di Bertam telah dilakukan dengan perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli - Tahap awal persiapan program belum didampingi oleh <i>Community Worker</i> (CW) yang tinggal dan menetap di lokasi Permukiman di Bertam hingga tahun 1990 baru ada pendampingan yang tinggal dan menetap dalam jangka waktu yang relatif lama. - Tugas sebagai <i>Community Worker</i> dipilih karena mandat dari instansi/lembaga terkait. - Tidak semua petugas dibekali dengan pelatihan khusus terkait pendampingan masyarakat dari instansi/ lembaga pengirim. - Sering terjadi perubahan petugas pendamping selama proses pelaksanaan program PKAT - Tidak ada seleksi pendamping masyarakat (CW), CW dipilih dari instansi/lembaga pemberi tugas - Tidak ada pelatihan awal menyamaan persepsi antar CW yang bertugas melaksanakan pendampingan. - sebelum FKKS Batam telah terlebih dahulu upaya pembinaan Suku Laut oleh KOSGORO di pulau Bertam dalam bentuk bantuan rumah. - Model bangunan rumah dilakukan terencana dengan bantuan tenaga ahli dari ITB, namun tidak menyertakan komunitas sasaran. - Adanya keterlibatan calon warga dalam membangun rumah yang
<p>Pelaksanaan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman 	
<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan rumah di darat dan di daerah semi darat dengan konsep pertama penempatan di semi darat, sedangkan penempatan warga didarat dilaksanakan setelah warga menempati beberapa waktu tinggal di pantai atau semi darat. ✓ Pembangunan Permukiman dimulai tanggal 4 April 1987 dan pada tanggal 17 Agustus 1988 sebanyak 14 KK Komunitas Suku laut dapat dimukimkan. - Pengadaan sarana dan prasarana. 	

<ul style="list-style-type: none"> - pemberian Santunan biaya hidup. ✓ Pendanaan melibatkan unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan organisasi luar negeri (NEBA). 	<p>nantinya ditempati, bentuk keterlibatan tersebut didukung dengan pemberian gaji kepada warga yang bersangkutan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan 	
<p>Bentuk pembinaan disesuaikan dengan karakteristik warga sasaran dan permasalahan yang dialami suku laut di Pulau Bertam baik dari aspek kependudukan, pendidikan generasi muda, sosial ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan politik keamanan.</p> <p>a. Bimbingan Hidup Bermasyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Latar belakang kegiatan adanya konflik akibat perubahan hidup dari nomaden dalam satu keluarga menjadi tinggal permanen satu tempat dengan keluarga yang berbeda. ✓ Pembentukan unit terkecil dari struktur masyarakat (RT) <p>Pemilihan Ketua RT melalui penunjukkan dari FKKS Batam</p> <p>b. Bimbingan Kesadaran Beragama</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Latar belakang kegiatan dari kondisi warga yang sebelumnya <i>atheis</i> ✓ Peran <i>Community Worker</i> sebagai pembimbing dan pendidik (<i>educator</i>). <p>c. Bimbingan Pemeliharaan Kesehatan Diri maupun lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Latar belakang program yaitu pola hidup warga yang kurang mendukung kesehatan diri dan lingkungan, diantaranya jarang mandi serta mengabaikan kebersihan rumah. ✓ Peran <i>Community Worker</i> memberikan pengarahan, mengajak, dan memberikan contoh bagaimana cara hidup sehat baik terhadap diri maupun lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa fasilitas sarana dan prasaran terlihat kurang terawat namun oleh warga masih digunakan diantaranya dermaga (<i>yetti</i>), jembatan pelantar, jalan setapak, juga sumur sumber air tawar. Dan sebagian yang lain sudah tidak bisa lagi digunakan diantaranya rumah yang dibangun di darat semuanya sudah roboh dan tidak lagi digunakan, ruang posyandu, ruang serba guna, monumen perahu, serta peralatan listrik tenaga surya (<i>modul</i>) yang sebagian besar telah rusak tidak bisa lagi digunakan dan hanya sekitar 3 <i>modul</i> yang masih bisa difungsikan namun tidak maksimal. - Kondisi rumah sebagian besar rusak baik pada atap, dinding maupun papan penyangga rumah. - Ditemukan satu rumah yang ditempati oleh dua atau tiga Kepala Keluarga sekaligus. - Analisa kebutuhan cenderung berasal dari keputusan FKKS Batam. - Bentuk kegiatan dilaksanakan dengan mendasarkan pada proposal dari CW (peran <i>fasilitasi</i>) untuk kemudian dilaksanakan dengan persetujuan FKKS Batam. - Bimbingan hidup bermasyarakat dapat menumbuhkan kesadaran melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam menyalurkan aspirasi untuk dipilih dalam pemilihan pengurus RT dan memilih dalam pemilu (TPS 17). - Bimbingan keagamaan berhasil

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan ✓ Kegiatan dilaksanakan dengan bantuan RS Budi kemuliaan sebagai mitra kerja yang tergabung dalam FKKS Batam juga bantuan dana dari NEBA. <p>d. Bimbingan dalam Pertanian, peternakan dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Latar belakang kegiatan ; Ketergantungan penghasilan warga dari hasil tangkapan ikan, penggunaan alat tradisional dalam mencari ikan, kondisi pencemaran air laut. Kegiatan ini diharapkan warga mempunyai pendapatan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. ✓ Mengandalkan peran <i>Community Worker</i> dalam pelaksanaan. ✓ Tidak terdapat petugas dari dinas terkait dalam pelaksanaan. <p>e. Bimbingan penyuluhan tentang makanan gizi dan KB.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Latar belakang kegiatan didasarkan pada kondisi warga yang memiliki banyak anak dimana rata-rata dalam satu Kepala keluarga dapat mempunyai 5 sampai dengan 6 orang anak bahkan bisa sampai 7 atau 8 orang anak serta pola makan yang kurang memperhatikan kandungan gizi pada makanan. ✓ Kegiatan dilaksanakan dengan pembentukan posyandu berupa penyuluhan baik oleh <i>Community Worker</i> maupun dengan kerjasama Dinas kesehatan melalui penempatan Bidan kesehatan dan bantuan dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan 	<p>menyadarkan warga untuk memeluk salah satu agama resmi yang diakui pemerintah serta menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama lain yang ditunjukkan dengan memberikan kebebasan bagi anggota keluarga untuk memeluk agama yang sesuai dengan keyakinan yang dianutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ini telah berhasil mengajak masyarakat menjadi lebih bisa melaksanakan pola hidup sehat sehari-hari. Kegiatan mandi sehat menggunakan sabun dan air tawar dilakukan dua kali setiap hari sudah menjadi kewajiban warga juga setiap rumah hampir dapat dijumpai tempat MCK yang berada dibelakang rumah masing-masing. - Kebersihan lingkungan rumah masih belum sepenuhnya dilaksanakan karena banyak dijumpai sampah berserak dibawah kolong warga. - Karakteristik tanah banyak kandungan bouksit dan berbatu serta sifat warga yang kurang sabar membuat kegiatan kurang bermanfaat secara maksimal untuk kelompok sasaran. - Peran dan keterampilan CW dalam kelancaran kegiatan bimbingan pertanian dan perikanan menjadi penting karena tidak ada keterlibatan dinas pertanian juga perikanan yang diharapkan dapat memberikan solusi serta pengarahan dalam bidang yang terkait. - Bimbingan penyuluhan tentang makanan gizi dan KB dapat dikatakan relatif berhasil dengan didorong oleh faktor adanya
--	--

<p>yang juga tergabung dalam FKKS Batam.</p> <p>f. Bimbingan untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal bagi orang dewasa</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Latar belakang kegiatan ini adalah banyak dari warga baik yang berusia lanjut maupun anak-anak tidak dapat membaca dan menulis. ✓ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan diantaranya gedung sekolah, seragam, baju, alat tulis, sepatu. ✓ Memanfaatkan bantuan YKB sebagai mitra kerja yang tergabung dalam FKKS Batam. <p>g. Bimbingan Budi daya rumput laut</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dasar pertimbangan kegiatan; ketergantungan warga sebagai nelayan dengan peralatan yang masih tradisional, semakin tercemarnya perairan Batam tempat para warga mencari ikan sehingga mengurangi jumlah tangkapan ikan, kurang cocoknya kondisi tanah tempat warga bermukim ditanami berbagai jenis tanaman baik yang dapat dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual. ✓ Manajemen proyek budidaya rumput laut dibawah kendali FKKS yang berada di pulau Bertam, dilaksanakan dengan kerjasama Departemen riset dan teknologi Jakarta, di bawah Menristek Prof. Dr. Ing. B.J Habibie. ✓ Pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut dilaksanakan melalui dua tahap, tahap pertama dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 1991 sedangkan pada tahap ke dua dilaksanakan pada bulan Maret 	<p>keterbukaan masyarakat untuk menerima pengetahuan baru serta keinginan untuk menerapkan pola hidup sehat disamping juga kehidupan baru untuk menetap tinggal di rumah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan pendidikan bagi diri dan anak dapat dikatakan relatif berhasil didukung dengan sikap terbuka masyarakat dalam menerima perubahan. - khusus untuk pendidikan bagi para orang tua kurang berhasil dilaksanakan, kesadaran akan pentingnya pendidikan tidak dibarengi dengan keinginan dan tindakan untuk ikut dalam proses belajar. - Faktor pendukung lain dari keberhasilan bidang pendidikan adalah adanya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dalam hal ini bangunan sekolah. Letak bangunan sekolah yang berada di pulau Bertam memudahkan warga untuk melanjutkan pendidikan khususnya pendidikan Sekolah Dasar (SD). - Penyediaan fasilitas ini belum didukung oleh staf pengajar yang disebabkan tempat tinggal guru yang berada di luar pulau Bertam sehingga untuk melaksanakan tugas, mereka harus mengeluarkan biaya transportasi yang mahal menuju ke pulau Bertam. - Faktor lain dari keberhasilan bimbingan pendidikan karena ditauladani oleh salah satu warga yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 dan kemudian bekerja sebagai Guru PNS di SD setempat. - Kegiatan budidaya rumput laut baik dengan menggunakan sistem rakit
---	--

<p>1992 sampai dengan bulan Januari 1993.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode yang digunakan pada penanaman tahap pertama dengan menggunakan metode rakit sedangkan pada tahap ke dua dengan menggunakan metode <i>monoline</i>. ✓ Dilakukan Evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Evaluasi pertama menunjukkan kegagalan panen dengan sebab salah satunya adalah perubahan musim dari musim utara, musim timur, musim selatan, semakin banyaknya sampah di perairan Bertam dan juga pengetahuan masyarakat yang kurang mendukung budidaya rumput laut (salah dalam pemilihan bibit yang seharusnya tunas muda yang diambil dengan perbandingan 70:30, dimana 70 untuk bibit dan 30 untuk dijemur) ✓ Evaluasi kedua menunjukkan budidaya rumput laut baik dengan menggunakan sistem rakit maupun sistem <i>monoline</i> pada perairan disekitar pulau Bertam secara keseluruhan mengalami kegagalan. <p>h. Mengenal penggunaan uang melalui simpanan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Latar belakang program karena adanya pola hidup boros dari sebagian warga dengan kebiasaan menghabiskan pendapatan pada hari itu juga. ✓ Kegiatan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan petugas BRI Batam melalui penyuluhan. <p>i. Bimbingan Keterampilan Wanita</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Latar belakang kegiatan adalah waktu luang yang dimiliki oleh 	<p>maupun sistem <i>monoline</i> pada perairan disekitar pulau Bertam secara keseluruhan mengalami kegagalan, ditandai dengan tidak dilanjutkannya program setelah penanaman tahap ke II dan juga belum tercapainya tujuan budidaya semula yaitu menambah penghasilan warga Bertam. Dan sampai dengan penelitian ini dilaksanakan warga yang sebelumnya mendapatkan bimbingan budidaya rumput laut ternyata tidak ada yang berusaha untuk melanjutkan maupun mengembangkan program budidaya rumput laut yang sebelumnya mereka peroleh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan mengenal penggunaan uang melalui simpanan pada Bank Rakyat Indonesia relatif belum berhasil meskipun sebagian warga yang mulai sadar mulai menyimpan sebagian pendapatan mereka namun belum memanfaatkan keberadaan Bank meskipun sebelumnya pihak pelaksana program telah mengupayakan memperkenalkan fungsi dan manfaat bank dalam kehidupan mereka yang salah satunya disebabkan karena keberadaan lokasi Bank ada di pulau Batam sehingga warga masih harus dibebani dengan pengeluaran akan biaya transportasi. - kegiatan bimbingan keterampilan Wanita relatif kurang berhasil disamping juga ditunjukkan dengan tidak berfungsinya lagi kegiatan PKK yang dibentuk sebelumnya sebagai wadah ibu-ibu untuk mengembangkan diri dan berkarya juga beberapa warga yang menjual
--	--

<p>para isteri setelah dimukimkan. Setelah dimukimkan waktu luang mereka menjadi lebih banyak, hanya beberapa kali mereka ikut suami mencari ikan khususnya pada saat “bertandang”</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan diwujudkan dengan membentuk kelompok PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). ✓ Kegiatan dengan melibatkan <i>Community Worker</i> juga dari ibu-ibu yang tergabung dalam PKK Batam baik secara formal maupun informal. 	<p>peralatan yang didapat pada saat program dilaksanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan terminasi cenderung dilaksanakan karena batas waktu pelaksanaan program telah selesai dan pihak pelaksana kegiatan merasa bahwa program telah selesai dilaksanakan. - Keputusan pelaksana untuk menyelesaikan program karena dipandang program telah berhasil, Disamping juga disebabkan masih banyak Komunitas Adat Terpencil (KAT) secara nasional yang belum tersentuh program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT). - Secara langsung komunitas Suku Laut tidak lagi dikategorikan sebagai komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan perlakuan khusus terkait program pembangunan untuk KAT, tetapi sudah masuk kategori “masyarakat biasa” yang mandiri dalam arti sejajar dengan warga negara lain.
Terminasi	
<p>Penyerahan Permukiman suku laut di Pulau Bertam kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Sosial RI yaitu Ibu Inten Soeweno pada tanggal 4 Agustus 1993 di Ruang Serba Guna Bertam dan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Propinsi Riau yaitu Bapak Soeripto.</p>	

Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010

4.2. Faktor Pendukung/ Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.

4.2.1. Faktor Pendukung.

4.2.1.1. Dukungan Pemerintah.

a. Landasan Hukum.

Pada saat program ini dilaksanakan pemerintah telah menetapkan daerah perbatasan dalam hal ini Kotamadya Batam sebagai wilayah strategis dalam pembangunan nasional, hal ini mengingat Batam merupakan daerah perbatasan negara Indonesia dengan negara Singapura dan Malaysia. Sebagaimana yang terdokumentasikan oleh Direktorat Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial

RI dalam Hasil Pendataan Masyarakat Terasing di Daerah Perbatasan RI-Singapura/Malaysia, sebagai berikut:

Pemerintah Indonesia telah menetapkan apresiasi strategis pembangunan wilayah perbatasan Republik Indonesia-Malaysia /Singapura...bahwa pada tahap sekarang ini sedang diarahkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dalam kaitan dengan ketahanan nasional serta keserasian hubungannya dengan segala aspek kehidupan di negara tetangga. Rencana pembangunan di daerah perbatasan ini telah dijabarkan melalui koordinasi Bappeda Propinsi Riau dengan memperhatikan hasil studi Rencana Terpadu Pembangunan Daerah Perbatasan Kepulauan Riau oleh Pusat Penelitian Universitas Riau.

Kebijakan tersebut diapresiasi oleh pemerintah khususnya melalui Departemen Sosial RI dalam hal ini Direktorat Bina Masyarakat Terasing melalui program Pembinaan Masyarakat Terasing dengan mendasarkan pada pengkajian permasalahan sosial di daerah Batam khususnya terkait dengan keberadaan Suku Laut di wilayah Kota Batam secara khusus disahkan dalam “Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam” pada tahun 1987. Payung hukum inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi FKKS Batam untuk secara operasional melaksanakan program PKAT bagi komunitas Suku Laut di pulau Bertam. Hal ini diakui juga oleh Informan (Sd) sebagai berikut:

Program bisa berjalan karena ada payung hukum. Dari situ saya bisa *expose* (keberadaan Suku Laut) keuangan bisa masuk. Lebih mudah cari *duit* (pendanaan) untuk suku laut dari pada program lain. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Dari informasi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan secara hukum bahwa FKKS Batam sebagai pelaksana operasional untuk implementasi program merupakan faktor pendukung utama bagi kelancaran program. Dengan payung hukum yang ada dapat memperlancar usaha FKKS Batam dalam mendapatkan kepercayaan baik instansi pemerintah maupun instansi di luar Pemerintah yang

terkait lain atau juga oleh lembaga *privat* untuk mengelola dana bagi keberhasilan program.

b. Dukungan Lembaga/ Organisasi Pemerintah Lain yang Terkait.

Dukungan lembaga/ organisasi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan program PKAT pada Komunitas Suku Laut di pulau Bertam merupakan salah satu penunjang kelancaran program karena dengan dukungan tersebut tercipta adanya komunikasi dan konsultasi tukar pengalaman bagi keberhasilan program. Dukungan ini tidak saja dari Depsos RI sebagai penanggung jawab fungsional tetapi juga didapat dari instansi pemerintahan yang lain. Hal ini dapat terlihat dari beberapa lembaga/ organisasi yang berkunjung untuk melihat program secara langsung di permukiman Suku Laut yang ada di pulau Bertam, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Daftar tamu kunjungan di Komunitas Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam dari Tahun 1986 s/d 1993

Tahun	Tamu Kunjungan
1986	Menteri Sosial RI (Ibu Nani Soedarsono) Kunjungan sebanyak 2 kali
1987	BKKKS Jawa Barat
1988	Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial
1989	Mensos RI (Ibu Prof. Dr. Haryati Soebadio)
	Dirjen Depsos RI
	Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial
1990	Mensos RI (Ibu Prof. Dr. Haryati Soebadio)
	BKKKS Propinsi Lampung
	BKKKS Propinsi DKI Jakarta
	Menteri UPW (Ibu Sulasikin Murpratomo)
	Duta Besar Singapura
	Menteri Penerangan RI (Bapak Harmoko)
	Dirjen Penerangan Umum
	Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial
	Wakil Gubernur Propinsi Riau
	Sekjen Depsos RI
	Rombongan Ria Pembangunan (Ibu Suharsono) beserta anggota
1991	Ketua Umum Yayasan Pengembangan Asmat (M. Kharis Suhud)
1992	Anggota DPR Komisi VIII
	BKKKS DKI Jakarta
	Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial
	Inspektur Jenderal Rustandi

	Menteri Sosial (Ibu Prof. Dr. Haryati Soebadio)
	Menteri UPW
	Ibu Umar Wirahadikusumah
	Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (Bapak M. Noer)
	DPR Komisi IX
	Kepala Perpustakaan Nasional (Ibu Mastini)
	Rombongan PMI Jakarta
	Dirjen Perum Departemen Penerangan
	Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Depsos RI
	Asisten III Menkokesra
	Direktur Bank des Departemen Dalam Negeri
	BKKKS Propinsi Jawa Barat
	PKK dan BKKKS Jawa Timur
	BKKKS Irian Jaya
1993	Mensos RI (Ibu Inten Soweno) Penyerahan Speed Boat Pemberian Bantuan Dana Sebesar Rp. 20.000.000,00 Penyerahan Komunitas Suku Laut di pulau Bertam kepada Pemerintah Kota Batam

Sumber: Dokumen penelitian, Oktober 2010.

Hal ini juga diakui oleh Informan (Sd) dan (Sn) seperti yang diungkap dibawah ini:

Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait juga pelaksana program lain saya (FKKS Batam) lakukan. Misalnya seminar-seminar tentang Suku Laut di Pekanbaru juga Irian Jaya. Apa yang baik saya pelajari, dari yang tidak tahu apa itu Suku Laut jadi mengerti. Atik (Penulis) nanti bisa lihat dokumentasinya di kantor. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Oya, kalau dukungan dari instansi lain diluar Depsos yach sangat banyak. Beberapa kali ada kunjungan dari Jakarta (Pemerintah Pusat) ke Bertam, kadang tidak hanya berkunjung tapi juga bawa sumbangan macam-macam ada beras, mie bungkus, ikan kaleng, seragam anak sekolah, Beasiswa.. macam-macam lah. (Sn, Mantan Pendamping/Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Informasi tersebut sekaligus menguatkan bahwa dukungan (*Support*) dari lembaga/ organisasi pemerintah lain yang terkait dapat menjadi faktor pendukung yang bisa memperlancar pelaksanaan program. Dukungan yang ada tidak hanya dari segi *finansial* tetapi juga masukan dari berbagi pengalaman dan saran bagi perbaikan program.

4.2.1.2. Dukungan Lembaga KKKS Batam.

a. Komitmen Kuat Ketua FKKS Batam.

Sebagai pelaksana kegiatan, aktifitas lembaga KKKS Batam (Pada saat program bernama FKKS Batam) mempunyai peranan yang penting dalam keberhasilan program. Dukungan yang diberikan FKKS Batam tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan FKKS Batam untuk melaksanakan program sampai dengan tahap terminasi. Keberhasilan FKKS Batam dalam program PKAT Suku Laut di pulau Bertam tidak terlepas dari Kepemimpinan Ibu Sd (salah satu informan dalam penelitian ini), hingga beliau mendapatkan julukan dan dikenal dengan panggilan “Ibu Suku Laut”. Panggilan tersebut juga secara tidak langsung menunjukkan kedekatan emosional yang terjadi antara pimpinan FKKS Batam dengan warga Bertam. Hal ini diungkapkan oleh Informan (Rn) dan Informan (Ol) sebagai berikut:

Faktor pendukung (Program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam): Adanya komitmen kuat Ketua FKKS, Ny. Sri Soedarsono bagi terwujudnya proyek permukiman tersebut. (Rn, Mantan Staf Ahli Depsos RI Wilayah Kota Batam, 4 Januari 2011)

Kenapa ibu Dar itu disukai di suku laut sampai-sampai dipanggil “Ibu Suku Laut” kenapa.. karena dia ini wanita. Suksesnya ibu Dar di suku laut kenapa? Karena dia wanita. Macam mereka (Suku Laut) percaya sama isteri lah. (Ol, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Hal ini dibenarkan oleh Informan (Hs) dan Informan (Ra) sebagaimana berikut:

Nah dulu kita itu enak-enaklah di bantu Bu Darsono (Ketua FKKS Batam). Gak pernah itu pemerintah datang kunjung-kunjung tetapi kalo Bu Darsono datang keliling ke pulau Lingka, pulau Gara ya kasih macam-macam lah.

Sakit kita bisa berobat gratis (di RS Budi Kemuliaan) kan sampai sekarang. Ya kita mengadu ke siapa lagi sekarang?. (Hs, *Beneficiaries* Program, 19 Oktober 2010)

Dulu masih ada itu Ibu Sd, karena Ibu Sd itu orang yang paling top yang mengetup dalam sejarah Batam itu dia, karena seperti apa.. orang.. jadi dia harus menarik masyarakatnya, seperti orang suku laut atau pun apa, jadi Bapak menceritakan, jadi memang Bapak orang suku laut ya. Dari mulainya makanan, pakaian, sekolah anak diberi..ya dulu Bertam rame karena Ibu (Ketua FKKS Batam). (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Sedangkan komitmen kuat dari Ketua FKKS Batam terlihat sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan dibawah ini:

Kita harus mulai dari diri sendiri..saya mungkin karena didikan tentara harus berani sendiri kita harus mau pergi sendiri kita.. kalau tidak mulai dari diri sendiri kita tidak akan pernah bisa.. kalau hanya perintah-perintah..”*you never get a sukses*”.. harus kasih contoh.. kita tidak kasih contoh itu tidak bisa..saya tidak menyombongkan diri..saya berani itu pergi ke naik pancung?. udah ombak gede-gede..kita pasrah ya Allah..mau di tempat tidur atau di laut kalau sudah waktunya mati ya mati.. hanya empat orang waktu itu. Saya pengen mereka (Suku Laut) bisa sekolah ada hidup yang lebih baik, beri kesempatan hidup layak itu *commitment* saya. Kalau ada tidak punya perasaan itu anda tidak akan bisa masuk... apa yang dia (Suku Laut) makan saya makan.” (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Keberhasilan Ibu Sd sendiri juga tak lepas dari dukungan suami yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Otorita Batam yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) Soedarsono Darmosoewito, juga dukungan keluarga besar beliau khususnya dalam hal ini Bapak. Ing. BJ Habibie yang merupakan kakak kandung beliau sekaligus pada saat itu merupakan pejabat Otorita Batam sekaligus Menristek RI, sebagaimana diungkapkan Informan (Sd) dibawah ini:

Bapak (Suami Ibu Sd) kepala (Kepala Otorita Batam) waktu itu tinggal perintah semua diam. Pak Habibie bantu buat listrik dari matahari, ibu-ibu Darma Wanita karena saya ketuanya. Saya begini begitu bisa. Sekarang, karena pemerintah membubarkan PKK juga sudah dibubarkan. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Informan (Sn) seperti yang diungkap di bawah ini:

Dulu jalurnya “jalur tol”, jaman Bu Dar (Ibu Sd) dulu khan punya *access...* Iya juga karena Pak Habibie (kakak kandung dari Ibu Sd), dengan menteri juga dekat, suaminya juga salah satu penguasa disini (Ketua Otorita Batam). Akhirnya secara tak langsung dia yang bangun. Meskipun pihak ke-3 tetapi dia yang megang. Saya aja hanya diperbantukan. Bu Dar memang dekat sekali dengan warga Bertam orang memanggilnya “ibu suku laut”. (Sn, Mantan Pendamping/ Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung bagi kelancaran program adalah adanya dukungan dari keluarga dekat dari Informan Sd yang *mensupport* setiap aktifitas yang beliau lakukan khususnya terkait dengan program PKAT di pulau Bertam. Keterangan tersebut sekaligus menunjukkan kecakapan Ketua KKKS Batam untuk memanfaatkan *networking* (jaringan kerja pribadi) yang potensial yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program.

b. Dukungan Mitra Kerja FKKS Batam.

FKKS atau pada saat ini berubah nama menjadi KKKS Batam merupakan lembaga sosial yang bertujuan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat secara khusus program yang dimaksud adalah Pemberdayaan Suku Laut di wilayah Batam. FKKS (Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial) Batam pada awal berdiri beranggotakan 27 lembaga sosial yang mempunyai kesamaan visi dan misi pelayanan sosial khususnya di wilayah Batam. Dalam menjalankan

programnya, FKKS Batam mendapatkan bantuan dari mitra yang tergabung dalam FKKS Batam, seperti yang diungkap oleh informan (Sd) dan (Ol) dibawah ini:

Kerjasamanya FKKS lewat Budi Kemuliaan, klinik terapung Budi kemuliaan tetapi proyeknya NEBA. Karena saya itu.. FKKS kan koordinator Kegiatan Kesejahteraan sosial semua ikut, sekolahan dibenahin ada YKB (Yayasan Keluarga Batam), YPAB, kesehatan ini ada Budi Kemuliaan, agama juga..juga ada, sosial juga terkait. Semua saya masukkan. Saya koordinir.. seminar-seminar. saya untung mempunyai kemampuan untuk bisa bicara dengan semua pejabat..jadi satu keluarga besar (Mitra yang tergabung) dikoordinasikan FKKS. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)

Buku-buku di *back up* sama YKB (Yayasan Keluarga batam) kita..walaupun guru YKB tidak ada disana... tapi kan semua dibelikan.. sepatu-sepatu anak dikasih..kesehatan nya.. juga diback up.. rumah sakit budi kemuliaan kalau sakit. (Ol, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa salah satu peran yang diberikan oleh Mitra kerja yang tergabung dalam FKKS Batam adalah memberikan masukan baik saran maupun informasi melalui kegiatan seminar bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu juga fasilitas pelayanan sosial diantaranya bidang Kesehatan melibatkan RS. Budi Kemuliaan, dan bidang Pendidikan melibatkan YKB dan juga YPAB.

Peran mitra anggota yang tergabung dalam FKKS Batam lainnya yang turut memperlancar program adalah dalam bentuk bantuan finansial diantaranya dari total dana yang dikeluarkan dengan berdasarkan data tahun anggaran 1992/1993 untuk kegiatan-kegiatan dari FKKS Batam terdapat pemasukkan anggaran dari bantuan YPAB (Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda) Batam, sebesar Rp. 25.000.000,00 yang diperuntukkan bagi proyek Suku Laut di Pulau Bertam.

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan mitra kerja yang tergabung dalam FKKS Batam tidak hanya terbatas pada usulan,

pendapat dan saran tetapi juga bantuan fisik berupa finansial juga fasilitas pelayanan.

4.2.1.3. Keterbukaan Warga Menerima Perubahan.

Keterbukaan warga untuk menerima perubahan menjadi faktor pendukung lain yang turut memperlancar program. Kehidupan *nomaden* menjadikan intensitas dan mobilitas yang tinggi warga suku laut mengharuskan mereka lebih sering berinteraksi dengan warga diluar komunitas meskipun cenderung terbatas dengan *tauke* dan pemerintah, kondisi tersebut menjadikan suku laut lebih terbuka menerima hal yang baru. Sebagaimana informasi yang penulis dapat dari informan (Mh), dan (Tl) berikut ini:

Kita senang ada yang peduli dengan Suku Laut. Bapak tak ingin terus terombang-ambing di laut makanya waktu dimukimkan senang dirasa. Jadi sekarang merasa bangga di Pulau Bertam ini, termasuk punya rumah walaupun bagaimana rumah itu, kondisinya gubuk seperti kandang kambing dan juga kandang ayam, tapi sangat senang, apalagi kalau seperti ini kan bisa berkumpul dengan anak. Beda kan dengan di perahu, itu kan kita terapung-apung belum lagi badai datang yang ada rasa takut kan. Kegiatan pun semua ikut, ibu juga waktu itu. Asal untuk masa depan yang lebih baik bapak pasti mau. Warga disini pun sama seperti Bapak, asal ada kegiatan yang bermanfaat bisa meningkatkan hidup mereka pasti mau. (Mh, *Beneficiaries* program Sekaligus Wakil Ketua RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Kalau untuk meningkatkan pendapatan pasti kami mau melaksanakan. Kami bisa berlama-lama di laut untuk dapat ikan, kalau ada pemerintah mau bantu membuat kami hidup lebih pasti kami maulah. (Tl, *Beneficiaries* Program, 17 Oktober 2010)

Dari beberapa ungkapan diatas menunjukkan bahwa warga Bertam mempunyai keinginan kuat untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik. Keinginan kuat tersebut ditunjukkan dengan sikap terbuka untuk menerima perubahan.

4.2.2. Faktor Penghambat.

4.2.2.1. Anggaran/Dana yang terbatas dari Pemerintah.

Faktor yang menjadi salah satu penghambat kelancaran program adalah keterbatasan dana yang diberikan oleh penanggung jawab fungsional program dalam hal ini Depsos RI kepada pelaksana operasional program dalam hal ini FKKS/ KKKS Batam. Kondisi ini sebagaimana diungkap oleh Informan (Sd) dan (Rn) dibawah ini:

Ada kita dapat dari Depsos meskipun hanya dana *stimulus* ya semacam modal awal. Memang hanya bisa buat beli pilar dan atap seng aja, ngak cukup itu. Saya kerja keras cari dana sana-sini, saya mau itu suku laut berhasil. Yang banyak (bantuan dana) itu dari OB (Otorita Batam). (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Faktor Penghambat (Pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di Bertam): Anggaran/Dana Depsos hanya dapat membiayai 50% dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk proyek tersebut. (Rn, Mantan Staf Ahli Depsos RI Wilayah Kota Batam, 4 Januari 2011)

Berdasarkan dokumentasi yang penulis peroleh dari FKKS Batam menunjukkan bahwa harga tiap rumah yang dibangun menelan biaya sekitar Rp. 1.000.000,00 dan dari biaya tersebut FKKS mendapatkan bantuan dana untuk tiap-tiap rumah dari Depsos RI sebesar Rp. 450.000,00 atau kurang lebih 45% dari total biaya yang diperlukan, dan untuk selebihnya menjadi tugas FKKS Batam untuk mencukupi kekurangan biaya yang ada.

Dari keterangan tersebut diatas menegaskan bahwa anggaran menjadi faktor penting untuk memperlancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun demikian anggaran yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Depsos RI kurang cukup untuk mengcover kegiatan yang terkait dengan program, sehingga mengharuskan FKKS/ KKKS Batam mengupayakan penggalangan dana dari lembaga/ instansi lain.

4.2.2.2. Kerjasama dan Perencanaan Kegiatan yang kurang antar Petugas Pelaksana.

Hambatan teknis yang menghambat pelaksanaan program diantaranya yaitu kurangnya kerjasama dan perencanaan kegiatan yang terbentuk dari tenaga pelaksana pada saat penerapan di lapangan, sebagaimana informasi dari informan (Bu) berikut ini:

Kalau ya memang k3s (KKKS Batam) punya program dia.. kadang program dengan di lapangan itu tidak jalan ya.. umpamanya dinas pendidikan punya program pada saat kita diterapkan di lapangan tidak jalan.. kenapa tidak jalan karena petugas yang lain, masyarakatnya tidak mendukung. misalnya Depag punya program penyuluhan oke kita hari sabtu mengumpul disana, ya pada saat kegiatan ternyata dia tidak bisa “pak saya tidak bisa hadir”, “kenapa?” “Pak saya ke laut” kalau sudah siang sorenya jum’at kalau sudah sore sudah surut sudah tidak ada lagi itu anak-anaknya saja yang tertinggal.. itu kadang kita memanfaatkan waktu pembinaan itu ya kadang hari-hari air pasang dan hari minggu pada saat dia tidak ingin melaut. (Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)

Kondisi kurangnya kerjasama dan perencanaan kegiatan pada saat program PKAT pada komunitas Suku Laut di Bertam berlangsung juga diungkapkan oleh warga, seperti pernyataan Informan (Ra) dibawah ini:

Ya, kita orang tua berfikirnya ya bagaimalah mencari ya pendapatannya, makannya kalau dipertanyakan lebih memilih mananya waktu itu (Pada saat program PKAT di Bertam berlangsung) Bapak memilih untuk mencari ikan dari padanya kumpul (hadir di tempat kegiatan). (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Dari kedua keterangan tersebut diatas menunjukkan bahwa pada saat kegiatan berlangsung, ada kalanya perencanaan yang semula di rumuskan tidak dapat dilaksanakan. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya koordinasi untuk merumuskan baik waktu pelaksanaan maupun kegiatan antar pelaksana kegiatan yang terkait yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi komunitas sasaran.

Kurang diperhatikannya kondisi dan situasi komunitas sasaran dapat dilihat misalnya pelaksanaan kegiatan yang kurang memperhatikan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan tanpa mengurangi waktu warga untuk mencari ikan. Mencari ikan merupakan pekerjaan utama warga sehingga jika pekerjaan tersebut terganggu akibatnya pendapatan warga juga terganggu. Dengan tidak terlaksananya suatu kegiatan yang telah direncanakan menyebabkan terhambatnya proses implementasi kegiatan lainnya.

4.2.2.3. Terbatasnya Sumber Daya dalam Proses Pendampingan.

Hambatan lain yang dapat diidentifikasi dari implementasi program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam adalah terbatasnya sumber daya dalam proses pendampingan. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan kualitas, tidak terdapatnya pendamping pada saat proses persiapan, kurangnya jumlah pendamping pada saat pelaksanaan program, serta sering terjadinya pergantian *Community Worker* selama proses pendampingan. Menyangkut kualitas *Community Worker* yang bertugas pada saat program, berdasarkan dokumentasi yang penulis peroleh menunjukkan bahwa mereka yang bertugas kurang memiliki pengetahuan tentang pendampingan masyarakat, terdapat 1 pekerja sosial dari FKKS Batam dengan latar belakang pendidikan Antropologi, pekerja sosial dari Depag dengan latar belakang pendidikan setingkat SMU, sedangkan mereka yang bertugas sebagai pelaksana dari Departemen Sosial dengan latar belakang sebagai Pekerja Sosial Masyarakat atau SATGASOS (Satuan Tugas Sosial) memiliki tingkat pendidikan setingkat SMU tanpa memiliki pengetahuan melakukan pendampingan sebelumnya namun dibekali pelatihan dasar tentang pendampingan masyarakat.

Sedangkan terkait dengan belum tercukupinya secara kuantitas pekerja sosial sebagaimana diungkapkan oleh Informan (Sd) dibawah ini:

Kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mau tinggal di Bertam, mereka (Suku Laut di Bertam) itu orang bodoh yach, tetapi mereka bisa. Mereka bisa belajar bercocok tanam. Itu karena ada yang bina dan kasih contoh. Pertukangan mereka bisa *kog*. Buktinya buat kapal sendiri juga bisa.

Berarti mereka bisa bikin meja-kursi untuk mereka sendiri. Dan kekurangan SDM yang mau tinggal disitu dengan *ikhlas* yach. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)

Berdasarkan penuturan dari Ketua lembaga pelaksana program diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses pendampingan jumlah pendamping belum secara maksimal terpenuhi, hal ini dimungkinkan terjadi karena keberadaan *Community Worker* (CW) terutama mereka yang menetap selama implementasi program tidak dimulai dari awal proses implementasi program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam mulai dilaksanakan. Berdasarkan dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa CW yang menetap dipermukiman mulai ada pada tahun 1990, atau berjarak 3 tahun setelah persiapan program dimulai dan 2 tahun setelah komunitas sasaran bermukim di Bertam. Sebagaimana diketahui bahwa persiapan program dimulai pada tahun 1987 sedangkan komunitas sasaran menetap di pulau Bertam pada tahun 1988.

Kurangnya sumber daya dalam proses pendampingan juga dapat terlihat sebagaimana ungkapan (Bu) dibawah ini:

Saya dulu disana pertama kali ditugaskan oleh Depag. Secara ini saja kekeluargaan, kebetulan pak dokter (salah satu Dokter Gigi yang bertugas di Pulau Bertam)..disanakan ada kekosongan guru agama.. saya kebetulan kesana ke bpk H. Abu Bakar guru saya itu kesana bersama pak dokter itu..trus berbincang-bincanglah saya disana melihat mesjid kosong.. tanah orang kan..saya ketemu dengan bapak kan bulan 6 di Batam, saya bilang “pak, saya minta kerjalah”, Bapak Haji bilang “saya tidak ada lagi sudah penuh, semua sekolah” katanya..nah gini sajalah..”awak mau ndak kerja di Bertam”, mau lah saya. Ndak ada masalah buat saya dimana, karena saya sudah niatkan kerja itu kan. Jadi diajaklah saya tanggal 15 bulan ketujuh e.. memang tiga bulan itu saya goyang itu kan saya banyak kepikiran adik saya mau sekolah pekerjaan juga cuma begini, tapi kalau saya goyang saya pergi ke tempat pak dokter itu orang tua angkat saya ”pak saya begini begini ada masalah itukan”, ”udah kamu bertahan disana ngajarin orang di Bertam

lebih bagus dari pada ngajarin orang di Batam. Kalau di Batam sepuluh disana dapat seratus pahala, kamu mana yang mau” dan saya juga dibandingkan dengan nabi nuh, kan murid saya ada sepuluh yang ngaji kan “kalau jadi satu saja awak sudah berhasil” begitu Pak Dokter bilang ke saya. Akhirnya saya dikasih uang transportasi balik lagi ke sana (Bertam). Ada masalah lagi saya datang lagi ke dia.. ngadap..setiap masalah tidak bisa selesai dengan warga, dengan teman-teman saya kembali ke dia.. ngadu..lama-lama sudah berjalan yang masa krisis itu sudah hilang.. adik sudah dapat dibiayai dan dibantu, honor sudah naik, kawan juga sudah datang dari Batam. Saya setahun (di Bertam) itu kawan baru datang (CW yang lain) selama ini kawan sama Ol itu..kawan berkelahi sama dia. Dia (informan Ol) datang itu sudah agak ringan pekerjaan, kenapa karena mengajak yang selama ini mungkin ngajak gotong royong sekarang sudah ada kawan gotong-royong, yang selama ini di rumah kesepian masak sendiri sudah ada kawan gantian masak. Artinya kami disitu kami sudah berbagi.. berbagi tugas berbagi kerja, bagi cerita bagi susah, pokoknya sama-sama lah sama mereka.” (Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)

Keterangan tersebut menguatkan adanya keterbatasan sumber daya diantaranya: terkait kualifikasi sebagai pendamping sosial, tidak adanya tenaga pendamping (*Community Worker*) pada saat persiapan, kurangnya tenaga pelaksana pada saat program mulai diimplementasikan. Dari beberapa kondisi tersebut menyebabkan salah satunya yaitu sering terjadinya pergantian petugas pelaksana lapangan (CW) pada saat program berlangsung.

Namun demikian dalam ungkapan diatas juga menunjukkan adanya faktor pendorong yang menguatkan niat dari CW untuk tetap bertahan tinggal dan menetap di pulau Bertam yaitu dukungan (*support*) yang didapat dari rekan atau teman sejawat dan didukung oleh kebutuhan serta niat dan kesediaan CW untuk tetap bertahan melanjutnya tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Faktor penghambat dari sumber daya adalah sering terjadi perubahan petugas pendamping selama proses pelaksanaan program. Perubahan petugas juga terjadi pada Staff ahli yang ditugaskan oleh Depsos RI untuk membantu dalam tahap awal persiapan yaitu Informan (Rn), berdasarkan dokumentasi dari FKKS Batam menunjukkan: “Dalam hal ini Drs. Suranto boleh dibilang memiliki peranan khusus. Ia banya mendukung dalam pengembangan gagasan dan konsep pemberdayaan Suku Laut. Tak heran bila ada yang menyebutnya sebagai “arsitek” pemberdayaan warga Bertam. Pada saat serius melakukan perencanaan, sayangnya FKKS harus ditinggalkan salah seorang tenaga ahlinya, Drs. Suranto. Ia yang sudah beberapa tahun di Batam ditarik kembali ke Jakarta bulan September 1987. Akhirnya praktis untuk menggerakkan FKKS, Sri Soedarsono hanya dibantu oleh tenaga-tenaga pada level operasional.”

Sedangkan akibat lebih lanjut dari seringnya pergantian CW berpengaruh terhadap kelancaran perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti yang diungkap oleh Informan (Ol) dibawah ini:

Ya.. jangankah di situ (di Bertam) dimana-mana juga berpengaruh (sering terjadi pergantian petugas), kita tata baik jadwal..e..kamu jam lima harus azan.. kamu harus ini.. kamu harus ke mushola sholat.. saya panggil mereka itu.. saya sendiri ndak tahu sholatnya orang saya bukan orang Islam kan..saya tahu itu.. jam-jam sholatnya harus jelas.. dan juga guru-guru juga nggak boleh pulang.. kalau pulang kan mereka kita *back up*, datang hari jum'at.. kamis sudah pulang lah sore.. datang hari senin.. hari senin pun sudah siang..nah selasa, rabu, kamis hanya tiga hari mereka di situ.. dan orang tua pun “ah buat apa nak belajar ta apa lah”, “ada lah belajar begitu-begitu kita”.. *hinterland* memang begitu.”(Ol, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Informasi diatas menunjukkan bahwa dengan seringnya terjadi pergantian menyebabkan salah satu kegiatan menjadi terganggu dan tidak sesuai dengan rencana semula. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

4.2.2.4. Hambatan dari Warga Bertam.

a. Sikap dan Perilaku Mengharap Menerima Imbalan

Kendala lain yang menyebabkan pelaksanaan program terhambat adalah sikap masyarakat Bertam yang mengharapkan imbalan dari setiap kegiatan yang mereka jalani. dengan sikap ini kegiatan tidak maksimal terlaksana dikarenakan sebagian warga mulai cenderung untuk memilah kegiatan yang menawarkan imbalan uang. Seperti yang diungkap oleh Informan (Sn) dibawah ini:

akhirnya saya bilang aja, kalo paku nanti saya kasih deh. Kalian cari aja dulu. Masa iya, kalian biasanya cari kayu di pulau, masa iya nggak bisa nyari kayu untuk menyanggah rumah kalian tersebut? Terus buatnya ajak kawan-kawan, trus nanti paku saya belikan. Selama saya masih disitu jalan. Terus dia nyari kayu dan pasang sendiri. Saya aja orang darat bisa kog pasangnyanya apalagi mereka. Itu tuh merubah pola perilaku dan sikap orang-orang suku-suku laut itu yach susah. Kalau kegiatan harus siap menyediakan imbalan, itulah yang membuat semangat (sambil tertawa). Maklumlah karena kita mengurangi waktu mereka mencari ikan.. yang harusnya mereka dapat tangkapan jadi istirahat.” (Sn, Mantan Pendamping/ Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Kalo menurut saya orangnya juga, orang suku laut itu sendiri tidak ada berubah dan mau belajar. Lebih kepada faktor mental. Mereka di bina, dari pendidikan, guru agama aja tetapi yach tetap aja mereka sama, diibaratkan hasil pancingan yang dapat hari ini yach dihabiskan hari ini juga. Akibatnya mereka juga memiliki ketergantungan kepada bantuan pemerintah dan orang lain. Kemiskinan juga semakin banyak, tetapi keliatannya mereka tidak mau juga merubah nasib mereka sendiri. Contohnya pada waktu saya membuat kegiatan di Bertam, belum itu acara dimulai mereka sudah bertanya “Pak Bu kapan dibagi sembakonya” ya itu lah pening kalau mengingat. Kalo tak dikasih ada yang tak mau mereka datang tapi uang dari mana? Pening saya.

(Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)

Informasi diatas semakin menegaskan bahwa sikap dan perilaku mengharap imbalan sebagai salah satu sebab yang menghambat proses implementasi program. Namun demikian sikap dan perilaku mengharap imbalan tersebut muncul salah satunya karena dilatar belakangi oleh sifat *Charity* yang digunakan dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sebagaimana ungkapan informan (Sd) dibawah ini:

Ya bagaimana ya saya lihat begitu ya (Mayoritas Suku Laut tidak berpendidikan).. saya tahu kalau itu salah (selalu memanjakan warga dengan bantuan), emang itukan untuk orang tua. Sekarang yang tua-tua sudah bisa dihitung dengan jari, anaknya mestinya sudah waktunya kala dulu sudah bagus-bagus kerjaan tidak tergantung pada saya kan. Untung Nm diantara sekian ratus bisa, seumur umur tidak mau pindah gajinya 5 juta. Kurang apa mereka kalo mereka sakit yach mereka bisa datang kerumah sakit saya. Nah lumayankan mereka bisa berobat. Sekarang seharusnya mereka lumayan ada pengobatan gratis bagi orang miskin. Tetapi pengobatan bagi orang miskin tidak terlalu bagus. Kalo dirumah sakit saya, rumah sakit “Budi Kemuliaan itu” untuk suku laut gratis. Operasi apapun akan dilayani seperti kelas I dan seperti yang lainnya.” (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 15 Oktober 2010)

Dari keterangan tersebut diatas bahwa program yang lebih bersifat *Charity* (amal) yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program cenderung menyebabkan sikap dan perilaku komunitas sasaran menjadi tergantung untuk selalu mengharap adanya imbalan dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Sikap Curiga Antar Warga

Sikap curiga antar warga juga menjadi salah satu penyebab yang menghambat pelaksanaan program. Sikap curiga tersebut dilatar belakangi oleh kehidupan warga sebelum dimukimkan. Kehidupan sehari-hari sebelumnya di atas perahu menjadikan interaksi dan keterikatan emosional lebih banyak hanya dengan anggota keluarga mereka, dari keseharian yang kurang berinteraksi

dengan masyarakat lain sehingga pada saat mereka dimukimkan, kepercayaan akan warga lain menjadi rendah. Kepercayaan yang rendah menyebabkan muncul rasa curiga antar warga yang berakibat secara langsung pada keberhasilan pelaksanaan program.

Yach itulah masalah sikap dan pemikiran aja yach susah, kemudian mereka juga antara mereka saling curiga aja. Pada saat kita membuat kelompok saja antara mereka tidak saling percaya. Jadi agak susah membinanya. Nah misalnya kita buat mereka berkelompok untuk mengelola keramba, nah mereka khan ada yang rajin dan ada yang malas. Nah kalo begitu yang rajin ntar langsung menjual hasilnya tanpa harus membagi, nah dari situ mereka mulai tidak percaya antara satu dengan yang lain. Nah belum waktunya belum di jual yach dah mereka jual. Untuk dibandingkan dalam kelompok aja mereka susah sekali digabungkan. Tak Bisa mereka itu digabungkan. Nah satu-satu pun kecenderungan untuk memanen hasilnya sebelum waktunya. Kemudian tidak bisa memperbaiki. Kita kasih *bubu* ikan dan peralatan lain untuk mancing, eh belum dipasang, belum di pake dah bilang hilang. Nah untuk dipercaya agak susah. (Sn, Mantan Pendamping/ Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Adanya sikap curiga antar warga juga ditunjukkan Informan (OI) dalam ungkapannya seperti dibawah ini:

Mereka saya lihat hidup bahagia di laut..sekarang mereka bertetangga disinikan bisa berantem, bau minyak goreng pun bisa pemicu. Curiga satu ke satu warga ”si ini dapat ini kenapa saya tidak..wah bagaimana ini?” curiga lagi.. itulah. (OI, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Dari keterangan tersebut diatas diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sikap curiga antar warga sedikit banyak dapat mempengaruhi pelaksanaan program terlebih jika sikap curiga antar warga juga diikuti dengan munculnya sikap tidak percaya antar komunitas sasaran khususnya yang terjadi selama proses

implementasi program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-kota Batam.

4.2.2.5. Mahal dan Jarangnya Transportasi Laut Menuju Pulau Bertam.

Secara geografis jarak pulau Bertam dengan Pulau Batam memang tidak terlalu jauh, untuk menuju ke pulau Bertam hanya memerlukan waktu kurang lebih 45 menit dari pelabuhan rakyat sekupang di Batam. Namun karena hampir tidak ada perahu *boat* ataupun pancung menuju ke pulau Bertam menyebabkan perjalanan ke Bertam membutuhkan biaya yang cukup besar. Seperti yang diungkapkan oleh Informan (Rn) dan (Bu) dibawah ini:

Faktor Penghambat (Pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di Bertam): Transportasi lewat Laut lebih mahal dan tidak dapat dilakukan setiap waktu. (Rn, Mantan Staf Ahli Depsos RI Wilayah Kota Batam, 4 Januari 2011)

Jalur perjalanan ke Bertam susahya transportasi disana. Karena jarang orang ke Bertam, kalaupun ada mahal.. kesana saja bisa menghabiskan uang Rp. 150an ribu, sekarang uang sebesar itu mahal apalagi kalau dulu. Akhirnya apa, ya.. lebih baik pindah kan? Gaji tak cukup?. Apalagi yang diharap kalo ada kerja yang lebih baik?. (Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)

Mahal dan jarangya transportasi menjadi hambatan terutama karena sebagian pelaksana kegiatan di lapangan (*community worker*) tidak menetap di pulau Bertam. Sehingga tiap kali mereka harus menuju Bertam harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang harus mereka tanggung. Akibat lebih lanjut petugas yang bersangkutan jarang datang ke pulau sehingga beberapa kegiatan menjadi terhambat. Bahkan menurut (Bu) beberapa diantara petugas akan memilih untuk menerima pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih besar. Kondisi ini juga yang menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi pergantian petugas pada saat pelaksanaan program.

4.3. Dampak Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.

4.3.1. Dampak Langsung Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.

4.3.1.1. Dampak Personal/ Spiritual.

Dampak positif yang langsung dapat dirasakan oleh mereka yang menjadi sasaran dari program PKAT di Bertam yaitu adanya kehidupan yang lebih stabil yang dirasakan setelah mereka menetap di permukiman Bertam, seperti yang diungkap oleh Informan (Ra), (Mh) dan (TI) dibawah ini:

Memang saya merasa di laut itu dulu terapung-apung ke sana ke sini terasa bebas, memang bebas saya itu dalam hal mata pencarian saya di laut, memang sangat apa, memuaskan. Memang kalo dilaut kita hidup enak tetapi susah. Keadaanya ombak apalagi seperti ada bayi kecil. Nah, kalo dulu kita sih nggak takut ama laut, nggak takut ama ombak, nggak takut ama topan karena udah biasa. Nah kalo sekarang, contoh khan keluarga Bapak keluarga besar, hingga sampai ke pulau nginang. Ibu Bapak dulu pernah mengatakan kepada Bapak, pergilah ke rumah saudaramu. Tetapi Bapak tidak mau. Itu karena Bapak rasanya dah enak tinggal di Pulau Bertam ini. Kenapa karena disini, setelah kita melaut dapat ikan kita udah duduk santai dirumah nggak was-was akan datang ombak. Santailah. Dulu aja sekarang kalo seharian kena hujan-kena angin satu harian tidak apa-apa. Badan itu udah biasa. Kalo sekarang khan jangankan satu jam beberapa menit aja kena angin, hujan badan dah menggigil. Dulu tidak tidur pake atap, pake apapun masih enak tidurnya. Sekarang harus pake selimut. (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Bapak lebih senang dimukimkan, dulu harus menggembara dari pulau ke pulau hanya untuk mencari ikan, kasihan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah dan lagi kalau gelombang besar bapak harus menepi perasaan kwatir dengan keselamatan keluarga, hidup jadi tidak tenang. (Mh, *Beneficiaries* program Sekaligus Wakil Ketua RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Ya lebih senang di sini (pulau Bertam) mbak (penulis). Anak-anak bisa sekolah, ndak kwatir ombak, badai. Lebih tenang mbak (penulis). (Tl, *Beneficiaries* Program, 17 Oktober 2010)

Dari beberapa informasi diatas mengisyaratkan bahwa warga akan lebih memilih untuk menetap permanen di dalam rumah dari pada hidup mengembara sebagai *sea-nomads* di perairan wilayah Batam. Kecenderungan ini didorong oleh kehidupan yang lebih stabil jika mereka tinggal secara permanen. Dengan kehidupan yang lebih stabil mereka dapat mewujudkan keinginannya untuk mempersiapkan masa depan generasi penerus terutama melalui pendidikan formal, menjaga keselamatan jiwa keluarga karena bisa terhindar dari bahaya keganasan cuaca laut. Pilihan ini juga dipicu juga oleh kondisi tubuh yang mulai beradaptasi dengan lingkungan darat sehingga tubuh akan mulai merasa sakit jika dalam waktu yang lama berada di lautan.

4.3.1.2. Dampak Budaya.

Akibat lain yang muncul dari pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam adalah mulai pudar bahkan hilangnya sebagian adat istiadat budaya warga Suku Laut, munculnya sikap ketergantungan akan bantuan, serta mobilitas Warga Bertam untuk menetap di pulau lain atau kembali hidup *nomaden* di lautan.

Komunitas Suku Laut merupakan komunitas adat (*indigenous people*) yang hidup selama berabad-abad sebagai warga asli Batam dengan tradisi dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dengan cara mewariskanya kepada generasi penerus. Salah satu budaya adat kesenian yang tumbuh dan besar dikalangan komunitas Suku Laut adalah kesenian “Jung, Silat dan Joget”. Namun demikian diantara kesenian adat tersebut ada yang telah punah bahkan sudah tidak lagi dikenal warga Suku Laut diantaranya adalah Silat, sebagaimana yang diungkap oleh informan (Tl) berikut ini:

Sejak di sini (Bertam) hiburan ya joget tidak ada lagi lain. (Tl, *Beneficiaries* Program, 17 Oktober 2010)

Terus kalo ada nonton “joget” yach disitulah habis duitnya nonton joget. Syukur ajalah sekarang bapak ini udah insyaf dulu ikut juga kesana.”(Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Informasi diatas menunjukkan bahwa Joget adalah satu-satunya hiburan yang masih ada disekitar warga Bertam. Informasi diatas juga menunjukkan bahwa hiburan “Joget” juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan perilaku boros dikalangan warga. Pudarnya tradisi budaya juga dideskripsikan oleh Informan (Bu) dalam karya tulis yang berjudul “Gambaran Suku Laut Pulau Bertam Sebelum dan Sesudah Dibina dan Dimukimkan” (1992, hal. 13) sebagai berikut:

kesenian suku laut mempunyai kesenian didapatinya apakah dari suku melayu maupun dari suku laut itu sendiri. Ini terlihat dalam kesenian joget, jung dan silat. Mereka selalu tampil dan tidak mau ketinggalan dengan orang-orang lain, sangat kita sayangkan salah satu kesenian mereka kini lenyap dari generasinya yaitu kesenian silat. Sedangkan kesenian Jung dan Joget masih membudaya baik di masyarakat lain maupun bagi Suku Laut itu sendiri. Bagi mereka kesenian atau hiburan Joget adalah salah satu sarana hiburan yang sangat digemari dan sangat menyenangkan, menurut kebanyakan suku laut Joget sekarang tidaklah seindah Joget-joget tempo dulu yaitu disekitar tahun enampuluhan. Karena Joget-joget tempo dulu masih mempunyai alat musik gong, biola dan gendang. Kini alat-alat tersebut sudah dihilangkan oleh para pemain atau para group Joget, diganti dengan alat-alat yang modern... sedangkan Jung adalah berupa perahu kecil berukuran 1x20 cm atau lebih, Jung tersebut terbuat dari kayu pulai dan diberi layar serta pemimbangannya. Jung ini sering diperlombakan ketika hari-hari besar nasional... Jung dimainkan di lautan tanpa memakai tekong pengemudi menuju ke garis finis yang ditentukan.

Dampak lain yang muncul dari aspek budaya adalah munculnya sikap ketergantungan warga terhadap bantuan. Sifat ketergantungan muncul diakibatkan karena beberapa pelaksana berpandangan bahwa komunitas adalah kelompok

lemah yang kurang mampu sehingga dalam pelaksanaannya mereka sering memanjakan warga dengan bantuan atau cenderung bersifat amal, sebagaimana informasi dari informan (Bu) dan (As) dibawah ini:

Kebiasaan untuk diberi akhirnya mereka manja dan tidak mandiri, nah kebiasaan orang yang manja dan tidak mandiri susah akhirnya seolah-olah dia bergantung sama ibu Sd. Yang saya takutkan saat ini sekarang kan mereka berobat kan gratis ya berobat di budi kemuliaan, kalau ibu Sd sudah meninggal orang di rumah sakit sudah tidak ada yang disegani kan itu kan, personalianya sudah diganti dan karyawannya juga sudah mungkin berubah begitu orang Bertam (Warga di pulau Bertam) datang kesana ndak kenal “ditolak” selama ini *oke* bu Sd masih ada mungkin dua bulan sekali datang kesana janganlah datang tiap bulannya, kalau ada masalah lah mandiri saja. Kalau begini ini mereka tidak bisa mandiri karena tidak ada pikiran untuk menabung..eh paling nanti kalo habis ya minta bu Sd paling begitu. Jangankan itu, tongkat rumah saja minta sama bu dar..tongkat rumah yang putus itukan dari kayu..didatangi bu dar, “bu tongkat rumah kami putus bu?” Minta dia sama bu dar..minta duit supaya dibelikan sama bu dar. Padahal dia tiap hari apa salahnya dia naik ke atas sebentar cari kayu nanti bawa pulang dan tancapin, tak ada. Itulah kekurangannya. (Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)

Sampai dengan penelitian ini dilaksanakan warga masih mendapatkan bantuan gratis dalam bidang pengobatan dari rumah sakit Budi Kemuliaan yang merupakan salah satu mitra dari KKKS Batam dan juga bantuan seragam, sepatu, buku sekolah dari Yayasan Keluarga Batam yang juga merupakan mitra KKKS Batam. Sifat ketergantungan akan bantuan tercermin dari ungkapan informan (Hs) dibawah ini:

Rumah ini di bangun oleh bu Sd (FKKS Batam). Tetapi sekarang ini khanda di serah kepada pemerintah. Tetapi pemerintah tak diolah-olahnya. Itulah yang buat kami pening (sakit kepala), pemerintah tak memerintahkan ini di buat sama Bu (Sd). Udah berapa puluh tahun rumah

ini di bangun. Inilah tahun berapa yach, dari tahun 1988. Yach khan itung sendirilah. Makanya kami minta kepada pemerintah di era Batam ini supaya ganti baru rumah ini, ini khan sama aja lumut dah rumah ini. Nah sekarang kami minta kepada pemerintah agar di ganti yang baru, macam ibu (Sd). Tetapi gak murni kayak ibu (Sd). Makanya kami meminta kepada pemerintah sekarang ganti yang baru macam ibu (Sd). Kasih Hak baru, jadi kita tau khan. Yakin kalo pemerintah kasih kita yang baru. Ini khan rumah ini hak punya ibu (Sd), kalo pemerintah hanya ganti papan 2, 3, 5 Itu khan berarti belum ada ikhlas hatinya memberi kita rumah.” (Hs, *Beneficiaries Program*, 19 Oktober 2010)

Dari ungkapan tersebut tersirat makna bahwa mereka masih berharap bahwa program pembangunan yang diberikan dari Pemerintah serupa dengan apa yang telah mereka peroleh pada saat program PKAT berlangsung. Pada saat program fasilitas prasarana dan sarana disediakan demikian juga dengan *suply* kebutuhan pokok.

Kondisi ini salah satunya disebabkan karena warga belum siap untuk menerima keadaan yaitu tidak lagi diterimanya segala fasilitas sarana dan prasarana hidup setelah program selesai dilaksanakan. Pelaksanaan program mempunyai batasan waktu (*terminasi*) sehingga ketika program dinyatakan selesai secara tidak langsung pembangunan sarana dan prasarana serta batuan juga terhenti, beberapa kegiatan tidak lagi diberikan untuk warga Bertam khususnya yang terkait dengan KAT karena secara formal oleh pemerintah mereka telah dinyatakan menjadi “masyarakat biasa” dan tidak dikategorikan lagi sebagai Komunitas Adat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini disampaikan oleh Informan (As) dan (Sn) dari Dinas Sosial Kota Batam, sebagai berikut:

Setelah mereka diserahkan, nggak lagi dikategorikan sebagai KAT. Karena mereka sudah disahkan bukan masyarakat adat terpencil lagi tetapi sudah menjadi masyarakat biasa, karena mereka sudah berhasil di rumahkan. (As, Kaseksi PKAT & Penyuluhan Sosial Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Kalo masyarakat Bertam sih sebenarnya dah dianggap seperti “masyarakat biasa”, yach tapi khan kembali ke mentalnya sih yach. Kalo jaman kami dulu sih mereka hidupnya dah bagus yach mereka di kasih rumah. Dulu khan pada saat jaman bu Dar (Ketua FKKS Batam) itu khan semua kebutuhan dari suku laut di penuhi dan di berikan. Kalau kita khan tidak. Kalau mereka dikasih bantuan terus kapan mereka bisa mandirinya. Karena dia tergolong dengan masyarakat miskin yach dari pemerintah dia juga dia pasti dapat bantuanlah. Seperti JPS, kalo dari Depsos yach seperti keluarga harapan, tetapi khan tidak semua program itu untuk masyarakat miskin ada juga kategori-kategori masyarakat yang mana yang akan di bantu. (Sn, Mantan Pendamping/ Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Untuk mekanisme yang diatur oleh pemerintah pada saat ini terkait dengan program pembangunan bagi masyarakat secara umum diajukan melalui musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan (An) yang bertugas sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan Informan (Za) yang merupakan sekretaris Kelurahan Kasu, seperti yang diungkap dibawah ini:

Seperti salah satu program untuk suku melayu sana, nah di satu pulau. Kalau Bertam sudah kita anggap sebagai “masyarakat biasa”, Yach kita khan seleksi siapa yang layak dan tidak untuk dapat bantuan. Biasanya dari Musrenbang atau reses Dewan. Sedangkan dari hasil Musrenbang itu sendiri khan ketahuan siapa yang mendapat bantuan dan siapa yang tidak. Kemudian nanti kita diputuskan kira-kira jenis bantuan dan pembinaan yang layak dan mereka butuhkan. Seperti disana di daerah nelayan, yach ada peternakan ikan, yach kita meminta dari orang perikanan untuk memberi penyuluhan terhadap mereka.”(An, Kabid Pemberdayaan Masyarakat, 14 Oktober 2010)

Sebetulnya kita kan tidak ada perbedaan, tapi karena mereka disana itu masih ada dua pengawasan yaitu Pemko Batam dan dari KKKS.. kalau dari

pusat biasanya melalui KKKS itu. Mereka langsung kesana, mereka langsung laporan saja. Sifatnya koordinasi saja K3S itu kan mereka sering mendapatkan bantuan dari BUMN atau swasta.”(Za, Sekretaris Lurah Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, 19 Oktober 2010)

Informasi diatas menegaskan bahwa setelah terminasi dilaksanakan maka program dinyatakan selesai, yang berarti bahwa pelaksanaan kegiatan diambil alih dari KKKS Batam kepada pemerintah. Oleh pemerintah, warga Bertam tidak lagi masuk dalam kategori KAT tetapi telah dianggap sebagai “masyarakat biasa”, sehingga untuk mendapat sebuah program pembangunan dari pemerintah maka warga Bertam harus terlebih dahulu mengikuti prosedur pengajuan program pembangunan salah satunya yang terpenting adalah pengajuan proposal. Proposal menjadi penting karena dari sana pemerintah dapat menganalisa kebutuhan dari warga Bertam. Sebagaimana diungkap lebih lanjut oleh Informan (An) dibawah ini:

Tetapi sekarang dengan adanya, otonomi daerah dan hasil musrembang. Nah, kalo bantuan yang diajukan itu tidak merata yach ketua RT atau Lurahnya yang dimarahin ama warga. Sekarang khan pulau Bertam sudah masuk dalam Kelurahan kasu. Yach... tinggal RT mengajukan kepada pihak kelurahan terus nanti akan diteruskan kepada tingkat kecamatan. Begitulah bisa dari Musrembang, bisa dari hasil *reses* dewan. Misalnya ada keputusan dewan yang mengatakan ini rumahnya ini rusak dan langsung di bantu yach kita turunkan. Atau pada saat pemilihan Walikota khan ada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), nah kita kemudian memasukan program itu selama 5 tahun. Misalnya mau membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.” (An, Kabid Pemberdayaan Masyarakat, 14 Oktober 2010)

Di Bertam dan gara ini kan ada RT/RW jadi apa kebutuhan mereka sudah data kemudian datang menyampaikan kebutuhan kepada kita “kami membutuhkan ini” jadi, mereka hanya menyampaikan nanti baru kita infentarisir baru setelah itu kita bawa ke kelurahan dan kecamatan tiga pulau

(Bertam, Gara dan Lingka) ini istilahnya daerah istimewa. jadi kalau baik dari kelurahan maupun kecamatan kita tidak *godog*, tetapi tetap harus ada tulisan prioritas kebutuhan mereka (proposal pengajuan). Jadi dari analisa kebutuhan mereka itu kita hanya memberikan rekomendasi nanti yang mengajukan mereka (warga tiga pulau). (Za, Sekretaris Lurah Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, 19 Oktober 2010)

Dari keterangan diatas bahwa analisis kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat diajukan melalui musrenbang. Kebutuhan digali dimulai dari musrenbang tingkat desa sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Hal ini searah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang “Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam” disebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah. Dan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Musrenbang tingkat Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). Hasil Musrenbang Kelurahan antara lain daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan, daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui alokasi dana desa secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya, daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai oleh APBD Kota dan Propinsi dan daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil musrenbang Kelurahan pada forum musrenbang Kecamatan.

Dalam lingkup Kelurahan sesuai dengan kausul diatas menunjukkan adanya peran penting dari *Stakeholder* dalam penentuan prioritas kebutuhan hasil dari

musrenbang kelurahan. Yang dimaksud dengan *Stakeholder* yaitu pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah. Sebagai unit terkecil dari susunan pemerintahan yang ada di kelurahan, peran Ketua menentukan terlebih dalam menggali prioritas kebutuhan warga sekitar. Demikian juga bagi warga Bertam, keberadaan Ketua RT merupakan kepanjangan tangan mereka untuk menyalurkan setiap aspirasi yang menyangkut kebutuhan pembangunan masyarakat Bertam.

Permasalahan yang terjadi adalah adanya disfungsi Ketua RT yang pada saat ini menjabat, dikarenakan secara fisik sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsi sebagai RT secara maksimal, sehingga mereka menjadi kesulitan untuk membuat dan mengajukan apa yang menjadi kebutuhan yang nantinya dituangkan dalam sebuah proposal analisis kebutuhan, kondisi ini juga disebabkan karena secara mayoritas tingkat pendidikan warga adalah rendah sehingga banyak dijumpai warga buta huruf. Akibat lebih lanjut tentunya program pembangunan saat ini sulit sekali tersentuh untuk warga Bertam. Sebagaimana yang diungkap oleh Informan (Mh), (Hs) dan (Ra) di bawah ini:

Bapak terus terang tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah RT sudah Bapak laporkan kepada Lurah, tapi belum dapat jawaban. Warga sudah mulai banyak melapor rumah sudah roboh, pelatar rusak tapi bagaimana lagi kalau RT tidak bisa bertindak. (Mh, *Beneficiaries* program Sekaligus Wakil Ketua RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Sudahlah semua sudah di bikin (Laporan tentang kurang berfungsinya RT 20 kelurahan Kasu) tetapi tidak ada jawabannya, pucuk-pucuk surat kita kirim tetapi tidak balasan. (Hs, *Beneficiaries* Program, 19 Oktober 2010)

Sebenarnya Lurah itu harusnya mengerti bahwa di daerah Pulau Bertam banyak masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Kalo mengandalkan keputusan dari masyarakat yach tidak bisa. Seharusnya melihat situasi dan kondisi ini Lurah lebih mengerti dan memperhatikan kesulitan suku laut yang tidak bisa baca tulis. Memang sih sekarang telah jaman maju. Di Setiap RT dah ada Ketua dan Sekretarisnya. Tetapi semua itu tidak ada

gunanya. Tidak pernah sekalipun masyarakat mengadakan rapat, kumpul untuk membicarakan sesuatu. Bahkan RTnya aja dah hampir 10 tahun tidak pernah di ganti. Bapak ini dah berbuih (sering) datang kepada Pak Lurah melaporkan. “Pak kampung saya begini-begini kejadiannya”, tetapi pak Lurahnya hanya mengatakan “yach nantilah akan diurus” yach begitu-begitu aja, nanti dan nanti terus kapan nantinya entah Bapak Juga tak tahu. Bapak tidak bisa berbuat biarpun Bapak seorang sekretaris RT ini khan kepentingan masyarakat. Makanya bapak bilang siapa yang bisa nulis, bisa baca tolonglah ditulis karena Bapak tidak bisa baca tulis.” (Ra, *Beneficiaries Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam*, 15 Oktober 2010)

Beberapa Informasi tersebut mendeskripsikan kurang berfungsinya Ketua RT setempat. Kondisi ini disebabkan secara kesehatan dan fisik RT sudah tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai Ketua Rukun Tetangga. Informasi diatas juga menunjukkan bahwa warga telah berupaya menginformasikan kondisi yang telah terjadi kepada Lurah setempat namun belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan warga. Kondisi yang kurang harmonis antara warga dan pejabat Kelurahan turut menjadi sebab kurangnya kepedulian pejabat terkait dengan kondisi warga di pulau Bertam. Kondisi ini ditanggapi oleh Informan (Za) yang menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Kasu sebagaimana berikut ini:

Disetiap RT itu punya masa jabatan, Bertam RT 20. Kalau RT karena RT periode; periode pertama 3 tahun. Waktu itu sebelumnya jabatan RT masih di tunjuk jadi periode ini. Penggantian tunggu periode sampai februari. Tidak ada hal khusus karena suatu hal RT bisa diganti. Jadi kita berpedoman pada periode, kita punya SK. Yang masuk SK hanya RT saja sehingga alokasi anggaran juga hanya untuk Ketua RT. (Za, *Sekretaris Lurah Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam*, 19 Oktober 2010)

Dari Informasi diatas menjelaskan bahwa masa Jabatan bagi Ketua RT berlangsung selama 3 tahun masa jabatan, dan selama masa jabatan tersebut tidak

dapat dilakukan pergantian pejabat meskipun terdapat kondisi khusus yang bisa menyebabkan terjadinya pergantian Ketua Rukun Tetangga (RT). Merujuk pada keterangan informan (Za) bahwa Surat Keputusan yang dimaksud yaitu Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kasu No. Kpts./KKS/VII/2010 tertanggal 17 Juni 2009 tentang “Pembentukan dan Pengangkatan Ketua RT/RW dalam Wilayah Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang-Kota Batam”. SK tersebut dibuat dengan mempertimbangkan: 1. Bahwa untuk melengkapi Organisasi Aparatur Pemerintahan dalam wilayah Kelurahan Kasu perlu dibentuk wadah kelembagaan RT dan RW dibawah koordinasi Lurah Kasu Kecamatan Belakang Padang. 2. Untuk keperluan tersebut, perlu menunjuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas Administrasi Kependudukan di wilayah Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang.

Dari kausul yang tercantum dalam SK diatas bahwa RT dipilih dari mereka yang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk melaksanakan tugas administrasi Kependudukan serta mempunyai fungsi tertentu yang menyangkut tugas dan kewajibannya sebagai Ketua RT sehingga jika dikemudian hari tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam kausul diatas sudah menjadi kewajaran jika yang bersangkutan dapat diganti dengan mereka yang lebih mampu dan cakap.

Tidak berfungsinya ketua RT menyebabkan program pembangunan khususnya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat belum secara maksimal diserap warga Bertam, hal ini seperti diungkap oleh Informan (An) dibawah ini:

Untuk bantuan pinjaman modal dari program pemberdayaan di Bertam karena masuk dalam wilayah Kelurahan Kasu, prioritas kita berikan sesuai dengan proposal yang diajukan. Untuk Kelurahan Kasu tahun 2005 hanya ada 1 UKM yang mendapatkan Kredit Bantuan Modal, kalau warga Bertam sampai saat ini belum ada yang mendapatkan bantuan pinjaman modal. (An, Kabid Pemberdayaan Masyarakat, 14 Oktober 2010)

Munculnya Sifat ketergantungan yang melekat pada diri warga serta kualitas SDM yang rendah menyebabkan sebagian warga pindah dari permukiman antara lain di pulau Lingga juga pulau Batam, dan juga memunculkan keinginan untuk kembali menjalani kehidupan sebagai Suku Laut yang nomaden, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan (Sn) dan (Hs) dibawah ini:

Nah terus ada dari mereka (warga Bertam) ada yang pindah juga, yach maksudanya pindah ke pemukiman pemerintah juga. Waktu itu khan masih Kabupaten Tanjung pinang, sekarang masuk daerah Lingga. Nah disitu ada pemukiman yang di bangun oleh Pemerintah. Nah disana juga ada teman (dari Depsos RI) saya yang bisa di kontak terus saya tanyain “ pak, si ini ada disana yach”. Jadi karena dah ada yang kenal dan dah tau lama jadi saya bisa tau kalo ada masyarakat suku laut yang pindah. Jadi saya bilang kepada suku laut, kemana-kemana perginya kalian saya taulah. Ada juga pak Jalal yang pindah ke Batam, rumahnya sepertinya masih kosong. (Sn, Mantan Pendamping/Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Jadi kalo pemerintah sekarang yach deh, tidak kuat menyusun kita suku laut yach kita balik ke laut lagi. Kalo pemerintah tidak kuat memimpin kita yang lemah.. Yach kita *hijrah* (pindah) ke asal lagi lah. Orang kita ini masih kuat turun laut. Yach bisa pindah ke laut lagi seperti yang lain. (Hs, *Beneficiaries* Program, 19 Oktober 2010)

Informasi diatas menunjukkan adanya keinginan warga kembali menjalani kehidupan nomaden di laut jika pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan warga. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan perlakuan yang diterima warga pada saat program PKAT dilaksanakan dan setelah program selesai. Dimana ketika program berjalan bantuan banyak diterima dan setelah terminasi bantuan banyak yang dihentikan, sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek Budaya pelaksanaan program PKAT pada Komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam cenderung bersifat negatif.

4.3.1.3. Dampak Lingkungan.

Dampak lingkungan menyangkut keadaan lingkungan disekitar permukiman, salah satunya terkait dengan Model perumahan dan bentuk MCK yang digunakan oleh warga. Bentuk rumah semi permanen darat dengan pancang-pancang penyangga rumah ternyata membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi ini terjadi disebabkan karena bentuk rumah serta MCK tersebut memicu kebiasaan warga untuk membuang sampah rumah tangga langsung di bawah rumah dengan harapan sampah dan kotoran tersebut akan hilang terbawa air surut dari air pasang yang menggenangi permukiman warga sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Informan Nm berikut ini:

Sampah dibuang saja di bawah (rumah) nanti hilang dibawa air laut. (Nm, *Beneficiaries* Program, 16 Oktober 2010)

Bentuk MCK yang digunakan warga dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4.16. Bentuk MCK Warga Bertam-Kota Batam
Sumber: Dokumentasi Penelitian, Oktober 2010.

Dari deskripsi diatas menunjukkan bahwa dengan model rumah semi permanen di darat dan bentuk MCK yang juga merupakan *out put* pada saat pelaksanaan program menyebabkan pencemaran lingkungan disekitar perumahan, hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program berdampak negatif terhadap lingkungan khususnya lingkungan disekitar permukiman warga Bertam.

4.3.1.4. Dampak Ekonomi.

Dampak ekonomi terjadi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kondisi lingkungan terutama perairan pulau Batam khususnya sekitar pulau Bertam yang sudah tercemar. Suku laut hidup dengan menggantungkan diri pada

satu-satunya pekerjaan yang dimiliki yaitu sebagai nelayan. Kondisi pencemaran laut tentu saja berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan mereka, sebagaimana yang diungkap oleh Informan (Ol) dibawah ini:

sekarang ada masih bertahan di Bertam bulan Oktober harusnya sudah sampai tanjung pinang. Bagaimana mereka akan ke tanjung pinang sedang mereka masih di Bertam karena anginnya sudah lain, mereka lawan angin bisa-bisa mereka diseret kemana-mana, ndak bisa dayung nggak akan kuat itu angin terasa keras. Sekali tahan mereka satu bulan jelas akan tertahan perjalanan mereka satu tahun...nah makan apa mereka sekarang..makan apa yang ada di sekitar Bertam yang bisa mereka dayung.. cari makan... dapat ikan secukupnya.. iya kan ndak bisa lagi banyak ikan lah.. ndak bisa lagi banyak-banyak ikan lah cam mana pula sudah berbagi polusi dan sebagainya. Disamping banyak nelayan yang amatir dan sebagainya... sudah banyak persaingannya cari ikan. (Ol, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Sebagai *sea-nomads* tentu saja memudahkan mereka untuk memperoleh ikan disepanjang wilayah yang mereka lalui. Keadaan ini berbeda yang terjadi setelah dimukimkan, wilayah jangkauan perairan yang menjadi ladang untuk mencari ikan menjadi semakin sempit hal ini diperparah dengan adanya polusi yang berasal dari industri perkapalan yang ada disekitar pulau Bertam akibatnya tangkapan nelayan semakin menyusut. Hal ini juga diungkapkan oleh Informan (Nm) dan (Ra) dibawah ini:

Dulu yach, sewaktu saya masih sekolah pulang sekolah itu kita dah turun ke laut, 2 ember besar yang biasa kita bawa-bawa itu sebentar aja udah penuh sekali. Sekarang mau ditungguin beberapa jam bahkan seharian pun tidak banyak tangkapan malahan pulang tak bawa apa-apa. Sekarang susah sekali. (Nm, *Beneficiaries* Program, 16 Oktober 2010)

Nah ini karena laut di pulau Batam ini pencemarannya dah luar biasa. Dulu orang dari kota senang aja turun ke laut. Sekarang tak ada lagi bukan apa-apa setelah dari laut kakinya dah gatal-gatal. Sekarang turun sebentar dah

gatal. Itulah imbasnya air industri itu. Apalagi kalo musim hujan. Air laut kita ini udah kuning-merah. Nah air limbah itu larinya kesini. Memang kondisi sekarang udah parah. (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Pencemaran air laut menyebabkan berkurangnya habitat ikan sehingga secara tidak langsung juga mengurangi tangkapan warga Bertam. Sebagaimana diketahui bahwa pekerjaan utama sebagian besar warga adalah nelayan sehingga banyak sedikit hasil tangkapan yang diperoleh akan berdampak pada hasil pendapatan keluarga. Semakin sedikitnya tangkapan ikan di perairan Bertam dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelum bermukim di Bertam membuat sebagian besar warga melakukan kegiatan “Bertandang”, seperti yang diungkap oleh Informan (Tl), (Hs) dan (Mh) dibawah ini:

Tak mungkin mengandalkan lagi laut di Bertam mbak (penulis). Kalo kita bertandang ya sama istri, sama anak tertua. Ya anaknya yang dayung, bapaknya yang nombak. (Tl, *Beneficiaries* Program, 17 Oktober 2010)

Itu tv sudah lama, saat pendapatan masih banyak. Itupun karena “bertandang” jauh, sampai ke Riau. Jadi dapat banyak duitnya bisa “bertandang”. (Hs, *Beneficiaries* Program, 19 Oktober 2010)

Warga kita orang Nelayan ya.. keahlian dari dulu nelayan, jadi bagaimana ya nak pindah kerja juga susah dibuatnya. Misalnya dari Perhimpunan Nelayan berusaha minta bantuan ke PT-PT (yang dimaksud adalah perusahaan) didekat sini khususnya yang dekat Bertam, PT-PT itu yang menyebabkan tangkapan ikan jadi berkurang, suara bisingnya, apa itu.. limbahnya yang dibuang. Dari situ ada 4 Warga yang bisa masuk kerja di sana tapi mereka tak mau melanjutkan kerja mereka bilang tak cocok dengan kerja yang diberikan balik lagi mereka cari ikan. Ya itulah lebih baik bertandang dapat ikan dapat hasil. (Mh, *Beneficiaries* program Sekaligus Wakil Ketua RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Hal ini dibenarkan oleh Informan (Sn) yang merupakan salah satu *community Worker* yang bertugas pada saat program PKAT berlangsung, seperti yang diungkapkan berikut ini:

Mereka khan tidak selalu melaut disekitar situ (perairan Bertam), mereka berpindah-pindah. Kadang-kadang mereka pergi di belakang padang dan mereka sebut itu bertandang, ke batu besar, ke galangan sana, yach kalo dapat tangkapan disana yach mereka menjual disana. Bertandang artinya pergi mencari ikan selama beberapa hari bahkan bisa berbulan-bulan disana dan atau berpindah-pindah setelah itu nanti baru pulang. (Sn, Mantan Pendamping/Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Bertandang yaitu kegiatan pergi beberapa hari bahkan bulan meninggalkan pulau Bertam ke pulau-pulau lain di sekitar kepulauan Riau untuk mencari ikan. Dengan kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan warga Bertam namun demikian jika dilihat dari aspek pendidikan anak berakibat negatif karena kegiatan ini cenderung mengikutsertakan seluruh anggota keluarga tak kecuali dengan anak mereka yang masih bersekolah. Sehingga selama ikut bertandang mereka menjadi membolos akibatnya akan ketinggalan beberapa matapelajaran yang harus mereka pelajari.

Dari deskripsi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak dari pelaksanaan program dari aspek ekonomi adalah berkurangnya pendapatan warga diantaranya diakibatkan oleh kondisi pencemaran yang terjadi di perairan pulau Batam salah satunya berasal dari industri perkapalan yang ada di sepanjang pesisir pulau Batam yang berjarak dekat dengan perairan pulau Batam, atau secara tidak langsung berdampak negatif secara ekonomi. Di sisi lain munculnya kebiasaan “bertandang” akibat tangkapan ikan yang mulai berkurang di perairan Bertam juga menimbulkan dampak negatif lain terutama dari bidang pendidikan atau dampak negatif aspek personal karena kegiatan bertandang cenderung mengikutsertakan anak-anak mereka yang masih mempunyai kewajiban untuk bersekolah.

4.3.1.5. Dampak Sosial Politik

Dampak sosial politik yang muncul dari pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam yaitu munculnya kesadaran warga Bertam akan hak kepemilikan tanah, terutama setelah warga berada di permukiman Suku Laut di Bertam. Permasalahan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Informan (Ra) dan (Hs) seperti dibawah ini:

Kalau dibalik sananya (Sebagian sisi lain dari pulau Bertam) itu semua tanah perkebunan orang tidak ada penghuninya, yang dibelakang ada alurnya kalau mau ke Kasu menjorok ke sana. Didalamnya hutan ada juga yang menempati tapi bukan dari Bertam.. dianya orang kasu orang kebonnya dia berladang. Dia punya lahan lama, jadi dia tanami pohon karet, pohon rambutan.. termasuknya jengkol. Duluan mereka kesini, mereka tu sudah lama di pulau kasu.. dulu bapak masih terapung-apung masih dulu di laut. Maksudnya perkebunan orang kasu itu yang ada di Bertam ini kita kan hanya numpang didepan saja. Di hutan sana ada tanah miliki orang sana orang kasu, jadi ndak boleh kita ambil tanah orang. Pulau Bertam ini banyak tanah memang.. tanah kosong.. tanah orang bukan tanah kita. untuk bisa masuk ke wilayah Bertam tidak terbatas bebas cumakan kalau kita mau tanam ndak boleh kita. Orang sini ada sebagian ada sertifikat tanah. Ndak tahu bapaknya darimana dapat sertifikat tanah.. orang sini disuruh mengajukan ke pak Lurahnya diukur dari kasu atau dari mana saya kurang tahu. (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

Bapak belum ada sertifikat tanah, tapi Bapak punya tanah. Kalo nggak salah 70 hektar tanah di kasih kepada suku laut ini. Masih hidup bu Darsono tanyalah. Memang tidak kuat kalo tak ada surat, tetapi bagaimana kemaren disuruh buat surat tetapi kami tidak tau bagaimana buat surat. Tetapi kami tidak bisa. Jadi khan kalo kebun-kebun sendiri dah pandailah udah ada di buat sendiri. Tetapi hak tanahnya kita nggak tau, kita hanya hak pakai.

Bapak sudah bilang sama lurah “buatkan kami yang gratis” tapi belum ada jawaban. (Hs, *Beneficiaries* Program, 19 Oktober 2010)

Informasi diatas menunjukkan bahwa saat ini warga mulai sadar akan hak kepemilikan secara sah dari tanah yang telah menjadi miliknya. Pulau Bertam sendiri terbagi atas dua kepemilikan, yaitu sebagian hutan milik warga pulau Kasu dan sebagian lain milik warga Bertam. Dilihat dari sejarahnya, warga pulau Kasu lebih dulu memiliki hak atas tanah baru kemudian dibuka permukiman di Bertam yang ditempati warga Bertam saat ini. Dari Informasi diatas, warga juga paham dan sadar dengan batas-batas kepemilikan tanah yang menjadi hak miliknya, mereka juga menghormati hak warga lain atas kepemilikan tanah yang ada.

Permasalahan tanah ini pada saat program berlangsung telah mengantisipasi oleh pihak pelaksana dengan membagi lahan menjadi beberapa petak sebagai bukti sah kepemilikan warga atas tanah yang bersangkutan namun demikian kepemilikan tersebut belum disahkan secara hukum dalam bentuk sertifikat kepemilikan tanah, sebagaimana yang diungkap oleh Informan (Sd) dan (Ol) dibawah ini:

Oya, tanah saya bagi..ini bagian si a, ini bagian b ada surat-suratnya. Coba hubungi Ol dia yang pegang. Cuma, saya buat disahkan camat kalau secara resmi belum lah. Dari camat sudah cukup kuat. (Sd, Ketua FKKS/ KKKS Batam, 14 Oktober 2010)

Ada surat-suratnya..kebon anu seluas ini..kebon anu ini..kan saya buat mereka jelas mereka punya. Saya pun ada tanah di situ, nggak sampai sertifikat hanya alas hak lah namanya.. terlalu jauh mereka punya sertifikat.. sedangkan mereka saja punya rumah saja masih ada air di bawahnya konon. Kalau punya sertifikat di darat bingung lah. Nah pada saat saya di sana a.. itu surat sampai camat lah.. itu kan sudah sangat kuat di kepulauan-kepulauan ini.. nah kalau di jawa iya lah.. sertifikat dari nenek kakek dan segala macam. Jadi kalau di dinas pertanahan.. mereka tidak tahu (pembagian kepemilikan lahan di Bertam). Kalau di camat baru mereka punya. Ada 5 orang yang punya (Sertifikat Tanah). Tentulah sudah saya

ajarin (Prosedur pembuatan Sertifikat Tanah). Kalau punya tanah.. surat *tebas* dari RT, RW, ke Lurah sampai ke Camat... itu sudah lewat kalau itu di sini..sedang surat *tebas* yang sudah kumal..kumal pun bisa laku.. tidak pakai tanda tangan.. pakai cap itu... RT, RW, Camat, lurah. (Ol, Mantan Pendamping/Peksos FKKS, 23 Oktober 2010)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa pengesahan *legalitas* kepemilikan tanah bukan menjadi salah satu prioritas pada saat program PKAT pada komunitas Suku Laut dipulau Bertam berlangsung. Namun demikian kepemilikan tersebut tidak dibuat secara formal dengan pengesahan dari petugas pemerintah yang berwenang, sehingga kepemilikan tanah tersebut masih menjadi *problem* bagi warga Bertam, seperti yang diungkap oleh Informan (Nm), (Ra), dan (Hs) dibawah ini:

Sebenarnya masalah disini hak tanah. Iya, hak atas tanahnya ini yang susah. Biayanya mahal sekitar 500 ribu. Sebenarnya nggak apa-apa kalo pemerintah mau bangun pabrik disini, asal anak suku laut jangan di pindahkan dan dikasih pekerjaan. (Nm, *Beneficiaries* Program, 16 Oktober 2010)

Saya ada tanah juga mbak Norma satu. Bapaknya satu tapi ndak diurus sertifikat tanah. Di mesjid ni mbak norma punya dari masjid ke bawah itu semua ditanami semua tapi sekarang sudah semak-semak pulanya. Juga sebagian warga Kasu pun semuanya sudah tau. Sertifikat belum turun. Nah, itulah susah sekali. Jangankan mengurus sertifikat tanah untuk mengurus KTP aja beberapa orang di kelurahan kasu tidak selesai, susah kita. Bayangkan udah berapa kali bapak meminta surat keterangan untuk mengurus KTP penduduk, udah berapa banyak uang warga di sana. Tetapi sampai sekarang belum juga ada diberesin. Jawabnya selalu, nanti, nanti dan nanti. Emang kita gak butuh ongkos datang ke lurahan sana. Emang pancung itu bisa jalan kalo pake air. Nah itulah kadang-kadang yang kita tidak mau. Sampai sekarang uang warga ada 450ribu di sana di kelurahan

kasu. (Ra, *Beneficiaries* Program Sekaligus Sekretaris RT 20 Bertam, 15 Oktober 2010)

mau kita seperti itu dari dulu. Boleh bangun apa saja, trus kita orang suku laut tidak dipindahkan dan dikasih kerja. Karena kita juga nggak pernah kerja. Paling kalo ada bangunan khan bisa ikut. Karena hasil laut juga dah susah. Kalo tak ada surat bagaimana kita nak bisa tinggal lama (di Bertam). (Hs, *Beneficiaries* Program, 19 Oktober 2010)

Kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi diatas adalah bahwa salah satu faktor penting yang perlu untuk dipertimbangkan sebelum proses terminasi dilaksanakan adalah kualitas Sumber Daya Manusia, dengan keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya dilihat dari aspek pendidikan yang rendah warga Bertam sulit untuk menyalurkan aspirasi mereka karena secara teknis mereka kesulitan untuk membuat proposal yang merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan program pemerintah, sehingga dalam beberapa kebutuhan warga Bertam kurang tergali akibatnya beberapa program pembangunan tidak secara maksimal dapat diserap terutama untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhan warga Bertam, serta dengan adanya permasalahan hak kepemilikan warga Bertam yang belum mendapat mengakuan secara sah dari perangkat hukum dapat dikatakan bahwa implementasi program berdampak negatif terhadap bidang sosial politik. Namun demikian dilain pihak dapat juga dikatakan bahwa dengan munculnya kesadaran warga akan hak kepemilikan menunjukkan bahwa mulai bisa menyuarkan hak milik pribadinya sehingga dalam hal ini berdampak positif pada aspek sosial politik.

4.3.2. Dampak Tidak Langsung di luar Komunitas Suku Laut di Bertam.

4.3.2.1. Dampak Ekonomi

Dampak pelaksanaan program terhadap masyarakat di luar komunitas Suku Laut di pulau Bertam dapat dirasakan khususnya dari para pelaksana program, yaitu Organisasi FKKS Batam dan Pendamping Program (*Community Worker*). Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa dampak yang dimaksud lebih cenderung dari aspek Ekonomi dan bersifat positif.

Dampak ekonomi dari pelaksanaan program bagi FKKS Batam terkait dengan masukan pendanaan, pendanaan bagi organisasi sosial merupakan sumber daya yang dapat memperlancar berjalannya kegiatan organisasi sekaligus eksistensi organisasi. Bagi FKKS/ KKKS Batam, program suku laut di pulau Bertam merupakan salah satu sumber daya yang bermanfaat untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga lain yang mempunyai tujuan yang terkait dengan program. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan (Sn) dan (Bu) dibawah ini:

Program ini sampai juga ini di Belanda ini.. program ini bukan hanya yang ada di Bertam saja program ini di bawa ke Belanda ..ya mereka tahunya disini. Dengan adanya seperti ini membuat brosur seperti ini banyak pendatang wisatawan datang dengan bu Sd.. mereka dapat duit bu Sd (ketua KKKS Batam). (Sn, Mantan Pendamping/ Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Pemerintah kan terbatas dananya paling bagian-bagian jalan, jembatan, kalau rumah paling-paling hanya sekedarnya saja lah kalo umpamanya bangunan itu.. paling hanya seng... kalau bu Sd beda maunya diberikan rumah dari atas sampai bawah rumah dikasih semua..manalah ada dana kayak gitu.. ya pingsan lah ibu Sd kan makanya ibu Sd menjual mereka kan wajar kan ibu Sd menjual mereka (Suku Laut di Bertam) dan mereka (Suku Laut di Bertam) bilang “wajar saya meminta karena saya dijual” kalau ada orang minta berfoto maka dia akan minta duit... saya pernah bilang “janganlah begitulah jangan minta uang kalau berfoto” “ah ibu Sd saja jual kita (Suku Laut di Bertam)”, gimana lagi ya ?. (Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)

Dari ungkapan diatas menunjukkan bahwa dengan mempromosikan salah satu kegiatan yang sedang dilaksanakan, KKKS Batam mendapatkan kepercayaan dari lembaga donor baik dalam maupun luar negeri untuk mengelola kegiatan yang diperuntukkan bagi warga Bertam. Hal ini secara tidak langsung

memperlancar kegiatan yang terkait dengan program. Dengan keberhasilan program juga dapat meningkatkan eksistensi organisasi sebagai lembaga yang bertujuan memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat khususnya masyarakat di Wilayah Batam dan lebih khusus untuk warga Bertam.

Namun demikian informasi diatas juga menunjukkan bahwa kegiatan mempromosikan komunitas Suku Laut yang ada di Bertam oleh FKKS Batam juga mendorong munculnya kesadaran warga Bertam bahwa dirinya mempunyai nilai jual tinggi yang dapat menghasilkan uang, akibat dari tindakan ini cenderung memicu timbulnya sikap mengharap akan imbalan untuk mendapatkan uang tanpa kerja keras, atau dapat dikatakan memicu munculnya dampak negatif aspek budaya.

Sedangkan bagi pendamping program, pelaksanaan program membawa berkah tersendiri bagi peningkatan kehidupan mereka. Dari kesabaran mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga pada saat penelitian ini dilaksanakan para petugas memperoleh manfaat dari tugas yang telah dijalani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan (Bu) dan (Sn) dibawah ini:

Saya dari Bertam inilah hasilnya (Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Tata Usaha di MTsN Batam) kalau disana itu harus seratus persen ikhlas, kalau hanya lima puluh saja tergoda pasti ilang... karena di batam ini kan godaannya besar..orang seluruh Indonesia ini kan datang ke Batam..saya juga ditempa dari pondok, tidak mulus sekolah saya.. putus putus sekolah saya..hingga saya terakhir di Ibnu Sina (Menamatkan Pendidikan di jenjang Strata 1). (Bu, Mantan Pendamping/Guru Agama Depag Kota Batam, 25 Oktober 2010)

Setelah bertugas di Bertam, banyak yang didapat.. saya bisa melanjutkan lagi kuliah di STKS Bandung. Untuk tugas akhir saya mengambil judul pemberdayaan di pulau Bertam.. dosennya *killer* waktu itu.. hampir saya tidak lulus karena saya kerjakan itu hanya tiga bulan sudah selesai. Dosen saya bilang”apa ini man (panggilan informan) hapir kau tak lulus sidang tadi tapi setelah lihat tugasmu disana bertahun-tahun.. lulus lah kau”. (Sn,

Mantan Pendamping/ Satgasos BMT Sekaligus Kasub Perencanaan & Evaluasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 13 Oktober 2010)

Informasi diatas menunjukkan bahwa ketekunan dan ketulusan petugas dalam menjalankan kewajiban mereka di pulau Bertam membuka kesempatan tersendiri bagi warga untuk meningkatkan pengetahuan dengan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan hidup yang bersangkutan.

BAB 5

PEMBAHASAN

Bab pembahasan merupakan bagian inti dari penelitian yang telah dilakukan yang akan menguraikan pembahasan terhadap temuan-temuan di lapangan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 3 dan Bab 4. Temuan-temuan tersebut berasal dari wawancara yang telah dilakukan yang kemudian dianalisa dengan didasarkan pada tujuan penelitian sebagaimana yang dipaparkan dalam Bab 1 serta kerangka pemikiran dan teori-teori yang digunakan sebagaimana diungkapkan dalam Bab 2.

5.1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam - Kota Batam.

Batam merupakan wilayah perbatasan yang membatasi antara negara Indonesia dengan negara Singapura. Melihat posisi strategis pulau Batam, kemudian pada era tahun 1978 pemerintah menetapkan pulau Batam sebagai *Bonded Zone Island* yang berfungsi sebagai pusat pengembangan industri lepas pantai dan penunjang Migas. Guna melengkapi fasilitas sarana dan prasarana penunjang maka sejak tahun 1983 sampai 1997 digalakkan pembangunan fisik di pulau Batam hingga berubah menjadi kota industri, alih kapal, Pariwisata dan Jasa. Perubahan pesat atas pembangunan yang terjadi di wilayah pulau Batam ternyata belum sepenuhnya menyentuh kehidupan warga pribumi yang mendiami wilayah Batam, salah satunya komunitas Suku Laut (Bab 3, hal.114).

Kehidupan suku laut yang hidup nomaden di sepanjang wilayah perairan Batam dengan sebuah sampan kecil beratapkan rumbia/kajang berukuran $\pm (5 \times 1\frac{1}{2}m)$ mereka hidup bersama dengan anak-anak mereka, dengan rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga antara 5 s/d 7 orang. Kehidupan yang dijalani cenderung mengancam jiwa karena bisa jadi tiba-tiba ombak besar datang, juga angin kencang yang dapat menghancurkan sampan-sampan kecil tempat tinggal suku laut sehingga mengharuskan mereka mendarat untuk mencari perlindungan, kondisi cuaca ini juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi dikalangan warga. Selain juga banyak didapati anak-anak suku laut yang tidak

mengenal pendidikan akibat hidup nomaden di laut. Pekerjaan utama mereka sebagai nelayan dengan alat tangkap sederhana yang digunakan seperti tombak, pancing, dan *bubu*. Alat tangkap sederhana ini menyebabkan hasil tangkapan ikan dalam kondisi rusak akibatnya beberapa tangkapan menjadi tidak laku untuk dijual dan pendapatan mereka menjadi berkurang. Hasil tangkapan ikan nantinya akan dijual kepada *tauke* yang ada di Singapura, interaksi yang terjalin tersebut menyebabkan banyak dari suku laut yang melintas batas negara tanpa menggunakan prosedur resmi sehingga berpengaruh terhadap stabilitas keamanan negara (Bab 4, hal. 140-141).

Keterbatasan hidup yang dialami oleh Komunitas Suku Laut jika merujuk pada kategorisasi KAT berdasarkan aspek karakteristik, tempat tinggal atau habitat dan sistem mata pencahariannya oleh Direktorat Pemberdayaan KAT Departemen Sosial RI termasuk dalam kategorisasi Kelana II (menetap sementara), dimana secara habitat mereka masih hidup berpindah menetap dalam kondisi yang sangat sederhana, dengan menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana yang didapat dari luar komunitas mereka, hidup masih berpencar dan berpindah dalam jumlah kecil dalam orbitasi tertentu, dan sudah ada kontak (interaksi) dengan dunia luar dari komunitas mereka (Bab 2, hal. 40).

Dengan berdasar pada keterbatasan kondisi hidup suku laut kemudian pihak Depsos RI melalui Direktorat Bina Masyarakat Terasing sebagai pelaksana teknis pusat dan Kanwil Depsos Prop. Riau sebagai pelaksana teknis daerah bekerjasama dengan Organisasi Sosial Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam sebagai pelaksana Utama Operasional Implementasi program mengupayakan usaha pemberdayaan yang merupakan bagian dari perangkat kebijakan negara (*State Obligation*) mengarah pada peningkatan kualitas hidup komunitas Suku Laut, searah dengan pandangan Suharto (Bab 2, hal. 41) dengan nama program Pembinaan Suku Laut di Pulau Batam yang merupakan bagian dari program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT) yang saat ini berubah nama menjadi program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) (Bab 4, hal.120).

FKKS sendiri merupakan organisasi sosial yang terbentuk pada tanggal 04 April 1986 dari hasil musyawarah 27 organisasi sosial yang ada di Batam, sebagai aktualisasi mereka ikut berperan dalam pembangunan serta mempunyai kebutuhan yang sama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sosial. Berdirinya FKKS Batam mendapat pengakuan berupa Surat Keputusan dari Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam No. 3148 A/Kep/KA/VII/86 serta diresmikan oleh Menteri Sosial pada kunjungan kerja di pulau Batam pada tanggal 6 Mei 1986. Kemudian pada tahun 1993 menjadi Badan Khusus dengan mengubah namanya menjadi Badan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Batam (Bab 3, hal. 116).

Pemilihan FKKS Batam sebagai pelaksana utama program dengan didasari pada pertimbangan kondisi internal dan eksternal Depsos RI, yaitu kurangnya sumber daya yang dimiliki Depsos dalam hal pendanaan juga dikarenakan tujuan, peran dan program kerja dari organisasi FKKS Batam dalam memberikan pelayanan sosial khususnya kepada komunitas Suku Laut yang berada di wilayah Kota Batam (Bab 4, hal.124-125).

FKKS Batam dibentuk dengan Tujuan, yaitu: a. Terciptanya mekanisme pengendalian terhadap berbagai kegiatan sosial di daerah Batam, b. Terbentuknya kesatuan gerak untuk mengisi kesenjangan antara kemampuan penanganan dengan besaran permasalahan sosial yang dihadapi, c. Terciptanya keseimbangan antara pembangunan pulau Batam sebagai kawasan industri, alih kapal, basis logistik dan pariwisata di satu pihak, dengan pembangunan kesejahteraan sosial pada sisi lain. Sedangkan peran FKKS Batam adalah sebagai: 1. Wahana komunikasi antar kegiatan di bidang kesejahteraan sosial, 2. Jembatan antara pemerintah dan masyarakat, 3. Koordinator, pembinaan dan pengawasan kegiatan sosial di daerah Batam. Disamping itu FKKS Batam menetapkan pemberdayaan komunitas suku laut sebagai salah satu program utama pelayanan sosial yang akan dilaksanakan. Keputusan ini didasarkan pada hasil Musyawarah Kesejahteraan Sosial (MKS) yang dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 November 1986 dengan

agenda “penguatan program kerja FKKS 1987 s/d 1993” dihadiri dan dibuka oleh Ibu Mensos RI (Bab 4, hal.125).

Landasan Hukum Program Pemberdayaan komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam dilatarbelakangi oleh disahkannya kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pola penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Departemen Sosial RI melalui program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT). Dalam tataran implementatif program ini mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur (tata nama) dari awal kali pertama disebut dengan istilah “Suku Terasing”, kemudian “Masyarakat Terasing” hingga kemudian pada tahun 1992 disebut sebagai “Komunitas Adat Terpencil” sesuai dengan Kepres. RI No. 111 tentang “Pembinaan Kesejahteraan Sosial KAT (Bab 2, hal. 37).

Perubahan ini dilakukan tidak secara serta merta, tetapi dengan melalui pengkajian dan evaluasi terhadap program sebelumnya. Yang berarti bahwa dalam pelaksanaan terdapat pembaharuan dan perbaikan metode dan penanganan. Demikian juga dengan perubahan nomenklatur “Masyarakat Terasing” menjadi “KAT”. Perbedaan dapat dilihat dari segi pelaksanaan, dimana program PKAT lebih mengedepankan konsep pemberdayaan (*bottom-up*) dengan mengutamakan aspirasi, inisiatif, dan partisipasi komunitas sasaran dalam setiap kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi, menumbuhkan sikap dan rasa percaya diri KAT untuk mengelola potensi yang ada pada dirinya guna melepaskan diri dari keterpencilan, hambatan geografis dan psikologis serta kemiskinan. Searah dengan konsep yang dikemukakan oleh Payne dalam Adi (Bab 2, hal. 38). Sedangkan dalam pelaksanaan PKSMT pemberdayaan dikemas dalam bentuk pembinaan dan cenderung bersifat *top down*.

Perbedaan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Sejarah Perkembangan Komunitas Adat Terpencil oleh Direktorat PKAT:

Apabila dimasa lalu pembinaan bersifat *top down* maka pembinaan KAT lebih bersifat pemberdayaan, dimana KAT dilihat sebagai subjek dan pihak luar melalui peran sertanya dengan menitik beratkan upaya mereka agar

KAT sendiri lebih mampu menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka (Bab 2, hal. 41).

Kedua pendekatan diatas merupakan pendekatan yang bertolak belakang karenanya kecenderungan penggunaan pendekatan *top down* atau *bottom-up* dalam pelaksanaan program akan menimbulkan efek yang berbeda pada komunitas sasaran, Pressman dan Wilavsky (Bab 2, hal. 46) mengungkapkan bahwa Model rasional *top down* berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan, dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. Begitu juga yang diungkapkan oleh Kusumanegara dan Nugroho (Bab 2, hal. 46) yang melihat bahwa pendekatan *top down* hanya terfokus pada urusan birokrasi untuk melaksanakan keputusan politik semata dan mengesampingkan interaksi serta perasaan manusia. Lebih dalam Fermana dan Parson menyatakan bahwa dalam relasi sosial yang koersif yang membahas tentang siapa objek keputusan, paradigam *top-down* gagal menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat karena keputusannya yang bersifat tirani dan elitis. Dengan penekanan terlalu banyak dikenakan pada definisi tujuan yang ditentukan dari atas, bukan pada peran pekerja di lapangan (Bab 2, hal. 46).

Hal ini tentu saja berbeda dengan penggunaan pendekatan *Bottom-Up*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Parsons, Kusumanegara, dan Nugroho (Bab. 2, hal. 47) bahwa pendekatan *bottom-up* merupakan pendekatan yang lebih *preskriptif* serta mengedepankan unsur desentralisasi dalam pelaksanaan program. Demikian juga yang diungkap oleh Parsons dan Fermana (Bab 2, hal. 47) bahwa sudah menjadi keharusan suatu kebijakan publik yang menganut model demokrasi dirumuskan dari bawah (*bottom up*) sehingga pada nantinya lebih memungkinkan munculnya pemberdayaan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai target dari keputusan.

Sebagaimana temuan hasil penelitian yang dilakukan, perbedaan juga dapat dilihat dari apa yang menjadi tujuan dari masing-masing program. Tujuan program pemberdayaan Suku Laut sebagaimana tercantum dalam “Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam” (Bab 4, hal. 122) adalah

meningkatnya kondisi kesejahteraan sosial suku laut sesuai dengan falsafah Pancasila dan berkembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan suku laut dalam rangka terciptanya wilayah daerah perbatasan yang makin mantap. Dengan tujuan antara, yaitu;

1. Mengadakan perubahan kebiasaan hidup Suku Laut yang mengembara di laut, kearah kehidupan yang menetap dalam permukiman di darat secara bertahap.
2. Meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, agama, sosial budaya, dll dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan Suku Laut.
3. Meningkatkan kualitas organisasi masyarakat khususnya dalam pembinaan suku Laut.

Sedangkan tujuan dari program PKAT sesuai dengan Kepmensos RI No. 06/PENGHUK/2002, pasal (5) adalah; untuk memberdayakan komunitas adat terpencil dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat (Bab 4, hal. 123).

Perbedaan terlihat, jika pada program pemberdayaan Suku Laut pelaksanaan program tidak memfokuskan pada adat istiadat komunitas. Sedangkan dalam program PKAT, pelaksanaan program lebih menitikberatkan pada adat istiadat komunitas. Memasukkan unsur adat istiadat dalam penanganan pemberdayaan khususnya bagi komunitas adat (*indigenous people*) merupakan prasyarat khusus bagi keberhasilan pengembangan komunitas, serta sebagaimana yang disebut Ife sebagai penghindaran terhadap adanya komodifikasi budaya (Bab 2, hal. 69).

Yang terjadi pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam terkait dengan tradisi dan adat istiadat adalah mulai pudarnya beberapa kesenian budaya misalnya tradisi kesenian Silat, Jung, juga Joget. Kesenian ini sebelumnya merupakan media hiburan sekaligus digunakan sebagai media interaksi antar komunitas Suku Laut. Namun demikian pada saat ini mengalami disfungsi, media

yang semula membudaya dan merupakan bagian dari tradisi menjadi terkomersialisasi dan tidak lagi dimainkan oleh warga Bertam. Posisi warga adalah sebagai penonton dan penikmat bukan pemain, sehingga ketika warga menginginkan terlibat dalam pertunjukkan mereka diharuskan mengeluarkan biaya sebagai ganti atas hiburan yang diperoleh. Sarana hiburan ini yang kemudian menjadi pemicu munculnya kebiasaan boros dikalangan warga Bertam (Bab 3, hal. 103, Bab 4, hal. 186, Bab 4, hal. 218-219), kondisi inilah yang oleh Ife dan Tesoriero (Bab 2, hal. 69) disebut sebagai komodifikasi budaya.

Program Pemberdayaan Suku Laut sendiri oleh Depsos RI dengan berdasar pada pendataan Persebaran Komunitas Adat Terpencil tahun 2006 yang dimutakhirkan tahun 2008 secara tidak langsung memasukkan program pemberdayaan Suku Laut sebagai bagian dari PKAT. Pelaksanaan program dimulai pada tahun 1989/1990 dan berakhir dengan dinyatakan komunitas Suku Laut di pulau Bertam sebagai masyarakat yang telah mandiri pada tahun 1993/1994 (Bab 4, hal. 120-121).

Melalui pemutakhiran serta pengklasifikasian sebagai masyarakat mandiri tentu saja membawa implikasi tertutupnya kemungkinan komunitas menjadi bagian dari komunitas sasaran (*beneficiaries*) program PKAT. Memang dilihat secara finansial tentu dengan memasukkan kembali komunitas sasaran yang telah dinyatakan mandiri sebagai penerima manfaat maka yang terjadi adalah adanya pemborosan anggaran karena program dilaksanakan sebanyak 2 kali tahun anggaran, namun jika yang diutamakan adalah “konsep pemberdayaan” dan merujuk pada adanya perbedaan dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pendekatan dalam program PKAT dan PKSMT, hendaknya penanggung jawab program perlu untuk melakukan evaluasi terhadap keadaan dan kondisi dari *beneficiaries* yang diakibatkan oleh program yang ada sebelum PKAT. Hal ini mengingat bahwa secara nasional program PKAT belum selesai dilaksanakan dan bahwa tahapan yang terkait dengan program pemberdayaan yaitu dengan mengadopsi pada konsep pengembangan masyarakat (*community development*) lebih bersifat siklikal atau siklus spiral, dalam arti bahwa dari tahapan yang telah

dilakukan siklus dapat berbaik kembali ke beberapa tahapan yang lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (Bab 2, hal. 74-75)

Secara Implementatif, pemberdayaan suku laut yang ada di Pulau Bertam-Kota Batam dilaksanakan dalam bentuk program dan proses. Sebagai sebuah program, kegiatan cenderung dilaksanakan berdasarkan pada jangka waktu dengan mengingat keterbatasan pada anggaran disertai dengan pentahapan dari setiap kegiatan hingga sampai pada masa Terminasi yaitu berakhirnya masa waktu program. Depsos RI mencatat pelaksanaan program pemberdayaan suku laut dimulai pada tahun 1989/1990 berakhir pada tahun 1993/1994 dan setelahnya tidak lagi dilaksanakan karena proses terminasi telah dilaksanakan dan program dianggap telah selesai (Bab 4, hal.188).

Sebagai proses dapat ditunjukkan dari implementasi yang mengadopsi konsep pengembangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tujuan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah peningkatan kualitas hidup suku laut dengan mengadakan perubahan pola hidup dan penyediaan fasilitas sarana dan prasana hidup seperti rumah, sumber air minum, MCK, sarana ibadah, sarana kesehatan, penyediaan sarana penerangan desa dengan menggunakan listrik tenaga surya, peningkatan pendapatan keluarga melalui pengetahuan keterampilan dalam perikanan dan pertanian, juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sektor pendidikan dengan dilengkapi sarana gedung sekolah. Aktifitas yang telah pelaksana program laksanakan menunjukkan adanya upaya perubahan hidup pada tingkat komunitas lokal terutama dengan memberi priotitas pada kebutuhan dan kepentingan dari kelompok masyarakat yang tertindas, tersisih, dan kurang beruntung searah dengan apa yang telah diungkapkan oleh Ife dan Tesoriero, Butcher, dan Soetomo (Bab 2, hal. 61-63).

Penggunaan aspek pengembangan masyarakat dalam pelaksanaan program juga dapat dilihat dari adanya *Community Worker* yang berperan sebagai *Change agent*, educator, fasilitator. Pendekatan yang digunakan cenderung bersifat *directif* (*Instruktif*). Penggunaan pendekatan *directif* terlihat dari prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari *community worker*

misalnya untuk pelaksanaan kegiatan, pendamping terlebih dahulu membuat proposal kegiatan dengan mendasar pada kebutuhan warga Bertam untuk kemudian diajukan kepada FKKS Batam guna menunggu persetujuan kegiatan dan pendanaan dari pelaksana program utama (FKKS Batam) seperti yang diungkap oleh Glen dan Batten dalam Adi (Bab 2, hal. 63-64). Hal ini juga menunjukkan adanya pola hubungan yang terbentuk diantara Depsos RI dan FKKS Batam bahwa dalam Implementasi program, peran FKKS Batam terlihat lebih dominan dibanding dengan Depsos RI.

Community Worker dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari luar komunitas suku laut (*Eksternal Community Worker*) (Bab 3, hal. 108-109). Sebagai orang luar, *community worker* berusaha melebur kedalam masyarakat Bertam dengan berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat serta melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat internal. Seperti yang telah dilakukan oleh Informan (Bu), (Ol) dan (Sn) sebagai pendamping warga Bertam dengan berusaha tinggal menetap bersama komunitas sasaran di permukiman pulau Bertam dari proses pelaksanaan kegiatan sampai kegiatan terminasi dilaksanakan, kondisi ini searah dengan apa yang diungkapkan oleh Ife dan Tesoriero (Bab 2, hal. 83-84).

Penentuan prioritas kegiatan pada saat pelaksanaan, berdasarkan laporan kegiatan pemberdayaan suku laut di Pulau Bertam oleh FKKS Batam serta hasil wawancara dengan pendamping kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan dipilih tidak semata mengacu pada rumusan perencanaan yang tertuang dalam JUKLAK dan JUKNIS pelaksanaan program (Bab 4, hal. 146). Dalam kondisi ini *Community Worker* mempunyai kehormatan fungsional untuk melakukan keleluasaan atau *diskresi (discretion)* dalam pelaksanaan kegiatan dengan memberikan ruang gerak bagi *Community Worker* untuk menentukan tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus yaitu ketika kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi lapangan, sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Nugroho (Bab. 2, hal. 83).

Pelaksanaan program pemberdayaan pada komunitas Suku laut di Pulau Bertam-Kota Batam secara sistematis terdiri atas tiga kegiatan utama yaitu: Persiapan, pelaksanaan dan Terminasi. Ketiga tahapan mencerminkan proses intervensi dengan mengadopsi pada konsep pengembangan masyarakat sebagaimana pendapat dari Adi (Bab 2, hal. 71-74). Agar lebih komprehensif ketiganya diuraikan secara lebih mendalam sebagai berikut:

5.1.1. Persiapan

5.1.1.1. Persiapan Petugas

Dengan melihat keterbatasan sumber daya yang ada pada Depasos RI dalam hal penganggaran program PKAT khususnya pada komunitas Suku Laut yang berada di wilayah Batam sehingga dilakukan kerja sama dalam program terkait. Kerjasama ini dilakukan juga berdasarkan pada adanya usaha pelayanan sosial yang dilakukan oleh FKKS Batam dalam memberikan pembinaan ke arah pemberdayaan kepada komunitas Suku Laut melalui program utamanya (Bab 4, hal. 124-125).

Guna melaksanakan fungsi koordinasi sekaligus fungsi kontrol sebagai upaya dalam pelaksanaan kebijakan terkait kepada sasaran program sehingga masalah-masalah yang ada dapat diatasi dan tujuan-tujuan yang ada dapat dicapai sebagaimana yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier, Dobelstein, Suharto, serta Indiahono (Bab 2, hal. 44-45) karenanya Depsos RI menugaskan petugas pendamping yang bertugas memberikan dampingan kepada FKKS Batam terhadap kelancaran pelaksanaan (*implementasi*) program (Bab 4, hal. 126).

Dari persiapan yang telah dilaksanakan, apabila ditelaah lebih dalam terdapat beberapa kelemahan mendasar yaitu tidak dipersiapkannya tenaga pendamping masyarakat (*community Worker*). Tahap persiapan merupakan awal terjadinya kontak dengan komunitas sasaran, peran *Community Worker* pada tahap tersebut yaitu menciptakan kedekatan dengan komunitas sasaran, peran lain dari *Community Worker* pada tahap ini adalah mencoba menerobos jalur formal untuk mendapatkan perizinan dari pihak terkait, menjalin kontak dengan tokoh informal (*informal leader*) sehingga hubungan dengan masyarakat dapat terjalin,

sebagaimana yang telah diungkap oleh Adi (Bab 2, hal. 71). Kontak yang terjadi pada nantinya dapat membentuk komunikasi yang baik diantara petugas dan komunitas sasaran sehingga memunculkan kepercayaan komunitas untuk menerima perubahan baru dari implementasi program yang akan dilaksanakan. Beberapa tugas strategis tersebut tanpa kehadiran *community worker* tentu saja dapat menghambat dan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program.

5.1.1.2. Persiapan Lapangan

Persiapan lapangan yang dilakukan terkait dengan program pemberdayaan Suku Laut yang berada di wilayah Batam dilaksanakan melalui empat kegiatan yaitu; Motivasi dan pendaftaran Calon pemukim, Study Kelayakan dan Pembuatan Buku Pedoman Kegiatan, Penyiapan Areal Permukiman, serta Penyiapan Tenaga Kerja. Keempat kegiatan tersebut secara lebih detail dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Motivasi dan Pendaftaran Calon Pemukim.

Kegiatan Motivasi dilaksanakan melalui penyuluhan secara motivatif dan persuasif kepada kelompok sasaran dengan tujuan menciptakan prakondisi sosial yang menimbulkan kesediaan dan keinginan komunitas untuk menerima program baru serta nilai baru yang akan diterapkan dalam usaha pembinaan. Kegiatan terutama dilaksanakan melalui pembinaan terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Dalam kegiatan ini sebagaimana dikemukakan Adi (Bab 2, hal. 71) disebut sebagai fase *engagement*, dalam fase ini terbentuk komunikasi yang baik antara Komunitas Suku Laut dengan pelaksana program.

Kegiatan Motivasi dan pendaftaran Calon Pemukim dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan unsur komunitas sasaran, langkah awal yang dilakukan pelaksana adalah dengan mengarungi lautan menjumpai komunitas Suku Laut mengingat kehidupan mereka yang nomaden di sepanjang perairan wilayah Batam.

Dalam kegiatan ini juga melibatkan unsur Pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan disahkannya Surat Keputusan Walikotamadya Batam No. KPH 84/I/1986 tertanggal 12 September 1986 tentang Pembentukan Tim Survey

Pendataan suku laut di wilayah Batam. Dari data menunjukkan sebanyak 4657 Jiwa atau 1171 KK Komunitas Suku Laut tersebar di wilayah Perbatasan Riau. Dari data sebanyak 826 jiwa (17,74 %) atau 139 KK mendiami wilayah Kodya Batam dengan rata-rata perkepala keluarga terdapat 5 atau 6 anak (Bab 4, Hal. 130-131).

Tidak semua populasi dapat dimukimkan, salah satu strategi yang digunakan guna memperlancar kegiatan dilakukan dengan cara memberikan imbalan kepada mereka yang bersedia untuk dimukimkan berupa rumah sebagai tempat tinggal dan pendidikan untuk anak-anak serta *punishment* atau hukuman berupa dicabutnya hak menempati rumah dan menetap bagi mereka yang meninggalkan rumah lebih dari tiga bulan lamanya (Bab 4, hal. 131). Dengan strategi ini FKKS Batam dapat membuka kontak awal dan kepercayaan dari komunitas Suku Laut untuk menerima perubahan, ini dibuktikan dengan berhasil dimukimkannya sebanyak 14 KK komunitas Suku Laut di lokasi Permukiman Bertam-Kota Batam secara permanen pada tanggal 17 Agustus 1988 hingga pada saat penelitian ini dilaksanakan.

Namun demikian jika dilihat bentuk partisipasi yang diberikan oleh komunitas sasaran sebagaimana diungkap oleh UK Health for All Network dalam Ife dan Frank Tesoriero (Bab 2, hal. 58-59), termasuk partisipasi yang rendah masuk level “dikonsultasikan” dimana Organisasi mencoba mempromosikan sebuah rencana. Berupaya mengembangkan dukungan untuk mempermudah penerimaan atau memberikan sanksi secukupnya kepada rencana sehingga persetujuan administratif dapat diharapkan. Rendahnya partisipasi masyarakat berdampak pada tidak tercapainya tujuan pemberdayaan akibat lebih lanjut dapat menimbulkan ketidakberdayaan komunitas sasaran.

b. Study Kelayakan dan Pembuatan Buku Pedoman Kegiatan

Pelaksanaan study kelayakan dilaksanakan dengan perencanaan secara sistematis dengan melibatkan unsur Depsos RI, Pemerintah Daerah, Praktisi dan

Akademisi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi tentang calon warga dan lokasi permukiman selain itu juga menghasilkan rumusan kegiatan yang nantinya menjadi pedoman dalam setiap kegiatan dalam JUKLAK dan JUKNIS pelaksanaan program. Kegiatan ini menurut Adi (Bab 2, hal. 70) merupakan bagian dari tahapan *Need Assessment*, perencanaan alternatif program atau kegiatan secara partisipatif, dan juga tahap memformulasikan rencana aksi.

Strategi kegiatan selain dilaksanakan secara in formal dengan mendatangi komunitas sasaran yang bertujuan untuk mendata kebutuhan komunitas, kegiatan juga dilaksanakan secara formal melalui forum koordinasi dengan Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing-Depsos RI. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 November 1986 di Batam yang bertujuan untuk menginventarisasi karakteristik komunitas Suku Laut sehingga dapat diperoleh gambaran secara detail dari komunitas sasaran (Bab 4, hal. 133-134).

Perencanaan alternatif program dan tahap formulasi aksi dilaksanakan dengan forum formal pada tanggal 29 September s/d 2 Oktober 1987 dengan agenda acara “Pertemuan Konsultasi dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut dan Latihan Penyegaran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Batam” dengan pelaksana kegiatan oleh FKKS Batam, dengan maksud dan tujuan: Sebagai forum untuk menghimpun berbagai masukan guna merumuskan langkah-langkah operasional ke arah implementasi Pola Pembinaan Suku Laut secara terpadu, terencana dan profesional; dan bagi para PSM dimaksudkan untuk saling tukar menukar informasi dan pengalaman serta untuk menambah atau menyegarkan kembali pengetahuan sebelumnya (Bab 4, hal. 141).

Hasil pertemuan diatas yang nantinya dijadikan masukan dan pertimbangan oleh pelaksana dalam hal ini Direktorat Bina Masyarakat Terasing, Ditjen Binkesos-Departemen Sosial RI untuk menentukan formulasi kegiatan yang kemudian terangkum dalam “Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam” JUKLAK dan JUKNIS pelaksanaan program yang disahkan pada tahun 1987.

Pada tahap ini terdapat beberapa kelemahan, diantaranya: Pada saat *Assessment* dalam identifikasi kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan (*expressed needs*), perencanaan kegiatan, serta formulasi kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan program belum melibatkan secara aktif komunitas sasaran dan cenderung berdasarkan pada keputusan dari pelaksana (*Top Down*). Pemberdayaan adalah konsep yang mengutamakan partisipasi komunitas sasaran. Dengan partisipasi dapat melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya sehingga tumbuh kesadaran warga untuk ikut terlibat dalam kegiatan. Keikutsertaan aktif komunitas sasaran juga dapat menghindari adanya program dan kegiatan yang bersifat insidental (*one shot programme*) ataupun amal (*charity*) yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang, sebagaimana diungkapkan oleh Adi (Bab 2, hal. 72).

Disamping juga dalam kegiatan belum secara maksimal memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran dengan tidak mempertimbangkan aspek pengembangan Budaya atau adat istiadat komunitas sasaran. Komunitas adat (*indigenous People*) adalah Sekelompok Sosial Budaya yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan identitas etnik dari para leluhur kepada generasi mendatang, dan sebagai dasar keberlanjutan akan keberadaan mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya, lembaga adat dan sistem hukum mereka sendiri, sebagaimana definisi dari Pemerintah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, serta UN *Economic and Social Council Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* (Bab 2, hal. 35-36).

Dengan demikian pemberdayaan menjadi efektif dengan mengakui dan memperkuat budaya pribumi/asli sehingga membantu komunitas sasaran untuk memiliki kendali nyata terhadap masyarakat mereka sendiri dan nasib mereka sendiri sebagai bagian dari identitas diri komunitas. Tidak mempertimbangkan aspek tradisi dan budaya dapat berakibat pada hilangnya identitas diri komunitas,

lebih lanjut bukan kemandirian yang terbentuk tetapi lebih pada ketergantungan. Hal ini searah dengan apa yang dinyatakan oleh Ife dan Tesoriero (Bab 2, hal. 68).

Identifikasi Kondisi Suku Laut di wilayah Batam (Bab 2, hal. 39) dengan mendasarkan pada hasil penelitian dan teorisasi konsep terkait dengan Komunitas Adat dapat diambil kesimpulan sebagaimana tersajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.1. Identifikasi Kondisi Komunitas Suku Laut di wilayah Batam

No.	Kondisi Aspek	Permasalahan	Kebutuhan	Potensi
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Hidup <i>nomaden</i> di Laut dalam sampan (5 x 1½m) • Penghasilan tetap sebagai nelayan • Teknologi sederhana (tombak, pancing, bubu) • Ketergantungan hasil tangkapan pada “<i>tauke</i>” di Negara Singapura. • Kepemilikan alat-alat rumah tangga dasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat tinggal yang layak - Teknologi tangkapan ikan dan pengolahan hasil 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketaatan pada pemerintah - Lembaga Batih - Keahlian dalam Navigasi Laut - Keahlian dalam pembuatan Sampan
2.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Orang Tua dan Anak tidak sekolah • Angka kesakitan dan kematian tinggi • Angka kelahiran tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan orang tua dan anak - Perawatan Kesehatan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketaatan pada pemerintah - Lembaga Batih - Penghormatan pada hak “privacy”.
3.	Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman terhadap Identitas • Atheis (Tidak Beragama) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan identitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketaatan pada pemerintah - Lembaga Batih - Tradisi kesenian Jung, Silat dan Joget.
4.	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi rendah dalam kegiatan politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Advokasi social 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketaatan pada pemerintah - Lembaga Batih
5.	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Rentan terhadap eksploitasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dan Advokasi social 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketaatan pada pemerintah - Lembaga Batih

Sumber: Diolah Kembali, Februari 2011

c. Penyiapan Areal Permukiman

Penyiapan areal permukiman merupakan bagian dari tahap persiapan lapangan. Pelaksana dalam tahap ini melakukan survey lokasi yang nantinya dijadikan tempat dibangunnya permukiman Suku Laut. Penyiapan areal diperlukan mengingat latar belakang komunitas sasaran yang hidup nomaden di perairan Batam dan tidak memiliki tempat tinggal yang permanen. Survey dan Observasi serta wawancara secara informal kepada komunitas sasaran untuk mengetahui daerah yang sering menjadi persinggahan Komunitas Suku Laut. Pelaksanaan survey dan observasi dengan melibatkan praktisi, pakar, dan akademisi yaitu dari Depsos RI, FKKS Batam, ITB dan UI.

Dari kegiatan ini kemudian dipilih pulau Bertam sebagai calon areal permukiman Suku Laut dengan pertimbangan pulau tersebut telah menjadi tujuan komunitas suku laut untuk bermukim baik sementara waktu maupun menetap, terdapatnya sumber air tawar sebagai kebutuhan hidup warga, disamping itu juga pulau tersebut dekat dengan *bonded area* (Pulau Batam) (Bab 4, hal. 136).

Pola penataan permukiman sesuai dengan Tipe pemberdayaan di tempat asal (*in situ empowerment*). Penataan permukiman berdasarkan perencanaan dengan menggunakan sistem Zonasi yang berfungsi menjaga ekosistem lingkungan dimana areal permukiman dibagi menjadi 2 zona yaitu lahan dan hunian dengan perimbangan dari luas lahan di atas dan bawah 30% untuk permukiman atau hunia warga (Zona inti) dan 70% untuk hutan lindung (Zona Kehidupan). Model rumah tipe 28 m2 dari masing-masing rumah akan dihubungkan dengan pelatar dengan posisi satu sisi disebelah utara dan yang lain di sebelah selatan, searah dengan aturan pola permukiman oleh Depsos RI (Bab 3, hal. 108-109).

d. Penyiapan Tenaga Kerja

Penyiapan tenaga kerja dimaksudkan untuk menggali partisipasi komunitas sasaran melalui keterlibatan mereka dalam membangun permukiman yang nantinya dijadikan lokasi untuk membangun rumah serta sarana dan prasarana penunjang bagi pelaksanaan program PKAT khususnya bagi komunitas Suku

Laut. Partisipasi diberikan dalam bentuk tenaga (*Manpower*) yaitu ikut menjadi bagian dari pekerja bangunan, searah dengan pendapat Notoadmodjo (Bab 2, hal. 58) (Bab 4, hal. 138).

Namun demikian keikutsertaan dan kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam membangun permukiman masih disebabkan karena adanya insentif (imbalan gaji), sebagaimana diungkapkan oleh Informan (Hs) berikut:

Ya, namanya senang mo dikasih rumah, rame-rame kita kerja. Memang ndak ke laut tapi ada gaji dari Bu Dar ya gak papa lah. Yang penting ada uang buat makan. (Hs, *Beneficiaries Program*, 19 Oktober 2010) (Bab 4, hal. 139)

Penyiapan lokasi permukiman dilaksanakan dengan gotong-royong antara komunitas sasaran dan petugas pelaksana dengan imbalan gaji untuk komunitas sasaran. Bentuk partisipasi yang dilakukan komunitas sasaran pada saat penyiapan areal permukiman ini masuk dalam kategori Partisipasi Incentive (*Participation for Material Incentive*) seperti yang diungkapkan Pretty bahwa Partisipasi Insentif terjadi jika “*People participate by providing resources, for example labour, in return for food, cash, or other material incentives. It is very common to see this called participation, yet people have no stake in prolonging activities when the incentives end*”. (Masyarakat memberi imbalan dan jasa untuk memperoleh imbalan isentif berupa upah walau tidak di libatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang di lakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan setelah insentif di hentikan). Sedangkan Arnstein dalam Ife dan tesorieros (Bab 2, hal. 57) mengkategorikan level partisipasi tersebut sebagai fase “menenangkan” dan masuk dalam kategori “derajat tokenisme”.

Tokenisme merupakan praktek memberikan kebaikan-hati secara resmi kepada wakil kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat hanya untuk tujuan menghasilkan suatu penampilan yang jujur/adil. Tokenisme dalam keadaan terburuk akan membuat orang-orang yang tak berdaya semakin tak berdaya dan terasing, searah dengan pendapat Ife dan Tesoriero (Bab 2, hal. 58).

Dan jika dilihat secara lebih detail kegiatan ini mempunyai kelemahan yaitu tidak dikajinya analisis lingkungan diluar areal permukiman yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan Bertam. Pembangunan industri perkapalan yang ada disekitar pulau Bertam tepatnya berada di pulau Batam ternyata berdampak terhadap kondisi perairan yang ada di pulau Bertam. Polusi yang ditimbulkan oleh industri besar tersebut pada saat ini mempengaruhi habitat kehidupan ikan yang semakin berkurang terutama di perairan pulau Bertam. Kehidupan Suku Laut sangat tergantung pada hasil tangkapan ikan. Sebagai pekerjaan utama yang dimiliki tentu saja kondisi ini berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan hidup mereka (Bab 4, hal. 206-209).

5.1.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan dimulai dari tahap permukiman yaitu pembangunan rumah hingga penempatan komunitas sasaran di pulau Bertam, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, penempatan petugas pendamping masyarakat, santunan biaya hidup hingga pelaksanaan bimbingan. Pembahasan tentang pelaksanaan kegiatan diuraikan secara lebih detail sebagaimana berikut:

5.1.2.1. Pemukiman

Terdapat empat kegiatan dalam pelaksanaan yaitu: pengadaan rumah sederhana, pengadaan sarana dan prasarana pendukung, penempatan petugas dan santunan biaya hidup.

a. Pengadaan Rumah Sederhana

Dalam pengadaan rumah, model bangunan rumah dilakukan terencana dengan bantuan tenaga ahli dari ITB, dengan bentuk rumah semi darat dengan pancang-pancang sebagai tiang penyangga rumah. Rumah dibuat berhadapan dengan penghubung jembatan, dengan tujuan agar terbentuk interaksi antar penghuni permukiman. Konsep awal model rumah berdasarkan keputusan dari pelaksana program dibentuk permukiman semi darat laut (pantai) dimana rumah dibangun dengan menggunakan pancang-pancang sehingga ketika air laut pasang akan masuk ke bawah rumah-rumah warga. Dimana rumah-rumah dibuat

berhadapan-hadapan dengan dihubungkan oleh pelatar (jembatan) sehingga diharapkan memunculkan interaksi antar warga yang bermukim.

Selain rumah semi darat laut pada tahap selanjutnya pada tahun 1990 atau berjarak 3 tahun setelah dibangun rumah semi darat dibangun rumah berlokasi di darat. Tujuan dari pembangunan rumah di darat maksud untuk memindahkan warga secara bertahap dari lingkungan pantai menuju ke permukiman permanen di darat sebagaimana masyarakat awam lainnya (Bab 4, hal. 148). Namun konsep ini gagal dengan ditinggalkannya permukiman darat oleh warga kembali ke permukiman semi darat laut, dan hingga saat penelitian ini dilaksanakan sudah roboh hanya terlihat reruntuhan bangunan yang menunjukkan letak awal permukiman darat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada saat perencanaan pelaksanaan pengkajian (*assessment*) belum mengikutsertakan keterlibatan aktif komunitas sasaran dan hanya berdasarkan pada analisa kebutuhan dan keputusan dari pelaksana kegiatan. Dengan tidak melibatkan pengkajian kebutuhan dari sudut pandang komunitas sasaran mengakibatkan pembangunan rumah yang berlokasi di darat menjadi terbengkalai dan manfaat yang ada dari pembangunan rumah tersebut tidak dapat dirasakan dan dinikmati oleh komunitas sasaran, searah dengan pendapat Adi (Bab 2, hal. 71-72).

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Dalam kegiatan ini pelaksana juga menyediakan fasilitas sarana dan prasana hidup di lokasi permukiman Komunitas Suku Laut di pulau Bertam. Bangunan fisik yang telah dibuat menunjukkan beberapa diantaranya sudah tidak lagi digunakan bahkan beberapa terlihat roboh. Deskripsi dari bangunan fisik tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Kondisi rumah sebagian besar telah mengalami kerusakan karena lapuk, hanya beberapa rumah sekitar 15 unit rumah semi darat laut dalam kondisi yang masih dipelihara pemiliknya dengan cara memperbaiki dan mengganti bahan yang lapuk juga memperluas bangunan rumah. Sedangkan seluruh bangunan rumah yang dibuat di darat sudah rubuh yang tertinggal hanya sisa

puing bangunan. Bangunan posyandu mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan lagi. Bangunan Sekolah telah mengalami rehab dan pembangunan gedung baru sehingga jumlah ruang keseluruhan menjadi 5 kelas. Jumlah ruangan kelas yang terbatas menyebabkan ada kelas yang digabung menjadi satu ruangan, hal ini menjadi salah satu kendala dalam proses belajar mengajar. Bangunan Masjid telah mengalami perbaikan sehingga memudahkan warga untuk menjalankan ibadah. Ruangannya sudah lapuk hanya terlihat lantai yang menunjukkan luas batasan bangunan sebelumnya. Tempat monumen berdiri masih bisa dijumpai, namun *perahu kajang* sudah tidak ditemui lagi, yang tertinggal hanya pancang dan tempat sandar monumen berada. Sarana air minum dan mandi masih digunakan warga dan kondisinya masih layak digunakan. Kondisi Yetti (dermaga) dan pelatar atau jembatan penghubung memprihatinkan karena banyaknya kayu yang telah lapuk sehingga ada beberapa warga yang terjerembab jatuh terperosok akibat kondisi tersebut. Jalan setapak masih dalam kondisi baik meskipun terlihat kurang mendapatkan perawatan dari warga. Jalan lingkaran rusak berat. Jalan ini digunakan untuk menghubungkan rumah warga yang didarat, dan karena rumah sudah roboh sehingga jalan lingkaran tidak lagi difungsikan. Sebagian besar telah mengalami kerusakan dikarenakan biaya perawatan dan alat pengganti yang rusak mahal, warga beralih menggunakan genset. Dan hanya satu yang masih dalam perawatan dan masih bisa digunakan (Bab 4, hal. 151-155).

c. Penempatan Petugas Pendamping Lapangan

Berdasar pada hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping (*Community Worker*) yang bertugas pada saat proses implementasi program berasal dari berbagai instansi yang terlibat serta dengan berbagai latar belakang pendidikan, antara lain dari: Depsos RI yang menugaskan pendamping dengan tingkat pendidikan SMU serta kualifikasi sebagai Pekerja Masyarakat (Satgasos) yang diperoleh dari pelatihan, Departemen Agama yang menugaskan pendamping sebagai Guru agama dengan tingkat pendidikan Madrasah Aliyah atau setingkat

SMU, juga dari FKKS Batam yang menugaskan pendamping (*Community Worker*) dengan tingkat pendidikan Strata S1 (S1) dari bidang Ilmu Antropologi (Bab 3, hal. 107-108) (Bab 4, hal. 155-156).

Kegiatan persiapan tenaga kerja yang telah dilakukan oleh pelaksana memiliki kelemahan diantaranya:

- Kegiatan persiapan tenaga kerja terutama petugas pendamping (*Community Worker*) masyarakat tidak dilaksanakan diawal proses pelaksanaan program. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program. Kondisi tersebut terjadi disebabkan peran penting yang dapat dilakukan oleh *Community Worker* dalam pengembangan komunitas diantaranya; di awal pelaksanaan program mereka berperan sebagai penghubung baik dengan pemerintah setempat, tokoh informal yang dapat memperlancar pelaksanaan program maupun dengan komunitas sasaran. Dengan pemerintah setempat dilakukan dengan menerobos jalur formal untuk mendapatkan perizinan dari pihak terkait, menjalin kontak dengan tokoh informal (*informal leader*) agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik, serta menjalin kedekatan dengan komunitas sasaran sehingga menumbuhkan kepercayaan dan kesediaan komunitas untuk menerima perubahan, sebagaimana diungkap oleh Adi (Bab 2, hal. 71).
- Tugas sebagai *Community Worker* dipilih karena mandat dari instansi/lembaga terkait, hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksana program tidak melaksanakan seleksi pendamping (*Community Worker*). Dari keadaan tersebut juga dapat diambil kesimpulan bahwa pendamping berasal dari luar komunitas sasaran atau disebut juga dengan pendamping *eksternal*, searah dengan apa yang diungkapkan oleh Ife dan tesoriero (Bab 2, hal. 84).
- Tidak semua petugas dibekali dengan pelatihan khusus terkait pendampingan masyarakat dari instansi/ lembaga pengirim (Bab 3, hal. 107-108).
- Sering terjadi perubahan petugas pendamping selama proses pelaksanaan program PKAT. Keadaan ini secara langsung mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan, karena dengan perubahan tersebut pelaksana lain harus menyesuaikan kembali rencana kerja awal yang telah dibuat. Sedang bagi

warga berdampak pada tidak dilaksanakannya kegiatan dan jika terjadi pergantian pendamping dengan petugas yang baru mengharuskan mereka untuk memulai dari awal menyesuaikan diri dan menjalin kontak akibatnya dapat memperlambat proses pelaksanaan (Bab 4, hal. 151)

- Tidak ada pelatihan awal menyamaan persepsi antar CW yang bertugas melaksanakan pendampingan. Mengingat adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan instansi yang menugaskan *community worker* sehingga perlu untuk melakukan persamaan persepsi baik terkait dengan metode maupun teknik-teknik yang akan digunakan dalam proses pendampingan. Tanpa ada penyamaan persepsi akan berakibat tidak adanya keselarasan berfikir dan bertindak dari para pendamping, sebagaimana yang diungkap oleh Adi (Bab 2, hal. 70)

d. Santunan Biaya Hidup

Santunan biaya hidup diberikan kepada warga dengan dilatarbelakangi adanya penurunan pendapatan dari *beneficiaries* terutama setelah mereka menetap di lokasi permukiman. Santunan diberikan dalam bentuk uang sebagai pengganti pendapatan mereka setiap hari yaitu sebesar hasil menangkap ikan setiap harinya atau sekitar 2 kg ikan (Bab 4, hal. 159-160).

Pemberian santunan biaya hidup menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program pelaksana cenderung bersifat insidental (*one shot programme*) ataupun amal (*charity*), bentuk program tersebut jika mengacu pada pendapat Adi (Bab 2, hal. 73) berdasarkan konsep pengembangan masyarakat hendaknya dihindari, karena tidak mencerminkan konsep pemberdayaan.

5.1.2.2. Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan setelah warga mulai Bermukim di permukiman Bertam. Dari data penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh pelaksana tidak disesuaikan dengan rencana dan rumusan formulasi kegiatan sebelumnya yang tercantum dalam “Pola pembinaan Suku Laut di pulau Bertam” sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksana program telah melakukan “diskresi” (*discretion*) yang merupakan kewenangan dari

implementor kegiatan ketika apa yang tertulis dan diformulasikan dalam rencana tidak sesuai atau tidak diatur sebelumnya sehingga disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari masyarakat setempat, searah dengan yang diungkapkan oleh Nugroho (Bab 2, hal. 83) (Bab 4, hal.146)

Kegiatan bimbingan yang telah dilaksanakan yaitu: Pada tahun 1987 dilaksanakan kegiatan Bimbingan Hidup Bermasyarakat, Bimbingan Kesadaran Beragama, Bimbingan Pemeliharaan Kesadaran Diri maupun lingkungan, Bimbingan dalam Pertanian dan peternakan, perikanan. Tahun 1988 dilaksanakan kegiatan Bimbingan penyuluhan tentang makanan gizi dan KB, serta Bimbingan untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal bagi orang dewasa. Pada tahun 1990 dilaksanakan kegiatan Bimbingan Budi daya rumput laut, Mengenal penggunaan uang melalui simpanan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bimbingan Keterampilan Wanita (Bab 4, hal.160).

Kelemahan yang ada pada saat implementasi kegiatan bahwa analisa kebutuhan (*need Assessment*) cenderung berasal dari keputusan FKKS Batam. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme yang digunakan pada saat implementasi dimana bentuk kegiatan dilaksanakan dengan mendasarkan pada proposal dari CW (peran fasilitasi) untuk kemudian dilaksanakan dengan menunggu persetujuan FKKS Batam. Keterlibatan aktif kelompok sasaran untuk ikut menentukan kebutuhan yang menjadi prioritasnya sangat diperlukan agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri sehingga menimbulkan kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, searah dengan apa yang diungkapkan oleh Adi (Bab 2, hal. 71).

Need Assessment yang cenderung pada keputusan pelaksana menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dengan melibatkan tenaga ahli belum dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh warga Bertam. Diantaranya bimbingan Bimbingan dalam Pertanian dan peternakan, perikanan; Bimbingan Budi daya rumput laut, Mengenal penggunaan uang melalui simpanan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bimbingan Keterampilan Wanita (Bab 4, hal. 160-188)

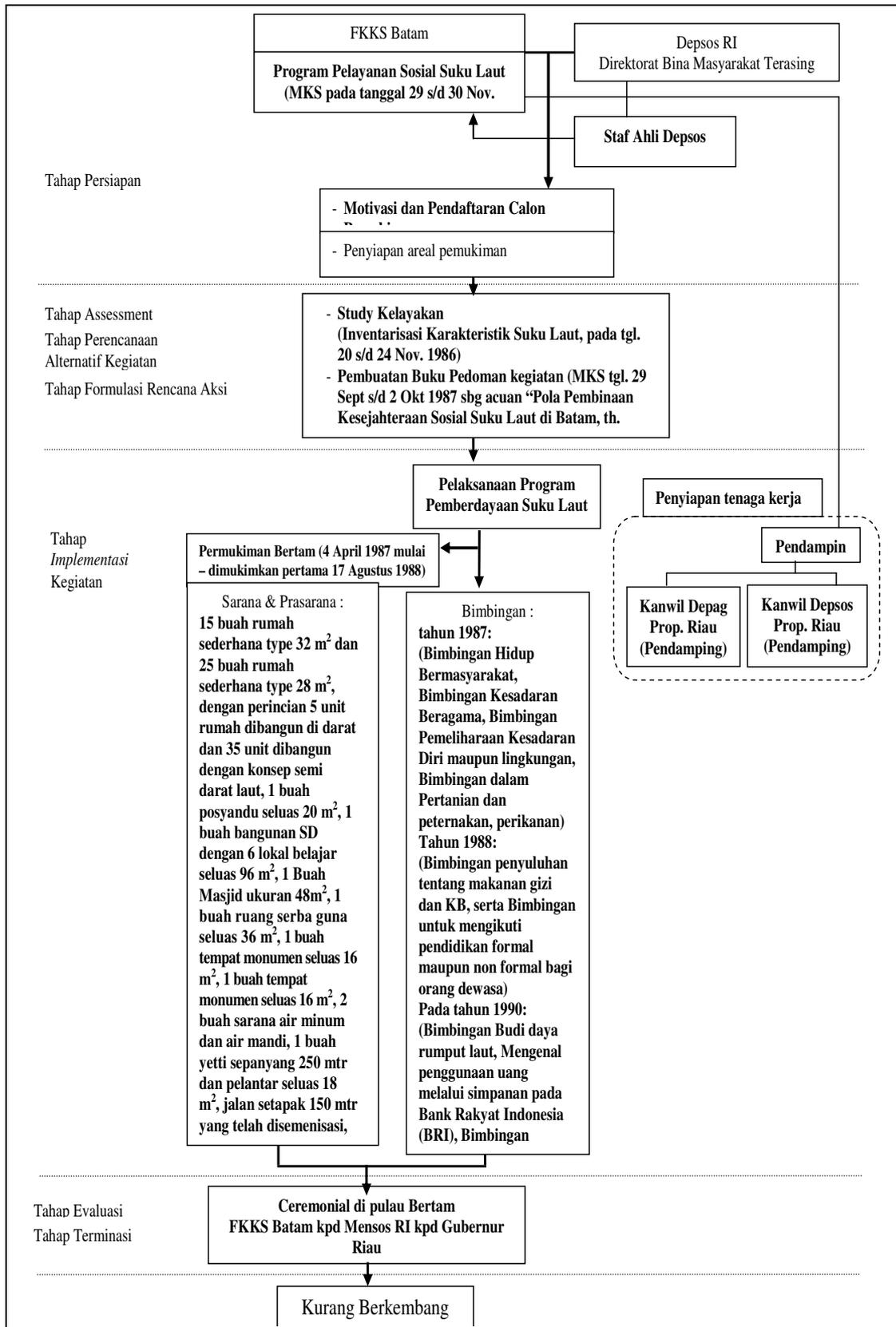
Namun demikian dari implementasi yang telah dilaksanakan juga mulai terlihat adanya perubahan-perubahan pola hidup baru yang bermanfaat bagi perkembangan dari Warga Bertam diantaranya dari kegiatan Bimbingan Hidup Bermasyarakat, Bimbingan Kesadaran Beragama, Bimbingan Pemeliharaan Kesadaran Diri maupun lingkungan, Bimbingan penyuluhan tentang makanan gizi dan KB, serta Bimbingan untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal bagi orang dewasa (Bab 4, hal. 160-188).

5.1.3. Terminasi

Kegiatan terminasi ditandai dengan adanya penyerahan Permukiman suku laut di Pulau Bertam dari FKKS/ KKKS Batam kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Sosial RI yaitu Ibu Inten Soeweno pada tanggal 4 Agustus 1993 di Ruang Serba Guna Bertam dan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Propinsi Riau yaitu Bapak Soeripto (Bab 4, hal. 188-189). Kegiatan ini sekaligus juga menegaskan bahwa warga Bertam dinyatakan telah mandiri sebagaimana masyarakat pada umumnya dan tidak lagi dikategorikan sebagai KAT.

Kelemahan yang dapat dilihat dalam proses terminasi adalah: Tahapan terminasi cenderung dilaksanakan karena batas waktu pelaksanaan program telah selesai dan pihak pelaksana kegiatan merasa bahwa program telah selesai dilaksanakan, Keputusan pelaksana untuk menyelesaikan program karena dipandang program telah berhasil, Disamping juga disebabkan masih banyak Komunitas Adat Terpencil (KAT) secara nasional yang belum tersentuh program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) (Bab 4, hal.189).

Deskripsi singkat pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam dapat dilihat sebagaimana skema gambar dibawah:



Gambar 5.1. Skema Pelaksanaan program PKAT pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam

Sumber: telah diolah kembali, Februari 2011

5.2. Faktor Pendukung/Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.

5.2.1. Faktor Pendukung.

5.2.1.1. Dukungan Pemerintah.

a. Landasan Hukum.

Produk hukum bagi sebuah kebijakan dapat menjadi faktor pendukung program. Dengan pengesahan kebijakan oleh pemerintah sekaligus menunjukkan legalitas program. dengan disahkannya Landasan Hukum bagi Pelaksanaan Program dalam hal ini FKKS Batam sebagai pelaksana utama program oleh Depsos RI dalam “Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam” pada tahun 1987 sekaligus memberikan kepercayaan dari lembaga pemerintah lain yang terkait juga organisasi sosial lain untuk ikut mendukung dan membantu dalam kelancaran dan kesuksesan program, atau dapat dikatakan sebagai faktor pendukung kelancaran program (Bab 4, hal. 198).

b. Dukungan Lembaga/ Organisasi Pemerintah Lain yang Terkait.

Dukungan Lembaga Sejawat dalam pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam dalam bentuk finansial (Bantuan Dana Rp. 20.000.000 dari Mensos RI) juga masukan dari berbagai pengalaman dan saran bagi perbaikan program. Diantaranya dari Seminar-seminar yang diadakan oleh pelaksana terkait tentang Suku Laut dengan dihadiri oleh Menteri UPW, Menteri Penerangan RI, Wakil Gubernur Propinsi Riau, Ketua Umum Yayasan Pengembangan Asmat, Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, DPR Komisi IX, Asisten III Menkokesra, Rombongan PMI Jakarta, Dirjen Perum Departemen Penerangan, BKKKS Jawa Barat, BKKKS Propinsi Lampung, BKKKS Propinsi DKI Jakarta, PKK dan BKKKS Jawa Timur, BKKKS Irian Jaya (Bab 4, hal. 141, 205).

Dukungan tersebut sebagai sebuah kelompok rujukan utama bagi seorang pekerja masyarakat, dan yang paling terlihat memberikan timbal balik yang membangun dan berbagai ide baru kepada seorang pekerja, dan merupakan

sebuah sumber kritis dukungan emosional dan moral, searah dengan pendapat Ife dan tesoriero (Bab 2, hal. 88)

5.2.1.2. Dukungan Lembaga KKKS Batam.

a. Komitmen Kuat Ketua FKKS Batam.

Komitmen Kuat Ketua FKKS Batam: kedekatan dengan komunitas sasaran secara emosional hingga disebut “Ibu Suku Laut”, Kecakapan memanfaatkan dukungan Keluarga (Suami/Ketua Otorita Batam Mayjen TNI (Purn) Soedarsono Darmosoewito Menristek B.J. Habibie untuk kegiatan Listrik Tenaga Surya di Bertam) untuk pelaksanaan program (Bab 4, hal. 202-203).

Munculnya kedekatan emosional ini juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat yang sangat menghormati perempuan terutama isteri mereka, sebagaimana pendapat dari Informan (O1) (Bab 4, hal. 203). Dan juga tercermin dari perilaku masyarakat yang ditunjukkan dengan tidak adanya tingkat perceraian dan poligami yang terjadi di kalangan warga Bertam (Bab 3, hal. 106).

b. Dukungan Mitra Kerja FKKS Batam

Maksud dari mitra kerja adalah organisasi yang menjadi anggota dan tergabung dalam FKKS/ KKKS Batam. FKKS/ KKKS Batam merupakan organisasi sosial yang beranggotakan 27 organisasi pelayanan sosial yang mempunyai komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan sosial di wilayah Batam (Bab 3, hal.118). Sehingga dengan dukungan Mitra kerja FKKS Batam tersebut membuka peluang bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang terkait, diantaranya bantuan fasilitas pelayanan klinik Terapung dari RS. Budi Kemuliaan, serta bantuan finansial dari YPAB sebesar Rp. 25.000.000 (Bab 4, hal. 205).

Dukungan tersebut merupakan bagian dari support yang diberikan oleh para pekerja dalam berbagai masyarakat yang lain. Bentuk dukungan pada tingkatan formal dapat dilakukan dengan seminar, konferensi, dan kursus pelatihan, searah dengan pendapat Ife dan tesoriero (Bab 2, hal. 85).

5.2.1.3. Keterbukaan Warga Menerima Perubahan.

Keterbukaan Warga Menerima Perubahan (Menyangkut kesediaan untuk bermukim permanen di pulau Bertam, kesediaan mengikuti kegiatan selama pelaksanaan program PKAT, kesediaan merubah cara dan kebiasaan hidup pada saat nomaden di laut dengan kebiasaan baru yang diperoleh selama program berlangsung terkait dengan kebersihan diri dan tempat tinggal, memasak makanan, memeluk salah satu agama yang sah di Indonesia, bersekolah, membentuk struktur pemerintahan setingkat RT (Bab 4, hal. 206).

Keterbukaan warga menerima perubahan secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka tidak menolak terhadap "orang luar" yang merupakan kendala dari pengembangan masyarakat yaitu penolakan terhadap "orang luar" (*rejection of "outsiders"*), dari sudut pandang psikologi dikatakan bahwa manusia mempunyai sifat yang universal, salah satunya adalah ia mempunyai rasa curiga dan rasa terganggu (*hostility*) terhadap orang asing. Keterbukaan ini akan memunculkan kesadaran warga untuk menerima perubahan atau sebagai faktor pendukung pelaksanaan program, searah dengan pendapat Watson dalam Adi (Bab 2, hal. 81).

5.2.2. Faktor Penghambat.

5.2.2.1. Anggaran/Dana yang terbatas dari Pemerintah.

Pendanaan merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program. Kondisi finansial yang dimiliki pelaksana akan berpengaruh terhadap pembiayaan kegiatan yang nantinya dilaksanakan. Yang terjadi pada saat pelaksanaan program adalah adanya anggaran/Dana yang terbatas dari Pemerintah yaitu berupa dana stimulus yang dapat mencakup 45% dari harga yang dianggarkan untuk tiap rumah yang akan dibangun sebesar Rp. 1.000.000.00, sedangkan kekurangan dari anggaran menjadi tanggung jawab dari FKKS Batam (Bab 3, hal. 109) (Bab 4, hal. 207).

Dalam perspektif pengembangan anggaran disebut sebagai (*finansial Capital*) yang merupakan dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas, searah dengan Adi (Bab 2, hal. 75-76).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan dukungan keuangan yang terbatas akan menghambat jalannya pembiayaan proses pembangunan dalam komunitas akibatnya pelaksanaan program juga akan mengalami hambatan.

5.2.2.2. Kerjasama dan Perencanaan Kegiatan yang kurang antar Petugas Pelaksana.

Dalam pelaksanaan program PKAT pada komunitas suku laut di pulau Bertam tidak hanya melibatkan petugas dari instansi pemerintah tetapi juga melibatkan Organisasi Sosial dalam hal ini FKKS/ KKKS Batam. Begitupula dengan pendamping kegiatan dilapangan (Community Worker) yang berasal dari berbagai instansi dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga agar kegiatan berjalan dengan lancar perlu adanya kerjasama dan perencanaan kegiatan dari para petugas pelaksana, searah dengan apa yang diungkapkan oleh Adi (Bab 2, hal. 71) sebagai penyamaan persepsi.

Namun demikian yang terjadi pada pelaksanaan program adalah kurangnya kerjasama dan perencanaan Kegiatan antar Petugas Pelaksana yaitu: kurang koordinasi untuk merumuskan waktu pelaksanaan maupun kegiatan antar pelaksana kegiatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi komunitas sasaran menyangkut pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan dan waktu warga mencari ikan. Akibatnya beberapa kegiatan menjadi terhambat untuk dilaksanakan.

5.2.2.3. Terbatasnya Sumber Daya dalam Proses Pendampingan.

Community Worker merupakan ujung tombak pelaksanaan program dimana program secara real dari yang sebelumnya berupa usulan-usulan program diaplikasikan secara nyata pada masyarakat. Sehingga keberadaannya menjadi sangat penting bagi kelancaran kegiatan. Oleh karena itu Keterbatasan jumlah pendamping akan menghambat jalannya kegiatan. Demikian juga yang terjadi pada pelaksanaan program, ditemukan adanya keterbatasan Sumber Daya dalam Proses Pendampingan yang menyangkut: kualitas CW, tidak terdapatnya CW profesional pada saat program mulai diimplementasikan, kurangnya CW diawal proses implementasi dilaksanakan, kurangnya anggaran, serta sering terjadinya

pergantian *Community Worker* selama proses pendampingan (Bab 4, hal. 209-211).

Keterbatasan ini menyebabkan *Community Worker* tidak dapat melaksanakan peran dan fungsi sebagai pendamping dengan maksimal. Akibatnya beberapa dari pendamping tidak bertahan lama di permukiman Bertam. Sehingga dijumpai sering terjadi pergantian petugas pendamping. Akibat lebih lanjut adalah mempengaruhi kelancaran kegiatan yang terkait dengan program, searah dengan pendapat Ife dalam Adi (Bab 2, hal. 81).

5.2.2.4. Hambatan dari Warga Bertam.

a. Sikap dan Perilaku Mengharap Menerima Imbalan

Sikap masyarakat Bertam yang mengharapkan imbalan dari setiap kegiatan yang mereka jalani. dengan sikap ini kegiatan tidak maksimal terlaksana dikarenakan sebagian warga mulai cenderung untuk memilah kegiatan yang menawarkan imbalan uang (Bab 4, hal. 213).

Sikap mengharap Imbalan menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat akan bantuan. Ketergantungan (*dependence*), ketergantungan terhadap seseorang dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Bagi kelompok masyarakat yang terlalu banyak terdapat orang yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain maka proses pemandirian masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan, sebagaimana pendapat Watson dalam Adi (Bab 2, hal. 80)

b. Sikap Curiga Antar Warga

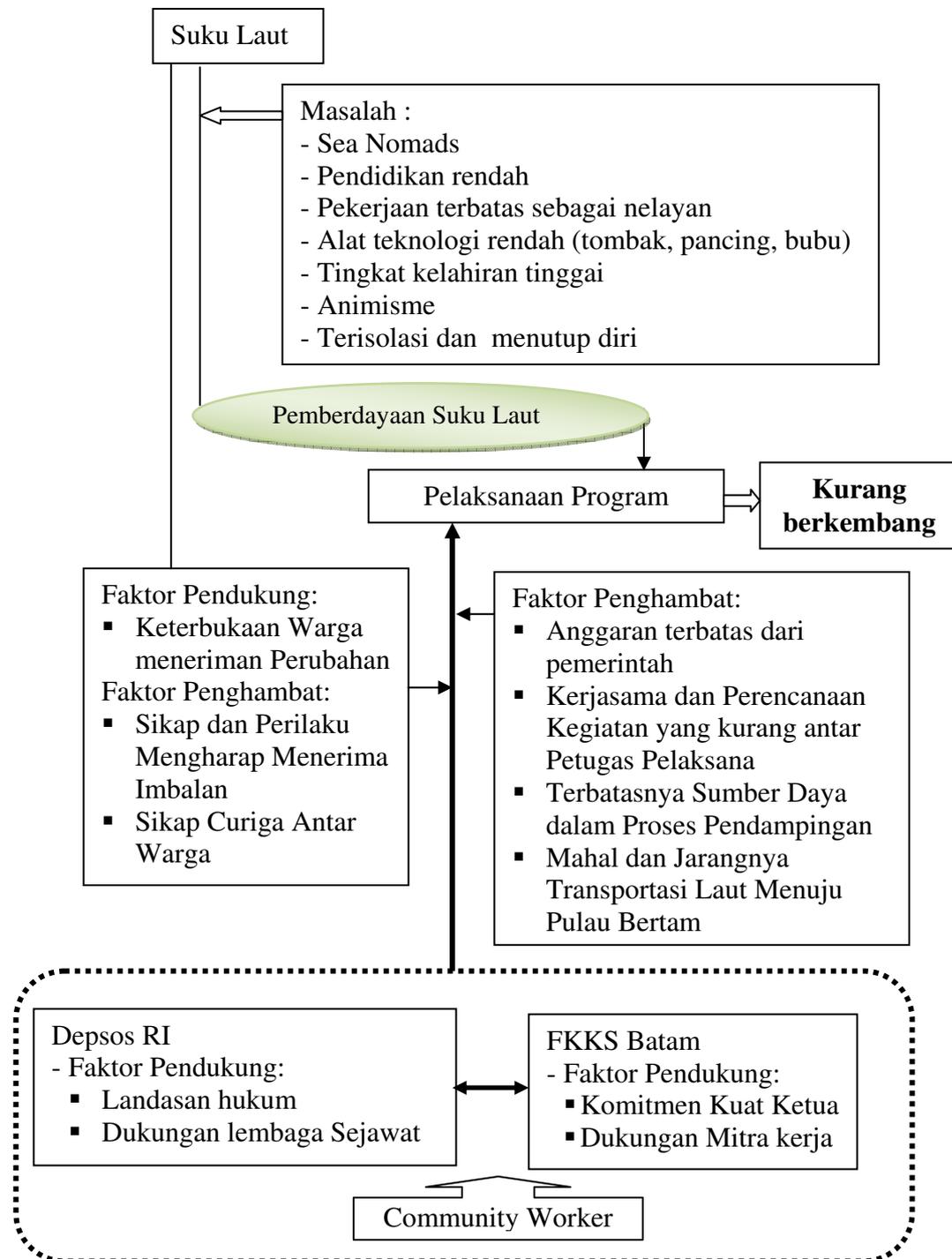
Sikap curiga tersebut dilatar belakangi oleh kehidupan warga sebelum dimukimkan. Kehidupan sehari-hari sebelumnya di atas perahu menjadikan interaksi dan keterikatan emosional lebih banyak hanya dengan anggota keluarga mereka, dari keseharian yang kurang berinteraksi dengan masyarakat lain sehingga pada saat mereka dimukimkan, kepercayaan akan warga lain menjadi rendah. Kepercayaan yang rendah menyebabkan muncul rasa curiga antar warga yang berakibat secara langsung pada keberhasilan pelaksanaan program (Bab 4, hal. 214-215).

Sikap curiga juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengembangan masyarakat, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan antar anggota komunitas. *Trust* (kepercayaan) merupakan salah satu modal sosial yang ada di masyarakat. dengan ketiadaan *trust* berakibat kegiatan akan sulit terlaksana (Bab 2, hal. 76-77).

5.2.2.5. Mahal dan Jarangnya Transportasi Laut Menuju Pulau Bertam.

Secara geografis jarak antara pulau Bertam dan pulau Batam dapat ditempuh dengan waktu 45 menit perjalanan laut dengan menggunakan perahu boat. Namun karena hampir tidak ada perahu *boat* ataupun pancung setiap saat menuju pulau Bertam menyebabkan perjalanan ke pulau Bertam tempat lokasi pelaksanaan program sehingga menjadi mahal. Hal ini berpengaruh terhadap mobilitas pelaksana program yang lebih banyak bertempat tinggal di pulau Batam akibatnya petugas menjadi jarang datang yang berakibat pada terhambatnya kegiatan selanjutnya (Bab 4, hal. 216).

Secara ringkas, deskripsi tentang faktor penghambat dan faktor pendorong program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 5.2. Skema Ringkasan Faktor Pendukung/Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.

Sumber: telah diolah kembali, Februari 2011

5.3. Dampak Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam.

Dampak pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam terbagi atas dua aspek yaitu dampak langsung pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam dan dampak tidak langsung di laur komunitas Suku Laut.

5.3.1. Dampak Langsung Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam.

5.3.1.1. Dampak Personal/ Spiritual.

Salah satu *Out put* dari pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam adalah bermukimnya secara permanen komunitas suku laut di pulau Bertam-Kota Batam. Hidup secara permanen menyebabkan adanya perubahan hidup yang harus dijalani yang tentu saja sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya sebagai pengembara diperairan sekitar wilayah Batam.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka cenderung untuk memilih hidup stabil secara permanen di permukiman dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya yang mereka jalani. Kecenderungan pilihan hidup stabil di permukiman disebabkan diantaranya adalah terwujudnya keinginan warga untuk mempersiapkan masa depan generasi penerus terutama melalui pendidikan formal, menjaga keselamatan jiwa keluarga karena bisa terhindar dari bahaya keganasan cuaca laut, serta kondisi tubuh yang mulai beradaptasi dengan lingkungan darat sehingga tubuh akan mulai merasa sakit jika dalam waktu yang lama berada di lautan (Bab 4, hal. 217).

Dengan demikian kehidupan stabil secara permanen yang dijalani akan berdampak pada ketenangan batin/ jiwa mereka sehingga dapat merencanakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga khususnya bagi masa depan anak-anak melalui pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu sarana bagi peningkatan kualitas manusia, manusia yang berkualitas merupakan kekuatan sosial sebagai aset komunitas yang bermanfaat bagi perkembangan komunitas. Adi (Bab 2, hal. 76) menyebutkan sebagai Modal manusia (*human capital*).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya ketenangan jiwa serta terbentuknya manusia yang berkualitas yang memiliki tujuan hidup serta rasa

harga diri merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan personal dan juga spiritual, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ife dan Tesoriero (Bab. 2, hal. 70).

5.3.1.2. Dampak Budaya

Suku laut merupakan bangsa yang maju (*Neolithicum*) bagian dari kelompok etnis (*indigenous People*) sebagai penduduk asli yang menempati wilayah perairan Batam mampu bertahan hidup selama berabad-abad lamanya dengan nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan melekat pada kehidupan sehari-hari (Bab 3, hal. 93).

Karenanya melestarikan dan menghargai budaya asli/ pribumi/ adat (*indigenous*) merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan masyarakat khususnya bagi komunitas adat. Dengan pelibatan tradisi budaya komunitas dapat memperkuat budaya pribumi/asli yang secara efektif membantu mereka untuk memiliki kendali nyata terhadap masyarakat mereka sendiri. Partisipasi budaya juga sebagai cara penting untuk membangun modal social (*social capital*), memperkuat masyarakat, dan menegaskan identitas, sebagaimana diungkapkan oleh Ife dan Tesoriero (Bab 2, hal. 76-77). Demikian juga yang diungkapkan Putnam dalam Suharto bahwa modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan. (Bab 2, 78)

Hasil penelitian menunjukkan yang terjadi di komunitas Suku Laut di pulau Bertam terkait aspek budaya yaitu mulai pudarnya budaya tradisi dalam hal ini kesenian diantaranya Silat, Jung, dan joget yang semula melembaga dalam kehidupan mereka sebagai media hiburan tempat warga melepas lelah setelah seharian berada di laut mencari tangkapan ikan (Bab 4, hal. 218-219).

Salah satu tradisi yang masih ada pada saat ini adalah “Joget” namun demikian juga mengalami pergeseran dari tata cara dan peralatan yang digunakan (Bab 4, hal. 219). Jika sebelumnya Joget merupakan media hiburan gratis komunitas Suku Laut pada saat ini berubah menjadi media hiburan yang bisa

mendorong warga untuk berperilaku hidup boros, karena untuk berperan dalam Joget mereka diharuskan mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu sebagai ganti dari hiburan yang diberikan oleh para pemain Joget (Bab 3, hal. 103-104) Ife dan tesoriero sendiri menyebutnya sebagai komodifikasi budaya (Bab 2, hal. 69). Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam yang tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan budaya mengakibatkan dampak negatif dari aspek budaya.

Selain itu dampak langsung yang bersifat negatif yang dapat dilihat dari aspek budaya adalah munculnya sikap ketergantungan warga Bertam terhadap bantuan. Sifat ketergantungan muncul diakibatkan karena pandangan negatif pelaksana terhadap komunitas Suku Laut, akibatnya pelaksana program cenderung memanjakan warga dengan bantuan yang bersifat amal (*charity*) (Bab 4, hal. 214). Program-program yang bersifat insidental (*one shot programme*) ataupun amal (*charity*) merupakan program yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang, sebagaimana yang diungkap oleh Adi (Bab 2, hal. 70). Ketergantungan sendiri bukanlah merupakan tujuan dari sebuah kebijakan publik sebagaimana pendapat Nugroho bahwa kebijakan publik yang terbaik adalah mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saing masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskannya ke dalam pola ketergantungan (Bab 2, hal.41).

Sifat ketergantungan ini di sebabkan salah satunya karena pada saat proses pelaksanaan program warga terbiasa untuk menerima bantuan yang cenderung bersifat amal, akibatnya ketika terminasi dilaksanakan yang menandakan bahwa program telah berakhir serta menandakan pula bahwa segala pembangunan sarana dan prasarana, bantuan yang diperoleh warga juga terhenti. Dengan selesainya program PKAT untuk komunitas Suku Laut di Bertam, maka FKKS/ KKKS Batam tidak lagi bertanggung jawab terhadap keberlangsungan (*sustainable*) program tersebut. Untuk selanjutnya program pembangunan bagi warga Bertam akan disesuaikan dengan mekanisme penyaluran program pembangunan dari pemerintah atau melalui musrenbang (Bab 4, hal. 222).

Sedangkan mekanisme musrenbang menghendaki adanya usulan akan prioritas kebutuhan warga berasal dari warga setempat dengan prasyarat adanya proposal analisis prioritas kebutuhan. Kondisi ini tentu saja mempersulit warga Bertam, hal ini disebabkan mayoritas warga khususnya orang tua tidak memiliki kemampuan membaca dan berhitung (Bab 3, hal. 97-98) sehingga untuk memenuhi prasyarat tersebut adalah suatu hal yang sulit dilaksanakan.

Keadaan tersebut terjadi salah satunya juga akibat disfungsinya ketua RT, hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa disfungsinya Ketua RT disebabkan secara kesehatan dan fisik RT sudah tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai Ketua Rukun Tetangga (Bab 4, hal. 212). Aparat pemerintah setempat yang kurang peduli dengan situasi dan kondisi warga di pulau Bertam menyebabkan permasalahan disfungsi ini menjadi berlarut-larut belum ada penyelesaian. Akibat lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai saat penelitian dilaksanakan belum ada warga yang menerima bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi produktif, sebagaimana diungkap oleh Informan (An) yang merupakan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam (Bab 4, hal. 225-226).

Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelum terminasi dilaksanakan, pelaksana belum mengikutsertakan warga dan kurang mempertimbangkan kualitas SDM dari komunitas sasaran. Evaluasi merupakan proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga jika dalam pelaksanaan evaluasi tanpa melibatkan komunitas sasaran akibat selanjutnya dalam jangka panjang adalah belum dapat memunculkan kemandirian warga dan yang ada lebih

cenderung pada ketergantungan. Searah dengan apa yang diungkapkan oleh Adi (Bab 2, hal. 73-74).

Akibat lebih lanjut ketika program telah dinyatakan selesai warga merasa belum siap untuk menerima keadaan yaitu hilangnya bantuan baik fasilitas sarana dan prasarana yang sebelumnya mereka dapatkan dari pelaksanaan program (Bab 4, hal. 221), sehingga kurang menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan memiliki sarana dan prasana yang diperoleh pada saat proses pelaksanaan program. Hal ini dapat dilihat dari kurang terjaga dan terawatnya sarana dan prasarana hidup yang diperoleh warga Bertam diantaranya, kondisi rumah yang mulai banyak yang lapuk bahkan beberapa telah roboh, jembatan (pelantar) dan yetti (dermaga) yang sudah mulai lapuk dan berlobang, modem sebagai alat listrik tenaga surya yang mulai rusak dan tidak bisa digunakan, bangunan ruang serba guna yang sudah rohhoh, ruang kesehatan yang mulai rusak tidak lagi digunakan, monumen perahu yang sudah tidak lagi berada ditempatnya, dan juga rumah yang dibangun di darat yang semuanya roboh tinggal puing-puing (Bab 4, hal 151-155). Dari deskripsi diatas menunjukkan bahwa sikap ketergantungan warga menunggu bantuan merupakan dampak negatif dari aspek budaya.

Adanya sifat ketergantungan serta kualitas SDM yang rendah dan didorong oleh kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap kebutuhan warga Bertam menyebabkan munculnya Mobilitas warga Bertam yang dilakukan dengan pindah dari permukiman Bertam ke tempat yang lain, diantaranya ke pulau lingga juga pulau Batam, atau juga kembali menjalani kehidupan sebagai Suku Laut yang nomaden di lautan, seperti yang diungkapkan oleh Informan (Hs) berikut:

Jadi kalo pemerintah sekarang yach deh, tidak kuat menyusun kita suku laut yach kita balik ke laut lagi. Kalo pemerintah tidak kuat memimpin kita yang lemah.. Yach kita *hijrah* (pindah) ke asal lagi lah. Orang kita ini masih kuat turun laut. Yach bisa pindah ke laut lagi seperti yang lain. (Hs, *Beneficiaries Program*, 19 Oktober 2010) (Bab 4, hal. 228).

Kondisi ini secara tidak langsung menegaskan munculnya dampak negatif dari aspek budaya yang terjadi akibat dari pelaksanaan program PKAT khususnya bagi Komunitas Suku Laut yang ada di pulau Bertam-Kota Batam.

5.3.1.3. Dampak Lingkungan

Penggunaan model rumah semi permanen di darat dengan pancang-pancang kayu sbg penyangga rumah serta model MCK yang langsung terbuang di laut memicu adanya kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan. Kebiasaan ini menyebabkan lingkungan menjadi kotor, karena sampah yang dibuang tidak bisa terbawa arus laut sehingga pada saat air surut tiba sampah masih tertinggal di kolong-kolong rumah tersangkut oleh pancang-pancang penyangga. (Bab 4, hal. 229).

Kondisi ini secara tidak langsung menyebabkan pencemaran lingkungan. sedangkan lingkungan merupakan salah satu modal (*environmental capital*) sebagai aset komunitas yang mendukung pengembangan masyarakat. lingkungan yang tercemar berakibat buruk pada kondisi kesehatan warga, atau dapat dikatakan merupakan dampak negatif dari lingkungan (Bab 2, hal. 76).

5.3.1.4. Dampak Ekonomi

Data hasil penelitian menunjukkan adanya polusi di perairan Batam yang diakibatkan oleh limbah dari industri perkapalan yang ada di sekitar pulau Batam. Jarak yang relatif dekat antara pulau Batam dan pulau Bertam menyebabkan polusi yang ada sampai pada perairan di pulau Bertam. Akibat lebih lanjut dari polusi ini adalah berkurangnya habitat ikan sehingga mempengaruhi hasil tangkapan warga Bertam, yang secara langsung berpengaruh pada pendapatan (Bab 4, hal. 229-230).

Mengingat pekerjaan utama mayoritas warga Bertam adalah nelayan sehingga pendapatan mereka sangat tergantung pada hasil tangkapan ikan (Bab 3, hal. 96). Kondisi ini juga menunjukkan bahwa dalam Study kelayakan untuk menentukan lokasi permukiman yang dilaksanakan pada saat persiapan belum mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitar pulau Bertam yang dapat berakibat terhadap kehidupan warga dimasa yang datang.

Dengan semakin sedikitnya tangkapan ikan di perairan Bertam dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelum bermukim di Bertam membuat sebagian besar warga melakukan kegiatan “Bertandang” (Bab 4, hal. 231). Kegiatan bertandang dilakukan warga selama sehari-hari bahkan berbulan-bulan untuk mencari ikan di sekitar perairan kepulauan Riau dengan membawa serta isteri juga anak mereka tak kecuali mereka yang masih dalam bangku sekolah. Akibat dari kegiatan ini lebih lanjut anak menjadi membolos sehingga berpengaruh pada proses belajar mengajar. Dari deskripsi diatas menunjukkan bahwa salah satu dampak yang muncul akibat pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam adalah menurunnya pendapatan warga atau dalam hal ini berdampak negatif secara ekonomi, disamping juga memunculkan kebiasaan bertandang yang jika dilihat secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan keluarga namun disisi lain menyebabkan pendidikan anak menjadi terbengkalai atau berdampak negatif dari aspek personal (terkait dengan kualitas SDM).

5.3.1.5. Dampak Sosial dan Politik

Pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam berdasarkan data penelitian berdampak pada munculnya kesadaran warga Bertam akan hak kepemilikan tanah (Bab 4, hal. 243). Munculnya kesadaran warga Bertam atas kepemilikan tanah yang didorong oleh adanya kekhawatiran warga Bertam menyangkut legalitas secara hukum kepemilikan tanah sebagai akibat dari mayoritas warga yang belum memiliki Sertifikat kepemilikan tanah. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kepemilikan pulau Bertam secara umum terbagi atas dua warga yaitu bagian muka atau lokasi dimana permukiman berdiri yang merupakan milik sebagian warga Bertam dan hutan yang didalamnya terdapat perkebunan karet merupakan milik warga dari pulau Kasu, dimana kepemilikan pertama atas tanah ada pada warga Kasu baru kemudian menyusul didirikan permukiman warga Bertam (Bab 4, hal. 233-234).

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ife dan tesoriero bahwa Isu yang sering muncul diseperti masyarakat adat adalah tanah dan spiritualitas (Bab 2, hal. 69). Pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pelaksana

kurang peka dengan isu-isu sentral seputar komunitas adat akibatnya pada saat program direncanakan dan diformulasikan, pelaksana program cenderung tidak mempertimbangkan aspek penilaian akan keberlanjutan kegiatan dari program yang dilaksanakan.

Dari situasi diatas bahwa belum tersalurkannya secara maksimal aspirasi warga Bertam untuk mendapatkan program pembangunan yang menyangkut kebutuhan hidup warga disebabkan karena salah satunya yaitu tidak dipertimbangkannya aspek kualitas SDM pada saat evaluasi sebelum proses terminasi dilaksanakan adalah kualitas Sumber Daya Manusia, serta dengan adanya permasalahan hak kepemilikan warga Bertam yang belum mendapat mengakuan secara sah dari perangkat hukum dapat dikatakan bahwa implementasi program berdampak negatif terhadap bidang sosial politik. Dilain pihak kesadaran warga akan hak kepemilikan menunjukkan bahwa mulai bisa menyuarakan hak milik pribadinya sehingga dalam hal ini berdampak positif pada aspek sosial politik

5.3.2. Dampak Tidak Langsung di Luar Komunitas Suku Laut

Dampak tidak langsung menyangkut lingkungan masyarakat di luar komunitas Suku Laut yang merasakan akibat dari adanya pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam, yaitu FKKS/ KKKS Batam dan *Community Worker*.

5.3.2.1. Dampak Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tidak langsung dari program PKAT pada Komunitas Suku Laut yang ada di pulau Bertam adalah pemasukan sumber daya bagi Organisasi FKKS Batam serta perbaikan kualitas hidup dari petugas pendamping (*Community Worker*) pada saat pelaksanaan program berlangsung (Bab 4, hal. 236-237).

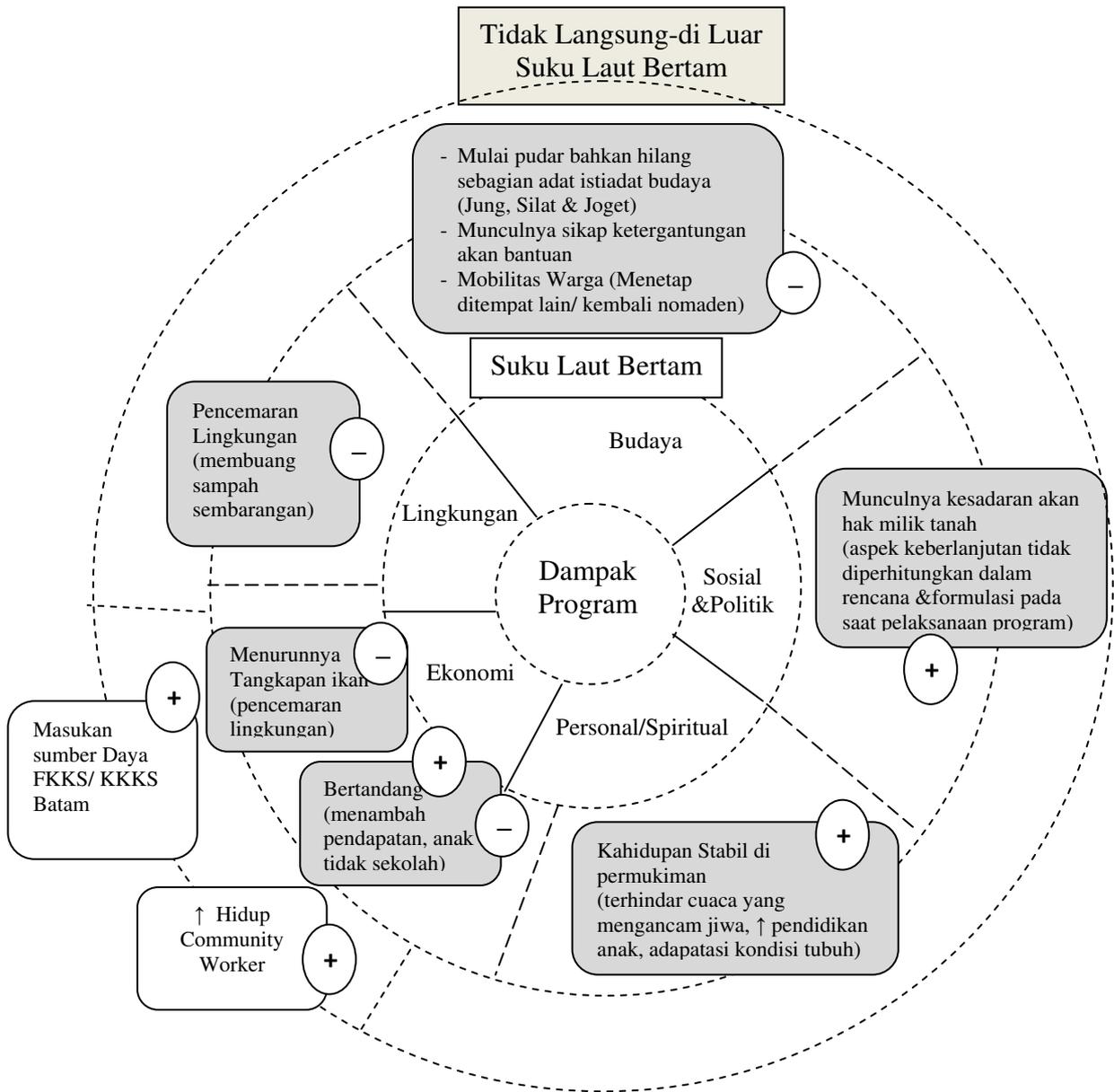
Dengan berhasilnya FKKS/ KKKS Batam menyelesaikan pelaksanaan program PKAT pada Komunitas Suku Laut khususnya yang ada di permukiman pulau Bertam memberikan manfaat pada penambahan pemasukan sumber daya bagi operasionalisasi kegiatan pelayanan sosial yang akan dilaksanakan terutama

berasal dari kepercayaan lembaga/ organisasi yang mempunyai tujuan yang sama sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan eksistensi organisasi sebagai lembaga yang bertujuan memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat khususnya masyarakat di Wilayah Batam dan lebih khusus untuk warga Bertam, atau dalam ini berdampak positif pada ekonomi.

Namun demikian informasi diatas juga menunjukkan bahwa kegiatan mempromosikan komunitas Suku Laut yang ada di Bertam oleh FKKS Batam juga memicu munculnya sikap mengharap akan imbalan tanpa kerja keras, yang disebabkan oleh adanya kesadaran warga Bertam bahwa dirinya mempunyai nilai jual tinggi yang dapat menghasilkan uang, atau dapat dikatakan memicu munculnya dampak negatif aspek budaya.

Bagi pendamping program, pelaksanaan program membawa berkah tersendiri bagi peningkatan kehidupan mereka, kesabaran mereka melaksanakan tugas dan kewajiban membuka kesempatan tersendiri bagi *community Worker* untuk meningkatkan pengetahuan dengan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan hidup yang bersangkutan, atau berdampak positif bagi ekonomi *Community Worker*.

Deskripsi singkat dampak pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 5.3. Skema Dampak Program PKAT pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam

Sumber: Telah diolah kembali, Februari 2011

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang didasarkan pada kebijakan, temuan lapangan dan pendapat para ahli, berikut beberapa kesimpulan penting penelitian yaitu:

Pelaksanaan Program PKAT merupakan upaya sistematis dan terencana dari Departemen Sosial RI yang bertujuan pemberdayaan komunitas adat terpencil sehingga dapat mandiri, terjangkau akses terhadap pelayanan sosial dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan budaya setempat. pelaksanaan PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam dilaksanakan berdasarkan pada Kebijakan Depsos RI melalui Direktorat Bina Masyarakat Terasing sebagai pelaksana teknis pusat dan Kanwil Depsos Prop. Riau sebagai pelaksana teknis daerah bekerjasama dengan Organisasi Sosial Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam sebagai pelaksana Utama Operasional Implementasi program mengupayakan usaha pemberdayaan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup komunitas Suku Laut dengan nama program Pembinaan Suku Laut di Pulau Batam yang merupakan bagian dari program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT). Dari kedua lembaga yang berperan, dalam tataran operasionalisasi implementasi kegiatan FKKS/ KKKS Batam lebih berperan dalam menentukan keputusan kegiatan dan pendanaan yang terkait dengan pelaksanaan program.

Pemilihan FKKS Batam sebagai pelaksana utama program dengan didasari pada pertimbangan kondisi internal dan eksternal Depsos RI, yaitu kurangnya sumber daya yang dimiliki Depsos baik pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) juga dikarenakan tujuan, peran dan program kerja dari organisasi FKKS Batam dalam memberikan pelayanan sosial khususnya kepada komunitas Suku Laut yang berada di wilayah Kota Batam.

Terdapat beberapa kali perubahan nomenklatur (tata nama) dalam tataran implementatif program; pada awalnya dengan istilah “Suku Terasing”, kemudian “Masyarakat Terasing” hingga kemudian pada tahun 1992 disebut sebagai

“Komunitas Adat Terpencil (KAT)” sesuai dengan Kepres. RI No. 111 tentang “Pembinaan Kesejahteraan Sosial KAT. Perubahan nomenklatur dengan diikuti oleh pembaharuan dan perbaikan metode dan penanganan.

Pelaksanaan Kegiatan PKAT pada Komunitas Suku Laut di pulau Bertam berbasis pada pengembangan Masyarakat dengan mengacu pada pola tahapan sesuai yang telah ditentukan oleh Depsos RI dalam juklak dan Juknis yang disahkan pada tahun 1987 yaitu “Pola Pembinaan Suku Laut di Pulau Batam. Tahapan terdiri dari Persiapan melalui empat kegiatan yaitu; Motivasi dan pendaftaran Calon pemukim, Study Kelayakan dan Pembuatan Buku Pedoman Kegiatan, Penyiapan Areal Permukiman, serta Penyiapan Tenaga Kerja. Kemudian kegiatan Pelaksanaan dimulai dari tahap permukiman yaitu pembangunan rumah hingga penempatan komunitas sasaran di pulau Bertam, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana hingga pelaksanaan bimbingan. Dan kemudian dilanjutkan dengan tahap Terminasi atau penghentian program. Tahapan tersebut sesuai dengan pentahapan yang diungkapkan oleh Adi (Bab 2, hal.89-93) yang terdiri dari persiapan, assessment, perencanaan kegiatan, alternatif kegiatan, formulasi rencana aksi, pelaksanaan (*implements*), evaluasi dan tahapan terakhir yaitu terminasi.

Sebagai sebuah model pengembangan masyarakat, pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam memiliki beberapa kelemahan mendasar yaitu: 1. Pelaksanaan program tidak mempertimbangkan aspek budaya, adat dan istiadat komunitas sasaran, 2. Kegiatan penyiapan tenaga kerja terutama petugas pendamping (*Community Worker*) masyarakat tidak dilaksanakan diawal proses pelaksanaan program, 3. Tugas sebagai *Community Worker* dipilih karena mandat dari instansi/lembaga terkait, 4. pelaksana program tidak melaksanakan seleksi pendamping (*Community Worker*), 5. Tidak semua petugas dibekali dengan pelatihan khusus terkait pendampingan masyarakat dari instansi/ lembaga pengirim, 6. Sering terjadi perubahan petugas pendamping selama proses pelaksanaan program PKAT, 7. Tidak ada pelatihan awal menyamaan persepsi antar CW yang bertugas dalam melaksanakan

pendampingan. Dari beberapa kelemahan yang ada dan didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah ditunjukkan dengan tingkat buta huruf yang tinggi menyebabkan Partisipasi komunitas sasaran masih terbatas pada Partisipasi Incentive (*Participation for Material Incentive*) pada level fase “menenangkan” atau masuk dalam kategori “tokenisme”. Tokenisme merupakan praktek memberikan kebaikan-hati secara resmi kepada wakil kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat hanya untuk tujuan menghasilkan suatu penampilan yang jujur/adil. Tokenisme dalam keadaan terburuk akan membuat orang-orang yang tak berdaya semakin tak berdaya dan terasing. Akibatnya saat ini komunitas suku laut yang ada di pulau Bertam menjadi kurang berkembang. Yang ditandai dengan adanya mobilitas warga baik pindah ke pulau lain atau kembali menjalani kehidupan sebagai *seanomads*.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam antara lain: Dukungan pemerintah baik dari landasan hukum maupun Dukungan Lembaga/ Organisasi Pemerintah Lain yang Terkait, Dukungan Lembaga KKKS Batam menyangkut Komitmen Kuat Ketua FKKS Batam serta Dukungan Mitra Kerja FKKS Batam, Keterbukaan Warga Menerima Perubahan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan program diantaranya: Anggaran/Dana yang terbatas dari Pemerintah yang hanya mampu menyediakan 45% dari anggaran awal, Kerjasama dan Perencanaan Kegiatan yang kurang antar Petugas Pelaksana, Terbatasnya Sumber Daya dalam Proses Pendampingan, Hambatan dari Warga Bertam menyangkut Sikap dan Perilaku Mengharap Menerima Imbalan dan Sikap Curiga Antar Warga, Mahal dan Jarangnya Transportasi Laut Menuju Pulau Bertam.

Dampak program pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam diidentifikasi dari dua aspek yaitu dampak langsung pada komunitas suku laut pulau Bertam serta dampak tidak langsung di luar komunitas Suku Laut. Dampak langsung diantaranya: Dampak positif Personal/Spiritual yaitu kehidupan yang lebih stabil setelah menetap di permukiman Bertam, Dampak negatif Budaya diantaranya: mulai pudar bahkan hilangnya

sebagian adat istiadat budaya warga Suku Laut, munculnya sikap ketergantungan akan bantuan, serta munculnya mobilitas Warga Bertam untuk menetap di pulau lain atau kembali hidup *nomaden* di lautan. Dampak negatif Lingkungan yaitu adanya Pencemaran lingkungan disekitar permukiman akibat perilaku membuang sampah rumah tangga sembarangan. Dampak negatif Ekonomi yang ditandai dengan menurunnya tangkapan ikan berdampak pada penurunan pendapatan. Dampak positif sosial dan politik ditandai dengan munculnya kesadaran warga akan hak kepemilikan tanah dari warga Bertam.

Dampak tidak langsung diluar komunitas Suku laut berupa Dampak positif Ekonomi pada lembaga serta individu pelaksana program PKAT diantaranya: Menambah Sumber daya finansial dan eksistensi Organisasi FKKS/ KKKS Batam serta Peningkatan hidup *Community Worker*.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas maka untuk perbaikan pelaksanaan program PKAT secara khusus pada Komunitas Suku Laut di pulau Bertam, berikut beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan tersebut:

1. Kepada pelaksana program yaitu: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Departemen Sosial Republik Indonesia dan FKKS/ KKKS Batam.
 - Pelaksanaan program pemberdayaan khususnya untuk Komunitas Adat harus tetap **memperhatikan adat istiadat, budaya, nilai, norma dan pranata yang ada di masyarakat adat (*indigenous people*)**, dengan memberikan **perlindungan sosial (*social protection*)** guna menghindari adanya eksploitasi budaya (komodifikasi budaya). Mengingat bahwa sebelum masyarakat masuk dalam kategorisasi KAT oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial RI, mereka adalah komunitas yang dapat hidup mandiri meskipun dengan segala keterbatasan dari segi material namun mereka mampu untuk bertahan hidup dan tentu saja mereka mempunyai kearifan sendiri yang mereka dapatkan dan pertahankan dari leluhur mereka. Karena mengingat melalui kebijakan merupakan salah satu

Universitas Indonesia

strategi dalam pembangunan yang secara tidak langsung akan terjadi perubahan dalam tataran kehidupan masyarakat, perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang membawa kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan bukan perubahan yang membawa pada keterasingan dan ketergantungan.

- Memperhatikan **keberlanjutan program** yaitu program tidak hanya dilihat dari segi **kuantitas** sasaran tetapi juga **kualitas program**. Ketika program hanya dimaknai sebagai kuantitas dalam arti hanya berpatokan pada jumlah komunitas sasaran yang dihasilkan maka program menjadi kurang efektif terutama dalam pencapaian tujuan dan keberlanjutan, khususnya untuk pelaksanaan program PKAT sehingga keberhasilan program PKAT bukan pada jumlah berapa banyak KAT yang telah tercatat mendapatkan program tetapi lebih memperhatikan pada makna proses pemberdayaan itu sendiri yaitu aspiratif, inisiatif, dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan baik pada saat persiapan, pelaksanaan sampai pada saat pemutusan atau terminasi.
- Melakukan **evaluasi sebelum Terminasi dilaksanakan khususnya dengan lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia komunitas sasaran**. Dengan sebelumnya memperhatikan metode dan indikator keberhasilan yang akan dicapai. Evaluasi menjadi sangat penting mengingat Terminasi merupakan saat dimana program selesai dilaksanakan, secara eksplisit program terputus dan komunitas sasaran tidak lagi memperoleh kemudahan dalam mendapatkan segala fasilitas sarana dan prasarana yang sebelumnya diperoleh pada saat program berlangsung. Begitu juga dengan pelaksanaan program PKAT bahwa hendaknya pemerintah dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan KAT sebagai pihak yang menerima amanat dan bertanggung jawab sebagai pelaksana program untuk mengkoordinasi dan memperhatikan tahap evaluasi dengan secara konsisten menggunakan indikator keberhasilan program yang sebelumnya telah dirumuskan dan ditetapkan. Sehingga

ketika program selesai dilaksanakan berarti memang masyarakat tersebut telah berdaya dan mandiri dalam segala aspek kehidupan, dan bukan berpedoman pada keterbatasan pendanaan dan banyaknya komunitas sasaran yang belum mendapatkan program.

- **Lebih menekankan proses pemberdayaan dan menghindari program yang bersifat insidental (*one shot programme*) ataupun amal (*charity*).** Dalam jangka panjang jika dilakukan secara terus-menerus, bentuk program ini dapat mengakibatkan munculnya ketergantungan komunitas sasaran terhadap bantuan, sehingga dampak lebih lanjut yang terjadi **bukan kemandirian tetapi lebih pada ketergantungan komunitas sasaran pada pihak lain.**
- **Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dari para pelaksana** program khususnya terkait dengan program pemberdayaan serta pengetahuan tentang karakteristik komunitas adat.

2. Tenaga Lapangan (*Community Worker*)

- Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan pendamping dalam melakukan pendampingan, sehingga pendamping **perlu meningkatkan kemampuan pendampingan masyarakat** melalui seminar dan pelatihan yang terkait dengan ilmu pekerjaan sosial khususnya dari Dinas Sosial juga diberi kesempatan untuk mengikuti seminar dan pelatihan yang diadakan oleh dinas yang terkait.

3. Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam

- **Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan non formal baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua.** Pendidikan merupakan salah satu modal bagi pengembangan personal anggota komunitas sehingga dapat menjadi aset yang berguna dan bermanfaat bagi perkembangan masa depan komunitas.
- **Menjalin kerjasama dengan sesama komunitas adat** sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara Indonesia, juga merupakan salah satu bentuk

aktualisasi diri mereka di masyarakat. sehingga dapat memunculkan rasa percaya diri, dan identitas diri.

Terakhir, Penulis menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, hal ini terjadi karena kesulitan penulis untuk bisa menjangkau semua aspek dalam pelaksanaan program PKAT khususnya pada komunitas Suku Laut tersebut. Yang diharapkan dengan melihat hasil penelitian ini dapat terbuka ruang bagi peneliti lain untuk mendalami dan mengkaji secara lebih dalam, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan bagi Komunitas Adat (*Indigenous People*). Sehingga manfaat program tidak hanya dapat dinikmati pelaksana tetapi juga berguna dan bermanfaat bagi komunitas adat yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta: FISIP UI Press.
- . (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arba, Syarofin dan Rahman, Abdul. (2002). *Menantang Gelombang Kehidupan Suku Laut Di Pulau Bertam Perairan Batam*. Batam: Pustaka Dinamika.
- Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. (Seri IT-02). *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI.
- Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. (2005). *Pengembangan Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Coleman, James S. (2008). *Dasar-dasar Teori Sosial* (Imam Muttaqien, Derta Sri Widowatie, Siwi Purwandari, Penerjemah). Bandung: Nusa Media.
- Creswell, John W. (2002). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Angkatan III&IV KIK UI dan Nur Khabibah, Penerjemah). Jakarta: KIK Press.
- Denzin, K. Norman dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Reseach* (Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2004). *Profil Keberhasilan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil pada 12 Provinsi*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Departemen Sosial RI.
- Dolbelstein, Andrew W. (2003). *Welfare Policy and Analysis*. Singapore: Thomson Learning.

- Fermana, Surya. (2009). *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Field, John. (2010). *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana. Trans. of *Social Capital*, 2003.
- Hikmat, R. Harry. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. (2006). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development* (Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Indihono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- IUCN Inter-Commission Task Force on Indigenous Peoples. (1997). *Indigenous Peoples and sustainability case and Actions*. Utrecht: IUCN.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lawang, Robert M.Z. (2005). *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik*. Jakarta: FISIP UI PRESS.
- Lim Teck Ghee dan Gomes, Alberto G. (1993). *Suku Asli dan Pembangunan Di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial Perspektif Dalam Kesejahteraan Sosial* (Dorita Setiawan dan Sirojudin Abbas, Penerjemah). Jakarta: Ditperta Islam Departemen Agama RI.
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. United State of America: Pearson International Edition.
- Nugroho D, Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisa Kebijakan* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Kencana.

- Puslitbang UKS-Balatbang Sosial. (2005). *Pengembangan Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Puslitbang UKS-Balatbang Sosial-Departemen Sosial.
- Ritzer dan Goodman, Douglas J. (2007). *Teori Sosiologi Modern* (Alimandan, Penerjemah). Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state) di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. (2004). *Hubungan antar-sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- The Interseksi Foundation (TIFA). (2009). *Hak Minoritas Ethnos, Demos, Dan Batas-Batas Multikulturalisme*. Jakarta: TIFA.
- Todaro, Michael P., dan Smith, Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Haris Munandar dan Puji A.L, Penerjemah). Jakarta: Erlangga.
- Wrihatnolo, Randy R. Dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Bahan-Bahan Lain

- Direktorat Bina Masyarakat Terasing. (1987). *Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam*. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing Ditjen BINKESOS-Departemen Sosial RI.

- Direktorat Bina Masyarakat Terasing. (1988). *Ringkasan Laporan Pendataan Masyarakat Terasing Di Daerah Perbatasan Riau*. Jakarta: Direktorat bina Masyarakat Terasing Ditjen BINKESOS- Departemen Sosial RI.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2002). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2009 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Keputusan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor: 06/PENGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil-Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial-Departemen Sosial RI.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2006). "*Jurnal Sistem Informasi Komunitas Adat Terpencil (Sikat)*". Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2008). *Data Persebaran Komunitas Adat Terpencil tahun 2006 yang Dimutakhirkan Tahun 2008*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Muchrodji. (1992). "*Seminar Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing Di Jayapura-Irian Jaya, Peranan Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Propinsi Irian Jaya*". Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial-Departemen Sosial RI.
- Sarinah. (1990). "*Ny. Sri Soedarsono, FKKS Membantu Anak*". Jakarta: Sarinah Edisi tanggal 22 Oktober 1990.
- Soedarsono, Sri. (1993). "*Peranan Forum Komunikasi Dan Konsultasi Sosial (FKKS) Dalam Pembinaan Suku Laut Di Pulau Bertam-Kep. Riau*". Batam: FKKS Batam.
- Suradi. "*Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dimulai dari Mana ?*." Sistem Informasi Komunitas Adat Terpencil (Sikat) (2006): 28-32.

TESIS

Rakhmani. (2009). *Penguatan Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Tiga Kelompok Usaha Bersama Di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)*. Depok: Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Indonesia.

Syafrizal. (2001). *Struktur masyarakat Suku Laut dan Pelaksanaan Program PKSMT (Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing)(Studi Kasus di desa Sungai Bela, Kabupaten Tingkat II Indragiri Hilir, Propinsi Riau)*. Depok: Magister Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Indonesia.

Taupiqurrahman. (2006). *Analisis Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam Pembangunan Daerah di Hulu Sungai Selatan*. Depok: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik-Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia.

Pencarian Internet

Apa dan Siapa KAT?. (2009). Diakses pada tanggal 19 Agustus 2010, dari KAT CENTER Departemen Sosial RI, Web Site:

<http://www.katcenter.info/tentang.php?apa=siapa>

Human Development Index and its components. (2010). Diakses pada tanggal 5 Februari 2011, dari UNDP, Web Site:

<http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/>

KAT; Riwayatmu Nanti ! Edisi 2. (2004). Diakses pada tanggal 19 Agustus 2010. Dari Kementerian Sosial RI, Web Site:

<http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=52>.

Mengapa KAT Harus Diberdayakan. (2010). Diakses pada tanggal 18 Agustus 2010. Dari Kementerian Sosial RI, Web Site:

<http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=15287>

- Penduduk Indonesia tahun 2010. (2011). Diakses pada tanggal 7 Februari 2011, dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Web Site: <http://bps.go.id/bps-tahun-2010-penduduk-indonesia-2342-juta>
- Siapa Masyarakat Adat. diakses pada tanggal 18 September 2010. (1999). Dari Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Web Site: (<http://www.aman.or.id/in/masyarakat-adat/siapa-masyarakat-adat.html>)
- Suku Laut di Batam terancam punah. (2010). Diakses pada tanggal 19 Januari 2011, dari tempo interaktif terbit pada tanggal 6 April 2010, Web Site: <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/04/06/brk,20100406-238293,id.html>
- Swanson, Burton E. , Bentz, Robert P., and Sofranko, Andrew J. (1996). Using rapid or participatory rural appraisal. Diakses pada tanggal 6 Juli 2010, Web Site: <http://www.fao.org/docrep/w5830e/w5830e08.htm>
- Tentang ASEAN. (2009). Diakses pada tanggal 4 Januari 2011, dari Kementerian Luar Negeri RI, Web Site: <http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=6&l=id>
- Undang-Undang Kesejahteraan Sosial RI. (2009). Diakses pada tanggal 19 Agustus 2010, dari Departemen Sosial RI, Web Site: <http://www.depsos.go.id/unduh/UU-Kesos-No11-2009.pdf>

Lampiran 1. Telaah Penelitian Mengenai Komunitas Adat Terpencil

Sasaran Telaah	Penelitian yang Ditelaah			
	1	2	3	4
Judul Penelitian	Struktur masyarakat Suku Laut dan Pelaksanaan Program PKSMT (Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing)(Studi Kasus di desa Sungai Bela, Kabupaten Tingkat II Indragiri Hilir, Propinsi Riau)	Pengembangan Model Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil	Analisis Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam Pembangunan Daerah di Hulu Sungai Selatan	Penguatan Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Tiga Kelompok Usaha Bersama Di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)
Tahun penelitian	2001	2003 dan 2004	2006	2009
Keluaran lembaga	FISIP, Magister Sosiologi	Pusat Penelitian dan Pengembangan usaha kesejahteraan sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen sosial RI	FE UI, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik	FISIP, Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Kekhususan Pembangunan Sosial
Pertanyaan penelitian	1. Pelaksanaan Program PKSMT yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan petugas lapangan maupun instansi yang terkait	1. Apakah ada perbedaan pemenuhan kebutuhan sosial dasar KAT sebelum – sesudah uji coba konsep model 2. Apakah ada perbedaan kondisi sosial KAT	1. Bagaimanakah proses pelaksanaan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di lokasi penelitian. 2. Bagaimanakah peran pemerintah Pusat dan	1. Bagaimana pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga Kelompok Usaha Bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten

	<p>di daerah tingkat II Indragiri Hilir.</p> <p>2. Program pembangunan yang dilaksanakan Depsos, oleh masyarakat suku laut dianggap tidak operasional terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi.</p> <p>3. Kenyataan program yang kabarkan menghabiskan dana puluhan juta rupiah menjadi mubazir dan tidak efektif.</p>	<p>sebelum – sesudah uji coba konsep model</p> <p>3. Apakah ada perbedaan kondisi ekonomi KAT sebelum – sesudah uji coba konsep model</p> <p>4. Apakah ada perbedaan kondisi religi KAT sebelum – setelah uji coba konsep model</p> <p>5. Apakah ada perbedaan kondisi ekologis KAT sebelum – setelah uji coba konsep model</p>	<p>Pemerintah Daerah, serta warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan.</p>	<p>Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan?</p> <p>2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung/penghambat pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga Kelompok Usaha Bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan?</p> <p>3. Bagaimana dampak pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi tiga Kelompok Usaha Bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan?</p>
Temuan	Pelaksanaan program PKSMT menunjukkan	Terjadi perubahan positif sekitar 65% anggota matra	Hasil analisa ekspert dengan metode AHP diperoleh hasil	Peran Pendamping dalam mempercepat proses

	kegagalan, dilihat dari kondisi sosial ekonomi suku laut belum terwujud dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suku laut. Dari pembinaan Depsos justru ada kesan muncul sifat ketrgantungan masyarakat pada pemerintah	individu dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi religi, kondisi ekologi setelah uji coba konsep dan model pemberdayaan pada KAT	bahwa kebijakan PKAT yang optimal dapat terwujud apabila: Target kemandirian warga KAT dapat dicapai, kendala Sumber Daya Manusia warga KAT yang diberdayakan dapat teratasi, pelaku uatam adalah warga KAT sendiri sebagai tokoh central, strategi yang paling diprioritaskan adalah peningkatan dan pengintegrasian partisipasi masyarakat.	pemberdayaan pada Komunitas Adat Terpencil
Metode	Kualitatif	Kuantitatif dan teknik analisa kualitatif	Kualitatif dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dan metode Analitical Hierarchy Process (AHP)	Kualitatif
Penelitian terdahulu yang menjadi acuan	Parsudi Suparlan (1982), Edi indrizal (1992), dan Tasman (1995)	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan	Lubis (2004) dan Ichsan (2004)
Keunggulan penelitian	Menggambarkan struktur masyarakat suku laut terkait dengan program kebijakan Depsos	Menggambarkan pengembangan model pemberdayaan dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar,	Menggambarkan analisis kebijakan Pemberdayaan KAT serta kendala dalam pelaksanaan kebijakan	Menggambarkan Pengembangan berbasis komunitas yang didukung oleh pendamping dalam memberdayakan KAT untuk

		kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi religi, dan kondisi ekologi dari Komunitas Adat Terpencil		memahami program, memutuskan kegiatannya, memprosesnya dari perencanaan sampai evaluasi, membantu kelompok sasaran menjadi mandiri
Persamaan dengan penelitian ini	Menggambarkan program kebijakan depsos pada komunitas suku laut	Menggambarkan model pemberdayaan pada komunitas adat terpencil	Menggambarkan kebijakan Pemberdayaan KAT	Menggambarkan pemberdayaan pada komunitas adat terpencil
Perbedaan dengan penelitian ini	Memfokuskan pada struktur masyarakat dan hubungannya dengan program PKSMT dari Depsos. Sasaran penelitian pada suku laut di desa Bela kabupaten tingkat II indragiri hilir, Provinsi Riau.	Terfokus pada pengembangan model pemberdayaan KAT, metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan dibantu analisis data kualitatif, dengan komunitas sasaran komunitas osing di Kabupaten banyuwangi Propinsi Jawa Timur dan Komunitas Naga di Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.	Menggunakan metode PRA dan AHP dalam menganalisa kebijakan pemberdayaan KAT di Hulu Sungai Selatan.	Lebih terfokus pada usaha ekonomi produktif, lokasi penelitian di desa hamak Utara kecamatan telaga langsung kabupaten hulu sungai selatan Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Diolah berdasarkan penelusuran pustaka, 2010

Lampiran 2.

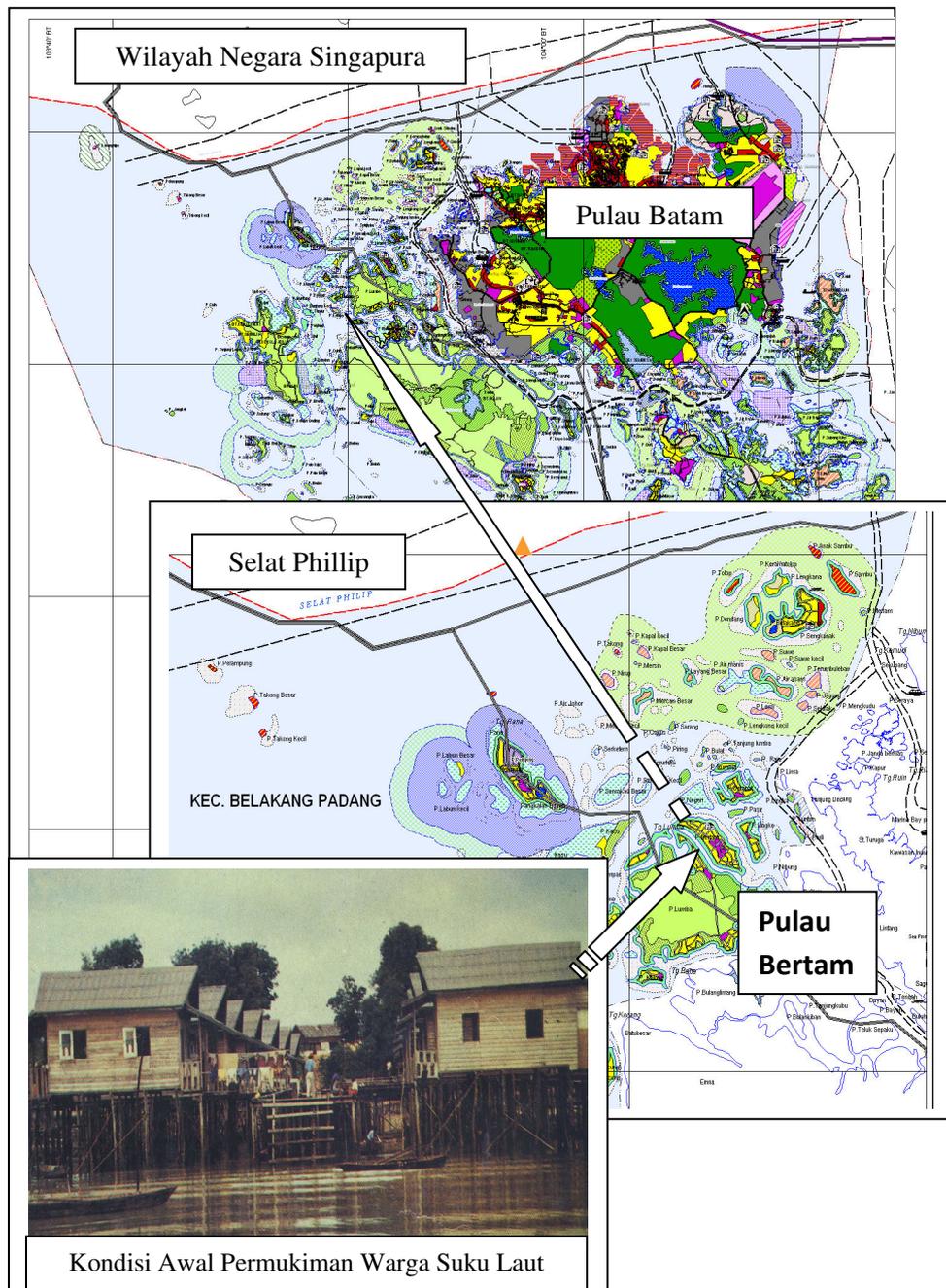
Perubahan Nomenklatur KAT

Nomenklatur	Definisi	Keterangan
1. Suku Terasing (1976) (Sumber: Panduan Umum Studi Kelayakan Persiapan Pemberdayaan KAT Tahun 2003, Depsos RI)	Sekelompok masyarakat dan atau suku-suku tertentu yang dikategorikan masih terasing secara sosial budaya sehingga belum bisa membaaur dengan masyarakat sekitarnya.	Amin Muzzakir dalam TIFA mengungkapkan bahwa istilah Suku Terasing, tampak sekali merupakan penamaan pihak luar terhadap sebuah kelompok tertentu yang berkonotasi merendahkan, baik dalam pengertian geografis maupun psikologis (77).
2. Masyarakat Terasing (1987) (Sumber: data dan Informasi Pembinaan Masyarakat terasing Tahun 1987, Dit.BMT, Depsos RI)	Kelompok masyarakat yang mendiami suatu lokasi daerah yang terpencil, terisolir, maupun mereka yang hidup mengembara di kawasan laut, yang tingkat kesejahteraan sosial mereka masih sangat sederhana dan terbelakang ditandai dengan sangat sederhananya sistem sosial, sistem ideologi serta sistem teknologi mereka belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan.	Terjadi perubahan tata nama dari Suku Terasing menjadi Masyarakat Terasing yang berdampak pada redefinisi dari suku terasing
3. Masyarakat Terasing (1992) (Sumber : Kumpulan Makalah Penanganan Masyarakat Terasing di Indonesia, Dit BMT, Depsos)	Kelompok masyarakat yang mendiami suatu lokasi tertentu, baik yang orbitasinya terpencil, terpenjar dan berpindah-pindah maupun yang hidup mengembara di kawasan laut, yang taraf kesejahteraannya masih mengalami ketertinggalan, ditandai oleh adanya kesenjangan sistim sosial, sistim ideologi dan sistem teknologi mereka belum atau sedikit sekali terintegrasi dalam proses pembangunan nasional	Redefinisi masyarakat terasing hanya memperluas cakupan sasaran kebijakan yang sebelumnya dikategorikan sebagai mereka secara kesejahteraan mengalami ketertinggalan.

<p>4. Masyarakat Terasing (1994) Sumber: (Kepmensos No. 05/HUK/1994 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing)</p>	<p>Kelompok-kelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau berkelana di tempat-tempat yang secara geografik terpencil, terisolasi dan secara sosial budaya terasing dan atau masih terbelakang dibandingkan dengan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya</p>	<p>Redefinisi ulang masyarakat terasing hanya memperluas cakupan sasaran kebijakan yang sebelumnya dikategorikan sebagai mereka secara kesejahteraan mengalami ketertinggalan.</p>
<p>5. Masyarakat Terasing (1998) (Sumber: Kepmensos No. 69/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing)</p>	<p>Kelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial-budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik nasional</p>	<p>Jika definisi sebelumnya menggunakan kata “terpencil, terisolasi, terbelakang” mengalami perubahan menjadi “bersifat lokal dan terpencar serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik nasional”</p>
<p>6. Komunitas Adat terpencil (KAT) (1999) (Sumber: Keppres No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil & Kepmensos No. 06/PEGHUK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil).</p>	<p>Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik</p>	<p>Perubahan nomenklatur dari “Masyarakat Terasing” menjadi “Komunitas Adat Terpencil”. Terjadi perubahan dalam metode dari top down ke bottom up atau pemberdayaan. Istilah Masyarakat Terasing mengandung “stigmasasi” dan punya tendensi “Merendahkan Status Etnisitas tertentu” serta bermakna adanya sebuah komunitas/nilai-nilai sosial budaya “Asing” yang bukan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI).</p>

Sumber: Diadaptasi dari (KAT, 2004) diolah kembali.

Peta Letak Lokasi Pulau Bertam



Sumber: Dokumentasi penelitian, Oktober 2010

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS FKKS/ KKKS BATAM

BADAN PERTIMBANGAN

1. Badan Pertimbangan adalah orang/perangkat FKKS/ KKKS Batam yang terdiri atas unsur masyarakat, pemerintah dan lain-lain yang dianggap perlu dalam musyawarah FKKS/ KKKS Batam.
2. Badan Pertimbangan dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil, serta seorang Sekretaris dengan dua orang anggota, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musda.
3. Tugas Badan Pertimbangan FKKS/ KKKS Batam adalah memberikan pertimbangan dan pengawasan bagi suksesnya pelaksanaan tugas Badan Pengurus FKKS/ KKKS Batam. Adapun uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan Musyawarah.
 - b. Menilai dan Mengusulkan pemyempurnaan dan atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Badan Pengurus FKKS/ KKKS Kota Batam.
 - c. Melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan dibidang Sosial dan Kesejahteraan Sosial agar tetap sejalan dengan kebijaksanaan Umum FKKS/ KKKS Batam, dan memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Pengurus FKKS/ KKKS Batam mengenai pembinaannya.
 - d. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Badan Pengurus baik diminta maupun tidak mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi.
 - e. Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan program umum organisasi kepada Muscab, setelah menampung aspirasi dari Anggota Organisasi dibidang Sosial di Batam.
 - f. Badan Pertimbangan FKKS/ KKKS Batam dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat mengadakan rapat tersendiri yang diinformasikan kepada Badan Pengurus Harian FKKS/ KKKS Batam.

BADAN PENGURUS FKKS/ KKKS BATAM

KETUA UMUM

1. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pimpinan FKKS/ KKKS Batam
2. Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan Kesejahteraan Sosial.
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan Kesejahteraan Sosial yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh anggota dan Pengurus FKKS/ KKKS Batam

4. Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musda, Raperda dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musda.

KETUA I

1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya yang membidangi kegiatan dibidang Pemberdayaan Anggota, Keorganisasian, Pelayanan Pendidikan dan Latihan serta Advokasi Anggota.
2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
3. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan Bidang Organisasi, Komisi Hukum, Komisi Kehormatan, dan Pemberdayaan Anggota.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

KETUA II

1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya dalam mengkoordinasi kegiatan kerjasama dan kerelawanan.
2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan
3. Mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan, penggalangan Relawan Sosial, dan Penggalangan Kerjasama dengan instansi terkait dalam kemitraan dibidang kegiatan kesejahteraan sosial.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum

KETUA III

1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya dalam bidang Penggalangan Dana.
2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan
3. Mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan Kerjasama usaha kesejahteraan Masyarakat, penghimpunan dana sosial Perusahaan dan dana bantuan-bantuan Pemerintah, serta dana bantuan luar negeri melalui berbagai bentuk kegiatan Kesejahteraan Sosial.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum

KETUA IV

1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya dalam mengkoordinasi kegiatan kerjasama dan kerelawanan.
2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan
3. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bidang kegiatan, media dan promosi, hubungan masyarakat serta Pusat system informasi kegiatan kesejahteraan Sosial.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

SEKRETARIS

1. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan
2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kerja Sekretariat
3. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas semua kegiatan administrasi di lingkungan FKKS/ KKKS Batam
4. Mendukung seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional bidang komisi di lingkungan FKKS/ KKKS Batam
5. Melaksanakan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan materil, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan FKKS/ KKKS Batam.
6. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan FKKS/ KKKS Batam
7. Mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Musda, Raparda yang dilaksanakan Panitia Pelaksana.
8. Mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Musda, Raparda yang dilaksanakan Panitia Pelaksana.
9. Menjadikan pendamping dan narasumber pada setiap Raparda
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Umum.
11. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil sekretaris.
12. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua umum.

WAKIL SEKRETARIS

1. Mewakili Sekretaris apabila berhalangan
2. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya
3. Mengkoordinasikan dan meningkatkan hubungan kerja dengan setiap anggota dan Pengurus FKKS/ KKKS.
4. Mempersiapkan dan membantu serta mengarahkan Panitia Pelaksana setiap Musda, Raparda sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
5. Menjadi narasumber bilamana dibutuhkan oleh Instansi dan Media Umumnya
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.

BENDAHARA

1. Melaksanakan kebijakan umum dalam urusan keuangan dan anggaran
2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
4. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik
6. Didalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh seorang Wakil Bendahara
7. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Raparda
8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

WAKIL BENDAHARA

1. Mewakili Bendahara apabila berhalangan

2. Membantu Bendahara dalam melaksanakan setiap tugasnya
3. Mendampingi Bendahara sebagai Narasumber pada setiap Raparda
4. Di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara.

BIDANG PEMBERDAYAAN ANGGOTA

1. Memberikan pendapat/rekomendasi atas setiap usul/rancangan perubahan dan/atau pengecualian terhadap ketentuan AD dan atau ART.
2. Memberikan usul agar terhadap AD dan/ atau ART dilakukan perubahan dan atau pengecualian.
3. Membantu Ketua I dalam bidang Pemberdayaan Anggota, Keorganisasian, Advokasi Anggota dan Pemberdayaan anggota
4. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Program Kerja FKKS/ KKKS Batam dalam bidangnya.
5. Memberikan saran-saran kepada Ketua I dan atau Ketua umum dalam bidang pembinaan Keanggotaan dan Keorganisasian.
6. Mengkkoordinasikan semua kegiatan berkaitan dengan kegiatan/pembinaan Anggota dan organisasi anggota serta pengurus FKKS/ KKKS Batam
7. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Keanggotaan dan organisasi pada setiap Raparda
8. Memberikan pengarahan di bidang Keanggotaan dan organisasi dalam setiap Musda yang dilaksanakan oleh anggota dan Pengurus FKKS/ KKKS Batam
9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan Bidang Keanggotaan dan Organisasi secara periodik
10. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Ketua I.
11. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari Keanggotaan, Keorganisasian Layanan Advokasi Hukum dan Komisi Kehormatan Organisasi Kesejahteraan Sosial.
12. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua I

KOORDINATOR BIDANG KERJASAMA DAN KERELAWANAN

1. Memberikan pendapat/rekomendasi atas setiap usul kerjasama dengan berbagai pihak yang mengikat kepada Organisasi FKKS/ KKKS Batam.
2. Memberikan usul organisasi dalam optimalisasi pengalangan relawan dari berbagai keahlian untuk membentuk tim Relawan Terpadu bidang Kesejahteraan sosial Kota Batam.
3. Membantu Ketua II dalam bidang Kerjasama dan Kerelawanan.
4. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Program Kerja FKKS/ KKKS Batam dalam bidangnya.
5. Memberikan saran-saran kepada Ketua II dan atau Ketua umum dalam bidang pembinaan Kerjasama Organisasi dan Kerelawanan.
6. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengalangan kerjasama kepada berbagai pihak serta penghimpunan kerelawanan Sosial dari berbagai Pihak yang terkait dibidang Pendidikan, Sosial, Kesehatan, dan Kesejahteraan.
7. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Kerjasama dan Kerelawanan setiap kesempatan yang terkait dengan organisasi.

8. Memberikan pengarahan di bidang Kerjasama dan Kerelawanan dalam setiap Musda yang dilaksanakan oleh anggota dan Pengurus FKKS/ KKKS Batam
9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan Bidang Kerjasama dan Kerelawanan secara periodik
10. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Ketua II
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sehari-hari pelaksanaan Kerjasama dan Kerelawanan bidang Kesejahteraan Sosial.
12. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua II.

KOORDINATOR BIDANG PENGGALANGAN DANA

1. Mengkaji usulan-usulan aktivitas anggota Kesejahteraan Sosial Batam dalam bidang kesehatan, sosial, pendidikan yang dapat menghasilkan dana untuk kepentingan FKKS/ KKKS Batam
2. Mencari dan menciptakan peluang-peluang usaha dan kesejahteraan yang berkaitan dengan kegiatan FKKS/ KKKS Batam baik skala daerah, regional, nasional untuk kepentingan FKKS/ KKKS Batam
3. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan FKKS/ KKKS Batam tentang gagasan penggalangan dana Organisasi dan atau pengembannya.
4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua III
5. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Ketua III

KOORDINATOR BIDANG LITBANG DAN LAYANAN UMUM

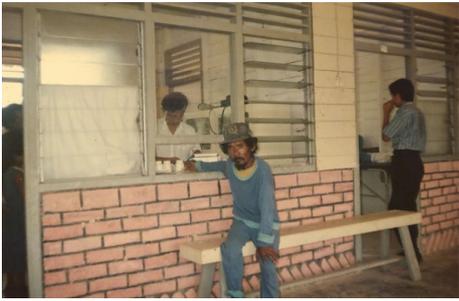
1. Mengkoordinasi dan mempersiapkan materi berita, informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media masa dalam kerangka sosialisasi keberadaan FKKS/ KKKS Batam, dan kegiatan-kegiatan FKKS/ KKKS Batam.
2. Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menerbitkan bahan-bahan publikasi Menyusun criteria, klarifikasi dan standarisasi pendidikan dan pelatihan anggota.
3. Melakukan penelitian dan pembakuan metoda perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, serta pembinaan dalam bidang kesejahteraan sosial.
4. Mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan kesejahteraan Sosial kepada masyarakat melalui media massa dan lainnya
5. Melaksanakan penataran dan pelatihan Anggota, pelatih dan personil pendukung kegiatan kesejahteraan Sosial lainnya dengan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan peralatan terbaru
6. Mendokumentasikan setiap kegiatan FKKS/ KKKS
7. Membina hubungan dan kebersamaan dengan insan pers dan unsur-unsur media dan instansi terkait dan masyarakat.
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan hak penayangan dan penyiaran kegiatan kesejahteraan Sosial multievent di Batam, baik tingkat Daerah, Nasional maupun regional/internasional.
9. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua IV
10. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan Ketua Bidang Media & Promosi.

PEDOMAN WAWANCARA
 PELAKSANAAN PROGRAM
 PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PKAT)
 (Studi Deskriptif Pada Komunitas Suku Laut
 di Pulau Bertam - Kota Batam)

Aspek	Informasi Yang Ingin Digali	Sumber Data
A. Pelaksanaan Program	1. Latar belakang program PKAT pada komunitas suku laut di pulau Bertam-Kota Batam. 2. Persiapan program PKAT pada komunitas suku laut di pulau Bertam-Kota Batam. a. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat persiapan program b. Lembaga/ Organisasi yang berperan dalam tahap persiapan 3. Persiapan Petugas a. lembaga/organisasi pelaksana program b. Alasan pemilihan lembaga/organisasi tersebut sebagai pelaksana program c. Peran dan fungsi masing-masing lembaga/organisasi pelaksana program d. Tata cara pemilihan petugas pelaksana (<i>Community Worker</i>)	Pemerintah/ Community Worker (CW) Orsos/ (CW)
	4. Persiapan Lapangan a. Tata cara penggalian data kelompok sasaran b. Tata cara penentuan lokasi sasaran c. Tata cara mengetahui kebutuhan kelompok sasaran d. Tata cara penyusunan dan penentuan kegiatan e. Tata cara menumbuhkan kesadaran masyarakat agar ikut serta dalam kegiatan f. Keikutsertaan (partisipasi) masyarakat dalam kegiatan persiapan lapangan 5. Pelaksanaan kegiatan program PKAT pada komunitas suku laut di pulau Bertam-Kota Batam. a. Proses Pelaksanaan program b. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat	Pemerintah/CW Orsos/CW Masyarakat

	<p>program</p> <p>c. Keikutsertaan (partisipasi) masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p>6. Pelaksanaan proses akhir (terminasi) program PKAT pada komunitas suku laut di pulau Bertam-Kota Batam</p> <p>a. Proses Pelaksanaan Kegiatan Terminasi</p> <p>b. Keikutsertaan (partisipasi) masyarakat dalam proses terminasi</p>	
B. Faktor Penghambat dan Pendukung program	<p>1. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program</p> <p>2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program</p>	
C. Dampak Implementasi program	<p>1. Dampak langsung pelaksanaan program pada masyarakat suku laut di pulau Bertam</p> <p>2. Dampak tidak langsung pelaksanaan program pada masyarakat di luar komunitas suku laut di pulau Bertam</p>	

FOTO SARANA DAN PRASARANA
PROGRAM PKAT PADA KOMUNITAS
SUKU LAUT DI PULAU BERTAM – KOTA BATAM

Sarana Fisik hasil (<i>Out put</i>) Program	Kondisi Pada Saat Penelitian
Pemukiman Komunitas Suku Laut	
 <p data-bbox="311 936 815 1034">Bentuk pemukiman yang menjorok ke dalam dan terlihat rapi dan lingkungan yang bersih</p>	 <p data-bbox="863 936 1351 1034">Kondisi pemukiman terlihat beberapa bangunan dan sarana mulai rusak dan lapuk</p>
Balai Kesehatan warga	
 <p data-bbox="363 1429 759 1487">Warga memanfaatkan fasilitas kesehatan</p>	 <p data-bbox="906 1429 1302 1487">Balai kesehatan yang tidak lagi difungsikan</p>
Gedung Sekolah	
 <p data-bbox="336 1854 786 1912">Murid SD Bertam didepan gedung sekolah</p>	 <p data-bbox="869 1854 1342 1912">Kerja bakti di depan gedung sekolah baru</p>

Sarana Fisik hasil (<i>Out put</i>) Program	Kondisi Pada Saat Penelitian
Fasilitas Ibadah untuk Umat Islam	
	
Fasilitas Masjid sebagai tempat ibadah	Kondisi Masjid setelah perbaikan
Ruang Serba Guna	
	
Pemanfaatan Ruang Serba Guna Pada saat tahap Terminasi	Ruang serba Guna telah roboh hanya terlihat lantai dasar bangunan
Monumen “Perahu Kajang”	
	
Monumen Perahu Kajang	Perahu Kajang tidak lagi di tempatnya

Sarana Fisik hasil (<i>Out put</i>) Program	Kondisi Pada Saat Penelitian
Fasilitas Air Minum dan MCK	
 <p data-bbox="347 772 791 840">Salah satu beneficiaries sedang melakukan aktivitas mencuci baju</p>	 <p data-bbox="884 772 1348 840">Sumur tanah yang masih digunakan warga Bertam</p>
Fasilitas 1 buah yetti sepanjang 250 mtr dan pelantar seluas 18 m²	
 <p data-bbox="320 1288 820 1355">Kondisi yetti dan pelantar sesaat setelah dibangun</p>	 <p data-bbox="874 1288 1358 1355">Kondisi pelantar yang mulai rusak dan berlobang</p>
Jalan Setapak 150 meter yang Telah Disemenisasi	
	
Jalan terlihat rapi	Jalan setapak masih difungsikan warga

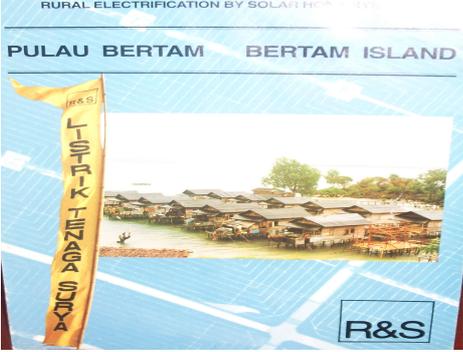
Sarana Fisik hasil (<i>Out put</i>) Program	Kondisi Pada Saat Penelitian
Listrik Tenaga Surya	
	
<p>Modem yang bisa dijumpai hampir pada setiap rumah di permukiman</p>	<p>Salah satu modem yang masih berfungsi</p>

FOTO KEGIATAN
PENELITIAN PELAKSANAAN PROGRAM PKAT
PADA KOMUNITAS SUKU LAUT DI PULAU BERTAM-KOTA BATAM



Wawancara penulis dengan Bapak Saniman sebagai mantan "Satgasos" PKAT pada komunitas suku laut di Pulau Bertam



Wawancara penulis dengan Ibu Sri Soedarsono "Ketua" KKKS (Sebelumnya bernama FKKS) Batam



Perjalanan Menuju pulau Bertam dari pulau Batam



Wawancara penulis dengan Bapak Husein Warga
pulau Bertam-Kota Batam



Wawancara penulis dengan bapak Rahman Warga
pulau Bertam-Kota Batam



Wawancara penulis dengan sekretaris kelurahan
dengan didampingi Mbak Norma warga Bertam



Aktivitas bersama keluarga Mbak Norma Warga pulau Bertam-Kota Batam

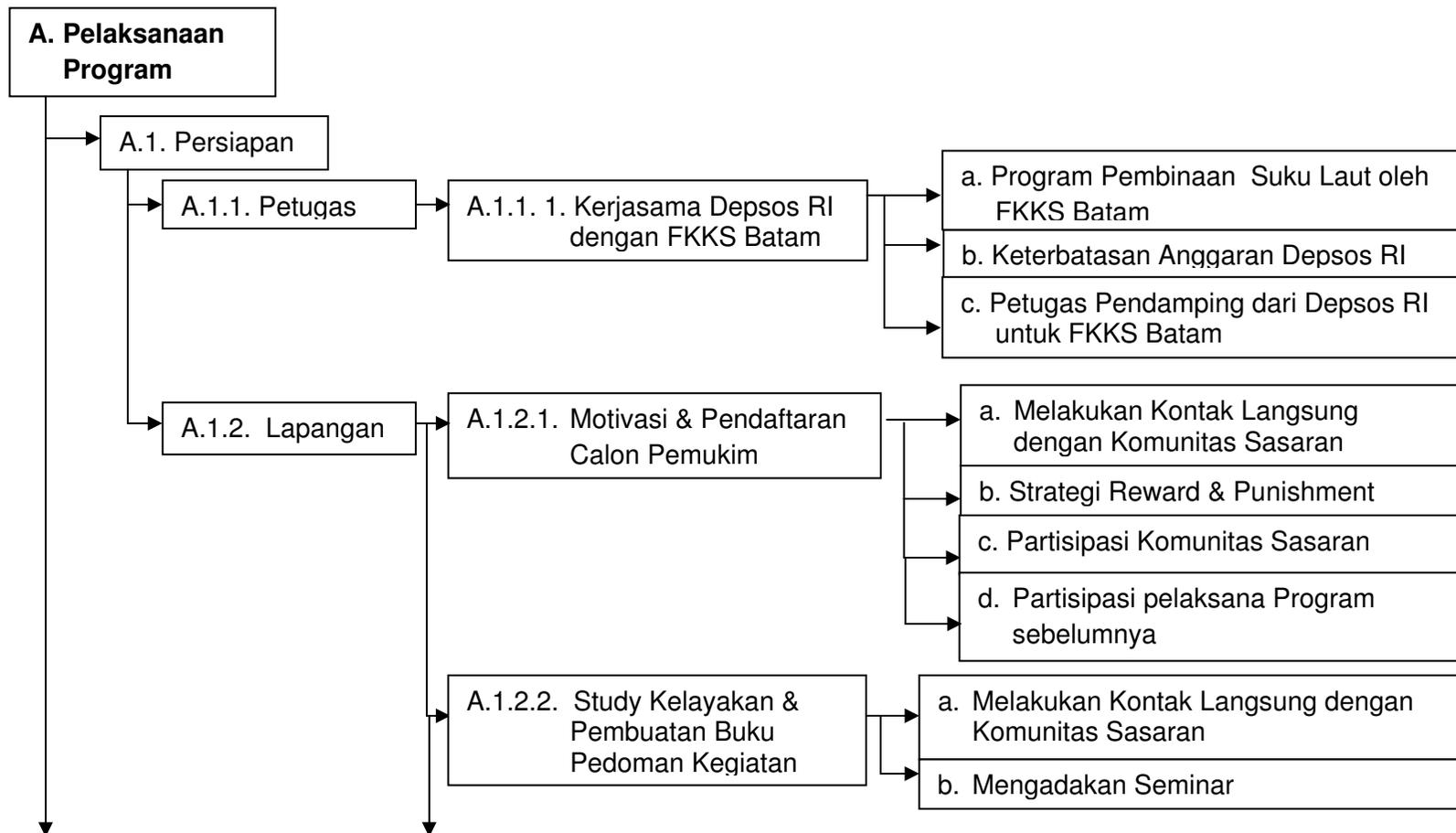


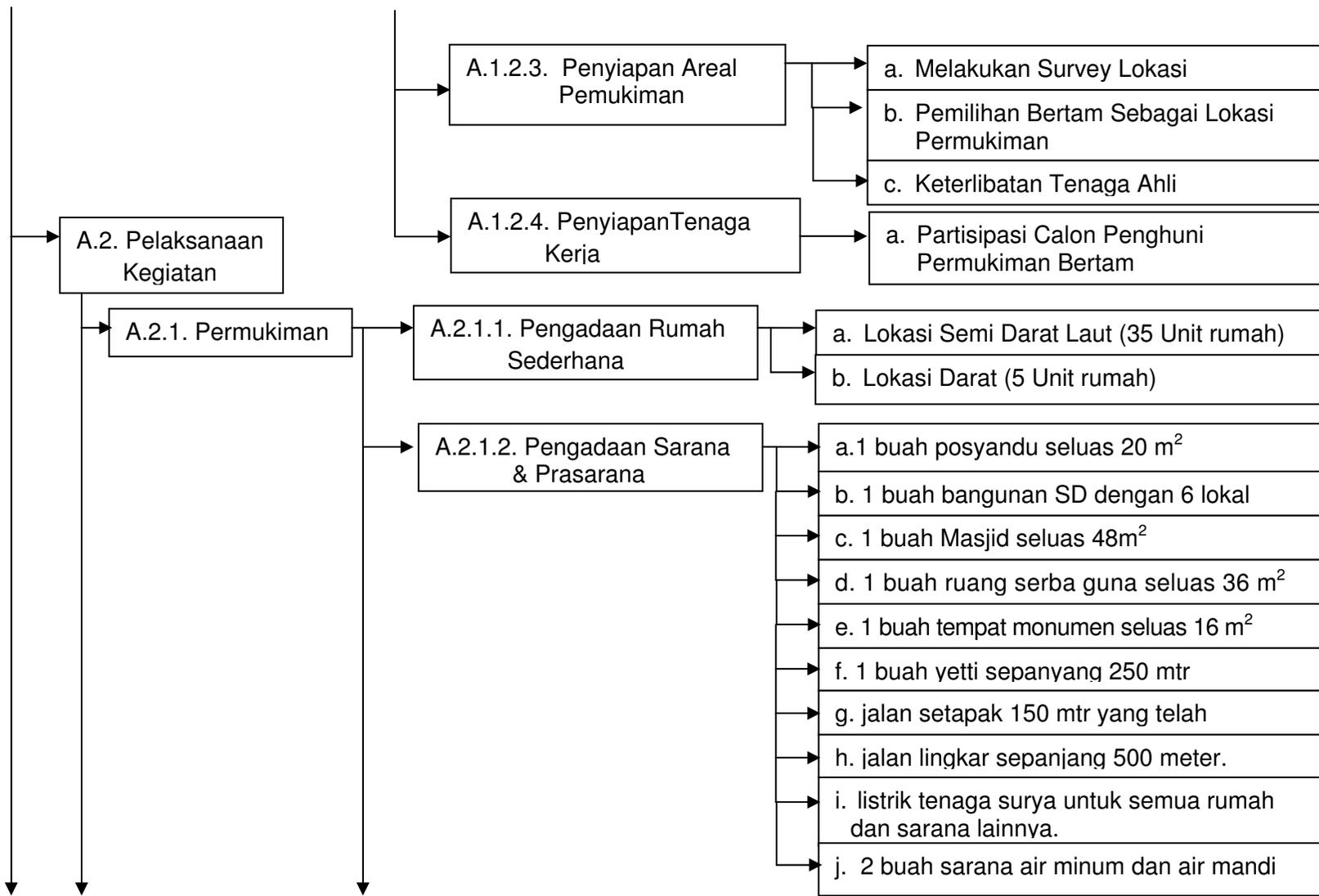
Ketua RT 20 pulau Bertam-Kota Batam "Bapak Matno"

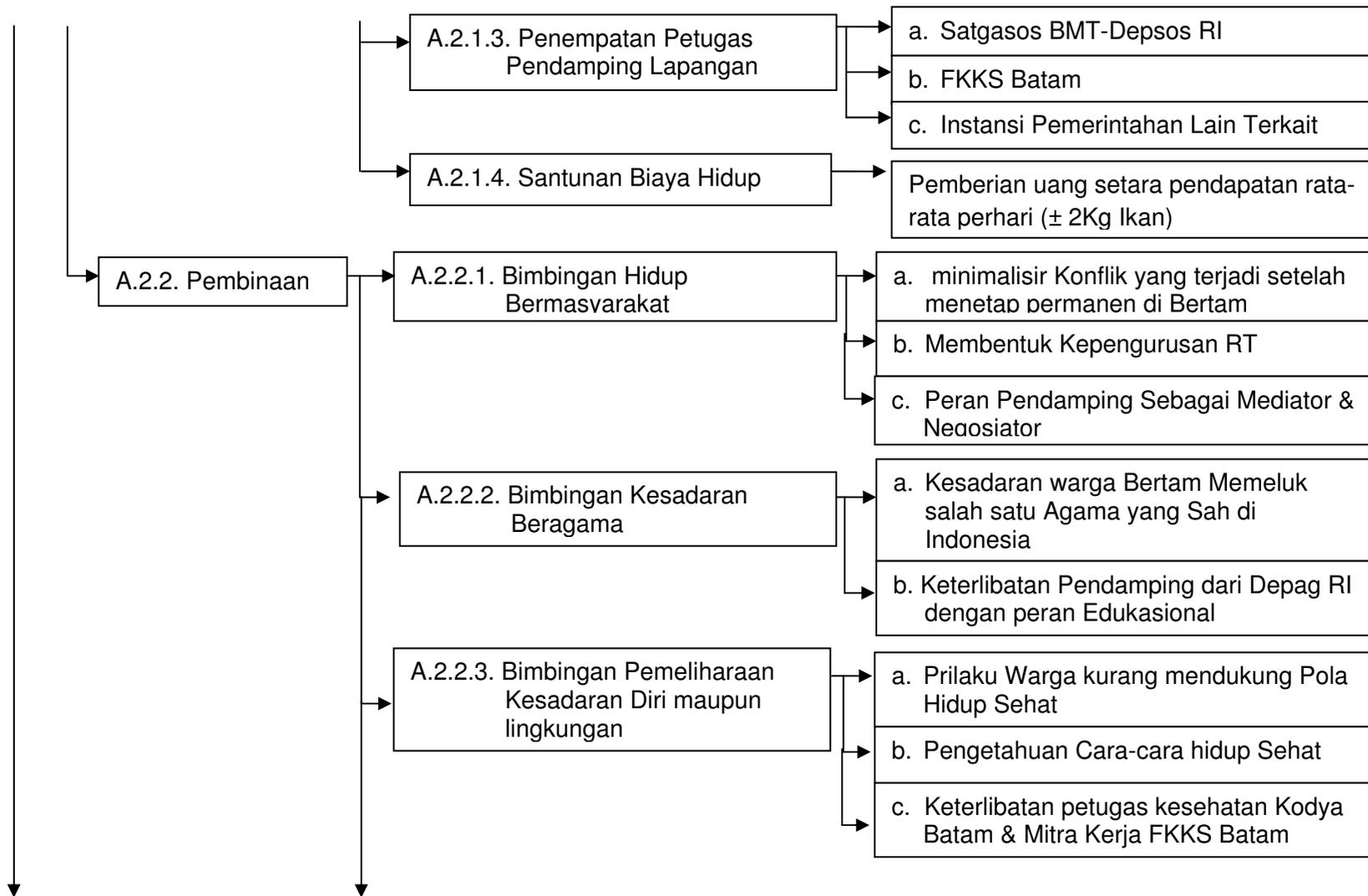


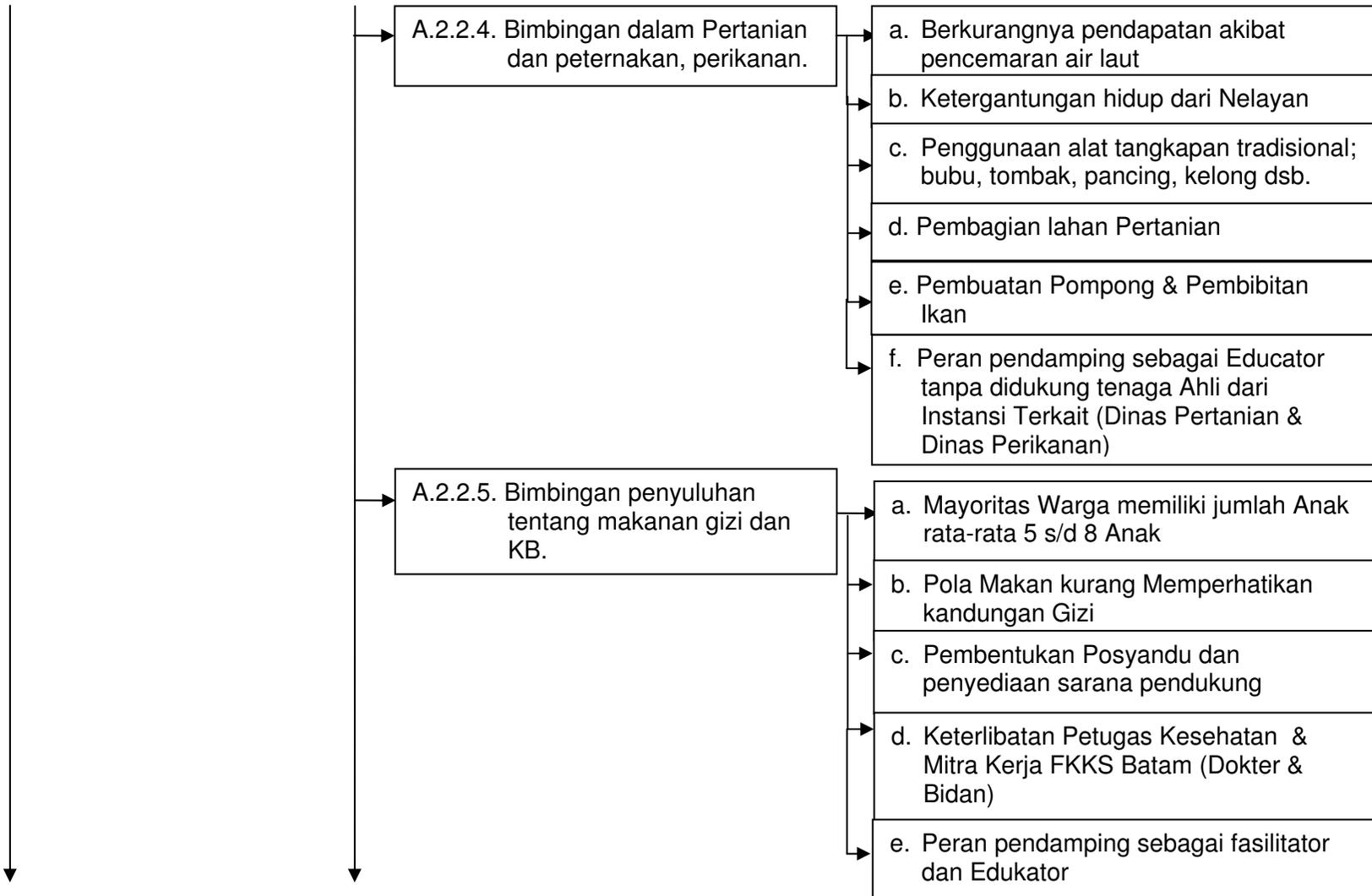
Berbagi permainan dengan siswa SDN Lokal Jauh 006 Belakang Padang Di pulau Bertam-Kota Batam

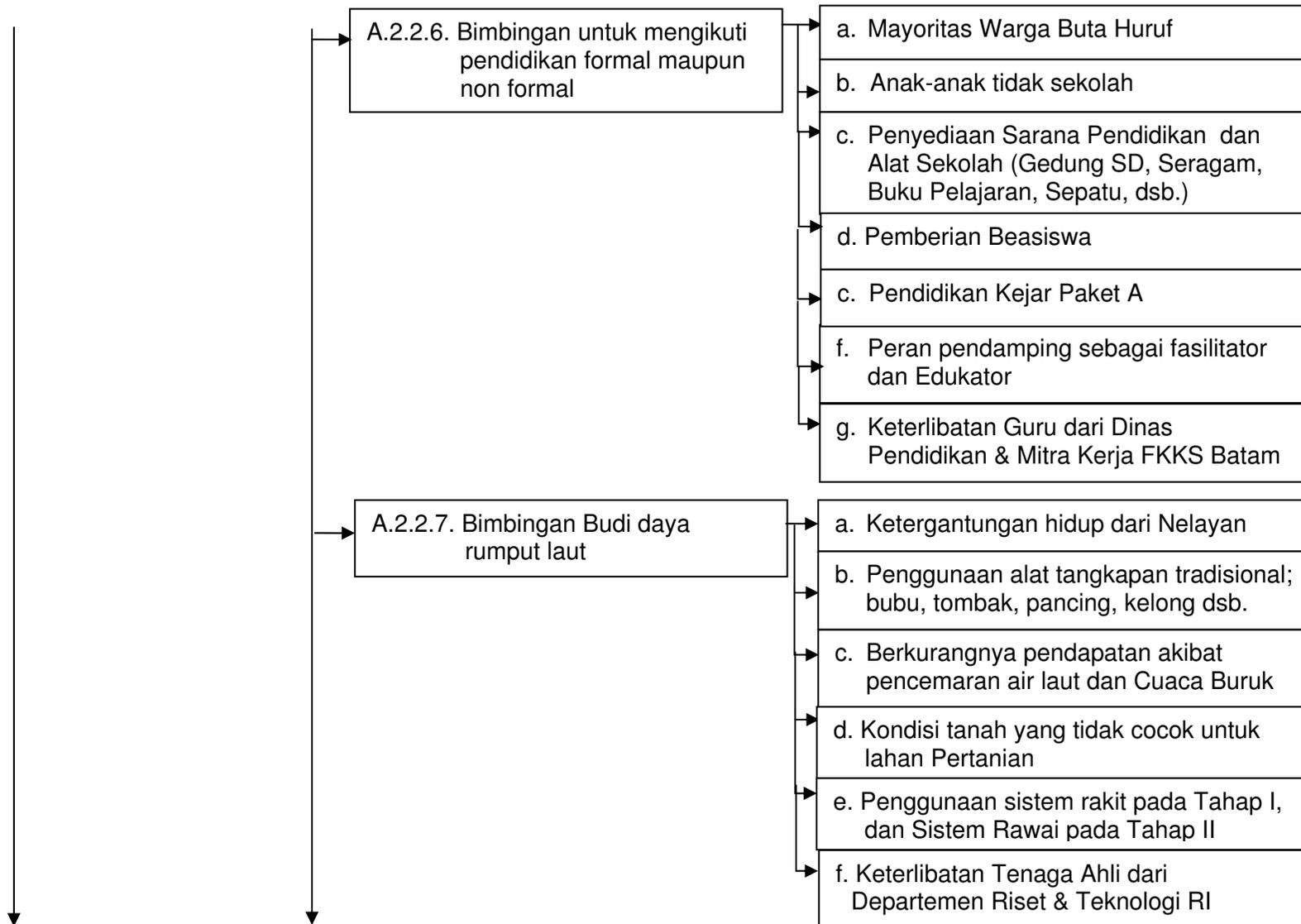
**TAKSONOMI PENELITIAN
PELAKSANAAN PROGRAM PKAT
PADA KOMUNITAS SUKU LAUT DI PULAU BERTAM-KOTA BATAM**

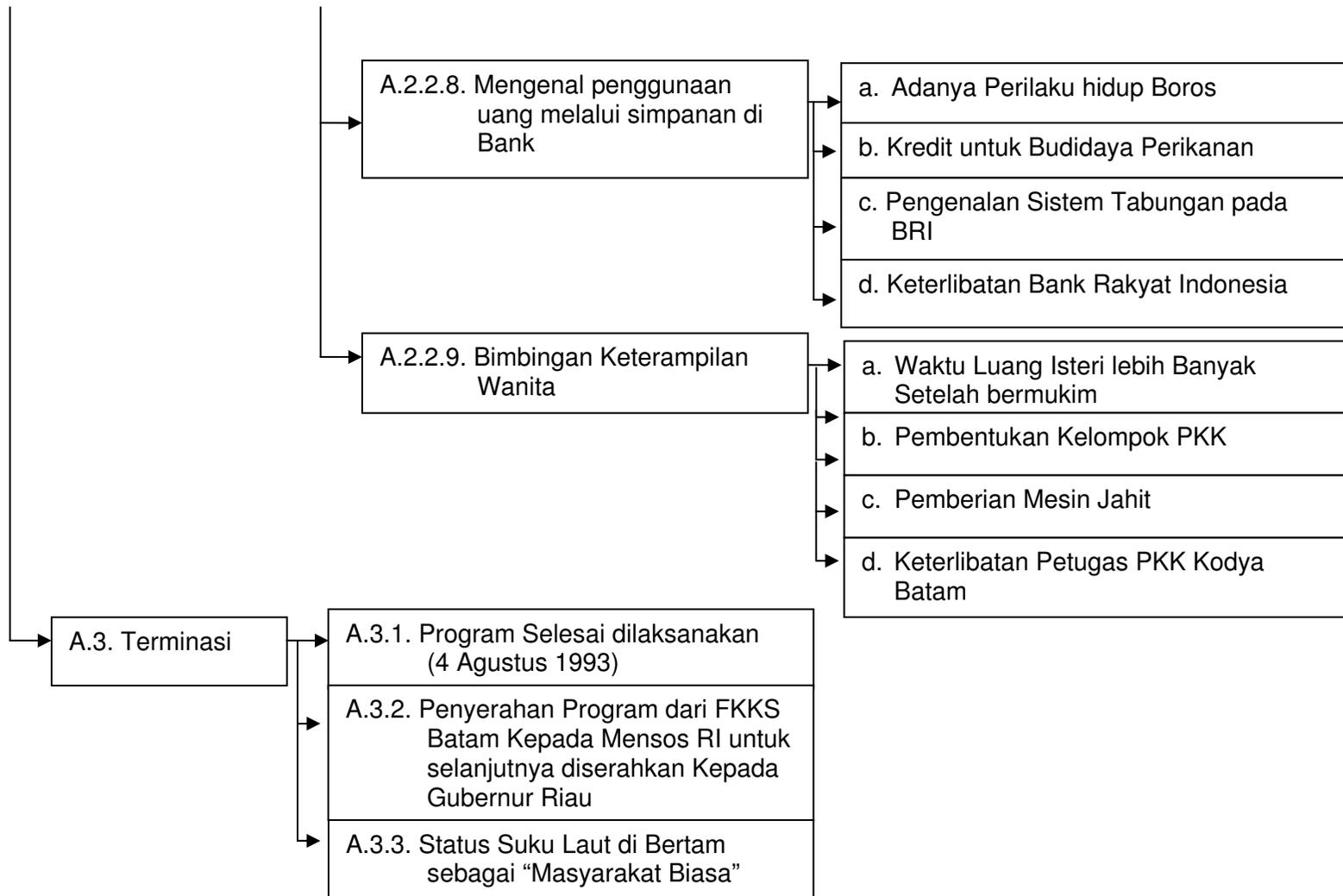


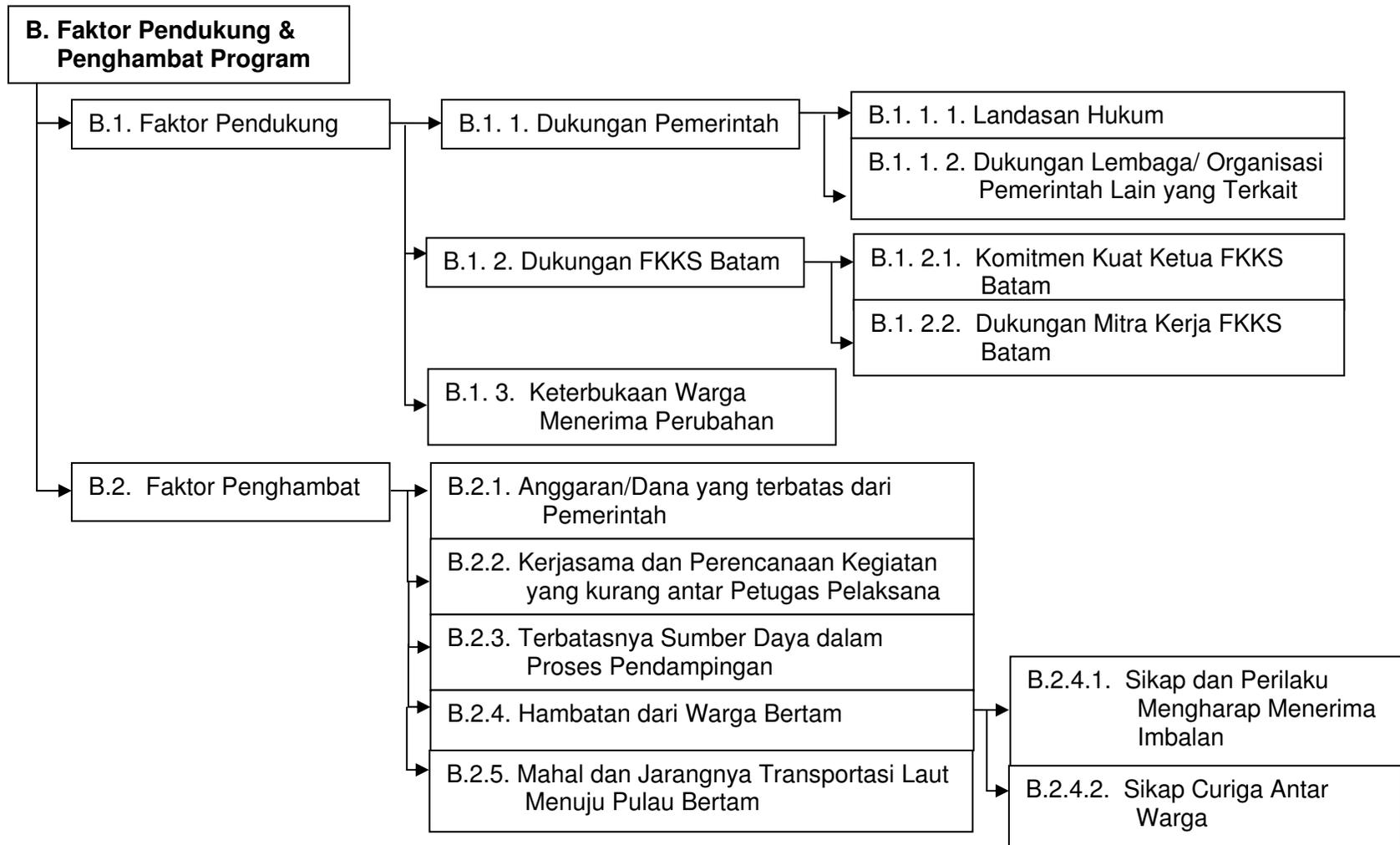


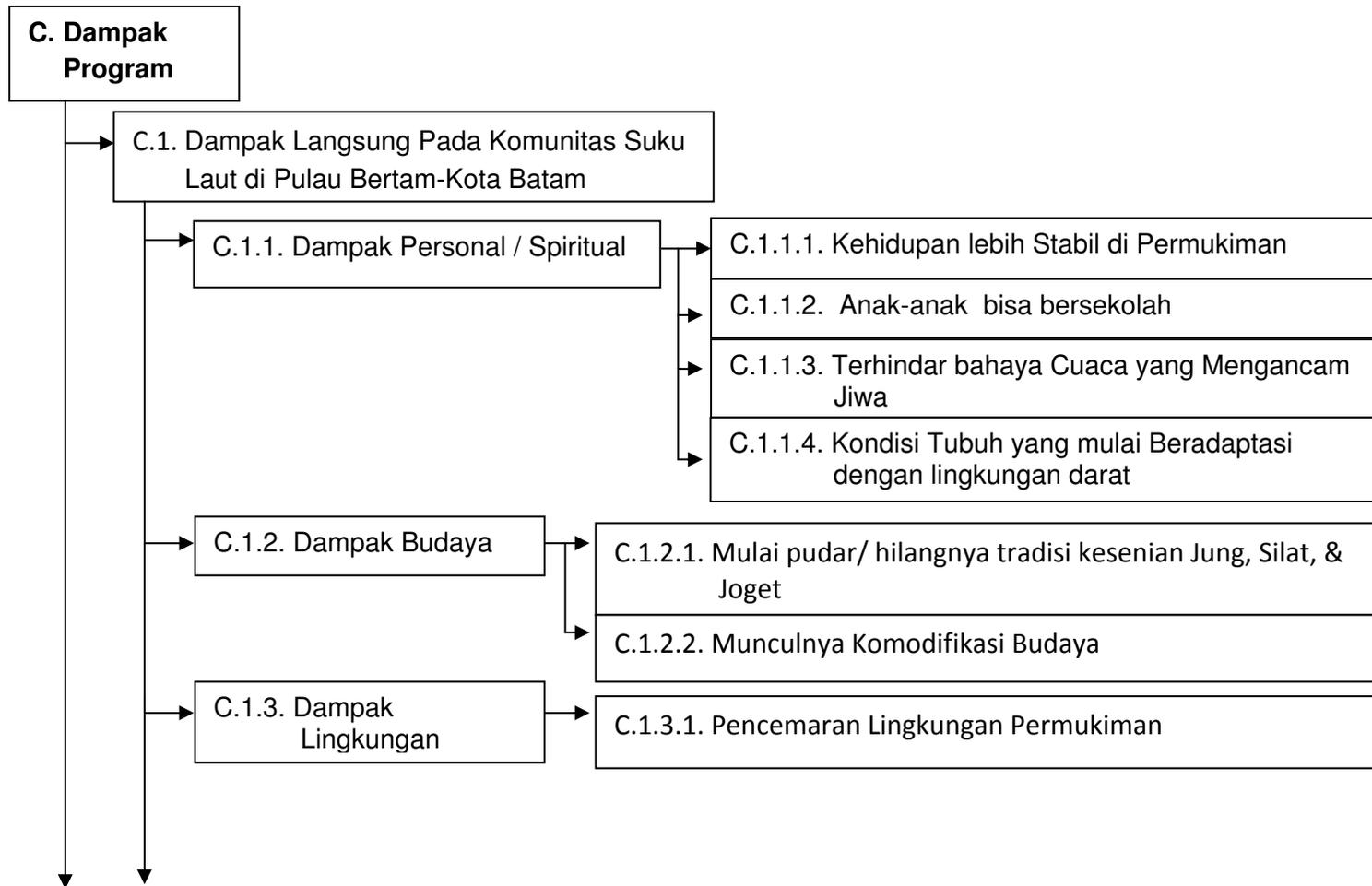


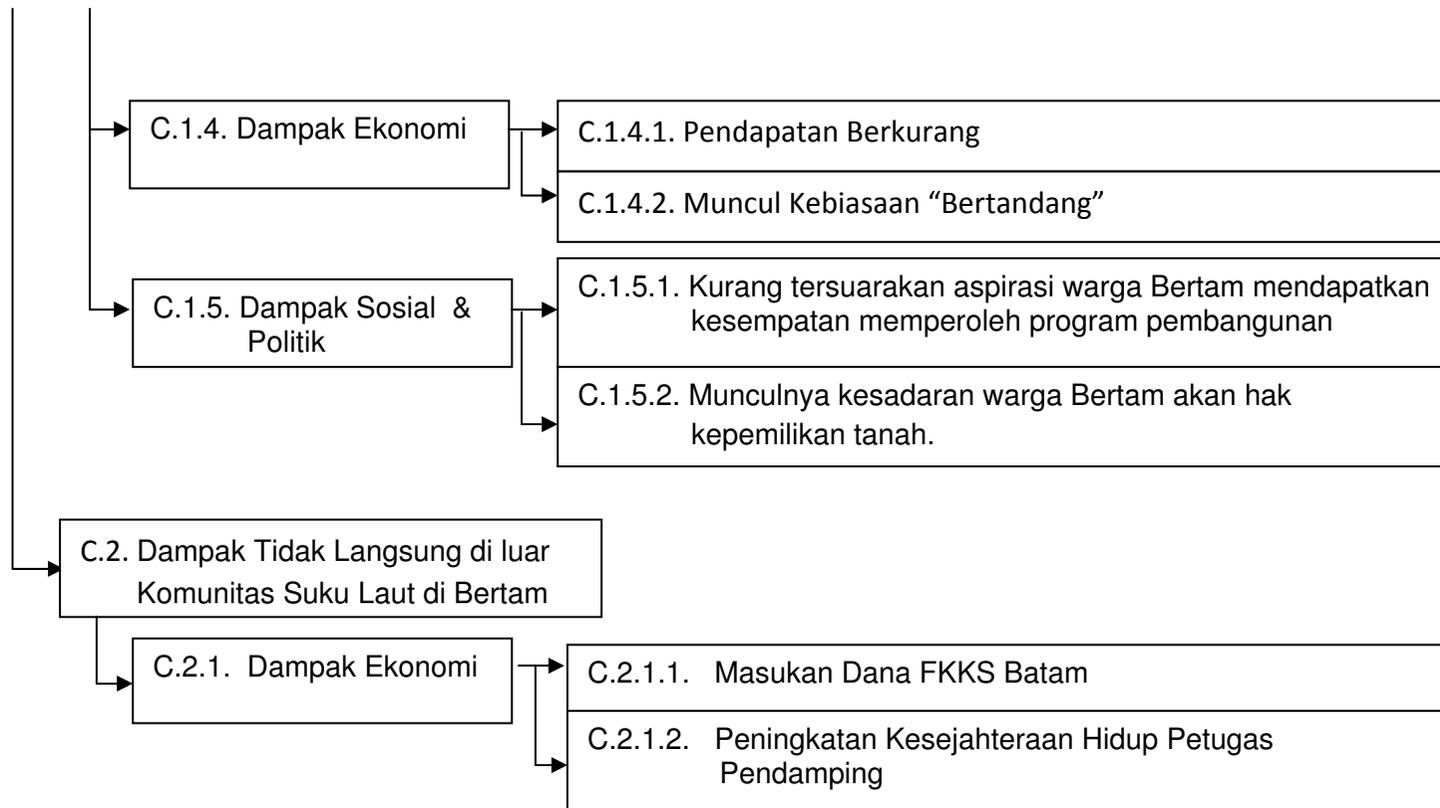














**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KANTOR DINAS BERSAMA**



Jalan Engku Putri Nomor 17 – Batam Centre
Telepon / Fax : (0778) 470620 Email : kesbangpolbatam@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 100/Kesbangpol/.../2010.

Tentang
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/ PRA RISET/
PENGUMPULAN DATA**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam, setelah membaca Surat dari Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI Nomor : 339/H2.F9.06/PPs/PDP.04.02/2010 tentang Permohonan Izin untuk kegiatan survey/ penelitian dan pengumpulan data, dengan ini memberikan izin/ rekomendasi kepada :

Nama : ATIK RAHMAWATI
NPM : 0806470573
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pascasarjana : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Tesis : **Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Terpencil (PKAT)**
(Studi Deskriptif Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam –Kota Batam).

Untuk melakukan penelitian di Kota Batam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan survey, riset dan pengumpulan data.
2. Pelaksanaan kegiatan survey/ riset/ pengumpulan data berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi dibuat.
3. Sebelum melakukan survey/ penelitian/ pengumpulan data, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
4. Melaporkan hasil survey/ penelitian/ pengumpulan data sebagai masukan kepada Pemerintah Kota Batam.
5. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan survey/ penelitian/ pengumpulan data belum selesai, perpanjangan survey/ penelitian/ pengumpulan data harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
6. Surat Rekomendasi akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan, membantu kelancaran kegiatan Riset dan terima kasih.

Dibuat di : B a t a m
Pada tanggal : 21 Oktober 2010


KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KOTA BATAM,

Drs. ZULHENDRI, M.Si
Pembina Tk I Nip. 19660611 198602 1 004

Pelaksanaan program...,Atik Rahmawati,FISIPUI,2011

*Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth :
L. Bannedako Batam :*